

PEMIKIRAN GURU BESAR USU

untuk
PEMBANGUNAN MANUSIA
DI SUMATERA UTARA

Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor. Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan manusia, akan membuat suatu daerah tertinggal dari daerah lain. Peningkatan kesejahteraan manusia akan memberikan manfaat dan mengurangi ketimpangan antardaerah. Data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara menginformasikan bahwa selama lima tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan meskipun terindikasi penurunan percepatan pembangunan yang signifikan. Dalam upaya mendukung program pemerintah daerah Sumatera Utara diperlukan berbagai pemikiran-pemikiran yang berupa rencana tindak lanjut sekaligus ide-ide penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan, pendidikan, serta perekonomian yang turut membangun indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. Sumbangan pemikiran ini ditinjau dari berbagai aspek keilmuan yang akan bermuara pada peningkatan IPM di Sumatera Utara. Buku pemikiran guru besar USU ini adalah karya pemikiran Guru Besar yang membangun solusi serta rencana implementasi dalam melakukan percepatan dan peningkatan indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara.

PEMIKIRAN GURU BESAR USU UNTUK PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA UTARA

PEMIKIRAN GURU BESAR USU

untuk

PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA UTARA

Penyunting:

Gontar Alamsyah Siregar

Tamrin

Arlina Nurbaity Lubis

Dina Keumala Sari

Albiner Siagian

Halimatuddahlia

Elisa Julianti



Pemikiran Guru Besar USU untuk Pembangunan Manusia di Sumatera Utara

Penyunting:

Prof. Dr. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD, KGEH

Prof. Dr. Tamrin, M.Sc.

Prof. Dr. Arlina Nurbaity Lubis, SE, MBA

Prof. Dr. dr. Dina Keumala Sari, M.Gizi, Sp.GK

Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si.

Prof. Dr. Halimatuddahlia, ST, M.Sc.

Prof. Dr. Ir. Elisa Julianti, M.Si.

USU Press

Art Design, Publishing & Printing

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-465-357-6

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pemikiran Guru Besar USU untuk Pembangunan Manusia di Sumatera Utara /
Penyunting: Gontar Alamsyah Siregar [et.al] – Medan: USU Press, 2021.

ix, 245. ; ilus.: 25 cm

Bibliografi

ISBN: 978-602-465-357-6

Dicetak di Medan



SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Saya menyambut baik terbitnya buku kumpulan tulisan para Guru Besar USU dengan tema “Pembangunan Manusia di Sumatera Utara”, untuk itu saya mengucapkan syukur Alhamdulillah dan selamat kepada Guru Besar USU, yang telah menyumbangkan pikirannya dalam bentuk tulisan. Hal ini penting dilakukan untuk mendukung program pembangunan yang tengah giat dilaksanakan Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hadirnya buku ini tentu bersumber dari ide dan pemikiran dari pengamatan, studi lapangan dan pustaka, serta evaluasi cermat yang dilakukan oleh para Guru Besar Universitas Sumatera Utara tentang kondisi dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Sumatera Utara.

Sebagai upaya mendukung pembangunan Sumatera Utara yang lebih maju dan bermartabat, sumber daya manusia menjadi yang paling sangat berperan untuk menentukan keberhasilan pembangunan secara maksimal sesuai perencanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kualitas sumber daya manusia unggul diperlukan untuk memberikan solusi berbagai persoalan pembangunan, seperti tingginya jumlah pengangguran, melemahnya daya beli dan melambatnya sektor perekonomian, serta yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Persoalan investasi sumber daya manusia memerlukan komitmen pemimpin yang kuat, karena waktunya relatif panjang dan terkadang menggerus kepopuleran atau relatif menuai ketidakpuasan dari masyarakat. Membentuk sumber daya manusia unggul sekaligus meningkatkan indeks pembangunan manusia, tentu banyak upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, seperti menjamin akses terselenggaranya pendidikan terbaik bagi semua masyarakat, pelayanan kesehatan yang terjangkau, lingkungan yang sehat dan nyaman, tersedianya lapangan pekerjaan yang mampu menjamin pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan harus dilaksanakan agar menjamin setiap peserta didik merasa aman, nyaman, dan inklusif. Jaminan itu akan memberikan ruang pertumbuhan yang lebih baik dalam pengembangan mutu intelektualitas, kreativitas, dan emosional masyarakat.

Pembangunan manusia dilakukan untuk melihat produktivitas dan kreativitas dengan memunculkan inovasi-inovasi penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan data yang dikeluarkan Bappenas, produktivitas manusia Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan karena masih 21 persen di bawah Amerika Serikat. Di sisi lain, dunia saat ini sedang mengalami disrupsi yang menuntut respon secara cepat terhadap dampak percepatan teknologi. Pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan harus berkolaborasi mencari solusi terhadap perubahan cepat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, produktivitas, pola kerja, perubahan jenis lapangan kerja, model operasi baru yang bersumber pada otomatisasi dan digitalisasi, kolaborasi untuk inovasi, interaksi sosial, dan kesenjangan penggunaan teknologi.

Solusi cepat yang harus ditempuh adalah dengan meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan yang dapat diakses masyarakat secara mudah. Meningkatkan *Human Development Indeks*, *Global Innovation Index*, *Human Capital Index* dan *Global Competitiveness Index* memerlukan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Kita boleh menyebutnya sebagai perkawinan yang membutuhkan sinergi yang kuat. Ketiganya harus saling bersinergi dan mendukung untuk menciptakan terobosan-terobosan baru, penyusunan kurikulum yang mengikutsertakan dunia industri dalam proses pembelajaran serta mengadopsi sejumlah pembaruan dalam bidang pendidikan yang sejalan dengan disrupsi.

Pembangunan manusia saat ini harus mampu mengubah proses analog menjadi digital atau setidaknya menjadi *smart digital user* dan mengenal penggunaan *internet of things*, *artificial intelligence*, bioteknologi, rekayasa genetik, *wearable devices*, energi baru yang terbarukan, otomatisasi, dan lain sebagainya. Upaya itu juga dilakukan untuk memperkecil disparitas layanan pendidikan yang terjadi karena faktor geografis maupun antarkelompok sosial ekonomi masyarakat. Profil lulusan dalam pembangunan manusia harus merespon perubahan yang terjadi di dunia industri agar sasaran yang ingin diraih oleh pemerintah dapat secepatnya tercapai.

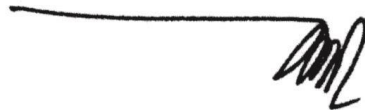
Indikator keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur berdasarkan atas jumlah sarjana yang dihasilkan, namun juga jumlah lulusan yang mampu diserap oleh dunia kerja atau mampu menciptakan lapangan kerja baru yang lebih produktif dan berdaya saing. Pemikiran-pemikiran para Guru Besar USU yang ditulis dalam buku ini, diharapkan dapat menjadi pemberi inspirasi, memperkuat cara dalam proses pembelajaran agar setiap lulusan dapat terlibat dalam mengatasi masalah kemanusiaan dan memberikan kontribusi kemajuan Indonesia.

Buku ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dan para praktisi pendidikan serta kalangan perguruan tinggi lainnya untuk mengkaji kondisi dan kualitas manusia Indonesia serta perannya dalam pembangunan. Sekali

lagi saya ucapkan selamat kepada Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara. Semoga terbitnya buku ini dapat memotivasi hadirnya buku-buku selanjutnya dengan tema pembahasan yang lebih bermanfaat dan menginspirasi dunia akademik. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridai segala upaya dan kerja keras kita, demi membangun Universitas Sumatera Utara dan Indonesia, serta memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Medan, September 2021
Rektor Universitas Sumatera Utara,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, cursive flourish.

Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si



KATA PENGANTAR KETUA DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Assalamualaikum WR... WB...

Alhamdulillah kami sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran dalam proses penerbitan kompilasi tulisan Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara dalam bentuk buku yang mengambil judul “Pembangunan Manusia di Sumatera Utara.” Buku ini memuat pemikiran para Guru Besar yang ada di Universitas Sumatera Utara, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.

Selaku Ketua Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, saya mengucapkan terima kasih kepada para Guru Besar USU yang telah berkenan menyumbangkan tulisan yang bersumber dari kapasitas keilmuan, pengamatan serta pengalaman yang dimiliki sejalan dengan tema tersebut. Semoga berbagai bentuk hasil pemikiran tersebut dapat menjadi salah satu landasan atau rujukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia dan menghadirkan sumber daya manusia unggul yang memiliki peran signifikan dalam pembangunan.

Bank Dunia atau *World Bank* baru saja menerbitkan laporan dalam *The Human Capital Index (HCI) 2020 Update: The Human Capital in the Time of COVID-19*. Dalam laporan tersebut dicantumkan bahwa nilai *Human Capital Index (HCI)* atau Indeks Sumber Daya Manusia Indonesia 2020 adalah sebesar 0,54, naik dari angka 0,53 pada tahun 2018.

Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mendongkrak peningkatan Indeks Sumber Daya Manusia Indonesia meliputi berbagai aspek yang saling mendukung dan berkaitan. Salah satu di antaranya adalah aspek pendidikan, yang memiliki peran signifikan dalam membangun karakter dan kapasitas unggul manusia Indonesia, termasuk di dalamnya Sumatera Utara. Khususnya di era digitalisasi saat ini, disrupsi atau perubahan besar-besaran terjadi di segala lini, menerabas batasan-batasan yang ada. Dunia menjadi tidak bersekat dan tidak ada pilihan bagi manusia selain meresponnya dengan adaptasi terhadap berbagai perubahan itu melalui *update* pemikiran, pengetahuan, keterampilan dan juga gaya hidup.

Disrupsi, sebagaimana halnya perubahan terkecil sekalipun, menjanjikan banyak peluang yang bisa dimanfaatkan manusia untuk menuju

tingkat terbaik dalam peradaban hidupnya. Tentu jika manusia tersebut mampu memanfaatkan momentum dengan baik, serta melakukan *upgrading* terhadap seluruh potensi dan kualitas diri yang dimilikinya. Namun jika tak mampu menyelaraskan diri dengan perubahan yang demikian deras menghantam, manusia akan tergulung dan tertinggal.

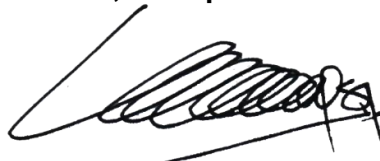
Seluruh kepentingan tersebut, membuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi harus terus dipererat, ditingkatkan, diperluas dan dievaluasi secara berkala untuk mencapai titik tertinggi. Sinergi tersebut juga membuka peluang masuknya dunia industri sebagai mitra untuk memperbesar daya dukung terhadap peningkatan kualitas manusia Indonesia. Perguruan tinggi adalah lumbung yang menyimpan bibit-bibit manusia Indonesia terbaik, yang harus diasah dan didorong secara maksimal, serta diberikan kesempatan untuk menunjukkan serta meningkatkan talenta, pengetahuan dan kemampuan personalnya. Hal tersebut telah cukup lama diamanatkan oleh pasal 3 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan merupakan salah satu unsur yang berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sebagaimana kita ketahui Bersama bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan atau mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri dan demokratis serta bertanggungjawab. Momentum perbaikan skor Indeks Sumber Daya Manusia Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan penguatan sistem pendidikan di Indonesia agar lebih siap untuk menghadapi tantangan global di masa kini dan akan semakin membesar di masa yang akan datang.

Kami berharap, semoga hal sederhana yang telah dilakukan oleh para Guru Besar Universitas Sumatera Utara melalui buku ini, dapat menjadi sumbangsih berharga dalam proses pembangunan bangsa dan negara untuk mencapai masa keemasan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi segala ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 02 September 2021



**Ketua Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara
Prof. Dr. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD, KGEH (K)**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.....	iii
KATA PENGANTAR KETUA DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
1. Penguatan Kapasitas Petani di Sumatera Utara Abdul Rauf	1
2. Gizi Sebagai Fondasi Pembangunan SDM Albiner Siagian	8
3. Peranan Manajemen Pendidikan Dalam Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman serta Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sumatra Utara yang Lebih Baik Arlina Nurbaity Lubis.....	19
4. Pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia di Sumatera Utara Badaruddin	31
5. Pembangunan Manusia di Sumatera Utara: Strategi Masalah Gizi di Provinsi Sumatera Utara Dina Keumala Sari	40
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia Memasuki Industri Pertanian 4.0 di Provinsi Sumatra Utara Elisa Julianti	49
7. Menumbuhkan Minat Wirausaha di Kalangan Mahasiswa Sumatera Utara Erika Revida.....	59
8. Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara untuk Pembangunan Manusia di Sumatera Utara Gontar A. Siregar	69
9. Peningkatan Mutu Lingkungan Melalui Daur Ulang Sampah Plastik Dalam Mewujudkan Produktivitas dan Ekonomi Masyarakat Sumatra Utara Halimatuddahlia	84

10. Peran Perguruan Tinggi Membangun Pendidikan Bermutu dan Bermartabat di Sumatera Utara Harry Agusnar	93
11. Tanggung Jawab Orang Tua Untuk Mendidik dan Melindungi Anaknya Guna Menjadi Generasi Emas Bangsa di Sumut (Tinjauan Berdasarkan UU Tentang Perlindungan Anak) Hasim Purba.....	104
12. Pembangunan Masyarakat Sumatera Utara: Review Data dan Masukan Strategi kepada Pemangku Kepentingan Himsar Ambarita	113
13. Sebuah Laporan Perjalanan Sebagai Masukan Bagi Pembangunan Masyarakat Sumatera Utara di Bidang Energi dan Lingkungan Irvan.....	123
14. Pendidikan Karakter (Kejujuran) Sebagai Sarana Pembangunan Manusia Bermutu Khairina Nasution.....	142
15. <i>Blue Print</i> Penyelesaian Masalah Pertanahan Sumatera Utara Muhammad Yamin Lubis	153
16. Pembangunan Pertanian di Sumatera Utara Noverita Sprinse Vinolina.....	166
17. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Strategi Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Prihatin Lumbanraja	173
18. Pembangunan Manusia di Sumatera Utara: Keterbatasan dan Tidak Meratanya Dokter Spesialis di Provinsi Sumatera Utara Ridha Dharmajaya	182
19. Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan Pola Pikir Kewirausahaan Pada Masa Covid-19 Ritha F. Dalimunthe	189
20. Pembangunan Manusia Berkarakter di Sumatera Utara Robert Sibarani	197

21. Pembangunan Manusia di Sumatera Utara Dalam Menurunkan Angka Kebutaan Karena Katarak Rodiah Rahmawaty Lubis.....	208
22. Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Peningkatan Kualitas Nakes Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak Sarma N Lumbanraja.....	218
23. Pembangunan Manusia Dalam Daya Konpetitif Suwardi Lubis.....	230
24. Peranan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Rakyat Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan di Sumatera Utara Tan Kamello.....	236

Penguatan Kapasitas Petani di Sumatera Utara

Abdul Rauf

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Sektor pertanian dalam arti luas (termasuk subsektor perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan) merupakan sektor utama penyerap tenaga kerja di Indonesia. Tingginya angka tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian terjadi, di samping Indonesia sebagai Negara agraris, juga karena adanya program pemerintah terkait penyediaan infrastruktur dan perluasan areal serta pemberdayaan bagi petani. Pemerintah beserta lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi menyediakan teknologi unggul berupa varietas dan klon-klon unggul baru, rekomendasi pemupukan spesifik lokasi, teknologi tepat guna sistem pertanian di berbagai ekosistem mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah, teknologi pengendalian hama penyakit tanaman, serta kajian kesesuaian teknologi pertanian dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat (petani) (Mubyarto, 2005).

Sementara sumber daya manusia pertanian mempunyai peran penting dalam pembangunan pertanian, apalagi dalam mendukung dan merealisasikan tuntutan pembangunan pertanian berkelanjutan pada dasawarsa terakhir hingga masa tak terbatas ke depan. Rencana Strategis Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2015 memfokuskan pembangunan pertanian melalui konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan pertanian berkelanjutan pada hakekatnya merupakan sistem pembangunan pertanian melalui pengelolaan secara optimal seluruh potensi sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan teknologi untuk menjaga agar suatu upaya terus berlangsung dan tidak mengalami kemerosotan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi maupun kelesatiran sumberdaya lingkungan.

Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pelatihan penggunaan teknologi modern merupakan faktor utama sektor pertanian masih tetap bersifat tradisional dan belum berbasis keberkelanjutan (*sustainability*). Banyak data mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan petani umumnya SLTP ke bawah. Sementara untuk mewujudkan pertanian modern yang berkelanjutan diperlukan sumberdaya manusia pertanian yang memiliki keahlian berdasarkan pendidikan dan pengalaman di bidang pertanian. Pertanian modern dan berkelanjutan harus dijalankan berdasarkan kajian dan analisis serta perhitungan-perhitungan matematis dengan dasar intelegensia petani. Menyadari akan kekurangan pada tingkat pendidikan formal tersebut, maka kegiatan pelatihan, studi banding, sekolah lapangan dan sejenisnya perlu ditingkatkan kepada petani pelaku utama dan keluarganya, di sela-sela minimnya sumberdaya manusia (terutama generasi muda berpendidikan)

yang berminat di sektor pertanian. Dalam hal ini, peran pemerintah, lembaga penelitian dan pengkajian serta akademisi dari perguruan tinggi pertanian sangat diperlukan dalam meningkatkan kapasitas petani menuju sistem pertanian modern dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara,

2. Masalah

Pembangunan (penguatan) kapasitas petani di Sumatera Utara didasarkan pada masalah:

1. Masih rendahnya tingkat pendidikan petani pelaku utama di Sumatera Utara.
2. Keterbatasan generasi mudah berpendidikan untuk berusaha di sektor pertanian.
3. Masih sedikitnya kegiatan pelatihan, sekolah lapangan, dan studi banding yang melibatkan sebagian besar petani pelaku utama.
4. Masih rendahnya kemampuan petani pelaku utama dalam menjalankan sistem pertanian modern dan berkelanjutan berbasis pada kajian dan analisis serta perhitungan-perhitungan matematis terutama dalam penentuan dosis pupuk dan obat-obatan pertanian.
5. Masih rendahnya kemampuan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam membangun kapasitas petani menjadi petani modern dan berkelanjutan yang menjalankan sistem pertaniannya berbasis pada kajian dan analisis serta perhitungan-perhitungan matematis, terutama dalam penentuan dosis pupuk dan obat-obatan pertanian.

Pemikiran Pemecahan Masalah

Pemikiran pemecahan masalah dalam membangun (menguatkan) kapasitas petani di Sumatera Utara meliputi:

1. Dengan keterbatasan pendidikan dan pengetahuan serta pengalaman dari petani pelaku utama maka penting dilakukan pelatihan intensif dan menyeluruh dalam mengelola pertaniannya berdasarkan atas hasil kajian, analisis dan hitung-hitungan matematis, terutama pada penentuan rekomendasi pemupukan dan pemanfaatan obat-obatan pertanian, juga dalam melakukan pembuatan dan penggunaan pupuk organik dan mikroorganisme lokal (MOL), pembuatan dan penggunaan pestisida organik serta penangkaran benih unggul secara mandiri.
2. Pelatihan dan penguatan kapasitas juga perlu dilakukan terhadap para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam membangun pertanian modern dan berkelanjutan.
3. Para Peneliti, Akademisi dari Perguruan Tinggi bersama Pemerintah perlu terus berperan dalam melibatkan seluruh petani pelaku utama, mengikuti pelatihan, studi banding dan sekolah pertanian lapangan,

3. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah dalam membangun (menguatkan) kapasitas petani di Sumatera Utara meliputi:

1. Melakukan pelatihan intensif dan menyeluruh kepada petani pelaku utama dalam mengelola pertaniannya berdasarkan hasil kajian, analisis dan hitung-hitungan matematis, terutama pada penentuan rekomendasi pemupukan dan pemanfaatan obat-obatan pertanian
2. Melakukan pelatihan intensif dan menyeluruh kepada petani pelaku utama dalam melakukan pembuatan dan penggunaan pupuk organik dan mikroorganisme lokal (MOL), pembuatan dan penggunaan pestisida organik dan penangkaran benih unggul secara mandiri.
3. Melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas kepada para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam membangun pertanian modern dan berkelanjutan.
4. Mendorong pemerintah guna melibatkan seluruh petani pelaku utama dalam studi banding dan sekolah pertanian lapangan ke daerah-daerah, bahkan ke luar negeri yang lebih maju dalam menjalankan praktik sistem usaha pertaniannya,

4. Rencana Tindak Lanjut

Dalam meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh pertanian lapangan agar melakukan sistem pertaniannya berdasarkan analisis dan kajian serta hitung-hitungan sederhana harus melalui pelatihan yang intensif yang diawali dengan penentuan status/tingkat kesuburan tanahnya. Penentuan tingkat kesuburan tanah pertanian secara mudah dapat dilakukan berdasarkan kandungan bahan organik tanahnya yang secara mudah pula dapat dilakukan oleh petani, bahkan dengan tingkat pendidikan terendah. Teknologi penetapan tingkat kesuburan tanah pertanian berdasarkan kandungan bahan organik dari masing-masing lahan milik petani dapat dilakukan di lapang/di rumah tangga petani dengan urutan pekerjaan sebagai berikut:

- Contoh tanah representatif dari lahan dikeringanginkan (pengeringan dalam ruangan, tidak terpapar sinar matahari)
- Timbang beratnya (misal a gram)
- Letakkan tanah dalam cawan, tuang spritus hingga basah betul dan segera dibakar
- Ulangi pembakaran hingga diperkirakan seluruh bahan organik habis terbakar, kemudian dengan hati-hati abu bakaran ditiup hilang
- Sisa yang tidak terbakar (biasanya berwarna merah bata) ditimbang (misal b gram)
- Kadar bahan organik tanah (BOT) dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\text{BOT (\%)} = [(a-b)/a] \times 100$$

Setelah diketahui kadar bahan organik tanahnya maka dengan menggunakan standar kesuburan tanah dengan kadar bahan organik minimal 3%, maka dosis pupuk organik (kompos dan atau pupuk kandang) yang harus diberikan/ditambahkan pada masing-masing daerah/lokasi dapat dihitung. Dengan menganggap nilai *bulk density* (BD) tanah rata-rata sebesar $1,2 \text{ g/cm}^3$, maka bobot tanah lapisan atas sedalam 20 cm setara dengan 2.400 ton per hektar. Dengan demikian, jika misalnya kadar bahan organik tanahnya (dari hasil perhitungan di atas) sebesar 1,6% maka diperlukan tambahan pupuk organik (kompos dan atau pupuk kandang) sebesar 1,4% atau sebanyak $1,4\% \times 2.400 \text{ ton} = 33,6 \text{ ton}$ per hektar.

Pemberian pupuk kandang atau kompos sebanyak itu umumnya tidak dapat dipenuhi oleh petani karena keterbatasan ketersediaannya. Namun begitu, pemberian pupuk kandang atau kompos yang tidak mampu mencapai dosis optimal tersebut, dapat mengurangi dosis pupuk buatan yang diberikan. Bila kompos atau pupuk kandang yang tersedia misalnya hanya 5 ton (umumnya pupuk kandang atau kompos mengandung 5 kg N, 2 kg P, dan 5 kg K masing-masing per ton bahan), ini berarti kita telah menambahkan 25 kg N, 10 kg P dan 25 kg K dari kompos atau pupuk kandang tersebut. Dengan melakukan penghitungan yang sederhana maka jumlah hara N, P, dan K dari pupuk kandang atau kompos ini dapat diketahui, dan untuk kasus/ccontoh ini berarti setara dengan: Pupuk Urea = $100/46 \times 25 \text{ kg/ha} = 54 \text{ kg/ha}$ Pupuk SP-36 = $100/16 \times 10 \text{ kg/ha} = 63 \text{ kg/ha}$, Pupuk KCl = $100/52 \times 25 \text{ kg/ha} = 48 \text{ kg/ha}$ Jadi, apabila seharusnya dosis pupuk buatan sebanyak 150 kg/ha Urea, 75 kg/ha SP-36 dan 30 kg/ha KCl misalnya, maka dosis pupuk buatan tersebut dapat dikurangi menjadi: Pupuk Urea = $(150-54) \text{ kg/ha} = 96 \text{ kg/ha}$ Pupuk SP-36 = $(75-63) \text{ kg/ha} = 12 \text{ kg/ha}$, dan Pupuk KCl = $(30-48) \text{ kg/ha} = 0$ (tidak perlu lagi dipupuk KCl). Dengan pemberian pupuk kompos atau pupuk kandang sebanyak 5 ton/ha/musim tanam pada tanah yang kurus (kadar bahan organik tanah dipertahankan tetap 3%), maka pemberian pupuk buatan dapat dihemat menjadi sekitar 50% untuk pupuk N (Urea atau ZA), 16% untuk pupuk P (SP36 atau TSP), dan tidak perlu dipupuk K (KCl atau MOP). Apabila kadar bahan organik tanah sudah mencapai 5% (mencapai komposisi ideal), tanah tersebut bahkan tidak perlu diberi pupuk buatan lagi. Bila hitung-hitungan ini dilatihkan kepada petani dan mereka trampil menggunakannya, maka pertanian presisi yang menjadi dasar pertanian modern dan berkelanjutan akan terwujud.

Pengembangan kapasitas petani juga dapat dilakukan pada pemberdayaan biomassa dalam pembuatan pupuk cair organik, pestisida organik dan mikroorganisme pengurai lokal (MOL). Banyak cara/metoda dalam pembuatan MOL dan atau pupuk cair organik yang pada prinsipnya mengembangkan mikroorganisme yang ada di sekitar kita, yang efektif dalam merombak bahan organik segar dalam pembuatan kompos. Mikroorganisme local (MOL) yang dihasilkan/dikembangkan dapat juga secara langsung diaplikasikan sebagai pupuk cair organik. Misalnya pembuatan MOL berbahan dasar induk bakteri isi usus ayam dengan cara kotoran hewan (pupuk kandang) dan dedaunan hijau (bukan sisa dan jangan menggunakan daun

dari pohon yang bergetah seperti karet, pinus, damar, nimba, dan yang sulit lapuk seperti jati, bambu, dan lain-lain), dimasukkan ke dalam drum atau ember. Bahan lain dapat juga digunakan menggantikan bahan tersebut di atas yaitu buah-buahan busuk (pepaya, pisang, semangka, jeruk dan lain-lain) yang diblender halus. Cairkan gula dan terasi dimasukkan ke dalam ember atau drum tersebut. Larutkan 1-3 sendok makan induk bakteri (dapat isi usus ayam atau sumber lain) ke dalam air dan masukkan ke dalam drum atau ember tersebut, kemudian ditutup rapat. Setelah 8-10 hari, pembiakan bakteri sudah selesai dan ember atau drum sudah dapat dibuka, Saring dan masukkan MOL/Pupuk Organik cair ke dalam wadah yang bersih (botol) untuk disimpan/digunakan dalam pembuatan kompos atau diaplikasi langsung di lapangan, Ampas sisa saringan masih mengandung bakteri, sisakan sekitar satu sampai dua liter, tambahkan air, terasi, dan larutan gula dengan perbandingan yang sama. Setelah 8-10 hari kemudian bakteri sudah berkembang biak lagi dan siap digunakan. Produk dengan teknologi sederhana ini jika dikuasai dan diaplikasi di tingkat petani jelas akan meningkatkan produktivitas lahan dan mengoptimalkan pendapatan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain itu, pestisida nabati juga dapat dibuat dengan mudah, salah satunya yang berbahan baku daun pepaya. Daun pepaya mengandung bahan aktif papain yang efektif untuk mengendalikan ulat dan hama penghisap. Cara Pembuatan dan aplikasinya sangat mudah yaitu: daun pepaya segar sebanyak satu kg dirajang. Hasil rajangan direndam dalam sepuluh liter air dan tambahkan dua sendok makan minyak tanah serta tiga puluh gram detergen, kemudian diamkan semalam. Saring larutan hasil perendaman dengan kain halus, dan semprotkan larutan hasil saringan ke bagian tanaman yang terserang hama dan atau penyakit.

Uraian di atas merupakan sedikit dari sebegitu banyak teknologi terapan yang mudah dan murah yang dapat dikerjakan oleh petani dalam merancang usaha taninya agar lebih efisien dan presisi berbasis kearifan lokal. Untuk inilah diperlukannya peningkatan kapasitas petani agar petani pelaku utama dapat secara mandiri dan berkelanjutan mendesain usaha taninya ke arah yang lebih modern dan berkelanjutan. Kerjasama kelembagaan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Dinas/Instansi/Lembaga terkait dengan peneliti dan akademisi dari Perguruan Tinggi, sangat diperlukan guna mewujudkan pertanian modern dan berkelanjutan, khususnya di Sumatera Utara.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Petani pelaku utama dapat ditingkatkan kapasitasnya guna mendukung pertanian modern dan berkelanjutan dengan ciri utama usahatani dilakukan berdasarkan analisis, kajian dan penghitungan yang akurat dan presisi.

2. Peningkatan kapasitas petani pelaku utama harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian lapangan terutama dalam hal pengkajian dan analisis kesuburan tanah serta penghitungan rekomendasi pemupukan di tingkat tapak dan penyediaan sarana produksi, terutama pupuk organik cair dan pestisida nabati berbasis biomassa dari lingkungan rumah tangga petani.

Saran

Dalam meningkatkan kapasitas petani pelaku utama dan penyuluh pertanian lapangan secara menyeluruh dalam mewujudkan pertanian modern dan berkelanjutan, khususnya di Sumatera Utara dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, sekolah lapang dan studi banding yang dilakukan secara bersama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Dinas/instansi terkait dengan peneliti dan akademisi dari Perguruan Tinggi.

Daftar Pustaka

- Abdul-Farid dan N. D. Kristanti, 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Petani (Kasus Petani Sayuran di Kabupaten Malang dan Pasuruan). *AGRIEKSTENSIA* Vol. 8 No. 1, Januari 2009, Hlm. 36-48.
- Abdul-Rauf, F.S. Harahap, 2019. Optimalisasi Lahan Pertanian Menggunakan Agen Biomassa. USU Press Medan.
- Abdul-Rauf, 2018. Budidaya Kelapa Sawit Berkelanjutan. USU Press Medan.
- Abdul-Rauf, 2017. Sistem Agroforestry; Upaya Pemberdayaan Lahan Secara Berkelanjutan; Edisi Revisi. USU Press Medan.
- Mubyarto. 2005. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES.
- Ruhimat. I.S., 2017. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Usahatani Agroforestry. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 14 No.1, 2017 : 1-17.
- Sajogdjo. 1996. Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia. Grasindo. Jakarta.

Biodata Penulis



Abdul Rauf, Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara lahir di Binjai, 17 September 1959. Pendidikan S1 (Ir.) pada Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) lulus pada tahun 1985. Pendidikan S2 (MP) juga dalam bidang Ilmu Tanah di UGM Yogyakarta, lulus pada 1994, melanjutkan pendidikan S3 (Dr.) di bidang yang sama di IPB Bogor, lulus tahun 2004. Bidang Ilmu Tanah yang didalamnya adalah Konservasi Tanah

dan Air serta Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan telah diembannya sejak tahun 1986 (sebagai staf pengajar di beberapa PTS di Medan) dan sejak 1987 hingga sekarang sebagai staf pengajar di Fakultas Pertanian USU, dan sejak tahun 2004 melengkapi pengabdianya sebagai staf pengajar di Program Pascasarjana S2 dan S3 Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian USU. Selain berperan sebagai staf pengajar dan narasumber pada berbagai seminar, pelatihan dan lokakarya, penulis juga aktif menulis buku teks (ISBN) diantaranya: Dasar-Dasar Pengelolaan DAS (USU Press), Sistem Agroforestry, Upaya Pemberdayaan Lahan Secara Berkelanjutan (2011) dan edisi revisinya (2017) (USU Press, 2017), Profil Arboretum USU 2006-2008 (USU Press, 2009), Pengelolaan DAS, Sebuah Rencana Pengelolaan Terpadu DAS Asahan Toba (USU Press); Pengelolaan DAS, Sebuah Rencana Pengelolaan Terpadu DAS Batang Gadis (CI-Jakarta); Teknologi Pemanfaatan Lahan Berbasis Pengelolaan DAS (USU Press, 2016); Tanah Sulfat Masam dan Pengelolaannya Secara Biologi (USU Press); Budidaya Kelapa Sawit Berkelanjutan (USU Press, 2018); Optimalisasi Lahan Pertanian Menggunakan Agen Biomassa (USU Press, 2019); dan Sains Biofisik dan Pertanian dalam Perspektif Al-Qur'an (USU Press, 2020). Beberapa organisasi profesi yang aktif diikuti oleh penulis diantaranya sebagai Pengurus Pusat Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTAI), Pengurus Komisariat Daerah Sumatera Utara Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), anggota Himpunan Gambut Indonesia (HGI), Ketua Forum DAS Wampu Sumatera Utara, Pengurus Forum Koordinasi DAS Provinsi Sumatera Utara, dan Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KP3K) Kabupaten Deli Serdang.

Gizi Sebagai Fondasi Pembangunan SDM

Albiner Siagian

Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat USU

1. Latar Belakang

You can't educate a child who is not healthy, and you can't keep a child healthy who is not educated (Joycelyn Elders, Guru Besar Emerita Ilmu Kesehatan Anak, Universitas Arkansas, AS)

Ketika terpilih menjadi presiden untuk periode kedua, Joko Widodo menyampaikan pidato politik melalui televisi pada tanggal 14 Juli 2019. Dalam pidatonya itu, presiden terpilih memperkenalkan istilah baru, yaitu itu 1000 HPK-Plus (1000 Hari Pertama Kehidupan-Plus). Itu adalah bagian dari visi dan misi pembangunan sumber daya manusia (SDM) pemerintahannya hingga lima tahun ke depan. Istilah itu baru sekaligus menarik. Kalau 1000 HPK adalah rentang waktu sejak seorang ibu positif hamil hingga anak yang dikandungnya berusia dua tahun kelak (1000 hari), 1000 HPK-Plus dilebarkan hingga anak memasuki usia sekolah. Dengan kata lain, 1000 HPK-Plus bermakna pemberian perhatian yang lebih besar kepada tumbuh kembang anak pada awal kehidupannya. Di sinilah letak menariknya 1000 HPK-Plus itu karena perhatian pada tumbuh kembang anak pada awal kehidupannya adalah peletakkan dasar bagi fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Sebagai informasi perihal 1000 HPK itu, pada tahun 2010, Sekjen PBB menginisiasi gerakan global yang disebut *Scaling up Nutrition Movement* atau *SUN Movement*. *SUN Movement* merupakan dorongan global untuk memperbaiki gizi bagi semua, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Mengapa perbaikan gizi perlu mendapat perhatian? Jawabannya adalah kurang gizi merupakan salah satu masalah paling serius di dunia, tetapi paling sedikit mendapatkan perhatian, padahal, biaya kemanusiaan dan ekonomi dari kurang gizi luar biasa besarnya.

Indonesia menindaklanjuti *SUN Movement* dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Selanjutnya, pada tanggal 30 Oktober 2013, Presiden RI meluncurkan "Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK)."

Dari perspektif investasi pembangunan SDM, masa 1000 HPK dikenal sebagai periode emas tumbuh-kembang anak. Melalui sebuah kajian komprehensif mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak di berbagai belahan dunia (Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Karibia), Schrimton dan kawan-kawan, melalui publikasinya pada Jurnal Ilmiah Pediatrics (Shrimpton, R *et al*, 2001), mengungkapkan bahwa pola pertumbuhan anak yang menderita kurang gizi adalah sama. Hambatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi sangat nyata pada tahun pertama kehidupan (bulan

ketiga) hingga tahun ketiga umur anak. Hal senada juga dinyatakan oleh Prentice, AM, *et al* (2013) dalam artikel mereka berjudul “*Critical Window for Nutritional Interventions against Stunting*”, yang dimuat pada *American Journal of Clinical Nutrition* (2013) bahwa hambatan pertumbuhan tinggi badan anak terjadi pada masa tahun pertama usia mereka dan tidak ada lagi perbaikan pertumbuhan tinggi badan setelah mereka berusia di atas lima tahun. Fakta ini juga bermakna bahwa masa kritis bagi anak untuk terhindar dari *stunting* adalah pada tahun pertama usia mereka. Karenanya, Schrimton dan kawan-kawan merekomendasikan perbaikan tumbuh-kembang anak dilakukan pada periode ini. Inilah yang dikenal sebagai jendela peluang (*window of opportunity*) perbaikan gizi sebagai investasi pembangunan SDM. Selain itu, berbagai penelitian juga sudah secara meyakinkan membuktikan bahwa cetak biru otak bayi sudah nyaris sempurna terbentuk ketika mereka dilahirkan. Penyempurnaan perkembangan otak berlangsung hingga mereka berumur dua tahun atau paling tidak hingga mereka memasuki usia sekolah (1000 HPK-Plus).

Saya sangat sepakat kalau pembangunan SDM dimulai sejak anak dalam kandungan dan melalui perbaikan gizi ibu hamil dan bayi/balita. Pembangunan SDM tidak boleh dipisahkan dari pembangunan raga manusia, karena pikiran yang cerdas bersemayam di dalam raga yang sehat. Joycelyn Elders, Guru Besar Emerita Ilmu Kesehatan Anak, Universitas Arkansas, AS, berkata: “Anda tidak bisa mendidik seorang anak yang tidak sehat, dan Anda tidak bisa memeliharanya tetap sehat kalau mereka tidak terdidik.”

Salah satu indikator kesehatan anak adalah status gizi. Status gizi menggambarkan keseimbangan antara asupan zat gizi dengan pengeluarannya untuk berbagai kebutuhan tubuh. Apabila asupan gizi lebih sedikit daripada kebutuhannya, hal itu akan menyebabkan kekurangan gizi (*undernutrition*). Sebaliknya, apabila asupan zat gizi melebihi kebutuhan tubuh, keadaan itu akan menimbulkan kelebihan gizi (*overnutrition*). Kedua masalah gizi ini disebut sebagai malagizi (*malnutrition*).

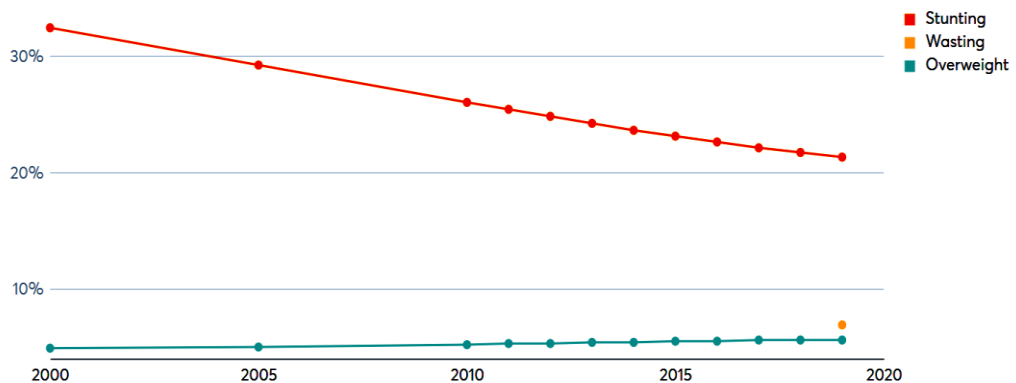
Kekurangan gizi, khususnya pada masa bayi, balita, dan anak-anak, ada dua golongan utama, yaitu gizi kurang dan gizi buruk (*underweight; wasting*) serta pendek dan sangat pendek (*stunting*). Dari kedua golongan masalah gizi pada bayi, balita, dan anak-anak itu, *stunting* adalah masalah gizi yang paling banyak mendapat perhatian dunia, termasuk Indonesia, akhir-akhir ini, terlebih-lebih terkait dengan pembangunan SDM.

2. Masalah

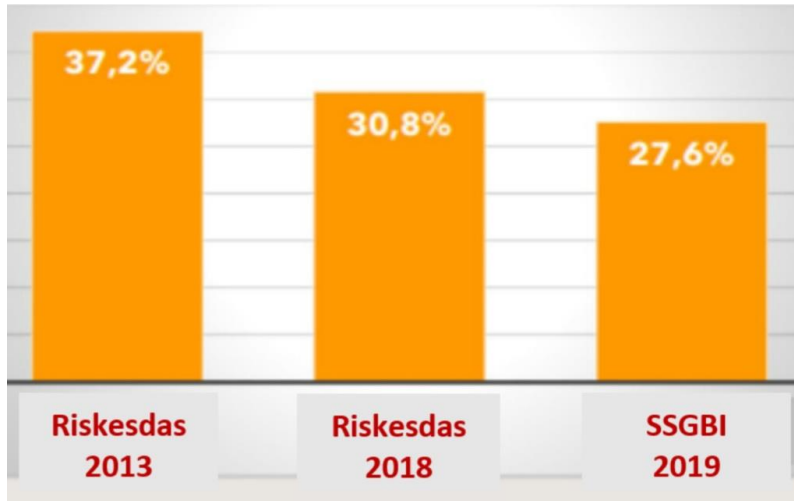
Secara sederhana, *stunting* didefinisikan sebagai keadaan tinggi badan (pendek atau sangat pendek) yang tidak sesuai dengan umur. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian *stunting* (pendek dan sangat pendek) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi

badan menurut umur (TB/U). Lebih lengkapnya, pendek disebut sebagai *stunted* dan sangat pendek disebut sebagai *severely stunted*. Seseorang anak disebut pendek apabila nilai *Zscore* PB/U atau TB/U berada pada rentang $-2SD - -3SD$ (standar deviasi), sedangkan sangat pendek apabila *Zscore* PB/U atau TB/U berada di bawah $-3SD$. *Stunting* pada masa anak-anak menggambarkan adanya masalah gizi kronis yang dipengaruhi oleh ibu/calon ibu (remaja), masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa bayi/balita. Seperti masalah gizi lainnya, *stunting* tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga terkait berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan.

Walaupun terjadi penurunan prevalensi *stunting* pada balita secara menggembirakan pada tingkat global, yaitu dari di atas 30% pada tahun 2000 menjadi mendekati 20% pada tahun 2020 (Gambar 1) dan di Indonesia dari 37,2% (2013) menjadi 27,6% (2019), secara khusus di Indonesia, penurunan itu masih jauh dari angka 20% (Gambar 2). Angka 20% adalah ambang batas (*cut off point*) yang ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO)* untuk *stunting* sebagai masalah kesehatan masyarakat. Artinya, kalau di suatu negara prevalensi *stunting* pada balitanya sudah mencapai 20% atau di bawahnya, maka *stunting* bukan lagi masalah kesehatan masyarakat di negara itu.



Gambar 1. Prevalensi *Stunting*, *Wasting*, dan *Overweight* pada Balita Global (Sumber: *Global Nutrition Report, 2020*).



Gambar 2. Prevalensi *Stunting* pada Balita di Indonesia (Sumber: Riskesdas, 2013; Riskesdas, 2018; dan SSGBI, 2019)

Secara rata-rata, berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi balita *stunting* di Provinsi Sumatera Utara masih berada di atas prevalensi rata-rata nasional. Prevalensi balita *stunting* di Sumatera Utara pada tahun 2019 adalah 30,1%. Bahkan, beberapa kabupaten memiliki prevalensi *stunting* pada balita di atas 40%, seperti Nias (56,21%), Mandailing Natal (49,91%), Tapanuli Utara (42,19%), dan Padang Lawas Utara (49,28%) (SSGBI, 2019). Dengan demikian, Provinsi Sumatera Utara secara rata-rata harus menurunkan prevalensi *stunting* pada balita paling sedikit 10,1% untuk dinyatakan bebas *stunting* sebagai masalah kesehatan masyarakat.

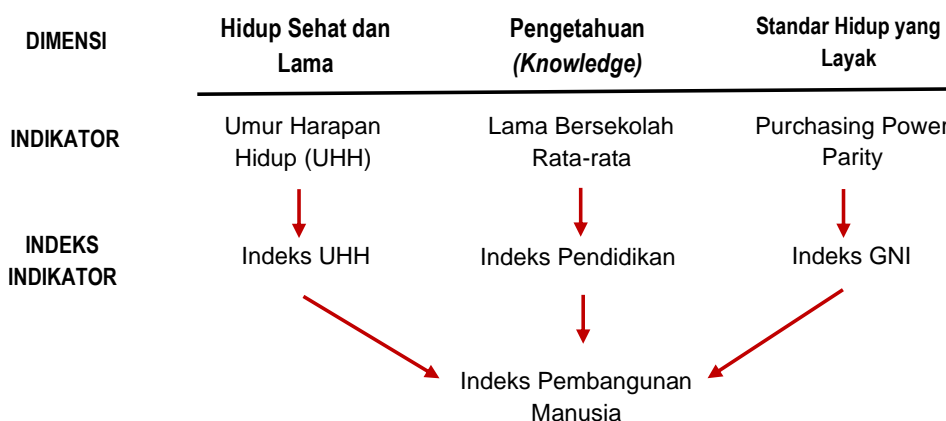
3. Strategi Pemecahan Masalah

3.1. IPM, IPKM, dan *Stunting*

Pada tahun 1990, ekonom Pakistan, Mahbub ul Haq, menggagas indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia. Tujuannya adalah untuk menggeser ukuran keberhasilan pembangunan dari pertumbuhan ekonomi ke kebijakan yang berpusat pada manusia (*people centered policies*). IPM mengoreksi ukuran pembangunan manusia sebelumnya, yaitu *Gross National Product (GNP)* dan *Physical Quality of Life Index (PQLI)*. GNP lebih menekankan pada keberhasilan pembangunan ekonomi. Sedangkan PQLI justru tidak memasukkan GNP sebagai salah satu komponen pembangunan manusia. Selain itu, PQLI menggunakan dua indikator secara tumpang tindih (umur

harapan hidup dan angka kematian bayi AKB) karena keduanya mengukur hal yang sama, yaitu derajat kesehatan dan keadaan gizi masyarakat.

IPM mengukur capaian rata-rata pembangunan pada tiga dimensi dasar, yaitu hidup sehat dan lebih lama (UHH); pendidikan (angka melek huruf dewasa dan tingkat keikutsertaan pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi), dan standar hidup yang layak (GNP dan *Purchasing Power Parity*). Dalam perjalanannya, metode dan indikator penentuan IPM mengalami perkembangan. Perhitungan IPM melibatkan Indeks Ketidaksetaraan Gender (kesehatan reproduksi, pembedayaan wanita, dan kepesertaan dalam pasar kerja) dan Indeks Kemiskinan Multidimensional.



Gambar 3. Dimensi, Indikator, dan Indeks Indikator Indeks Pembangunan Manusia

United Nation Development Program (UNDP) mengelompokkan negara menjadi 4 kelompok menurut peringkat IPM-nya. Negara yang memiliki IPM di atas 0,800 berada pada kelompok pembangunan manusia sangat tinggi. Berdasarkan *Human Development Report (2020)*, Norwegia (0,957), Irlandia (0,955), dan Swiss (0,955), berturut-turut berada pada ranking pertama, kedua, dan ketiga sebagai negara dengan IPM tertinggi di dunia sekaligus berada pada kategori tinggi, Negara yang memiliki IPM antara 0,700-0,800 masuk kelompok pembangunan manusia tinggi. Selanjutnya, negara yang memiliki IPM antara 0,550-0,700 termasuk golongan menengah. Sementara itu, negara-negara yang IPM-nya di bawah 0,550 digolongkan ke pembangunan manusia rendah.

Berdasarkan *Human Development Report (2020)*, Indonesia termasuk negara dengan kategori pembangunan manusia tinggi (IPM = 0,718) dan berada pada rangking 107 dunia. Secara umum, sejak tahun 1990, IPM Indonesia terus meningkat. Akan tetapi, peningkatan IPM tersebut tidak selalu diikuti oleh kenaikan peringkat IPM karena ada beberapa negara yang mengalami pertumbuhan rata-rata IPM yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pada kurun waktu 1990-2015, pertumbuhan rata-rata IPM Indonesia adalah 1,07%

sedangkan China dan Viet Nam mengalami pertumbuhan rata-rata IPM yang amat mengesankan, masing-masing sebesar 1,57% dan 1,45%.

Sejak tahun 1990, UNDP menggunakan IPM sebagai salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia. Dalam paradigma IPM, fokus utama ditujukan untuk pengembangan manusia adalah kemakmuran, keadilan, dan keberlanjutan. Indikator kesehatan dalam IPM yaitu umur harapan hidup (UHH) yang digunakan untuk mengukur pembangunan kesehatan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

UHH adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dari sejak dilahirkan, dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Namun muncul pertanyaan, apakah hanya cukup umur harapan hidup yang panjang dapat mendukung pembangunan manusia? Diharapkan pembangunan manusia dari sektor kesehatan, selain mengupayakan agar penduduk dapat mencapai "usia hidup" yang panjang tetapi juga sehat berkualitas dan tidak bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, pada tahun 2010, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan RI menyusun Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). IPKM adalah penjabaran dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang kesehatan masyarakat.

IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya. Sebagai contoh, IPKM tahun 2018 menggunakan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018 terintegrasi Riskesdas 2018, data Potensi Desa (Podes) 2018, serta data penduduk per kabupaten/kota proyeksi tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik. Metode yang digunakan adalah metode hitung IPKM 2013 (Kemenkes RI, 2018).

Nilai IPKM terdiri atas tujuh sub-indeks IPKM, yaitu kesehatan balita, Kesehatan reproduksi, pelayanan Kesehatan, perilaku, penyakit tidak menular, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Ketujuh sub-indeks IPKM terdiri atas 30 indikator dengan bobot tertentu. Kesehatan balita, misalnya, memiliki 6 indikator (dan bobot), yaitu balita gizi buruk dan kurang (5), balita pendek, dan sangat pendek (*stunting*) (5), balita gemuk (4), penimbangan balita (4), kunjungan neonatal (4), dan imunisasi dasar lengkap (4). Bobot 5 bermakna kategori mutlak, 4 (penting), dan 3 (perlu) (Kemenkes RI, 2018).

Secara keseluruhan (30 indikator), terdapat 123 bobot bagi nilai IPKM. Sebanyak 26 dari antaranya (21,1%) terkait dengan status gizi balita, termasuk *stunting* dan *wasting*. Artinya, masalah gizi pada masa balita sangat

berpengaruh pada nilai IPKM yang pada gilirannya juga menentukan mutu pembangunan manusia (IPM).

3.2. Gizi: *Input* bagi Pembangunan SDM

Secara sederhana proses pembangunan SDM, terutama pembangunan SDM jangka panjang atau pembangunan SDM sepanjang siklus hidup manusia, mengikuti alur *input-process-output*. Yang termasuk *input*, antara lain, manusia pada masa awal kehidupannya, yaitu masa janin dan masa balita. Merekalah yang akan memasuki masa sekolah. Proses mencakup pendidikan dan rupa-rupa pengembangan kapasitas diri, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya. Sementara itu, *output* adalah hasil dari proses pembangunan SDM, yaitu kualitas SDM.

Output dan *process* pembangunan SDM sangat dipengaruhi oleh keadaan awal manusia sebagai *input* bagi pembangunan SDM itu. Itulah, antara lain, yang Joycelyn Elders maksudkan pada pernyataannya di atas: "Kita tidak bisa mendidik orang yang tidak sehat!" Dalam konteks gizi, pernyataan itu berarti kita tidak bisa berharap banyak akan SDM yang berkualitas dari anak (*input*) yang status gizinya buruk.

Berbagai penelitian telah secara meyakinkan membuktikan bahwa cetak biru otak bayi sudah nyaris sempurna terbentuk ketika mereka dilahirkan. Penyempurnaan perkembangan otak berlangsung hingga mereka berumur dua tahun atau paling tidak hingga mereka memasuki usia sekolah (1000 HPK-Plus). Di sinilah peran sentral gizi sebagai *input* bagi pembangunan SDM. Pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang pada masa kehamilan dan pada masa balita akan menyokong tumbuh kembang anak, termasuk tumbuh kembang otaknya. Otak yang tumbuh dan berkembang dengan baik akan menjadi lahan persemaian benih (*input*) potensial bagi pembangunan SDM berkualitas di masa depan.

3.3. Perubahan Paradigma

Terkait pentingnya aspek gizi dalam pembangunan, termasuk pembangunan SDM, pada tahun 2006 Bank Dunia telah mengeluarkan pedoman bagi pembangunan bangsa-bangsa dengan menerbitkan buku berjudul *Repositioning Nutrition as Central to Development (A Strategy for Large-Scale Action)*. Hal senada juga dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui buku laporan *Administrative Committee on Coordination Sub-Committee on Nutrition*, berjudul "*Nutrition: A Foundation for Development: Why Practitioners in Development Should Integrate Nutrition?*" Dalam buku ini, Bank Dunia mengingatkan setiap bangsa agar menempatkan gizi sebagai fondasi pembangunan. Inilah yang dikenal sebagai pembangunan berarusutama gizi. Artinya, setiap upaya pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya pada perbaikan gizi. Secara implisit anjuran Bank Dunia ini mengisyaratkan bahwa perbaikan gizi bukan hanya urusan sektor kesehatan semata, tetapi juga urusan sektor lain yang terkait. Bank Dunia juga menegaskan perlunya perubahan paradigma pembangunan dari perbaikan ekonomi mendahului perbaikan gizi (paradigma lama) menjadi

perbaikan gizi mendahului perbaikan ekonomi (paradigma baru). Dalam kaitannya dengan pembangunan SDM, peringatan Bank Dunia tersebut dapat kita fokuskan menjadi pengarusutamaan gizi sebagai fondasi pembangunan SDM (*nutrition mainstreaming of human resource development*).

Terkait dengan masalah gizi sebagai penghambat SDM berkualitas, *stunting* pada balita adalah masalah utamanya. Untuk diketahui, *stunting* adalah gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi menahun (kronis). Ciri-cirinya adalah tubuh pendek atau sangat pendek dibandingkan dengan rata-rata tinggi badan anak seusianya. Bahkan, kekurangan gizi bisa sudah terjadi pada ibu yang mengandungnya. Akibatnya tidak hanya pada hambatan pertumbuhan fisiknya, tetapi juga terhadap perkembangan otaknya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan *input* bagi sumber daya manusia yang berkualitas, pintu masuknya adalah pencegahan *stunting* pada bayi dan balita (Sebagai gambaran, UNICEF memkirakan bahwa anak yang menderita *stunting* memiliki IQ rata-rata 11 poin lebih rendah daripada IQ anak yang tinggi badannya normal).

Sehubungan dengan itu, UNICEF melalui *UNICEF Nutrition Strategy 2020-2020* menetapkan visi: "*Nutrition for Every Child.*" Landasannya adalah Konvensi atas Hak-hak Anak, yang antara lain menyatakan pemenuhan hak-hak anak pangan (gizi). Tujuan akhir (*goal*) adalah Untuk melindungi dan mempromosikan diet, layanan dan praktik yang mendukung gizi optimal, pertumbuhan dan perkembangan untuk semua anak, remaja dan wanita. Hal ini sesuai dengan amanah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Agenda 2030*): menjamin akses oleh semua orang, termasuk bayi, pada makanan bergizi, makanan yang aman dan cukup sepanjang tahun, dan mengakhiri kelaparan dan malagizi dalam segala bentuknya. Untuk mencapai goal tersebut, ditetapkanlah 4 tujuan antara (*objective*), yaitu (1) mencegah kurang gizi, kekurangan zat gizimikro, dan kelebihan berat badan pada awal masa kecil (lima tahun pertama awal kehidupan); (2) mencegah kurang gizi, kekurangan zat gizimikro, dan kelebihan berat badan pada masa kecil tengah dan masa remaja; (3) mencegah kurang gizi, kekurangan zat gizimikro, dan kelebihan berat badan pada ibu, dan rendah berat lahir pada bayi baru lahir; dan (4) Untuk memastikan lebih awal deteksi dan pengobatan pemborosan dan bentuk lainnya mengancam jiwa malagizi akut pada anak usia dini. Untuk mendukung upaya pencapaian tujuan dan visi ini, UNICEF menyarankan perbaikan pada sistem pangan, sistem kesehatan, sistem penyediaan air bersih dan sanitasi, sistem pendidikan, dan sistem perlindungan sosial (UNICEF, 2020).

3.4. *Blanket Intervention*

Saat ini Indonesia tengah melakukan upaya percepatan penurunan *stunting*. Salah satu upaya itu Program Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*) di Kabupaten/Kota Prioritas. Program ini adalah intervensi bersasaran (*targeted intervention*) Kabupaten/kota yang menjadi prioritas didasarkan atas prevalensi *stunting* (tertinggi). Intervensi dengan cara ini kurang tepat karena balita penderita

stunting di 400 lebih kabupaten kota lainnya tidak bisa menunggu satu atau dua tahun kemudian untuk ditangani karena periode kritis perbaikan tumbuh kembang mereka sudah terlewati.

Oleh karena itu, intervensi *stunting* haruslah menempatkan *stunting* sebagai prioritas, bukan prevalensi masalah atau wilayah penderitanya. Intervensi *stunting* haruslah mencakup semua balita penderita *stunting* (*blanket intervention*). Pemerintah harus mengerahkan segala daya dan upaya untuk memenuhi kewajibannya akan hak paling mendasar warganya, yaitu bebas dari kelaparan. Sekedar mengingatkan, *stunting* itu adalah salah satu bentuk terparah dari kelaparan.

Melalui artikel saya pada harian Kompas (06/02/2016) perihal perlunya revolusi komitmen perbaikan gizi, saya menghimbau semua penyelenggara negara agar memiliki *sense of crisis* yang sama bahwa persoalan kurang gizi adalah persoalan yang amat serius dan memerlukan penanganan bersama. Negara harus menempatkan gizi sebagai prioritas pembangunan, terutama pembangunan SDM. Dan, tentu saja, pemerintah tidak ingin generasi bangsa ini menjadi pecundang di era revolusi industri 4,0 ini. Juga, kita tak rela membiarkan mereka mewariskan kemiskinan dan kebodohan ke generasi berikutnya (*lost generation*).

4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mendorong percepatan penanganan masalah gizi, khususnya stunting, dalam upaya memperbaiki input bagi pembangunan SDM di Sumatera Utara, upaya yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan perbaikan gizi di Sumatera Utara, antara lain adalah (1) mendorong pemberian makanan tambahan bagi balita, anak-anak dan ibu hami; (2) mengkampanyekan (*social campaign*) pemberian ASI-eksklusif dan pemberian ASI sampai dengan dua tahun; dan (3) meningkatkan penyediaan air bersih; (4) mereposisi dan merevitalisasi Posyandu; (5) mensinergikan kerja sama lintas-sektor penanganan gizi; (6) melakukan blanket intervention penanganan masalah stunting pada balita.

5. Kesimpulan dan Saran

Fakta ilmiah telah secara meyakinkan bahwa gizi adalah fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia. Gizi yang baik adalah investasi berharga bagi pembangunan manusia dan bangsa. Atas dasar itulah Bank Dunia dan PBB menyatakan perlunya pengutamaan gizi sebagai fondasi pembangunan bangsa (*nutrition mainstreaming for development*). Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus menyadari bahwa persoalan gizi adalah persoalan bersama, bukan masalah sektoral. Pemangku kepentingan pembangunan gizi dan penanganan masalah gizi harus merevolusi komitmen dan mengubah paradigma pembangunan gizi.

Daftar Pustaka

- GNR. 2020. Global Nutrition Report 2020.
<https://globalnutritionreport.org/reports/2020-global-nutrition-report/>
- Kemenkes RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013
- Kemenkes RI. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018
- Kemenkes RI. 2018. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 2018
- Kemenkes RI. 2019. Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019
- Prentice, AM, *et al.* 2013. Critical windows for nutritional interventions against stunting. *Am J Clin Nutr* 2013; 97:911–8
- Shrimpton, R *et al.* 2001. Worldwide Timing of Growth Faltering: Implications for Nutritional Interventions. *Pediatrics* May 2001, 107 (5) e75
- Siagian, A. Revolusi Komitmen Pembangunan Gizi. Opini pada Harian Kompas, tanggal 6 Februari 2016
- Pemerintah RI. 2013. Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
- UNDP. 2020. Human Development Report, 2020
- UNICEF. 2020. Nutrition for Every Child: UNICEF Nutrition Strategy 2020-2030. Nutrition Section, Programme Division 3 United Nations Plaza New York, NY 10017, USA
- World Bank. 2006. Repositioning Nutrition as Central to Development: A Strategy for Large Scale Action. Washington, DC.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7409> License: CC BY 3.0 IGO.

Biodata Penulis



Albiner Siagian diahirkan di Gompar Bintang, Kabupaten Tobasa, pada tanggal 13 Juni 1967. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Jurusan Kimia FT USU tahun 1991, mendapatkan gelar Magister Sains (Gizi Masyarakat) tahun 1998 dan Doktor (Gizi Masyarakat) tahun 2006 dari Program Studi Gizi Masyarakat, Institut Pertanian Bogor. Bidang ilmu yang ditekuni penulis adalah Ilmu Gizi dan Gizi Masyarakat.

Publikasi/Karya Ilmiah yang telah dihasilkan penulis di jurnal nasional, antara lain, adalah Pengaruh Indeks Glikemik Komposisi dan Cara Pemberian Pangan terhadap Respons Glikemik, Nafsu Makan, dan Profil Lipid Dewasa Obes dan Normal; Indeks Glikemik Sagu dan Produk Olahannya; Survei Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2007; dan Kajian Model Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga yang Terintegrasi dengan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, 2009. Sementara itu, publikasi penulis di jurnal internasional, antara lain, adalah *Relation Between Food Consumption and Anemia in Children in Primary School in a Final Disposal Waste Area; Mixed Cooked Rice with Purple Sweet Potato is Potentially to be the Low Glycemic Index Food; Effect of Nutrition Counseling and Breastfeeding on the Improvement of Exclusive Breastfeeding and Infant Nutritional Status in Lubuk Pakam and Tanjung Morawa Sub Districts, Deli Serdan; Nutritional Knowledge of Students on Consumption of Vegetables and Fruit and their Relationship with Micronutrient Intake; dan Performance of Coffee Origin and Genotype in Organoleptic and Physical Quality of Arabica Coffee in North Sumatra Province of Indonesia.*

Penghargaan yang pernah diraih penulis di antaranya adalah: Piagam penghargaan sebagai Mahasiswa Program Magister dan Doktor Berprestasi dari Sekolah Pascasarjana IPB, *National Best Lecturer* versi PT. HM Sampoerna tahun 2008, Satyalencana Karya Satya 10 Tahun. Pidato Pengukuhan Guru Besar penulis berjudul: "Reposisi Gizi sebagai Pusat Pembangunan."

Selain sebagai pengajar pada program sarjana, magister, dan doktoral di Universitas Sumatera Utara, Albiner Siagian juga aktif menulis artikel ilmiah pada Rubrik Opini, Rubrik Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Rubrik Kesehatan di koran Kompas, Suara Pembaruan, Pikiran Rakyat, Analisa, Sinar Indonesia Baru, dan Waspada. Selain itu, Albiner Siagian adalah kontributor bagi Buku Pemikiran Guru Besar USU (Buku ke-1, ke-2, dan ke-3). Tambahan lagi, Albiner Siagian adalah seorang Guru Etos dan Revolusi Mental bersertifikat. Albiner Siagian aktif menyelenggarakan seminar dan pelatihan motivasi kerja, etos kerja, revolusi mindset, revolusi mental, dan *capacity building*.

Peranan Manajemen Pendidikan Dalam Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman serta Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sumatra Utara yang Lebih Baik

Arlina Nurbaity Lubis

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatra Utara

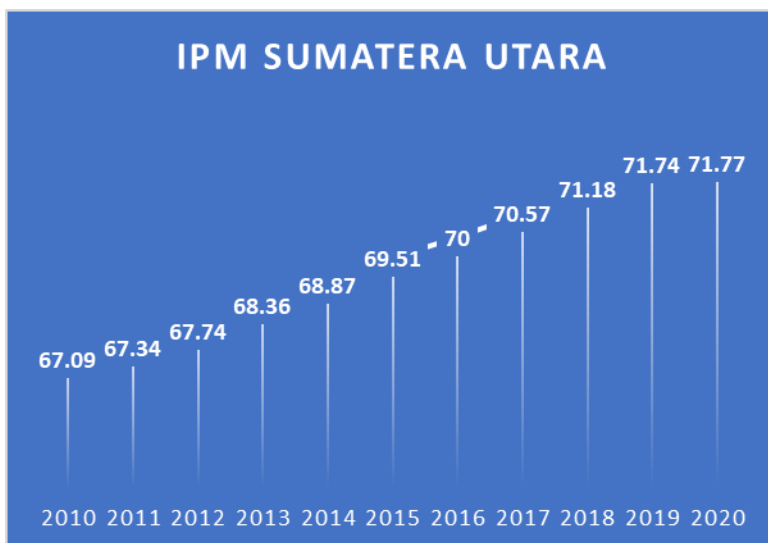
1. Latar Belakang

Kualitas sumber daya manusia memiliki peranan utama dalam meningkatkan kesejahteraan seseorang. Kualitas seseorang juga menjadi sumber keunggulan bersaing yang dimiliki oleh individu tersebut^[1]. Orang yang memiliki kualitas yang tepat akan terlihat lebih unggul dibandingkan dengan mereka yang tidak memilikinya. Kualitas dalam konteks ini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan benar. Perlu disadari bahwa masing-masing pekerjaan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, dalam konsep manajemen sumber daya manusia, setiap perusahaan berupaya menggapai pencapaian *the right man in the right place*, melalui berbagai aktivitas manajemen sumber daya manusia, seperti rekrutmen^[2].

Kualitas sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam membangun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memberikan efek domino terhadap peningkatan ekonomi yang lebih baik, pencapaian pendidikan yang lebih merata, serta dukungan akses terhadap kesehatan. Kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi memberikan kemampuan bagi individu tersebut agar dapat bersaing di dunia kerja^[3]. Pekerjaan yang lebih baik akan memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Ekonomi yang lebih baik juga membuka akses pendidikan generasi selanjutnya yang semakin baik serta layanan kesehatan yang semakin memadai.

Dalam upaya peningkatan daya saing, Indonesia memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV, tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2024. RPJMN IV mempersiapkan agenda untuk peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Fokus pembangunan pada RPJMN tersebut adalah mempersiapkan pencapaian "Indonesia Maju" di tahun 2045 dengan membangun sumber daya manusia yang berkompetensi dan mampu menjadi insan unggul pada persaingan global^[4]. Sebagai indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, pemerintah menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mengevaluasi tiga indikator kesuksesan pembangunan meliputi (1)

peningkatan kesehatan masyarakat; (2) peningkatan dan pemerataan pendidikan; dan (3) peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat^[5].

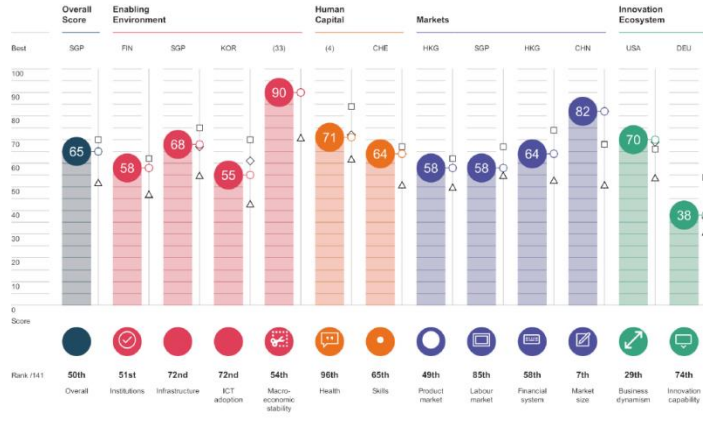


Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara 2010 – 2020

Gambar (1) memberikan informasi bahwa IPM di Sumatera Utara selama sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dimulai pada tahun 2010 dengan IPM 67,09 sampai dengan tahun 2020 dengan IPM 71,77. Pencapaian ini cukup baik apabila ditinjau dari peningkatan IPM yang mencapai 0,468 poin per tahun. Meskipun demikian, pada tahun 2020 terjadi perlambatan yang cukup signifikan, dari pertumbuhan rata-rata 0,468 per tahun, hanya meningkat sebesar 0,03 poin pada tahun 2020. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan rencana pencapaian IPM Indonesia pada tahun 2024 yaitu 75,24 poin.

Dengan mempertimbangkan daya saing Indonesia di dunia melalui *Global Competitiveness Index* (GCI) tahun 2019, Indonesia mengalami penurunan daya saing, dari sebelumnya berada pada peringkat 45 dari 140 negara, menjadi peringkat 50 dari 141 negara di dunia^[6]. Nilai umum dari Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hanya saja negara lain memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada Indonesia.

Gambar (2) menunjukkan bahwa daya saing Indonesia di dunia terletak pada ukuran pasar yang cukup besar di dunia (peringkat 7 dari 141 dunia). Meskipun demikian, dari sisi aspek *human capital*, Indonesia memiliki banyak ruang untuk peningkatan daya saing, baik dari sisi keahlian yang dimiliki (65/141) maupun dari tingkat kesehatan penduduk (96/141). Dari data ini terlihat bahwa keahlian yang dimiliki SDM Indonesia masih belum cukup kompetitif untuk memenuhi permintaan pasar dunia.



Gambar 2. Daya Saing Indonesia Tahun 2019 (Sumber: World Economic Forum [6])

2. Masalah

Saat ini perubahan yang fundamental sedang terjadi dari sisi teknologi, sosiokultural, dan lingkungan sebagai efek dari perkembangan revolusi industri 4.0. *Technological disruption* semakin berdampak pada banyak sektor. Kemunculan kecerdasan buatan (*artificial intelligence / AI*) disertai dengan *big data computation* membuat peranan *human capital* di dunia industri mulai tergantikan oleh perkembangan teknologi^{[7],[8]}. *Branchless banking* yang mulai banyak diterapkan membuat perbankan tidak lagi membutuhkan banyak SDM dan kantor cabang atau unit agar dapat mencapai efisiensi dan pasar yang lebih luas. Digitalisasi membuat banyak hal dapat dilakukan tanpa harus berinteraksi langsung dengan orang lain. Berbagai peran manusia dalam lingkungan dunia usaha dan dunia industri satu per satu mulai tergantikan oleh kecerdasan buatan yang seolah menjadi tantangan bagi SDM untuk bersaing dengan kecerdasan buatan yang bersifat lebih efisien karena mampu berkerja sesuai dengan prosedural yang diprogramkan dalam kecerdasan buatan tersebut. Dunia usaha dan dunia industri semakin tertarik dengan rendahnya tingkat kesalahan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan serta kecepatan eksekusi pengambilan keputusan dari AI tersebut jika dibandingkan dengan manusia secara umum. *World economic forum* menggambarkan pergeseran paradigma keterampilan yang diperlukan oleh SDM agar dapat bersaing dan tetap kompetitif di tahun 2025 nanti^[9]. Kemampuan yang paling penting adalah *problem-solving skill*, diikuti dengan keahlian dalam pengelolaan mandiri (*self-management*), keahlian bekerjasama dengan orang lain (*working with people*), dan penggunaan serta pengembangan teknologi (*technology use and development*). Disrupsi teknologi akan mengakibatkan banyak pergeseran kebutuhan keahlian sumber daya manusia yang sebelumnya lebih ke masalah teknis, di masa yang akan

datang akan beralih menjadi harmonisasi antara manusia, mesin, dan algoritma yang mendasari dari kecerdasan buatan^[10]. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis akan terganti oleh mesin dan peranan sumber daya manusia lebih mengarah pada algoritma pemrograman dibalik harmonisasi manusia dan mesin tersebut. Kebutuhan berpikir kritis (*critical thinking*) akan semakin diperlukan dalam membangun *problem-solving skill* sebagai *core competency* pada tahun 2025 mendatang.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memberikan gambaran kebutuhan *skills* yang diperlukan di masa yang akan datang sebagai 4C, meliputi *critical thinking*, *creativity*, *communication* dan *collaboration*^[11]. Generasi yang dimaksud pada masa yang akan datang adalah generasi digital. Kebutuhan atas *computational thinking* juga menjadi tambahan dalam melengkapi 4C yang diperlukan di masa yang akan datang tersebut. *Computational thinking* lebih menggambarkan bagaimana seseorang berpikir atau proses berpikir yang efisien dalam menemukan permasalahan dan solusi untuk menyelesaikannya berdasarkan informasi yang efektif^[12].

Kurikulum di Indonesia masih menerapkan transisi dari pendidikan konvensional menjadi pendidikan berbasis *computational thinking*. Banyak dari pendidik di Indonesia yang masih belum terbiasa memfokuskan diri dalam mengajarkan *computational thinking* kepada peserta didiknya. Sering sekali kita perhatikan fokus dari pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik bukan membangun pola pikir yang diharapkan, tetapi menyampaikan informasi atau pengetahuan yang diperlukan. Sebagai contoh, sering dari pendidik mengajarkan satu ditambah satu hasilnya adalah dua, tetapi tidak mengajarkan mengapa bisa hasilnya adalah dua. Dengan kata lain, pembiasaan *computational thinking* pada proses pembelajaran masih belum optimal^[13]. Dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi juga belum sepenuhnya mengadopsi keahlian-keahlian yang penting untuk daya saing di masa yang akan datang sehingga ke depannya akan memunculkan *skill gap* seiring dengan perkembangan teknologi di masa yang akan datang^[14]. Apabila kondisi ini tidak segera diselesaikan, daya saing dan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin menurun di persaingan global.

Di masa-masa yang akan datang, dunia sudah memprediksi peralihan antara tenaga manusia dengan mesin-mesin yang memiliki kecerdasan buatan. Lebih dari 85 juta pekerjaan dunia akan tergantikan oleh mesin-mesin tersebut. Peralihan ini tidak dapat dihindari selama perusahaan dan organisasi mencari *operational excellency* yang menargetkan kualitas, efektifitas dan efisiensi kerja. Meskipun demikian, masyarakat ekonomi dunia percaya bahwa akan lebih dari 90 juta pekerjaan baru akan muncul sebagai kolaborasi dan sinergi antara manusia, mesin, dan algoritma berpikir. Banyak dari SDM memerlukan pergeseran kompetensi dasar dan keahlian baru untuk dapat bertahan dalam pergeseran disrupsi teknologi tersebut. Dengan demikian, sebuah tantangan baru muncul dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi di masa yang akan datang.

Kualitas unggul dan berdaya saing ini sangat diperlukan dalam meningkatkan IPM Indonesia, khususnya Sumatra Utara.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Apabila kita mengacu kembali kepada permasalahan *skill gap* yang akan muncul dan mempengaruhi daya saing masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sumatra Utara, inti dari permasalahan tersebut terletak pada dua bagian. Pertama adalah permasalahan pendidikan yang belum sepenuhnya menargetkan pencapaian keahlian inti yang diperlukan dalam perkembangan disrupsi teknologi lima tahun ke depan, seperti *computational thinking*. Kedua adalah permasalahan bagi masyarakat yang sudah memasuki dunia kerja, dimana mereka akan memerlukan pembenahan diri secara mandiri dalam menyesuaikan kompetensi diri dengan kebutuhan keahlian manusia di masa yang akan datang.

Pendidikan merupakan pilar utama yang menyokong perkembangan peserta didiknya. Pendidikan diberikan kepada peserta didik untuk membentuk kesiapan dari peserta didik dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang^{[15][16]}. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusulkan dua keahlian kompetensi baru dalam pembelajaran anak Indonesia, salah satunya adalah berpikir komputasional. Apabila kita berbicara “berpikir komputasional” mungkin banyak di antara kita yang mengaitkannya dengan *computer science*, ataupun bahasa pemrograman, ataupun bagaimana manusia berpikir layaknya sebuah komputer canggih. Definisi dari *computational thinking* sebenarnya lebih bersifat umum, yaitu bagaimana cara seseorang menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapinya dengan efektif dan efisien^{[17],[18]}. Dengan kata lain, *computational thinking* bersifat sederhana, sistematis, efektif dan efisien^[19]. Seseorang yang memiliki keahlian *computational thinking* akan tumbuh dan berkembang menjadi *problem solver*, sebuah keahlian yang sangat dicari pada masa yang akan datang.

Apabila kita mengacu kepada *human capital theory*, sumber daya manusia memiliki peranan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai *human capital*, sumber daya manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui fungsi pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan dan pembelajaran membantu dalam membentuk elemen kognitif, afektif serta perilaku seseorang. Dalam kerangka konsep *computational thinking*, sumber daya manusia akan memperoleh *analytical skill* dan *cognitive ability* yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik. Kemampuan dan keahlian ini membantu individu dalam melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien. Pengambilan keputusan terhadap pekerjaan seperti pengalokasian sumber daya ataupun keputusan terhadap *uncertainty* yang terjadi di lingkungan kerja dapat dilakukan dengan baik melalui pemrosesan informasi dan pola pikir analisis yang baik. Dalam konteks kependidikan, usia muda pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas memiliki peranan

yang penting untuk membangun pondasi, kerangka berpikir seseorang di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, rencana untuk menambahkan *computational thinking* dalam kurikulum pembelajaran di Indonesia perlu didukung dengan baik. Institusi pendidikan dalam hal ini berperan besar untuk membangun dan mengembangkan keahlian dari setiap individu. Guru mendidik dan mengembangkan pola pikir serta karakteristik dari siswa. Dosen mendidik dan menumbuhkan keahlian yang diperlukan mahasiswa di masa yang akan datang melalui kegiatan pembelajaran selama perkuliahan. Oleh karena itu, kunci dalam membangun sumber daya manusia yang unggul salah satunya terletak pada sistem pendidikan.

Dalam upaya membangun sumber daya unggul dari proses pendidikan dan pembelajaran, diperlukan pemahaman dan pengembangan empat keterampilan peserta didik, meliputi cara berpikir atau bernalar (*way of thinking*), cara-cara ataupun metode dalam bekerja dan bekerjasama (*way for working*), alat-alat untuk bekerja (*tools for working*), dan cara-cara dalam menjalani kehidupan (*way of living*)^[20]. Apabila pendekatan ini dikaitkan dengan semakin sempurnanya interaksi individu dengan dunia tak kasat mata melalui digitalisasi, diperlukan pengembangan keterampilan yang mendasar bagi SDM Unggul, meliputi berpikir komputasional, kreatif, dan kritis sebagai *way of thinking*, mampu bekerjasama dengan orang lain atau berkolaborasi sebagai *way for working*, menguasai literasi digital dan teknologi sebagai *tools for working*, serta memiliki rencana kehidupan dan karier sebagai *way of living*.

Upaya penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui reformasi kurikulum pendidikan beserta implementasinya. Apabila kita mengacu kembali pada *computational thinking*, hal ini sebenarnya bukan merupakan hal baru dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, dimana targetnya adalah membangun pola pikir *analytical* melalui berbagai studi kasus dan permasalahan kehidupan sehari-hari yang diajarkan kepada peserta didik. Apabila kita meninjau lebih lanjut, *computational thinking* mengarahkan peserta didik dalam berpikir rasional. Pengembangan kemampuan *computational thinking* diharapkan mampu membangun kebiasaan peserta didik untuk menemukan *pattern* dari kejadian yang ditemukan sehari-hari dengan materi-materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah. Peserta didik diharapkan mampu berpikir kreatif dan memanfaatkan informasi yang dimilikinya untuk menyelesaikan permasalahan dengan efektif dan efisien. Konsep *decomposition* dari *computational thinking* diharapkan mampu membantu pesertadidik memilah permasalahan yang dihadapi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Dengan demikian, penanaman *computational thinking* dalam individu akan membangun pondasi penting dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan lain yang mempersiapkan individu sebagai *problem solver*, bukan hanya sekedar *problem solver*, tetapi juga mereka yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan efektif dan efisien, menggunakan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya dengan sumber daya seminimal mungkin dan hasil sebaik mungkin. Perkembangan kurikulum pendidikan perlu diseimbangkan dengan kemampuan tenaga pendidik dalam

menerapkan kurikulum tersebut. Perlu adanya sebuah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga pendidik, baik guru maupun dosen dalam mengimplementasikan pembelajaran yang membangun keahlian *computational thinking*. Materi-materi pembelajaran perlu secara holistik membaur dengan kondisi kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat mengembangkan *pattern recognition* dan menerapkan secara aplikatif pembelajaran yang dilakukannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan yang kedua dalam pengembangan kualitas SDM adalah bagi sumber daya manusia yang sudah tidak lagi dalam lingkungan pembelajaran sekolah maupun perguruan tinggi. Forum ekonomi dunia menilai bahwa setidaknya 50% dari *existing workers* akan memerlukan *reskilling* hingga nanti 2025^[8]. Kondisi ini semakin diperkuat dengan munculnya pandemi COVID-19 yang semakin mempercepat kebutuhan otomatisasi di berbagai sektor pekerjaan. Disrupsi teknologi dan kehadiran COVID-19 semakin menuntut angkatan kerja untuk meng-*upgrade* pengetahuan, kemampuan, serta keahliannya dalam upaya tetap kompetitif di lingkungan kerja dan tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan. Masing-masing individu harus menyadari pentingnya pembaharuan kemampuan ini sebelum terlambat. Apabila kita terlambat dalam melakukan pembaharuan, baik melalui *reskilling* ataupun *upskilling*, kita akan terlambat untuk menjaga diri tetap kompetitif di pasar global nantinya.

Kualitas sumber daya manusia, seperti yang sebelumnya telah dibahas, merupakan elemen penting dalam menyukkseskan peningkatan indeks pembangunan manusia, khususnya di Sumatra Utara. Kualitas sumber daya manusia menjadi daya saing individu dalam persaingan global di tengah *double disruption* saat ini, transisi pekerjaan manusia dengan mesin dan pandemi COVID-19 yang semakin meningkatkan disruption yang terjadi. Apabila SDM kita tidak mampu beradaptasi dengan melakukan pembaharuan keahlian yang diperlukan di masa yang akan datang, SDM kita akan tergantikan oleh mesin. Pekerjaan-pekerjaan sederhana yang sifatnya *technical* akan secara perlahan digantikan oleh kecerdasan buatan. Oleh karena itu, diperlukan kemandirian bagi SDM di Sumatra Utara untuk selalu memperbaharui kemampuan dan keahlian yang dimilikinya agar ke depannya tidak tergantikan oleh otomatitasi dari disrupsi teknologi. Pemerintah dapat membantu SDM di Sumatra Utara dengan memberikan pelatihan dan pemahaman seputar kondisi disrupsi dan kebutuhan ketenagakerjaan di masa yang akan datang. Meskipun demikian solusi ini bersifat solusi sementara dan dapat menimbulkan ketergantungan ketenagakerjaan terhadap pemerintah. Solusi yang paling efektif adalah membangun kemandirian dari SDM di Sumatera Utara. SDM harus secara sadar, mau, dan mampu berjuang untuk memperbaharui kemampuan dan keahliannya sesuai dengan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. SDM harus mempersiapkan dirinya menjadi SDM yang unggul dan berkualitas secara mandiri. Peranan pemerintah sebaiknya hanya sebatas katalis yang mempercepat pencapaian SDM unggul dan berkualitas tersebut. Pemerintah membantu membukakan jalan untuk

mencapai SDM unggul dan berkualitas, dan SDM secara mandiri menggapai pembaharuan kemampuan tersebut.

4. Rencana Tidak Lanjut

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan IPM tersebut, diperlukan SDM yang unggul dan berkualitas. SDM yang unggul dan berkualitas ini akan menjadi prioritas dalam organisasi sehingga akan membantu perekonomian individu dan keluarga tersebut. Dengan perekonomian yang lebih baik, akses kesehatan dan pendidikan akan ikut terbantu. Oleh karena itu, fokus pada tulisan ini adalah bagaimana mengupayakan SDM yang unggul dan berkualitas di hadapan tantangan *double disruption* yang tengah terjadi saat ini. Di tahun 2025, banyak pekerjaan yang sifatnya konvensional akan tergantikan oleh kecerdasan buatan yang mampu beroperasi lebih efisien dari SDM.

Dalam upaya peningkatan daya saing sumber daya manusia, diperlukan upaya-upaya untuk membangun SDM yang unggul dan berkualitas sebagaimana sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mengacu pada solusi atas permasalahan dalam tulisan ini, ada dua fokus yang perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan IPM di Sumatra Utara khususnya. Pertama adalah reformasi kurikulum pendidikan yang menekankan pada pengembangan *computational thinking* kepada para peserta didik, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pada tingkat sekolah dasar, *computational thinking* dapat “diinfus” kepada peserta didik melalui pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Peserta didik diajak belajar dan menyelesaikan permasalahan sejak ini. Kondisi ini adalah titik yang sangat penting dalam membangun pondasi *computational thinking* tersebut. Pada jenjang-jenjang setelahnya, *computational thinking* dapat lebih dikenalkan sebagai sebuah pola pikir yang berkaitan dengan bagaimana menyederhanakan permasalahan serta menyelesaikan permasalahan dengan efektif dan efisien. Apabila kita mengikuti perkembangan pembelajaran melalui berbagai program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, banyak sekali materi pembelajaran dan seminar-seminar sudah dilakukan untuk memperkenalkan *computational thinking* dan kurikulum serta metode pembelajaran berbasis *computational thinking*. Upaya ini adalah salah satu bentuk tindakan nyata dari kementerian dalam menekankan pemahaman *computational thinking* kepada dunia pendidikan di Indonesia. Meskipun demikian, diperlukan pula koordinasi dan pelatihan dari dinas pendidikan di Sumatra Utara untuk mencapai pemahaman *computational thinking* secara menyeluruh kepada pendidik di Sumatra Utara. Kesuksesan suatu program tidak dapat berjalan hanya oleh satu atau dua orang saja. Dukungan penuh dari seluruh pendidik diperlukan untuk membangun *computational thinking* sejak dini. Tidak hanya Dinas Pendidikan, Institusi Pendidikan seperti sekolah maupun Universitas juga harus mampu meneruskan dan membangun

computational thinking dalam program pembelajaran. Selain itu juga diperlukan program-program pelatihan kepada tenaga pendidik di Sumatra Utara agar mampu mempersiapkan materi pembelajaran berbasis *computational thinking* tersebut.

Permasalahan kedua seputar peningkatan mutu dan daya saing SDM Sumatra Utara dapat diselesaikan dengan membangun kemandirian SDM untuk tumbuh dan berkembang. Sering sekali ditemukan SDM Sumatera Utara merasa cepat 'puas' dengan *existing condition*-nya sehingga mereka lebih lambat dalam melakukan pembaharuan dan peningkatan kemampuan serta keahlian yang dimilikinya, padahal hal ini adalah sebuah kebutuhan pokok bagi SDM agar tetap kompetitif di masa yang akan datang. Apabila pemerintah ingin memberikan bantuan untuk membangun SDM unggul, program yang dibangun perlu lebih mengarah kepada membangun kemandirian SDM dalam meningkatkan kapabilitas dan kemampuan yang dimiliki SDM tersebut. SDM di Sumatra Utara tentunya sangat banyak jumlahnya dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan akan memberikan benefit yang bersifat sementara saja. Dalam hal ini perlu dipikirkan pula bagaimana upaya dalam memotivasi SDM agar menjadi lebih mandiri. Salah satunya adalah dengan mengungkapkan fakta bahwa industrialisasi berbasis teknologi saat ini mulai menggantikan SDM dengan mesin-mesin dengan kecerdasan buatan.

Dalam upaya membangun SDM yang unggul, selain *hard-skill* yang harus dipenuhi, juga diperlukan *soft-skill* yang berkaitan dengan bagaimana seseorang berempati dan bekerjasama dengan orang lain^{[21],[22]}. Kemampuan dalam berkolaborasi adalah kebutuhan penting di masa yang akan datang, khususnya kolaborasi yang dilakukan tanpa harus tatap muka langsung seperti saat ini. SDM harus memperoleh literasi digital yang baik dan dilengkapi dengan penalaran atau pola pikir kreatif yang didasarkan pada *computational thinking*. Keahlian-keahlian ini bukan merupakan bakat yang dibawa sejak lahir oleh individu, melainkan keahlian yang diperoleh melalui sebuah usaha untuk menggapainya. Oleh karena itu, dalam membangun SDM yang unggul diperlukan kemandirian dan perjuangan SDM. Langkah awalnya adalah memotivasi SDM untuk lebih mandiri, kemudian didampingi sampai ia menjadi lebih mandiri. Konsep *training of trainer* dapat menjadi salah satu solusi untuk menggapai jejaring SDM di Sumatra Utara yang lebih luas lagi. Pemerintah dapat memfokuskan dalam pengembangan *trainer* baru melalui program yang telah dilakukan dan dikembangkan menjadi *trainer* kepada rekan-rekan sejawatnya di instansi masing-masing.

5. Kesimpulan dan Saran

Pemikiran guru besar dalam pembangunan manusia di Sumatra Utara ini memfokuskan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menyikapi *double disruption* yang terjadi serta tantangan SDM di masa yang akan datang. Disrupsi yang terjadi mempercepat transformasi kebutuhan

ketenagakerjaan berbasis teknologi yang didukung oleh hadirnya kecerdasan buatan dan *big data analysis*. Posisi sumber daya manusia harus bersaing dengan kecerdasan buatan yang secara teknis lebih akurat dalam menjalankan tugasnya sesuai standar operasional yang ditanamkan dalam algoritma berpikir kecerdasan buatan tersebut. Kebutuhan keahlian dari SDM di masa yang akan datang akan bertransformasi, tidak lagi keahlian teknis tetapi keahlian-keahlian yang sifatnya lebih mengarah kepada *problem solver*. Peningkatan mutu SDM dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peranan pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga institusi pendidikan tinggi. *Computational thinking* hadir sebagai komponen utama dalam membangun pilar-pilar kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, implementasi pembelajaran *computational thinking* memiliki peranan penting dalam mencapai pembangunan manusia di Sumatra Utara yang lebih baik lagi. Selain itu, SDM di Sumatra Utara memerlukan *reskilling* atau *upskilling* dalam upaya meningkatkan dan mempersiapkan diri dalam bersaing pada tataran global di era digital pada masa yang akan datang.

Dalam upaya peningkatan pembangunan manusia Sumatra Utara, diperlukan sinergi yang baik dari dunia pendidikan di Sumatra Utara. Rencana penambahan kompetensi inti *computational thinking* dalam kurikulum pembelajaran peserta didik harus didukung penuh sebagai dasar dalam membangun SDM unggul dan berkualitas. Penambahan kompetensi inti dalam kurikulum juga harus didukung oleh tenaga pengajar yang akan memberikan pembelajaran *computational thinking* kepada peserta didik. Konsep *training of trainer* dapat dilakukan untuk memberikan pembaharuan kemampuan dan keahlian. Selain itu, dalam upaya melakukan *reskilling* dari *existing* SDM, diperlukan kemandirian dalam menggapai kualitas SDM yang lebih tinggi. Pemerintah sebaiknya tidak ‘memanja’ SDM dengan pelatihan dan pengembangan yang bersifat sementara. Melalui tulisan ini, lebih disarankan untuk memotivasi SDM agar lebih mandiri dalam membangun kemampuan dan keahliannya dalam memenuhi kebutuhan pasar di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- [1] M. U. Manara, “Hard Skills Dan Soft Skills Pada Bagian Sumber Daya Manusia Di Organisasi Industri,” *J. Psikol. Tabularasa*, vol. 9, no. 1, pp. 37–47, 2014.
- [2] A. P. Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- [3] N. Fajaryati, B. Budiyo, M. Akhyar, and W. Wiranto, “The employability skills needed to face the demands of work in the future: Systematic literature reviews,” *Open Eng.*, vol. 10, no. 1, pp. 595–603, 2020.
- [4] Muhyiddin, “Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia,” *J. Perenc. Pembang. Indones. J. Dev. Plan.*, vol. 4, no. 2, pp. 240–252, 2020.

- [5] Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Jakarta, 2021.
- [6] World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report*. 2019.
- [7] Organisation for Economic Co-operation and Development, "Conceptual learning framework Skills for 2030," *OECD Futur. Educ. Ski.*, 2019.
- [8] OECD and ILO, "Approaches to anticipating skills for the future of work," no. June, p. 24, 2018.
- [9] A. Schleicher, "The Future of Education and Skills: Education 2030," *OECD Educ. Work. Pap.*, pp. 1–23, 2018.
- [10] M. Weise, A. Hanson, R. Sentz, and Y. Saleh, "Robot-Ready: Human+ Skills for the Future of Work," 2018.
- [11] UNESCO, "A Global Framework of Reference on Digital Literacy," *UNESCO Inst. Stat.*, no. 51, p. 146, 2018.
- [12] W. Fitriani and M. N. Wangid, "Berpikir Kritis dan Komputasi: Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran di Sekolah Dasar," *J. Pendidik. Sains Indones.*, vol. 9, no. 2, pp. 234–242, 2021.
- [13] W. Suktiningsih, D. Supatmiwati, N. Gusti, and A. Dasriani, "Pengenalan Pemikiran Computational Thinking untuk Guru MI dan MTs Pesantren Nurul Islam Sekarbela," vol. 2, no. 1, pp. 91–102, 2021.
- [14] A. Delaney, "The White Paper on education: a Failure to Invest," *Student Econ. Rev.*, vol. 20, pp. 115–127, 2006.
- [15] Sarah Javed, Salma Javed, and Arfa Khan, "Effect of Education on Quality of Life and Well Being," *Int. J. Indian Psychol.*, vol. 3, no. 4, 2016.
- [16] A. Bhardwaj, "Importance of Education in Human Life," *Int. J. Sci. Conscious.*, vol. 2, no. 2, pp. 23–28, 2016.
- [17] G. DeJong, "Explanation-based learning," *Comput. Sci. Handbook, Second Ed.*, vol. 49, no. 3, pp. 68-1-68–18, 2004.
- [18] J. M. Wing, "Computational thinking and thinking about computing," *Philos. Trans. R. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci.*, vol. 366, no. 1881, pp. 3717–3725, 2008.
- [19] Y. Li *et al.*, "Computational Thinking Is More about Thinking than Computing," *J. STEM Educ. Res.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–18, 2020.
- [20] M. Binkley, "Defining Twenty-First Century Skills," in *Assessment and Teaching of 21st Century Skills*, 2012, pp. 17–66.
- [21] F. Delita, Elfayeti, and T. Sidauruk, "Peningkatan Soft Skills Dan Hard Skills Mahasiswa Melalui Project-Based Learning Pada Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran Geografi," *J. Geogr. Univ. Negeri Medan*, vol. 8, no. 2, pp. 124–135, 2016.
- [22] F. F. Patacsil and C. L. S. Tablatin, "Exploring the importance of soft and hard skills as perceived by it internship students and industry: A gap analysis," *J. Technol. Sci. Educ.*, vol. 7, no. 3, pp. 347–368, 2017.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Arlina Nurbaity Lubis, S.E., M.B.A adalah dosen tetap Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Beliau dilahirkan di Medan pada tanggal 07 April 1974. Tahun 1996 beliau menyelesaikan sarjana ekonomi dari Universitas Sumatera Utara kemudian melanjutkan studi S2 di Faculty of Business Administration dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Tahun 2001 menyelesaikan studi jenjang magisternya dan memperoleh gelar Master of Business Administration.

Tahun 2004 melanjutkan studi S3 ke Universitas Brawijaya dan selesai pada tahun 2007 dalam program doktoral Ilmu Ekonomi. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Beliau aktif melaksanakan kegiatan penelitian serta telah menerbitkan berbagai buku referensi hasil penelitian. Beliau juga aktif menulis jurnal internasional hasil penelitian serta menjadi reviewer untuk prosiding internasional dan jurnal internasional terindeks. Beliau diberikan gelar kehormatan guru besar bidang manajemen pemasaran pada Juni 2019.

Ditengah kesibukannya sebagai dosen, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan profesi, seperti Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI/Pengurus) dan juga Asosiasi Ilmuwan Manajemen Indonesia (AIMI/Pengurus). Beliau juga aktif sebagai Ketua pada Pusat Unggulan Ipteks (PUI) Teknologi Komunikasi Pemasaran Produk Pertanian Indigenous (TK3PI) Sumatera Utara.

Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia di Sumatera Utara

Badaruddin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau sebuah proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat (UNDP, 1990). Aspek kehidupan dalam pembangunan manusia dapat dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standard hidup yang layak. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 1990-1995, pada tahun 1996-1998 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Setiap tahun, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami peningkatan, tetapi pembangunan manusia mengalami ketimpangan atau disparitas peningkatan pada setiap provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2020, indeks pembangunan manusia tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,77 dan terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 60,44 atau mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 60,84. Pada tahun 2014 indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara menduduki posisi ke-14 di Indonesia sebesar 71,77 (BPS, 2021). Selain ketimpangan pembangunan manusia di berbagai provinsi di Indonesia, saat ini masalah pembangunan manusia adalah pandemi Covid-19 yang melanda kehidupan masyarakat dunia. Dampak pandemi ini memperlambat perkembangan pembangunan manusia dan mengancam kesehatan atau usia hidup masyarakat, penurunan pendapatan, dan masalah pada aspek pendidikan.

Aspek pendidikan merupakan salah satu sektor yang merasakan dampak adanya pandemi Covid-19 ini. Hal ini ditandai dengan kegiatan pendidikan yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka, saat ini dilakukan dengan virtual dengan kendala pada akses jaringan, biaya internet yang mahal, dan tidak tersedianya media untuk belajar daring. Selain itu kesenjangan pendidikan di pedesaan dan perkotaan, yang meliputi ketersediaan fasilitas pendidikan, rendahnya akses sarana pendidikan, dan teknologi, tingginya angka putus sekolah dan sebagainya. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2021), angka putus sekolah pada seluruh jenjang pendidikan di Indonesia dari tahun 2017

hingga 2020 sebesar 646.117 siswa. Pada tahun 2017 hingga 2020, angka putus sekolah di Sumatera Utara juga termasuk salah satu tertinggi di Indonesia sebesar 7,95 atau sebesar 51.383 siswa pada seluruh jenjang pendidikan. Tingginya angka putus sekolah di Indonesia menjadi masalah dan hambatan dalam pembangunan manusia. Selain itu, masih kurang memadainya tenaga pendidikan untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), seperti Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat.

Menurut Sagala (2017), pendidikan merupakan modal membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Pendidikan menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh warga Indonesia untuk dapat menjadi insan yang terampil, mampu bersaing dan keluar dari garis kemiskinan. Realitas nyata wajah pendidikan Indonesia menjadi tantangan dan tanggung jawab bagi seluruh pihak daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat dilakukan dengan memaksimalkan dan meningkatkan segala program yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan standard hidup yang layak. Pemerintah daerah dan pusat telah berupaya menekan masalah kesenjangan pendidikan melalui pemberian bantuan pendidikan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah bagi masyarakat miskin, dan Bantuan Kuota Internet, dan sebagainya. Selain peran serta pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia, perusahaan juga dapat mengambil peran dalam pembangunan manusia melalui pelaksanaan program CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat sekitar. Program CSR dirasa mampu memberikan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan nasional. Berdasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Murni, dkk (2017), bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) mempunyai peranan dan implikasi dalam mendorong perubahan dan meningkatkan pembangunan masyarakat desa di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu.

Keberadaan CSR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 bagian ketiga yang menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Keberadaan CSR telah memberikan dampak dan kontribusi dalam pembangunan manusia di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saleh, dkk. (2018) bahwa keberadaan CSR PT. *Agincourt Resources* di Kecamatan Batang Toru Provinsi Sumatera Utara telah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan dan implementasi program CSR, perusahaan dan masyarakat sering mengalami hambatan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Raudhah, dkk. (2019), bahwa

pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara II di Kecamatan Tanjung Morawa, masih menemui kendala karena lemahnya kemampuan dan manajerial UKM untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar luar. CSR sangat penting dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat sekitar guna menghindari dan meredam konflik sosial. Selain itu, CSR juga mampu sebagai alat dalam upaya mengurangi masalah pembangunan atau pendidikan di Sumatera Utara yang masih relatif tinggi untuk kasus putus sekolah pada siswa miskin, guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Melalui tulisan ini mencoba memberikan gambaran dan alternatif solusi bagi peningkatan kualitas pembangunan manusia pada sektor pendidikan melalui pemanfaatan CSR di Sumatera Utara. Dengan asumsi bila pemanfaatan CSR mampu dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, maka kesejahteraan masyarakat dan masalah pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara akan dapat teratasi dan mampu memberikan pengaruh positif bagi pembangunan manusia.

2. Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas dalam tulisan ini adalah: Bagaimana dana CSR berkontribusi di bidang pendidikan di Sumatera Utara dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Kehadiran CSR tidak dapat dipandang sebelah mata dalam mempercepat pembangunan wilayah atau manusia di Indonesia. Keberadaan CSR tidak dapat dilepaskan dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang merumuskan salah satu konsep pendekatan pembangunan berkelanjutan yakni *triple bottom line* (*Profit – People – Planet*). Konsep *triple bottom line* adalah sebuah pendekatan pembangunan yang menginginkan adanya keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini dilakukan demi mengurangi angka kemiskinan dan perbaikan keadaan lingkungan hidup manusia.

Regulasi yang berkaitan dengan CSR masih relatif sedikit. Namun, Keberadaan CSR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 74 ayat 1, disebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan telah memberikan makna penting bahwa kehadirannya

diharapkan mampu memberikan hasil pada percepatan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR telah memberikan kontribusi dalam segala aspek pembangunan di Indonesia dan di Sumatera Utara. Berdasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, RR, dkk. (2021), bahwa CSR dari P.T. P.P. London Sumatera Indonesia, Tbk telah memberikan hasil pada aspek pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur pada masyarakat di Sumatera Utara. Keberhasilan yang sama juga ditemukan dalam penelitian oleh Pratama, dkk. (2018) yang menemukan bahwa program CSR P.T. Socfin Indonesia di Desa Bangun Bandar dan Desa Tanjung Maria, Kecamatan Dolok Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara telah memberikan hasil pada berbagai aspek, seperti perbaikan sarana ibadah, pendidikan, pengobatan gratis, layanan imunisasi, bantuan peralatan olahraga, perbaikan jalan desa, dan pelatihan usaha untuk masyarakat.

Keberhasilan dan dampak positif CSR bagi pembangunan di Sumatera Utara, memberikan sinyal bahwa program CSR mampu menjadi penopang dalam kemajuan pembangunan di Sumatera Utara, khususnya di bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan berkembangnya industri atau perusahaan berskala sedang dan besar yang ada di Sumatera Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2020), pada tahun 2018 tercatat sebanyak 1.256 perusahaan industri sedang dan besar yang ada di Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah dengan jumlah industri atau perusahaan terbesar di Sumatera Utara sebesar 444 perusahaan, disusul oleh Kota Medan dan Kabupaten Asahan.

Selain itu, CSR juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di Sumatera Utara. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh P.T. Kawasan Berikat Nusantara (2017), bahwa sejumlah perusahaan BUMN bersinergi dalam penyaluran dana sosial sebesar Rp. 10,2 Milliar untuk meningkatkan kualitas sarana fasilitas umum sosial bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Pemberian dana CSR menysasar beberapa fasilitas dan sarana publik, seperti sarana pendukung pariwisata, pelestarian alam, pendidikan, sarana ibadah dan kesehatan di Sumatera Utara.

Terlebih lagi, kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan sangat beraneka ragam dan menysasar seluruh aspek pembangunan yang mampu menekan masalah pembangunan dan mendorong pertumbuhan dan kualitas pembangunan manusia. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat, semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan peningkatan pembangunan manusia. Maka untuk itu, kehadiran program CSR ini, dirasa mampu sebagai penopang seluruh sektor pembangunan di Sumatera Utara.

4. Rencana Tindak Lanjut

CSR memberikan kontribusi pada berbagai bidang kehidupan masyarakat luas, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Masalah pendidikan di Sumatera Utara juga harus mendapat perhatian penting dalam pengembangan kualitas manusia. Tingginya kasus putus sekolah, rendahnya lama sekolah siswa, minimnya akses sarana pendidikan, tenaga pendidik yang belum memadai, dan sebagainya, merupakan masalah pendidikan yang sering terjadi di Sumatera Utara. Hal ini perlu adanya upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan berkualitas juga merupakan amanat dalam Pembukaan UUD 1945 sekaligus menjadi tujuan negara Indonesia.

Selain itu, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tertuang dalam pasal 31 Ayat 1 UUD 1945. Di samping itu, juga tertuang jelas pada pasal 28B Ayat 1 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Dalam upaya peningkatan pendidikan yang berkualitas diperlukan peranan perusahaan melalui CSR ke masyarakat sekitar.

Peranan CSR pada sektor pendidikan telah mampu meningkatkan pembangunan di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hasil penelitian Badaruddin, dkk. (2009) di Sumatera Utara menemukan bahwa implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan mencakup berbagai bidang kehidupan, antara lain di bidang perekonomian (pemberian bantuan modal usaha), di bidang pendidikan (beasiswa dan sarana pendidikan), bidang kesehatan (sunat massal, bantuan pengobatan), dan pembangunan lingkungan (penghijauan dan kebersihan). Berdasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra, Dwi Pasca, dkk (2018), bahwa implementasi CSR P.T. Pertamina Marketing Operating Region I – Terminal Bahan Bakar Minyak menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan bahwa revitalisasi meningkatkan minat belajar siswa serta keinginan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi melalui bantuan dana pendidikan. Hal yang sama juga ditemukan oleh Riswayanti, dkk (2019), bahwa kontribusi program CSR P.T. Sago Nauli di Kabupaten Mandailing Natal pada bidang pendidikan yaitu perbaikan sarana pendidikan dan penyediaan bus sekolah untuk masyarakat di Desa Sinunukan. Hasil penelitian Hidayati, RR. Dkk. (2021) bahwa P.T. London Sumatera juga memberikan bantuan beasiswa pendidikan sebagai bentuk perhatian terhadap anak karyawan yang berprestasi. PT. London Sumatera tidak membatasi berapa jumlah atau kuota penerima beasiswa ini setiap tahun. Kesempatan terbuka selebar-lebarnya untuk mendapatkan beasiswa ini, dan nilai besaran beasiswa yang diberikan juga berbeda setiap jenjang pendidikan.

Disamping itu, program CSR yang dibuat oleh perusahaan yang ada di Sumatera Utara juga melibatkan instansi pendidikan sebagai mitra kerjasama

dalam percepatan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun perusahaan-perusahaan yang menyalurkan CSR pada bidang pendidikan di Sumatera Utara yaitu: P.T Indonesia Asahan Aluminium, Bank Tabungan Negara, Bank Indonesia, P.T. Djarum, Tanoto Foundation, Bank Central Asia, dan lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut memberikan kegiatan CSR dalam bidang pendidikan yang beraneka ragam, seperti pemberian beasiswa kepada mahasiswa miskin, pembangunan sarana pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Pada tahun 2019, P.T. INALUM memberikan beasiswa dan pelatihan kepemimpinan kepada 100 mahasiswa yang ada di Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (INALUM, 2019). Pada Tahun 2021, Bank Indonesia Regional Sumatera Utara juga memberikan kuota 300 beasiswa kepada 75 mahasiswa USU, 75 mahasiswa UNIMED, 50 mahasiswa UMA, 50 mahasiswa UNPAB, dan 50 mahasiswa UINSU. Pemberian beasiswa ini telah dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2014. Selain itu, Bank Indonesia juga menyediakan infrastruktur perpustakaan untuk perguruan tinggi. Hal yang sama juga dilakukan oleh P.T. Bank Tabungan Negara dengan memberikan bantuan CSR melalui sarana dan prasarana kepada Universitas Sumatera Utara sebesar Rp. 1 Milliar (USU, 2021).

Kontribusi CSR oleh perusahaan pada bidang pendidikan juga mampu mempercepat tercapainya kemajuan *SDGs (Sustainable Development Goals)* yaitu pendidikan berkualitas untuk semua. Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mengedepankan partisipasi, kualitas, hasil pembelajaran, kualitas guru, infrastruktur, keselamatan dan kebersihan di sekolah, serta komitmen terhadap nilai-nilai kewarganegaraan. Pada umumnya program CSR pada bidang pendidikan di Sumatera Utara, telah berkontribusi pada perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah atau perguruan tinggi, penyediaan bus sekolah, pemberian beasiswa dan bantuan sosial kepada mahasiswa miskin yang berminat melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi.

Pada sisi lain, program CSR yang dibuat oleh perusahaan pada sektor pendidikan, belum memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas tenaga pendidik seperti guru atau dosen, dalam hal penguatan kapasitas atau peningkatan keahlian tenaga pendidik untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada siswa. Tenaga pendidik seperti guru atau dosen, dan siswa atau mahasiswa, saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain. Maka untuk itu, perlu adanya inovasi baru dalam program CSR bidang pendidikan di Sumatera Utara, yang mampu memberikan pelatihan, atau penguatan kapasitas kepada tenaga pendidik di sekolah atau perguruan tinggi. Selain itu, agar dapat memaksimalkan kontribusi CSR pada sektor pendidikan di Sumatera Utara dalam hal peningkatan kapasitas tenaga pendidik, perlu adanya keterlibatan pemerintah daerah, penyedia jasa pelatihan atau kerjasama dengan balai pelatihan, perusahaan, sekolah, guru dan masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan yang berkualitas. Tenaga pendidik yang berkualitas akan mampu mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia di Sumatera Utara.

5. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah dipaparkan pada bagian terdahulu maka ada beberapa hal yang dapat ditarik menjadi simpulan dalam tulisan ini, yaitu:

- a. Kontribusi CSR pada bidang pendidikan di Sumatera Utara telah memberikan hasil pada bertambahnya minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, adanya perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan pemberian beasiswa.
- b. Kontribusi CSR belum berperan maksimal dalam peningkatan dan penguatan kapasitas tenaga pendidik di Sumatera Utara khususnya daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Kabupaten Nias. Hal ini akan memperlambat tercapainya pembangunan manusia yang berkualitas.
- c. CSR pada bidang pendidikan di Sumatera Utara akan lebih optimal dan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, jika terdapat kolaborasi multipihak seperti pemerintah daerah, balai pelatihan, perusahaan dan sekolah dalam upaya pemberian pelatihan dan penguatan kapasitas kepada tenaga pendidik.

2. Saran

Sejalan dengan pembahasan dan simpulan yang sudah dipaparkan pada bagian terdahulu, maka ada dua hal yang dapat disarankan:

- a. Perlu adanya inovasi baru dalam program CSR oleh perusahaan yang ada di Sumatera Utara untuk sektor pendidikan, khususnya peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar mampu menghasilkan manusia yang berkualitas.
- b. Perlu adanya *pilot project* program CSR kolaborasi dengan berbagai pihak atau *stakeholders* dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia pada bidang pendidikan atau penopang pembangunan lainnya di Sumatera Utara.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. (2020). Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten Kota Unit Tahun 2015-2018
- Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2020.
- Badaruddin, Subhilhar, Ritha Dalimunthe. (2009). Model Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berbasis Modal Sosial (*Social Capital*) di Sumatera Utara (Studi Pada Tiga Korporat: BUMN, Swasta Nasional dan Swasta Asing). Laporan Penelitian Hibah Pasca. LP USU-Dirjen Dikti.

- Hidayati, R. R., Badaruddin, B., & Harahap, R. H. (2021). Faktor-Faktor Pendukung & Penghambat Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Membantu Kehidupan Masyarakat Sekitar Perkebunan. *PERSPEKTIF*, 10(1), 171-179.
- Indonesia Asahan Aluminium (2019). Indonesia Asahan Aluminium Berikan Beasiswa Sekaligus Pelatihan Kepemimpinan Bagi 100 Mahasiswa di akses melalui <https://inalum.id/id/read/inalum-berikan-beasiswa-sekaligus-pelatihan-kepemimpinan-bagi-100-mahasiswa>
- Kawasan Berikat Nusantara. (2017). BUMN Hadir di Sumatera Utara. Diakses melalui <http://kbn.co.id/article/bumn-hadir-di-sumatera-utara>
- Kemntrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2021). Statistik Pendidikan di akses melalui <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>
- Murni, S., Amin, M. J., & Fitriyah, N. (2017). Peranan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 3(1), 138-147.
- Pratama, B. J., Manumono, D., & Trismiaty, T. (2018). Implementasi Corporate Social Rresponsibility (CSR) Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di PT. SOCFIN. *JURNAL MASEPI*, 3(1).
- Raudhah, PS, S. A. R., & Kurniasari, E. (2019). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(1), 175-184.
- Putra, P. D., Nasir, M., & Rozaini, N. (2018). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Kesehatan di Kota Gunung Sitoli: Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) Marketing Operating Region (MOR) 1–Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Gunung Sitoli. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(3), 776-786.
- Riswayanti, S., Helmi, H., & Mahdi, M. (2019). Analisis Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit Dalam Pengembangan Masyarakat Di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (Studi Kasus : PT Sago Nauli di Desa Sinunukan, Kec.Sinunukan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara). *JOSETA: Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture*, 1(2). doi: <https://doi.org/10.25077/joseta.v1i2.141>
- Sagala, Syaiful. (2017). Human Capital – Membangun Modal Sumber Daya Manusia Berakarakter Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas. Depok: Kencana
- Saleh, A., & Dalimunth, A. H. (2018). Model of Corporate Social Responsibility (CSR) Gold Mining for Community Empowerment Batangtoru District of South Tapanuli in North Sumatra Province. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 1(3), 144-152.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Badaruddin, M.Si., lahir di Serdang Bedagai (Pemekaran Deli Serdang) pada tanggal 25 Mei 1968. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana pada FISIP Universitas Sumatera Utara tahun 1991, mendapat gelar Magister 1998 dan Doktor pada tahun 2003 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Bidang Ilmu yang ditekuni penulis adalah Sosiologi. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi FISIP USU (1993-1995), Ketua Departemen Sosiologi FISIP USU (2005-2010), Dekan FISIP USU (2010-2016), dan saat ini dipercaya sebagai Ketua Prodi S-2 dan S-3 Studi Pembangunan FISIP USU (2017-2022). Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian dan menghasilkan karya tulis ilmiah yang dimuat di jurnal nasional maupun jurnal internasional dengan lingkup kajian yang terkait dengan: Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Modal Sosial, Kearifan Lokal, *Corporate Social Responsibility*, Pembangunan Pedesaan, Komunitas Nelayan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Konflik Sosial. Penulis juga telah menerbitkan buku (sebagai tim editor dan penulis), diantaranya pada buku: Wacana Budaya Untuk Pembangunan: Menoreh Kearifan Lokal (2004; Nasionalisme dan Isu-Isu Lokal (2005); dan buku Miskin Kota: Fenomena Yang Tak Kunjung Terselesaikan (2006). Karya Ilmiah berupa artikel pada Jurnal Internasional bereputasi antara lain: 1) Village Governance with Implementation of Law Number 6 of 2014 on the Village and Village Administration, 2017 (Q4); 2) Proposing a Model for Law Number 6 of 2014: Evidence from North Sumatera, 2017 (Q4); 3) Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera, 2020 (Q2); 4) Potential of Social Capital for Empowerment of Village Communities, 2020 (Q4); dan 5) A study of women's potential and empowerment for accelerating village development in Serdang Bedagai district, North Sumatera Province, 2020 (Q2) sebagai Corresponding Author.

Penghargaan yang pernah diperoleh penulis diantaranya sebagai Penyaji Terbaik hasil penelitian Hibah Bersaing oleh Kemendikbud pada Tahun 2006. Saat ini penulis juga aktif sebagai Reviewer Nasional DRPM Dikti dan LP USU. Pidato Pengukuhan Guru Besar Penulis berjudul: Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Modal Sosial: Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia.

Pembangunan Manusia di Sumatera Utara: Strategi Masalah Gizi di Provinsi Sumatera Utara

Dina Keumala Sari

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Berbagai permasalahan gizi masih ditemukan di Indonesia dan khususnya Provinsi Sumatera Utara, termasuk masalah stunting, malnutrisi, dan penyakit tidak menular seperti obesitas, penyakit jantung coroner, hipertensi, diabetes mellitus tipe 2. Hal ini meningkatkan kesadaran pemerintah untuk mengentaskan seluruh permasalahan gizi, namun persoalan ini masih ada dan persoalan gizi telah dilakukan berbagai jenis program dan tindakan.

Walaupun demikian, perbaikan gizi yang telah dilakukan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan merupakan pengembangan dan layanan sector kesehatan. Program gizi di berbagai wilayah disebabkan oleh asupan makanan yang tidak memadai dan juga pola konsumsi makanan yang tidak seimbang. Pola asupan makanan ini yang menjadi factor kekurangan gizi dan juga kelebihan gizi yang menyebabkan penyakit berkembang.

Penyakit tidak menular memberikan dampak negative pada system kesehatan termasuk didalamnya adalah gizi buruk protein-energi dan tingginya prevalensi bayi lahir berat badan lahir rendah, dan defisiensi mikronutrien, termasuk gangguan defisiensi yodium, defisiensi vitamin A, anemia defisiensi besi pada anak kecil dan wanita usia subur dan kalsium, seng dan kekurangan vitamin D. malnutrisi menjadi permasalahan gizi utama

Malnutrisi tetap menjadi masalah kesehatan utama terutama di Provinsi Sumatera Utara, malnutrisi bagaikan pedang bermata dua ini disebabkan oleh asupan makanan berisiko ditemukan tinggi dan menjadi penyebab keadaan malnutrisi tersebut. Asupan makanan tersebut antara lain asupan rendah buah dan sayur, kebiasaan konsumsi makanan yang mengandung bumbu penyedap, kebiasaan makanan manis, kebiasaan konsumsi makanan daging/ayam/ikan olahan dengan pengawet, kebiasaan konsumsi makanan yang dibakar, kebiasaan konsumsi makanan berlemak/berkolesterol/gorengan, kebiasaan konsumsi makanan asin, kebiasaan konsumsi soft drink atau minuman berkarbonasi, kebiasaan konsumsi minuman berenergi, dan kebiasaan konsumsi minuman manis. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 dilaporkan bahwa proporsi tertinggi kebiasaan lebih dari satu kali perhari dalam mengkonsumsi bahan makanan berisiko tinggi adalah kebiasaan konsumsi makanan yang mengandung bumbu penyedap dan kebiasaan makanan manis.

Proporsi yang dilaporkan untuk kebiasaan konsumsi makanan yang mengandung bumbu penyedap dengan lebih dari satu kali per hari adalah 45,6%, dibandingkan dengan 1-6x per minggu (15,54%) dan kurang dari sama dengan tiga kali per bulan (38,86%). Sedangkan untuk kebiasaan konsumsi makanan manis, proporsi yang dilaporkan adalah 58,51% untuk kebiasaan lebih dari satu kali per hari sedangkan untuk dengan 1-6x per minggu (33,02%) dan kurang dari sama dengan tiga kali per bulan (8,46%).

Table 1. Proporsi Konsumsi Buah/Sayur Per Hari dalam Seminggu Penduduk Umur \geq 5 Tahun menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Riskedas 2018

Kabupaten/Kota	Porsi makan buah/sayur per hari dalam seminggu ¹				N Tertimbang
	Tidak konsumsi	1 - 2 Porsi	3 - 4 Porsi	\geq 5 Porsi	
Nias	41,48	44,69	7,49	6,34	596
Mandailing Natal	15,48	81,79	2,38	0,36	1.907
Tapanuli Selatan	16,47	74,97	6,32	2,24	1.221
Tapanuli Tengah	21,20	71,51	5,24	2,05	1.580
Tapanuli Utara	21,80	70,03	7,11	1,07	1.299
Toba Samosir	8,72	62,82	22,91	5,55	810
Labuhan Batu	11,22	73,69	13,24	1,86	2.097
Asahan	8,70	66,86	21,70	2,74	3.159
Simalungun	4,18	81,69	13,06	1,07	3.794
Dairi	3,93	73,23	17,48	5,35	1.221
Karo	4,54	47,21	39,40	8,85	1.780
Deli Serdang	6,35	59,09	27,41	7,15	9.388
Langkat	8,29	71,25	18,71	1,75	4.541
Nias Selatan	40,61	56,97	2,19	0,23	1.384
Humbang Hasundutan	5,53	75,77	16,80	1,89	805
Pakpak Bharat	3,54	79,46	12,84	4,16	202
Samosir	12,93	78,91	6,76	1,39	548
Serdang Bedagai	13,53	58,78	22,41	5,27	2.688
Batu Bara	7,46	72,24	15,42	4,88	1.792
Padang Lawas Utara	5,57	78,81	15,39	0,23	1.128
Padang Lawas	6,45	85,14	8,07	0,33	1.156
Labuhan Batu Selatan	10,78	75,05	10,28	3,88	1.417
Labuhan Batu Utara	8,16	78,67	11,98	1,18	1.555
Nias Utara	24,44	74,57	0,99	6,34	596
Nias Barat	20,01	63,49	12,39	0,36	1.907
Kota Sibolga	4,72	38,26	31,30	2,24	1.221
Kota Tanjung Balai	8,35	70,14	18,02	2,05	1.580
Kota Pematang Siantar	6,93	51,30	34,87	1,07	1.299
Kota Tebing Tinggi	3,25	44,09	39,97	5,55	810
Kota Medan	10,20	67,04	17,10	1,86	2.097
Kota Binjai	7,15	84,10	7,83	2,74	3.159
Kota Padangsidempuan	11,70	78,16	9,61	1,07	3.794
Kota Gunungsitoli	13,94	65,50	15,22	5,35	1.221
SUMATERA UTARA	10,36	68,02	17,53	8,85	1.780

¹ Rata-rata porsi buah/ sayur yang dikonsumsi per hari

Kebiasaan makan sayur dan buah juga menjadi permasalahan yang penting dengan melihat semakin tingginya prevalensi obesitas yang akan menyebabkan penyakit jantung koroner, diabetes melitus tipe 2 dan gangguan metabolisme lainnya. Oleh karena itu penyakit tidak menular yang terkait masalah gizi menjadi ancaman utama dalam pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara (Tabel 1). Asumsi buah dan sayur sangat ditekankan sesuai dengan yang dianjurkan oleh World Health Organization (WHO) yang menetapkan konsumsi buah dan sayur yang dapat menghindarkan seseorang dari penyakit tidak menular tersebut terutama penyakit jantung koroner adalah 5-6 porsi buah dan sayur per hari. Asumsi buah-buahan sebanyak 3-5 porsi dan asumsi sayur-sayuran sebanyak 4-6 porsi perhari dan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan untuk buah-buahan sebanyak 50-60 gram per porsi dan sayuran sebanyak 100 gram per porsi makanan.

Table 2. Proporsi Konsumsi Buah/Sayur Per Hari dalam Seminggu Penduduk Umur ≥ 5 Tahun menurut Karakteristik di Provinsi Sumatera Utara, Riskesdas 2018

Karakteristik	Porsi Makan Buah/Sayur Per Hari Dalam Seminggu ¹				N Tertimbang
	Tidak konsumsi	1 - 2 Porsi	3 - 4 Porsi	≥ 5 Porsi	
Kelompok Umur (Tahun)					
5 - 9	41,48	54,12	14,94	6,34	7.662
10 - 14	15,48	85,21	4,20	0,36	7.123
15-19	16,47	80,47	9,75	2,24	6.479
20-24	21,20	76,79	8,14	2,05	5.884
25-29	21,80	76,00	10,12	1,07	5.432
30-34	8,72	67,49	26,96	5,55	5.084
35-39	11,22	77,50	16,94	1,86	4.898
40-44	8,70	72,63	27,74	2,74	4.433
45-49	4,18	85,32	17,03	1,07	4.044
50-54	3,93	77,07	20,95	5,35	3.545
55-59	4,54	52,88	45,72	8,85	2.945
60-64	6,35	64,29	32,16	7,15	2.218
65 +	8,29	76,04	24,62	1,75	3.103
Jenis Kelamin					
Laki-laki	11,05	69,76	17,81	3,96	31.275
Perempuan	9,68	69,15	19,69	4,23	31.574
Pendidikan					
Tidak sekolah	20,53	68,10	13,78	2,46	3.223
Tidak tamat SD	15,96	70,72	13,70	2,65	12.125
Tamat SD	10,32	72,74	16,79	3,22	11.610
Tamat SLTP	9,06	70,74	19,94	3,35	11.336
Tamat SLTA	6,60	68,57	23,03	5,55	18.735
Tamat D1/D2/D3 PT	3,37	65,74	29,07	7,97	4.290
Pekerjaan					
Tidak Bekerja	8,84	69,20	20,53	4,88	15.022
Sekolah	13,37	71,24	15,92	2,83	9.476
PNS/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD	2,13	64,69	30,84	10,22	1.600
Pegawai swasta	4,54	70,59	27,03	5,57	3.013
Wiraswasta	6,50	70,19	21,96	5,34	9.013
Petani/ Buruh tani	10,92	73,83	15,62	2,65	9.615
Nelayan	15,68	68,09	29,03	2,51	532
Buruh/Sopir/Pembantu Rata	7,52	71,51	23,64	3,45	4.117
Lainnya	5,52	65,08	33,01	6,00	2.124
Tempat tinggal					
Perkotaan	8,46	67,75	22,34	5,33	33.432
Perdesaan	12,52	72,23	15,43	2,68	29.417

¹ Rata-rata porsi buah/ sayur yang dikonsumsi per hari

Beberapa faktor yang terkait seperti jenis kelamin, pendidikan terakhir, lokasi tempat tinggal menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa kelompok umur 55-59 adalah proporsi tertinggi yang mengkonsumsi lebih dari sama dengan 5 porsi buah dan sayur per hari dalam seminggu, diikuti oleh jenis kelamin perempuan, pendidikan tamat D1/D2/D3/Perguruan Tinggi, pekerjaan sebagai PNS/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD, dan tinggal di perkotaan (Tabel 2).

Strategi pemahaman masalah gizi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah gizi di Provinsi Sumatera Utara masih perlu dibahas sebagai usaha dalam membantu mengatasi permasalahan gizi. Untuk itu perlu dibahas strategi yang perlu diambil guna mengurangi insidensi berbagai permasalahan gizi di Provinsi Sumatera Utara agar dapat membangun sumber daya manusia yang sehat.

2. Masalah

Permasalahan yang dapat diambil dari peningkatan pemberdayaan pembangunan manusia di Sumatera Utara dalam hal strategi sosialisasi ini adalah

- Masih ditemukan kasus malnutrisi.
- Kasus stunting yang masih ditemukan.
- Prevalensi penyakit ti
- Program gizi yang tidak berjalan optimal.
- Kurangnya informasi yang ilmiah kepada masyarakat.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah ini harus melalui strategi yang tepat yang dapat mempengaruhi siklus hidup keluarga, selain itu harus berperan seluruh pihak yaitu masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Posyandu dan puskesmas sebagai ujung tombak dalam melakukan deteksi dini berbagai masalah kesehatan masyarakat serta merupakan pelayanan terdepan di masyarakat, menjadi vital dalam pencegahan berbagai kasus masalah gizi saat ini.

Pemahaman tentang gizi adalah suatu kebutuhan dasar bagi setiap orang sama halnya dengan pemahaman kesehatan, namun keterkaitan dalam peningkatan kesehatan perlu diamati dari empat factor yaitu gaya hidup, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan genetic. Keempat factor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang. Untuk itu perlu dipikirkan pemecahan masalah yang mencakup keempat factor determinan tersebut.

4. Rencana Tindak Lanjut

Strategi pemecahan masalah dalam hal ini ada beberapa usulan yaitu:

Pendekatan 1:

- Memperkuat multisektoral untuk menjamin ketersediaan bahan makanan sumber yang sehat, bergizi, dan berkelanjutan.
- Meningkatkan komitmen seluruh pihak terhadap program gizi nasional.
- Mempromosikan pengembangan kebijakan pangan dan gizi nasional termasuk pencegahan malnutrisi dalam strategi pembangunan.
- Penguatan kapasitas teknis dan manajerial untuk program gizi dalam bidang kesehatan.
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pencegahan dan pengendalian penyakit terkait permasalahan gizi.
- Melibatkan semua pemangku kebijakan baik nasional dan internasional yang dapat berkontribusi mengatasi penyakit terkait gizi.

Pendekatan 2:

- Mempromosikan dan melindungi kesejahteraan gizi pada kelompok perempuan produktif dan anak-anak dalam mendukung 1000 hari pertama kehidupan (HPK).
- Memastikan gizi yang tepat seimbang sepanjang siklus hidup untuk semua kelompok umur.
- Mempromosikan nutrisi optimal pada 1000 HPK lengkap dengan suplementasi mikronutrien bagi ibu yang membutuhkan dan memberikan konseling.
- Mempromosikan dan mendukung program pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan makanan pendamping ASI pada bayi dan balita.
- Mempromosikan pengembangan gizi pra sekolah dan sekolah, termasuk pendirian sekolah ramah gizi, pendidikan gizi dengan kurikulum berbasis kompetensi, dan mendorong sekolah untuk meningkatkan aktivitas fisik.
- Menetapkan skema distribusi buah dan sayur yang tepat untuk seluruh masyarakat.
- Mempromosikan konseling gizi melalui puskesmas dan klinik untuk mengontrol obesitas dan malnutrisi selama masa kanak-kanak.
- Mempromosikan gizi yang tepat untuk kelompok usia yang rentan masalah gizi yaitu remaja, wanita, kelompok berkebutuhan khusus termasuk penyandang cacat fisik dan cacat mental dan lanjut usia.

Pendekatan 3:

- Mempromosikan makanan yang sehat, harga terjangkau, dan bergizi.
- Mempromosikan pola konsumsi makanan sehat untuk memastikan keragaman dalam pola makan, dan bergizi.

- Mempromosikan pemberantasan infeksi cacing yang berguna untuk menunjang perbaikan gizi.
- Meningkatkan program pendidikan dan suplementasi, terutama untuk anak-anak dan perempuan.
- Mendorong strategi berbasis pangan untuk mengatasi defisiensi mikronutrien, seperti biofortifikasi dan fortifikasi pangan.

Pendekatan 4:

- Memberikan informasi dan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat.
- Menetapkan pedoman diet berbasis pangan nasional dan memantau pelaksanaannya.
- Mempromosikan pengetahuan gizi dan sikap serta praktik pengasuh yang tepat terhadap makanan, kebiasaan sosial dan pola makan, perawatan keluarga/anak dan praktik pemberian makan serta rumah tangga.
- Mempromosikan kebersihan diri dan keluarga.
- Memperkenalkan skema pelabelan nutrisi yang mendukung pilihan sehat di titik pembelian.
- Meningkatkan kesadaran tentang hubungan antara zat gizi dan makanan dan air yang aman.

Pendekatan 5:

- Penguatan kebijakan nasional gizi, aktivitas fisik dan obesitas.
- Meningkatkan aktivitas fisik di sekolah.
- Mendukung aktivitas fisik melalui kebijakan transportasi, meningkatkan sumber zat gizi dan program aktivitas fisik, dan memastikan tersedianya infrastruktur yang memadai untuk aktivitas fisik dan hambatan untuk mencapai komunitas yang aktif secara fisik dihilangkan.
- Mempromosikan diet sehat.
- Mempromosikan makanan sehat di rantai restoran dan kantin sekolah.

Pendekatan 6:

- Meningkatkan layanan gizi dan pengembangan kapasitas di sektor kesehatan, termasuk situasi darurat dan dukungan kepada kelompok rentan.
- Melibatkan dan mendidik perawat kesehatan primer dan petugas kesehatan lainnya dalam penilaian gizi dan pemberian penyuluhan tentang pola makan, keamanan pangan dan aktivitas fisik, selain perlindungan, promosi dan dukungan pemberian ASI dan makanan pendamping ASI, serta mempromosikan penggunaan standar pertumbuhan anak WHO, dan nutrisi rumah sakit.
- Meningkatkan standar pelayanan pencegahan, diagnosis dan pengobatan penyakit terkait gizi melalui penyelenggaraan pelayanan

gizi rawat jalan dan rawat inap yang efisien, dengancakupkan penduduk yang memadai.

- Meningkatkan perawatan dan dukungan nutrisi dalam situasi darurat dan dalam kondisikrisis kemanusiaan.

Pendekatan 7:

- Memperkuat keamanan pangan
- Memperbarui dan menerapkan undang-undang dan peraturan nasional untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dan sesuai standar nasional dan internasional.
- Melakukan kampanye kesadaran untuk mendidik masyarakat tentang praktik mengolah makanan yang aman.
- Menegakkan undang-undang keamanan pangan untuk mencegah penyakit bawaan makanan di seluruh rantai pasokan makanan.
- Pemantauan keamanan air dan sanitasi melalui perluasan pengembangan keamanan airdirencanakan, untuk mengurangi kejadian

5. Kesimpulan dan Saran

Malnutrisi tetap menjadi masalah kesehatan utama terutama di Provinsi Sumatera Utara, malnutrisi bagaikan pedang bermata dua ini disebabkan oleh asupan makanan berisiko ditemukan tinggi dan menjadi penyebab keadaan malnutrisi tersebut. Strategi pemahaman masalah gizi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah gizi di Provinsi Sumatera Utara masih perlu dibahas sebagai usaha dalam membantu mengatasi permasalahan gizi. Berbagai strategi dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan permasalahan untuk menemukan penyelesaian bersama kerjasama berbagai macam pihak.

Daftar Pustaka

Balitbangkes (2019) Riset Kesehatan Dasar 2018: Laporan Provinsi Sumatera Utara. Lembaga Penerbit Nadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Diunduh:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbxby_qc7xAhWLSH0KHTq1DUQQFjAAegQIBRAD&url=http%3A%2F%2Fwww.pusat3.litbang.kemkes.go.id%2Fdwn.php%3Ffile%3DLAPORAN%2520RISKESDAS%2520SUMUT%25202018.pdf&usg=AOvVaw0rHuMGOU-ODg31Mlyptyvp.

European Commisions (2020) . Strategy on Nutrition, overweight, and obesity-related health issue diunduh:

https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/strategy_en.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2019) Hasil utama riskesdas 2018. Diunduh:
https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018_1274.pdf.

World Health Organization (2020). Regional Strategy on Nutrition. Diunduh:
<http://www.emro.who.int/nutrition/nutrition-infocus/in-focus.html>

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Dina Keumala Sari, M. Gizi, SpGK adalah Staf Pengajar Departemen Ilmu Gizi dan Program Studi Magister Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 1973. Lulus sebagai Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter sebagai dokter pada tahun 1998 di Universitas Sumatera Utara. Melanjutkan Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2007. Selanjutnya lulus program Doktorat (S3) di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013. Prof. Dr. dr. Dina Keumala Sari, M. Gizi, SpGK aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus penelitian pada vitamin D dan gangguan nutrisi penyakit tropis lainnya. Aktif dalam menulis buku dan menghasilkan beberapa produk paten, juga dalam publikasi artikel dalam jurnal nasional dan internasional.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Memasuki Industri Pertanian 4.0 di Provinsi Sumatra Utara

Elisa Julianti

Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara

1. Latar Belakang

Sumatra Utara adalah salah satu provinsi yang memiliki potensi besar di bidang pertanian yang didominasi dengan perkebunan sebesar 2.946.512 Ha atau 41% dari luas lahan yang ada. Beberapa komoditi yang dihasilkan seperti sawit, kopi, dan coklat merupakan komoditi ekspor yang besar kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data tahun 2020 pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan contributor utama bagi PDRB di Sumatra Utara yaitu sebesar 21,33% dari total PDRB [1]. Secara nasional sektor pertanian menjadi penyedia pangan bagi lebih dari 250 juta penduduk Indonesia, penyedia pakan untuk ternak, bioenergi, dan sebagai sumber bahan baku industri baik kecil maupun besar. Sektor pertanian juga paling banyak menyerap jumlah tenaga kerja, sebagai sumber utama pendapatan bagi sebagian besar masyarakat di pedesaan, serta berperan dalam menurunkan delapan juta ton emisi gas rumah kaca^[2,3]. Pembangunan di sektor pertanian bertujuan untuk mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern serta menciptakan ketahanan pangan secara nasional. Hal ini dituangkan dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pencapaian tujuan ini harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan sektor pertanian saat ini tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Saat ini dunia sudah masuk ke era revolusi industri 4.0 hampir di semua sektor termasuk sektor pertanian. Penggunaan mesin-mesinotomasi yang terkontrol seperti teknologi robotik dan sensor, teknologi siber, *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT), serta internet yang menghubungkan mesin dengan manusia sehingga pekerjaan dapat dikendalikan tanpa terbatas waktu dan jarak. Implementasi industri pertanian 4.0 termasuk dalam hal pengelolaan irigasi, lahan, penggunaan pupuk dan pestisida, pengembangan varietas baru, teknologi pascapanen, sampai distribusi dan pemasaran diharapkan akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dari usaha pertanian. Penerapan mekanisasi pertanian dapat menurunkan *input* biaya sehingga akan diperoleh keuntungan yang lebih besar. Teknologi-teknologi masa depan yang saat ini dikembangkan seperti bioinformatika, *smart farming*, energi terbarukan, *smart materials*, *biorefinery* dan *biofuels*, teknologi gen,

biologisintetis, transisi protein, desain pangan, akuakultur, *verticalagriculture*, teknologi konservasi, teknologi transportasi, dan modifikasi cuaca. Oleh karena itu, sektor pertanian di Sumatra Utara juga harus mampu beradaptasi untuk dapat bersaing dan mengikuti perkembangan yang akan terjadi di masa depan.

Di samping itu, era globalisasi yang melanda dunia berdampak pada terbentuknya pasar bebas, yang menyebabkan bebasnya aliran masuk barang dari dan keluar negara termasuk juga bebasnya aliran tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan terjadinya persaingan dalam bidang perdagangan termasuk perdagangan komoditi pertanian menjadi sangat ketat. Peningkatan kualitas komoditi pertanian lokal menjadi suatu keharusan untuk dapat bersaing, dan untuk itu diperlukan kualitas dan kompetensi SDM yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Tulisan ini akan membahas tentang permasalahan di dalam pengembangan SDM pertanian serta strategi pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut dalam rangka menghadapi industry pertanian 4.0.

2. Masalah

Peran sektor pertanian sebagai penyedia pangan serta mewujudkan ketahanan pangan di Sumatra Utara tidak terlepas dari kualitas SDM di bidang pertanian. Tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 35,43% dari total tenaga kerja yang ada di Sumatera Utara, dan menempati urutan kedua terbesar setelah sector jasa^[1]. Akan tetapi saat ini permasalahan utama SDM pertanian adalah rendahnya kemampuan SDM pertanian dalam memanfaatkan teknologi maju, menurunnya minat generasi muda terjun di bidang pertanian, serta keterbatasan tenaga penyuluh lapangan yang dapat mengedukasi petani. Permasalahan ini juga diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan petani, latar belakang Pendidikan yang bukan pendidikan pertanian, serta banyaknya petani yang sudah berusia lanjut. SDM yang ada hanya bekerja berdasarkan pengalaman dan kebiasaan sehingga sulit membuat inovasi-inovasi yang baru.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah SDM pertanian 4.0 di Provinsi Sumatra Utara adalah melalui:

- Peningkatan kompetensi SDM penyuluh pertanian
- Penyuluhan pelatihan dan pendidikan bagi petani
- Melibatkan generasi milenial sebagai SDM pertanian
- Peran perguruan tinggi dalam menciptakan SDM pertanian 4.0 yang tangguh, mandiri, professional dan berdaya saing global.

Strategi ini mutlak dilakukan untuk mewujudkan perubahan-perubahan yang positif. Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan bagi SDM pertanian

memerlukan wadah dan fasilitas berbentuk pusat-pusat penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

Penyuluhan, Pelatihan dan Pendidikan Bagi Petani

Berdasarkan data BPS^[1], tingkat pendidikan SDM yang bekerja pada sector pertanian di Sumatra Utara paling banyak pada jenjang sekolah dasar (Tabel 1), hanya 2,80% yang mengenyam tingkat pendidikan tinggi. Hal ini tentu saja mempengaruhi kualitas produk pertanian yang di hasilkan. Inovasi teknologi yang berorientasi pada efisiensi proses produksi dan peningkatan kualitas hasil saat ini lebih didominasi dengan teknologi maju berbasis...Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pertanian yang adaptif terhadap perkembangan industry pertanian 4.0. dapat dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Kegiatan ini perlu didukung dengan fasilitas ruang dan tempat, serta fasilitas prasarana lainnya termasuk internet.

Tabel 1. Tingkat pendidikanSDMPertanian di Provinsi Sumatra Utara [1]

No.	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	Sekolah Dasar	42,32
2	Sekolah Menengah Pertama	24,67
3	Sekolah Menengah Atas	30,21
4	Perguruan Tinggi	2,80

Peningkatan Kompetensi SDM Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian merupakan fasilitator yang membantu petani di dalam kegiatan pertaniannya. Seorang penyuluh pertanian harus memiliki kemampuan untuk membantu petani dan memotivasi petani di dalam kegiatan bertani, memahami aspirasi petani, serta mampu memberikan dukungan dan fasilitas kepada petani^[4]. Penyuluh pertanian juga harus dapat memberdayakan petani sehingga petani mampu merencanakan, menentukan program hingga mengontrol proses usaha taninya^[5].

Pembangunan SDM pertanian yang memiliki kompetensi di bidang pertanian dan berkualitas serta adaptif terhadap perkembangan teknologi industri 4.0 membutuhkan penyuluh pertanian yang profesional, inovatif, kreatif dan memiliki wawasan global. Penyuluh pertanian dibutuhkan untuk melakukan tugas pendampingan dan konsultasi bagi petani dan pelaku usaha tani dalam melakukan usaha taninya. Adopsi teknologi industri 4.0 di bidang pertanian akan lebih mudah jika penyuluh mampu memberikan pemahaman kepada para petani melalui penyuluhan. Penyuluhan pertanian merupakan sistem pendidikan nonformal yang diberikan kepada pelaku usaha tani dan keluarganya sehingga mereka dapat mengubah perilaku hidupnya untuk bertani yang lebih baik (*better farming*), melakukan kegiatan usaha tani yang lebih baik (*better business*), hidup yang lebih sejahtera (*better living*) dan kehidupan masyarakatnya juga lebih baik (*better community*) serta lingkungan yang terjaga dengan baik (*better environment*)^[6].

Penyuluh hanya bisa menjadi fasilitator dan motivator yang ideal serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya jika penyuluh tersebut memiliki kompetensi yang baik. Saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi teknologi informasi di bidang pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh petani, seperti industri penyebaran benih dengan memanfaatkan *drone*, pengendalian traktor dengan *remote control* dan satelit, mengamati dan mengawasi mutu produk dengan *Near Infra Red Spectroscopy* (NIRS) sehingga dapat dilakukan dari jarak jauh, serta pemanfaatan *e-commerce* (penjualan secara online melalui *market place*) untuk pemasaran hasil pertanian. Tetapi informasi dan pengetahuan tentang hal ini di tingkat petani masih sangat rendah, akibatnya hanya segelintir petani yang dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertaniannya. Seorang penyuluh dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi dari teknologi sederhana (teknologi tepat guna) hingga teknologi maju yang adaptif terhadap perkembangan industri 4.0. Dalam menghadapi perubahan era revolusi 4.0 dan perdagangan bebas, seorang penyuluh pertanian dituntut tidak hanya mampu di bidang pertanian saja, tetapi harus mampu memahami dan menguasai teknologi komunikasi dan informasi. Kemampuan ini harus dapat ditulkannya kepelaku usaha tani.

Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan formal diperlukan bagi seorang penyuluh pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, kemampuan di bidangnya dan juga kemampuan berfikir. Tingkat Pendidikan formal bagi seorang penyuluh pertanian dapat disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya. Pelatihan bagi seorang penyuluh pertanian bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan mengubah sikap. Bentuk-bentuk kegiatan pelatihan yang dapat diberikan adalah pelatihan klasikal (tatap muka di dalam kelas) dan nonklasikal (kegiatan pelatihan yang dilakukan di alam bebas). Pelatihan klasikal dapat diberikan dalam bentuk seminar, *workshop*, pelatihan, lokakarya dan sosialisasi. Pelatihan nonklasikal diberikan dalam bentuk *inhouse training* (pelatihan di tempat kerja), *outbond*, studi banding, magang, belajar melalui sistem jarak jauh (daring), dan belajar secara mandiri dengan membaca buku. Seorang penyuluh pertanian harus dapat melakukan hal ini untuk dapat menjadi seorang penyuluh pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing.

Penyuluh pertanian juga harus memiliki jiwa sebagai seorang wirausaha (*entrepreneur*) yang memiliki mimpi besar, bekerja secara cepat dan cerdas, menyenangkan tantangan, bekerja keras, disiplin waktu, dan tangguh. Penyuluh harus memiliki data potensi wilayah binaannya termasuk data SDM, SDA, dan SDE, serta berperan aktif dalam penerapan teknologi melalui kunjungan lapangan, pertemuan koordinasi dengan petani, pembuatan *demplot* dan *demfarm*, dan melakukan kaji terap untuk inovasi teknologi yang baru.

Peran Generasi Milenial

Generasi milenial merupakan generasi muda yang menjadi penentu keberhasilan pertanian di Sumatera Utara pada masa yang akan datang. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara^[1], terdapat 41,62% penduduk dengan usia 15-40 tahun yang dapat dikategorikan sebagai generasi milenial. Di sisi lain jumlah pengangguran dengan usia < 40 tahun mencapai 5,57% dari 6,90% jumlah pengangguran <40 tahun di Sumatera Utara. Data ini menunjukkan bahwa sudah saatnya kaum milenial ini dilibatkan di dalam kegiatan pertanian dan menjadi estafet petani di masa depan. Generasi milenial sudah memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi yang baik. Mereka juga memiliki inovasi dan gagasan-gagasan kreatif yang bermanfaat bagi kelangsungan usaha pertanian. Pertanian 4.0 yang memanfaatkan sistem informasi teknologi bukan merupakan hal yang sulit bagi generasi milenial. Generasi milenial akan mudah memanfaatkan berbagai instrument dan teknologi yang memungkinkan mereka bekerja secara sinergis, cepat, akurat dan cerdas. Generasi milenial diharapkan dapat menjadi penggerak sistem pertanian 4.0 dan tulang punggung pertanian di Sumatera Utara, karena mereka merupakan SDM yang siap mengikuti perubahan paradigma berfikir di era industri 4.0 saat ini.

Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan wadah untuk mempersiapkan SDM yang dapat mengikuti perubahan dunia global yang serba cepat dan dinamis. Perguruan tinggi dituntut untuk peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan ipteks tersebut. Sistem pembelajaran harus dibuat lebih inovatif dan kurikulum disesuaikan agar dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal teknologi informasi, serta menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Perguruan tinggi harus menyiapkan lulusan-lulusannya dengan program penguatan kapasitas (*capacity building*) melalui pelatihan atau *workshop*, misalnya pelatihan kepemimpinan (*leadership*), *career development* and assessment, menjalin *networking*, serta program-program kreatif lainnya.

4. Rencana Tindak Lanjut

Pertanian 4.0 merupakan peluang bagi peningkatan daya saing SDM bidang pertanian dalam mewujudkan SDM yang mandiri, berdaya saing dan profesional. Dalam rangka mencapai hal ini maka penguasaan terhadap teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kebutuhan isu strategis 4.0 harus dipenuhi. Penguasaan teknologi informasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan nilai tambah komoditi.

Penyuluhan, Pelatihan dan Pendidikan Bagi Petani

Pembinaan SDM pertanian melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan perlu dilakukan dalam rangka mengejar ketertinggalan Indonesia khususnya Sumatra Utara dalam hal mutu SDM. Hal ini merupakan Langkah antisipatif dalam menghadapi masuknya SDM asing sebagai dampak dari pasar bebas. Materi penyuluhan, pelatihan dan pendidikan yang diperlukan adalah materi yang bersifat kognitif, psikomotorik, afektif, dan intuisi. Materi yang bersifat kognitif meliputi materi yang memberikan pengetahuan dasar tentang agribisnis, teknologi pertanian, manajerial di bidang agribisnis termasuk proses produksi, keuangan, dan pemasaran. Keterampilan psikomotorik petani perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan, dalam hal ini termasuk pelatihan untuk menggunakan teknologi-teknologi informasi yang dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan sistem pertanian 4.0. Pembinaan yang sifatnya efektif juga diperlukan untuk mengubah sikap mental, moral dan etika petani. Petani juga perlu ditingkatkan intuisinya untuk dapat melihat peluang dan kesempatan bisnis pertaniannya. Materi penyuluhan perlu disesuaikan

Kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan bagi petani perlu didukung dengan fasilitas ruang dan tempat, serta fasilitas prasarana lainnya termasuk internet. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara diharapkan dapat bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan juga perguruan tinggi dalam rangka memberikan pelatihan dan pendidikan bagi petani. Kerja sama *pentaheliks* yang terdiri dari pemerintah, Lembaga usaha, petani, media massa dan akademisi sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pemahaman dan keterampilan petani.

Peningkatan Kompetensi SDM Penyuluh Pertanian

Penerapan pertanian 4.0 memerlukan SDM petani dan penyuluh pertanian yang bisa menguasai teknologi dan memahami sistem agribisnis yang dibutuhkan pasar. Oleh karena itu, kesiapan SDM penyuluh pertanian dalam menghadapi system pertanian 4.0 sangat diperlukan. SDM penyuluh pertanian harus mau mengubah diri dan meningkatkan kemampuannya terutama dalam system informasi teknologi. Penyuluh harus menyiapkan diri untuk memberikan penyuluhan dan memberikan materi penyuluhan dengan menggunakan teknologi informasi atau yang dikenal dengan *cyber extension* (Cybex). Penyuluh pertanian diharapkan dapat menyiapkan materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pasar. Penyuluh pertanian harus dapat memanfaatkan informasi dan komunikasi digital untuk mengemas materi penyuluhan yang akan diberikan kepada petani. Penyuluh pertanian harus mampu mengintegrasikan media komunikasi digital dan elektronik seperti televisi dan radio serta media komunikasi konvensional yang nondigital serta membentuk forum-forum media.

Saat ini kementerian pertanian memiliki pusat pendidikan dan pelatihan pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh seorang penyuluh pertanian. Pusat

pendidikan dan pelatihan ini diharapkan juga harus mampu mengubah sistem pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, membuat kurikulum sesuai dengan kebutuhan, sehingga penyuluh pertanian tidak lagi gagap dalam menghadapi perubahan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Pusat-pusat pelatihan ini juga seharusnya sudah tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sehingga penyuluh pertanian yang mengikuti pelatihan dapat memiliki sertifikat kompetensi.

Peran Generasi Milenial

Petani di Sumatra Utara didominasi dari kalangan berusia 45 tahun keatas yang sebenarnya sudah memasuki akhir usia produktif dengan kemampuan bekerja secara fisik yang sudah mulai berkurang, serta lambat dalam menerima informasi dan cenderung apatis. Oleh karena itu, hal ini perlu diantisipasi dengan melibatkan generasi milenial dalam kegiatan usaha tani. Minat generasi milenial yang rendah terhadap sektor pertanian, dapat disebabkan karena ketidakpastian dalam bisnis usaha pertanian, termasuk ketidakpastian harga. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat memberikan kepastian harga bagi petani, sehingga bisnis pertanian menjadi suatu bisnis yang menarik bagi generasi milenial. Pertanian perlu dijadikan sebagai bentuk usaha agribisnis yang maju dan bukan lagi sebagai pertanian tradisional yang identik dengan kemiskinan dan sesuatu yang sifatnya kuno. Generasi milenial juga perlu diberi keterampilan dan pemahaman yang nyata tentang manfaat yang diperoleh dalam mengembangkan usaha pertanian. Bentuk-bentuk pertanian modern seperti *smart farming*, penggunaan teknologi robotik yang serba otomatis perlu diperkenalkan kepada kaum generasi muda, sehingga minat mereka terhadap bidang pertanian dapat meningkat. Penggabungan kelompok-kelompok tani (Poktan) menjadi suatu bentuk korporasi petani, yang diatur dengan sistem manajemen yang teratur dan baik juga menjadi salah satu cara untuk menarik minat kaum generasi milenial untuk terjun ke dunia pertanian.

Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi harus siap di dalam menyiapkan SDM pertanian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kurikulum harus diubah sehingga lulusannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Seorang lulusan dari perguruan tinggi diharapkan tidak hanya memiliki bekal ilmu yang bersifat umum, tetapi juga ilmu-ilmu yang bersifat spesifik, misalnya sebagai tenaga ahli dibidang perbenihan, pemupukan, budidaya komoditi tertentu, dan banyak lagi kompetensi-kompetensi khusus di bidang pertanian. Akan tetapi, kompetensi ini juga harus dibarengi dengan kompetensi di bidang teknologi informasi serta kewirausahaan, sehingga nantinya lulusan perguruan tinggi dapat terjun langsung menjadi SDM pertanian yang tangguh, mandiri dan profesional. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti program magang di industri dan

instansi pemerintah yang tentu saja hal ini dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dari lulusan perguruan tinggi.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Sistem pertanian dunia saat ini sejalan dengan era revolusi industri 4.0, yang juga sudah memanfaatkan sistem informasi teknologi dan mesin-mesin pertanian yang sudah dikendalikan dengan sistem pengendali jarak jauh seperti teknologi robotik dan sensor. Penerapan teknologi industri 4.0 di bidang pertanian tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang melek teknologi. Sumatra Utara yang memiliki potensi pertanian yang besar harus dapat mengikuti perkembangan ini, tetapi kondisi saat ini sumber daya manusia di sektor pertanian di Sumatra Utara sebagian besar termasuk kategori usia yang mendekati usia tidak produktif atau berusia lanjut. Pemahaman petani usia lanjut ini terhadap sistem teknologi informasi sangat rendah sehingga perlu ditingkatkan dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan serta memotivasi mereka untuk bisa mengubah dan meningkatkan kapasitas diri. Untuk keperluan itu, dibutuhkan SDM penyuluh pertanian yang handal, yang juga dapat menguasai teknologi informasi, teknologi digital, dan internet. Pemerintah juga perlu melibatkan generasi milenial dalam sektor pertanian, dengan cara meningkatkan minat mereka untuk bekerja di sektor pertanian, karena generasi milenial ini merupakan generasi yang siap menerima perubahan-perubahan teknologi, inovatif dan kreatif untuk dapat menerapkan sistem pertanian 4.0. Selain itu, peran perguruan tinggi juga diperlukan dalam mendidik generasi-generasi muda yang siap diterjunkan ke sektor pertanian, dengan cara membekali generasi muda dengan ilmu yang cukup,

Saran

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara perlu untuk melakukan perbaikan infrastruktur terutama internet karena penerapan *Internet of Thing* (IoT) memerlukan akses internet yang memadai. Estafet petani ke generasi milenial harus dilakukan dengan memberikan Pendidikan tentang pertanian kepada generasi muda. Generasi muda harus disiapkan untuk menjadi SDM pertanian yang profesional dan berdaya saing tinggi, Sistem pertanian 4.0 seperti aplikasi *drone*, robotik, kecerdasan artifisial, *smart farming*, sistem agro-logistik digital, sistem *e-commerce* perlu disosialisasikan kepada petani dan juga dikembangkan.

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2021. *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021*.
- [2] Esther, Aphrodite dan Lexy. 2015. *Sektor Pertanian Merupakan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi Maluku. Agriekonomika*.
- [3] Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang *Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK)*
- [4] Daniel M. 2004. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [5] Fashihullisan, 2009. *Peran Penyuluh dalam Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [6] Damayanti, P. 2017. "Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Penyuluh Swadaya dengan Tingkat Keberhasilan Tugas Pokok Penyuluhan Pertanian". (Skripsi). Medan: Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Ir. Elisa Julianti, M.Si. menyelesaikan pendidikan sarjana (Ir) di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian USU (1990). Pendidikan S2 di program studi Teknologi Pasca Panen (1997) S3 di program studi Ilmu Pangan (2002) di Insitutut Pertanian Bogor. Sejak tahun 1990 hingga sekarang menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, dan saat ini sebagai Ketua Program Studi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan periode 2016-2021, serta Ketua Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) Cabang Medan periode 2018-2022.

Bidang penelitian yang digeluti adalah *modified atmosphere packaging*, teknologi pengeringan kemo reaksi, serta pengembangan tepung berbasis umbi-umbian lokal. Aktif sebagai mitra bestari pada beberapa jurnal nasional dan internasional, serta sebagai reviewer penelitian dan pengabdian masyarakat yaitu di LPDP, Kemenristek Dikti dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat USU.

Menumbuhkan Minat Wirausaha di Kalangan Mahasiswa Sumatera Utara

Erika Revida

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Sebelum dan pada saat pandemic Covid-19 melanda Negara Indonesia, sesungguhnya jumlah pengangguran di Sumatera Utara semakin hari semakin menunjukkan angka yang relatif tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2021) menunjukkan bahwa tingkat Jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2021 sebanyak 7,479 juta orang, naik 129 ribu orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2020, demikian halnya dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 0,72 persen.

Pengangguran terjadi antara lain disebabkan oleh sedikitnya lowongan pekerjaan yang tersedia, sementara jumlah lulusan setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam praktiknya, kebanyakan lulusan perguruan tinggi masih lebih banyak memilih untuk bekerja di sektor formal dan masih sangat sedikit yang mau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga jumlah pengangguran terus meningkat. Pengangguran selain menimbulkan masalah ekonomi, juga menjadi masalah sosial yang dapat berdampak pada tingkat kejahatan yang semakin meningkat akibat tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan. Oleh sebab itu peran perguruan tinggi menjadi penting untuk menumbuhkan minat wirausaha di kalangan mahasiswa agar setelah lulus dapat menjadi pencipta pekerjaan atau wirausaha muda.

Mahesa (2012) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh negara Jepang ternyata disponsori oleh para *entrepreneur* yang berjumlah 2 % tingkat sedang, berwirausaha kecil sebanyak 20% dari jumlah penduduknya. Inilah kunci keberhasilan pembangunan negara Jepang. Lebih lanjut, Pandoyo (1982) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh negara Jepang ternyata disponsori oleh wirausahawan bertingkat sedang yang berjumlah 2%, dan berwirausaha kecil 20% dari jumlah penduduknya.

Maju mundurnya suatu negara sangat ditentukan oleh banyaknya jumlah wirausaha muda minimal 5% dari total jumlah penduduknya. Namun, Jika dibandingkan dengan pertumbuhan wirausaha muda di negara-negara maju, maka pertumbuhan wirausaha muda di negara Indonesia terbelang masih sangat kecil yaitu berkisar 0,18% dari jumlah total penduduk Indonesia, sementara jumlah wirausaha muda di negara Amerika sebanyak 11,5% dan negara Singapura sebesar 7,2% dari total jumlah penduduknya (Suharti & Sirine, 2011).

Perguruan tinggi adalah pencetak lulusan sarjana yang diharapkan dapat menjadi wirausaha muda yang menciptakan lapangan kerja baru. Zimmerer & Scarborough (2005), menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan di suatu negara terletak pada peranan universitas melalui penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan. Oleh karena itu setiap Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Utara harus segera berbenah diri untuk lebih meningkatkan minat wirausaha mahasiswanya agar kelak setelah tamat dapat melahirkan wirausaha-wirausaha muda yang siap menciptakan lapangan kerja baru. Hal inilah yang mendasari tulisan ini diangkat ke permukaan dengan judul “Menumbuhkan Minat Wirausaha di Kalangan Mahasiswa Sumatera Utara”.

2. Masalah

Napitupulu (2009) menyatakan bahwa tingginya angka pengangguran pada lulusan perguruan tinggi menunjukkan proses pendidikan di perguruan tinggi kurang menyentuh persoalan-persoalan nyata di dalam masyarakat. Sementara itu hingga kini keinginan lulusan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih sangat langka. Kasmir (2007) menyatakan bahwa orientasi mahasiswa setelah lulus nanti hanyalah untuk mencari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu setiap perguruan tinggi khususnya di Sumatera Utara harus mau berbenah diri antara lain untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa dan merevisi kurikulum perguruan tinggi dengan memperbanyak atau memasukkan nilai-nilai wirausaha kepada mahasiswanya dengan tujuan agar lulusan perguruan tinggi kelak bukan menjadi mencari pekerjaan akan tetapi menciptakan lahan pekerjaan baru.

Namun harapan ini belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Ciputra (2011) menyatakan bahwa jika Indonesia memiliki 4.4 Juta jiwa yang menjadi wirausaha dari total jumlah penduduk, maka diperkirakan perekonomian negara bisa berjalan lebih baik. Ciputra (2011) menambahkan bahwa mengapa sebagian besar negara berkembang di dunia masih tetap miskin dan tak kunjung berkembang dan keluar dari kemiskinan, akar dari semua masalah itu adalah karena negara berkembang tidak kunjung berhasil menjadi negara maju karena mereka tidak punya cukup entrepreneur.

Menurut Ciputra (2011) ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya minat wirausaha mahasiswa yaitu:

- a. Pada umumnya generasi muda Indonesia tidak dibesarkan dalam budaya wirausaha
- b. Terlalu banyak pencari kerja namun sedikit pencipta kerja
- c. Kewajiban untuk mendidik dan melatih generasi muda untuk memiliki kemampuan menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri
- d. Kekayaan alam Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, ada beberapa masalah yang ditemui berkaitan dengan minat wirausaha mahasiswa di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang kewirausahaan
- b. Kurikulum perguruan tinggi yang belum menumbuhkan minat wirausaha
- c. Kemampuan dosen yang masih minim dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa
- d. Kurangnya dukungan orang tua dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa.

Pemikiran Pemecahan Masalah

Secara etimologi wirausaha berasal dari kata “wira” dan “usaha”. Wira mengandung arti pejuang, teladan, berani dan manusia unggul, sedangkan kata usaha mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian wirausaha diartikan sebagai manusia unggul yang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Tarmudji (2006) mendefinisikan wirausaha sebagai “seseorang yang berkemauan keras dalam melakukan tindakan yang bermanfaat dan patut menjadi teladan hidup”, sedangkan Kasmir (2007) menyatakan wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Zimmerer & Scarborough (2005) mendefinisikan kewirausahaan sebagai gabungan dari kreativitas, inovasi dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk usaha baru.

Minat adalah keinginan, kehendak atau kesukaan seseorang terhadap suatu hal atau objek tertentu. Kamisa (1997) mendefinisikan minat sebagai suatu keinginan terhadap sebuah objek dan tentunya setelah timbul minat, maka seseorang akan melakukan aktivitas. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya untuk memenuhi keinginan terhadap objek yang dianggap menimbulkan minat. Fuadi dan Eko (2009) mendefinisikan minat wirausaha sebagai keinginan, ketertarikan, serta ketersediaan individu melalui ide-ide yang dimiliki untuk bekerja keras atau berkemauan keras untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa rasa takut dengan risiko yang akan terjadi, dapat menerima tantangan, percaya diri, kreatif, dan inovatif serta mempunyai kemampuan dan keterampilan memenuhi kebutuhan. Dengan demikian yang dimaksud dengan minat wirausaha adalah keinginan atau kesukaan seseorang untuk melakukan usaha tertentu dengan kerja keras dan keberanian tertentu untuk mencapai tujuannya.

Perguruan tinggi sebagai “pabrik” lulusan yang berkualitas, sudah sepatutnya berkewajiban menghasilkan lulusan yang mempunyai minat wirausaha yang baik. Suhartie, Lieli dan Siine (2012) menyatakan bahwa menumbuhkan jiwa kewirausahaan para mahasiswa di perguruan tinggi dipercaya merupakan alternatif jalan keluar untuk mengurangi tingkat pengangguran, karena para sarjana diharapkan dapat menjadi wirausahawan muda terdidik yang mampu merintis usahanya sendiri. Oleh karena itu setiap

perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara sudah sepatutnya berbenah diri untuk dapat menumbuhkan minat wirausaha secara dini kepada para mahasiswanya. Alma (2011) menyatakan bahwa dengan bekal pendidikan tinggi yang diperoleh di bangku kuliah dan idealisme yang terbentuk, lulusan Perguruan Tinggi diharapkan mampu mengembangkan diri menjadi seorang wirausahawan dan bukan sebaliknya menjadi pencari kerja. Selanjutnya Alma (2011) menambahkan bahwa semakin maju suatu negara semakin banyak orang terdidik, dan semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha. Selanjutnya,

Beberapa pemikiran pemecahan masalah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat wirausaha di kalangan mahasiswa Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang kewirausahaan dan pentingnya minat wirausaha
- b. Merevisi kurikulum perguruan tinggi yang mengarah pada pembentukan minat wirausaha mahasiswa
- c. Meningkatkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan dosen yang dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa
- d. Perlunya dukungan orang tua dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa

3. Strategi Pemecahan Masalah.

Dari beberapa pemikiran pemecahan masalah dalam rangka menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa, maka strategi pemecahan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang kewirausahaan dan pentingnya minat wirausaha.

Dalam prakteknya, seringkali faktor ketidaktahuan mahasiswa tentang pentingnya wirausaha menjadi penghambat tumbuhnya minat wirausaha di kalangan mahasiswa. Yang dimaksud dengan pengetahuan (*knowledge*) menurut Djaali (2012) adalah kemampuan untuk menghafal, mengingat, atau mengulangi informasi yang pernah diberikan. Dengan demikian pengetahuan tentang wirausaha adalah kemampuan untuk mengingat dan menghafal tentang sesuatu hal. Pengetahuan tentang minat wirausaha adalah kemampuan untuk mengingat segala sesuatu yang dapat menumbuhkan keinginan atau motivasi untuk menciptakan peluang dan pekerjaan baru. Hasil penelitian Yuliani, Trianto dan Winario (2018) menyimpulkan bahwa ada pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap motivasi dan dampaknya terhadap minat dalam berwirausaha. Oleh karena itu pengetahuan mahasiswa tentang pentingnya wirausaha menjadi faktor stimulus menumbuhkan minat mahasiswa dalam berwirausaha dan sebaliknya. Adapun strategi meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam rangka menumbuhkan minat wirausaha adalah dengan

melakukan pembelajaran kewirausahaan yang variatif dan menyenangkan melalui *role playing* dan simulasi sehingga menumbuhkan motivasi dan minat berwirausaha. Yohnson (2009) menyatakan bahwa perguruan tinggi perlu menerapkan pola pembelajaran kewirausahaan yang konkrit berdasarkan masukan empiris untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang bermakna agar dapat mendorong semangat mahasiswa untuk berwirausaha.

- b. Merevisi kurikulum perguruan tinggi yang mengarah pada pembentukan minat wirausaha mahasiswa.

Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa kurikulum perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara tampak bahwa isinya masih sangat kurang komposisi tentang pendidikan kewirausahaan. Oleh karena itu diperlukan revisi kurikulum berbasis kewirausahaan. Hal ini dimaksudkan untuk atau dalam rangka menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa di perguruan tinggi.

Kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku saat ini adalah Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNi) tahun 2017 yang berbasis pada profil lulusan dan capaian pembelajaran. Profil lulusan disusun berdasarkan hasil *tracer study* dengan para dosen, mahasiswa, alumni dan *stakeholders* lainnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu sejak tahun 2020 dengan kebijakan baru merdeka belajar dan kampus merdeka, maka kurikulum KKNi harus menyesuaikan tuntutan merdeka belajar dan kampus merdeka. Adapun strategi untuk meningkatkan minat wirausaha mahasiswa melalui revisi kurikulum yang dilakukan di perguruan tinggi di Sumatera Utara antara lain dengan menambah mata kuliah kewirausahaan berbasis program studi serta melakukan magang ke perusahaan-perusahaan yang berhasil selama 1 (satu) semester.

- c. Meningkatkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan dosen yang dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa di perguruan tinggi.

Sesungguhnya negara Republik Indonesia telah berupaya menanamkan jiwa dan semangat wirausaha bagi mahasiswa dengan berbagai program dan kegiatan. Febriyanto (2015) menyatakan bahwa negara Indonesia telah berusaha dalam menanamkan jiwa dan semangat kewirausahaan bagi mahasiswa di perguruan tinggi dengan berbagai metode dan strategi yang membuat mahasiswa tertarik untuk berwirausaha. Namun hingga ini masih saja minat wirausaha mahasiswa masih relatif rendah. Hal ini tampak dengan masih banyaknya lulusan perguruan tinggi sebagai pencari kerja, bukan pencipta lapangan pekerjaan baru. Untuk meningkatkan minat wirausaha mahasiswa, maka peran dosen sangat menentukan. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dosen dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa antara lain dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi

- kewirausahaan kepada dosen sehingga dosen memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa.
- d. Meningkatkan dukungan orang tua dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa.

Orang tua mempunyai peran yang signifikan dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa. Orang tua yang mempunyai minat wirausaha akan mendukung anaknya menjadi wirausaha dan sebaliknya. Seiring dengan perkembangan zaman, orang tua yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang wirausaha akan mendorong anak-anaknya untuk menjadi wirausaha. Menurut Herdiman (dalam Suharti & Sirine, 2012), keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menumbuhkan mental kewirausahaan anak. Demikian halnya dengan hasil penelitian Isdianto, dkk (dalam Suharti & Sirine, 2012) yang menyimpulkan bahwa peranan keluarga mendorong minat anak dalam berwirausaha. Dunn & Holtz (dalam Suharti & Sirine, 2012) menyatakan bahwa orang tua yang berprofesi sebagai wirausaha diyakini dapat menjadi panutan (*entrepreneurial role model*) yang akan membentuk minat anak untuk berwirausaha pada masa depan. Hal ini senada dengan pendapat Shochib (1998) yang menyatakan bahwa dukungan orang tua mampu membuat anak secara emosional merasa lega karena diperhatikan, mendapat saran atau kesan yang menyenangkan untuk dirinya. Dengan demikian strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dukungan orang tua dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa antara lain dengan mengubah mindset orang tua menjadikan anaknya sebagai pegawai melalui sosialisasi yang intens dan berkesinambungan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh pendidikan.

4. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, pemikiran pemecahan masalah, dan strategi pemecahan masalah, maka dirumuskan rencana tindak lanjut menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa di Sumatera Utara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang kewirausahaan dan pentingnya minat wirausaha.

Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pentingnya minat wirausaha dalam hal ini bukan saja terbatas secara teoretis atau konsep-konsep, akan tetapi juga membentuk sikap, perilaku serta mental dan pola pikir yang berani mengambil resiko serta kreatif dan inovatif serta dapat melihat peluang bisnis yang mampu mengubah sumber daya dan peluang yang belum dilirik orang lain menjadi sesuatu yang akan ditindaklanjuti menjadi peluang bisnis. Adapun rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang

kewirausahaan adalah mewajibkan mahasiswa mengikuti program kewirausahaan mahasiswa Indonesia (PKMI) yang meliputi 4 (empat) kegiatan unggulan yaitu Workshop Kewirausahaan, Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI), Akselerasi *Start up* Mahasiswa Indonesia (ASMI) dan Pendampingan Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PWMI).

- b. Merevisi kurikulum perguruan tinggi yang mengarah pada pembentukan minat wirausaha mahasiswa.

Idrus (1999) mengkaji masalah strategi pengembangan kewirausahaan dan peranan perguruan tinggi dimana perguruan tinggi yang strategis perlu diaktifkan untuk mendorong percepatan perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan pelaku-pelaku ekonomi baru (*entrepreneur*) yang terampil dan mempunyai teknologi maju, berusia muda yang produktif, kreatif dan berdaya saing. Oleh karena itu kurikulum perguruan tinggi perlu direvisi mengarah pada menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa. Dengan perkataan lain, revisi kurikulum kewirausahaan di perguruan tinggi sudah saatnya segera dilakukan dengan berbasis merdeka belajar dan kampus merdeka, sehingga mahasiswa mempunyai kebebasan dalam memilih mata kuliah program yang berbasis kewirausahaan baik di luar program studi maupun di luar perguruan tinggi. Sebaiknya mata kuliah kewirausahaan diberikan di semester akhir sehingga pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tentang kewirausahaan masih segar dan dapat dilakukan segera setelah lulus.

- c. Meningkatkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan dosen yang dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa di perguruan tinggi.

Dosen adalah narasumber utama di perguruan tinggi yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, maka dosen wajib mentransformasikan, mengembangkan program-program kewirausahaan untuk menumbuhkan minat wirausaha. Oleh sebab itu, dosen harus memiliki kompetensi yang baik dalam bidang kewirausahaan dan pastinya dosen harus memiliki jiwa dan semangat wirausaha yang baik terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai "*transfer of knowledge*". Gilstrap dan Martin (1975) menyatakan bahwa peran pengajar lebih erat kaitannya dengan keberhasilan pembelajaran, terutama berkenaan dengan kemampuan pengajar dalam menetapkan strategi pembelajaran kewirausahaan. Rencana tindak lanjut yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dosen dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa antara lain dengan mewajibkan dosen mengikuti pelatihan *Training of Trainers (TOT)* tentang menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa.

- d. Meningkatkan dukungan orang tua dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa.

Dukungan orang tua sangat penting dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa. Hal ini disebabkan bahwa dukungan orang tua akan mampu membuat anak secara emosional merasa lega karena

diperhatikan, dicintai, dihargai serta mendapat saran, masukan atau kesan yang menyenangkan bagi anak-anaknya. Pemberian dukungan juga dapat berupa teguran, pengarahan, membantu dalam menghadapi kesulitan ataupun memberi hukuman apabila berbuat kesalahan (Shochib, 1998). Dukungan orang tua terhadap mahasiswa dapat menumbuhkan minat berwirausaha, dan sebaliknya. Merasa dihargai, dicintai oleh orang tua akan menjadikan mahasiswa berani dalam melakukan sesuatu hal sebagai salah satu ciri dari wirausahawan. Pemberian dukungan orang tua juga dapat dilakukan dengan teguran, pengarahan, membantu dalam menghadapi kesulitan ataupun memberi hukuman apabila berbuat kesalahan. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa dukungan orang tua dapat menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa di Sumatera Utara.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, pemikiran pemecahan masalah, strategi pemecahan masalah, dan rencana tindak lanjut, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan mahasiswa tentang wirausaha penting untuk menumbuhkan minat wirausaha. Oleh karena itu perlu ditingkatkan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan yang berkesinambungan serta ajek tentang kewirausahaan baik pendidikan formal maupun nonformal. Selain itu perlu dilakukan pendampingan wirausaha kepada mahasiswa yang berkesinambungan dan ajek
- b. Revisi kurikulum berbasis kewirausahaan perlu dilakukan di perguruan tinggi Sumatera Utara. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi kurikulum perguruan tinggi yang mengarah pada pembentukan minat wirausaha mahasiswa dan merdeka belajar yaitu dengan lebih banyak praktek dan magang ke perusahaan-perusahaan selama minimal satu semester.
- c. Pengetahuan dan keterampilan dosen dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa masih relatif minim. Oleh karena itu perlu meningkatkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan dosen yang dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa di perguruan tinggi melalui pelatihan kewirausahaan, *training of trainers* (TOT) tentang kewirausahaan, lokakarya atau *workshop*, serta melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil.
- d. Dukungan orang tua dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa masih minim. Lebih banyak orang tua mengarahkan anaknya yaitu mahasiswa untuk menjadi pegawai atau pencari kerja. Oleh karena itu perlu meningkatkan dukungan orang tua dalam menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa yaitu dengan cara mendorong dan memotivasi anaknya yaitu mahasiswa untuk menjadi wirausaha muda.

Daftar Pustaka

- Alma, B. (2011). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2021). <https://sumut.bps.go.id/>. Diakses 22 Mei 2021.
- Ciputra. (2011). *Ciputra Quantum Leap 2: Kenapa dan Bagaimana Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Bangsa dan Masa Depan Anda*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Djaali. 2012. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Febriyanto, M.M. (2014). Strategi Peningkatan Kewirausahaan Bagi Mahasiswa Di Pendidikan Tinggi. *Jurnal Bisnis Darmajaya*. Vol. 1(1), pp.105-114.
- Fu'adi, I.F. & Eko, B. (2009). Hubungan Minat Berwirausaha Dengan Prestasi Praktik Kerja Industri Siswa Kelas XII Teknik Otomotif SMK Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 2008/2009. *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin*. Vol. 9(2).
- Gilstrap dan Martin. (1975). *Current Strategies For Teachers*. California: Goodyear Publishing Company. Inc.
- Kamisa. (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Kasmir. (2007). *Kewirausahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Mahesa, A. D. (2012). Analisis Faktor-Faktor Motivasi Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha (Studi Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Napitulu, E. L. (2009). Lulusan Perguruan Tinggi Hanya Berorientasi Jadi Pencari Kerja. *Kompas.com*. Jakarta.
- Pandoyo, H. R. (1982). *Wiraswasta Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Panduan Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia tahun 2021. Jakarta: Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Shochib, M. (1998). *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Disiplin Diri*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharti, L. & Sirine, H. (2012). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Niat Kewirausahaan (*Entrepreneurial Intention*). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 13(2), pp.124-134.
- Tarmudji, T. (2006). *Prinsip-prinsip Wirausaha*. Yogyakarta: Liberty.
- Yohnson. (2009). Peranan Universitas dalam Memotivasi Sarjana Menjadi Young Entrepreneurs. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(2): 97-111.
- Yuliani, Trianto, B dan Winario, M. (2018). Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Motivasi dan Dampaknya Terhadap Minat Dalam Berwirausaha. Studi Kasus Mahasiswa STIE IQRA ANNISA. *Jurnal AL-Amwal*. Vol. 7 (2). p.112-120.
- Zimmerer, T.W. & Scarborough, N.M. (2005). *Essentials of entrepreneurship and small business management*. Prentice-Hall.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Erika Revida, MS lahir di Simalungun, 21 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung bidang ilmu Administrasi Publik pada tahun 2005. Pada tahun 1991 menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, dan menempuh pendidikan Sarjana (S1) bidang Ilmu Administrasi Publik pada tahun 1996 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara. Menjadi dosen tetap program studi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Sejak 1 Januari 1987, dan sejak tanggal 1 April 2007 menjadi Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Medan dan pada saat ini menjadi Sekretaris Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaaan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Penulis banyak menulis artikel pada jurnal nasional dan internasional terutama bidang pemberdayaan birokrasi, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, modal sosial dan pelayanan pariwisata.

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara untuk Pembangunan Manusia di Sumatera Utara

Gontar A. Siregar

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Pembangunan manusia menurut UNDP (1990) merupakan proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (*a process enlarging people's choices*), dengan tiga pilihan utama yang dianggap paling penting, yaitu panjang umur dan sehat (*longevity*), akses ke sumber daya agar standar hidup yang layak dapat dipenuhi (*living standard*) dan berpendidikan/berpengetahuan (*knowledge*). Yang dimaksudkan sebagai peluang hidup adalah peluang hidup yang dihitung berdasarkan angka kehidupan ketika lahir, sedangkan pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lamanya bersekolah dan angka melek huruf penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sedangkan hidup yang layak diukur berdasarkan pengeluaran per-kapita yang didasarkan oleh paritas daya beli (*purchasing power parity*).¹

Makna pembangunan manusia sejatinya memiliki arti yang luas. Namun, ide dasar pembangunan manusia itu sendiri adalah pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Ide dasar ini memiliki fokus kepada manusia dan kesejahteraan. *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan Manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, tujuan utama dari pembangunan adalah diciptakannya lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.²

Seiring dengan Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) yang pertama kali diterbitkan oleh PBB pada tahun 1990, pembangunan manusia telah menjadi pembahasan utama dunia. Orientasi pembangunan sendiri telah bergeser menjadi pembangunan yang berorientasi kepada pembangunan manusia dari yang sebelumnya berorientasi pada pembangunan ekonomi yang fokus pada pertumbuhan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjadi cara dalam mengukur kualitas manusia disuatu daerah.^{1,3}

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah suatu pengukuran yang membandingkan antara harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak bagi semua negara di seluruh dunia. IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk kedalam kategori negara maju, negara berkembang, ataupun negara terkebelakang. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini juga nantinya menjadi parameter untuk melihat pengaruh kebijakan ekonomi suatu negara terhadap kualitas rakyatnya.¹

Tiga dimensi agregasi perhitungan angka IPM, diantaranya hidup sehat dan umur panjang, standar hidup layak, dan pengetahuan, diwakili oleh indikator tersendiri pada setiap dimensinya. Indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat adalah umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, indikator yang mewakili dimensi pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mewakili dimensi standar hidup layak. Jadi ketiga dimensi ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPMnya. Ketiga dimensi tersebut saling memengaruhi satu sama yang lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri. Selain itu, faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah juga akan mempengaruhi IPM. Oleh sebab itu, apabila ketiga dimensi tersebut dapat ditingkatkan maka akan berdampak pula pada peningkatan IPM di suatu daerah, nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut.³

Salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah adalah dengan melihat pertumbuhan IPM. Pertumbuhan rata-rata menunjukkan rata-rata sebesar 0,8% per tahun berdasarkan data IPM di Sumatera Utara dari tahun 2015-2019. Perkembangan ini menunjukkan pembangunan manusia secara umum di Sumatera Utara yang semakin membaik.²

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok seperti yang terlihat pada tabel 1. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengkategorikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara mencapai 71,77 pada tahun 2020. Dengan capaian IPM tersebut, Sumatera Utara berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”.²

Tabel 1 Klasifikasi Status Pembangunan Manusia²

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
60 ≤ IPM < 70	Sedang
70 ≤ IPM < 80	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Pada tahun 2020, capaian IPM di Sumatera Utara sudah mencapai 71,77. Angka ini meningkat 0,03 poin dari capaian pada tahun 2019 yang sebesar 71,74. Namun, di balik angka yang membahagiakan ini terlihat penurunan yang tajam dari perkembangan IPM di Sumatera Utara yang

sebelumnya meningkat sebesar 0,70 per tahun, di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu 0,04 per tahun. Angka ini sudah menunjukkan gejala penurunan sejak tahun 2019. Meskipun capaian IPM pada tingkat 71,77 sudah tergolong tinggi, namun pencapaian ini perlu lebih ditingkatkan lagi hingga mencapai kesejahteraan yang lebih baik di masa yang akan datang.^{2,4}

2. Masalah

UNDP telah menggunakan IPM sebagai pengukuran pembangunan manusia selama lebih dari 25 tahun. Di Indonesia, IPM digunakan sebagai dasar penentuan anggaran transfer pemerintah pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) untuk provinsi dan kabupaten/kota. Pengukuran pembangunan manusia dengan IPM yang digunakan selama ini sebetulnya tidak seutuhnya sempurna. Pengukuran pembangunan manusia dengan menggunakan IPM ini oleh banyak pihak dianggap kurang tepat. Salah satu kritik untuk IPM adalah sifat egalitarian sebagai basis ideologi dalam IPM dengan kecenderungan cara berpikir bahwa seluruh penduduk diperlakukan oleh pemerintah ataupun mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah dan miskin terhadap pemikiran terkait teknologi.²

Provinsi Sumatera Utara merupakan satu diantara provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada pada pertengahan jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, dimana Sumatera Utara menempati posisi kelima dari sepuluh provinsi. Mayoritas provinsi di Pulau Sumatera sudah berada pada kategori “Tinggi” dimana Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi dan Sumatera Selatan. Provinsi Lampung merupakan satu-satunya provinsi di pulau sumatera dengan IPM yang berada pada posisi “sedang”. Tidak ada provinsi di Pulau Sumatera yang berada pada kategori pembangunan manusia “sangat tinggi” maupun “rendah”.²

IPM Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 71,77, lebih rendah dibanding Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat dan Aceh. IPM tertinggi di Pulau Sumatera yaitu Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 75,59. IPM terendah di Pulau Sumatera yaitu Provinsi Lampung dengan IPM sebesar 69,69. Walaupun di tingkat nasional IPM Sumatera Utara menduduki ranking ke 14, namun angka IPM Sumatera Utara masih dibawah angka Nasional yang mencapai 71,94.²

Jika dibandingkan dengan beberapa Provinsi di Indonesia, pembangunan manusia di Sumatera Utara berstatus tinggi. Namun hal ini tidak menjamin seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara memiliki kualitas pembangunan manusia yang baik. Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara pada tahun 2020 telah mencapai 71,77 dengan status pembangunan manusia Sumatera Utara tetap berstatus “tinggi”. Pada tingkat

kabupaten/kota, capaian pembangunan manusianya cukup bervariasi. Dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, tidak ada lagi kabupaten/kota di Sumatera Utara yang berkategori "Rendah". Terdapat 13 Kabupaten/kota yang berada pada kategori "Sedang", 19 Kabupaten/Kota yang telah mencapai kategori "Tinggi", dan satu kabupaten/kota yang mencapai kategori "sangat tinggi". Kota Medan memiliki capaian pembangunan manusia tertinggi dengan IPM sebesar 80,98. Kota Medan merupakan satu-satunya Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dengan status pembangunan manusia pada level Sangat Tinggi. Sedangkan, Kabupaten Nias Barat dengan IPM sebesar 61,51 merupakan kabupaten dengan capaian pembangunan manusia terendah.²

Persoalan yang dihadapi saat ini adalah disparitas terlepas dari pertumbuhan angka Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini disebabkan oleh karena Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang tidak merata, dimana terdapat daerah yang berstatus sangat tinggi, tinggi dan sedang.⁵

Disparitas pembangunan manusia dalam perspektif kabupaten/kota memberikan gambaran tentang kinerja secara umum pembangunan manusia di tingkat provinsi. Sampai dengan tahun 2020, disparitas pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Sumatera Utara terlihat dari capaian Kota Medan dengan IPM tertinggi (80,98) dan Kabupaten Nias Barat dengan capaian IPM terendah (61,51). Selama 2016 hingga 2020, disparitas nilai IPM diantara kabupaten/kota di Sumatera Utara cenderung menurun.²

Disparitas atau perbedaan pencapaian pembangunan antar daerah bukan merupakan hal baru bagi Indonesia khususnya Sumatera Utara. Kompleksitas berbagai faktor seperti sumber daya manusia, letak geografis, sejarah, dan ketidakmerataan sumber daya alam merupakan hal yang masih menjadi kendala dalam menuju konvergensi pembangunan. Oleh sebab itu, peningkatan pemerataan pendapatan melalui penurunan indeks gini menjadi 0,305 termasuk dalam lima sasaran utama pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2018-2023. Tahun 2020 Gini Ratio Sumatera Utara sebesar 0,316, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih cukup tinggi.²

Tahun 2016 selisih IPM kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 20,31 turun menjadi 19,47 pada tahun 2020. Pada umumnya daerah dengan capaian pembangunan manusia yang masih rendah berpeluang untuk meningkat lebih cepat dibandingkan daerah dengan capaian pembangunan manusia yang sudah tinggi. Pertumbuhan IPM Nias Barat 0,61 persen, lebih tinggi dari Kota Medan (0,01 persen) sehingga pada tahun 2020 berhasil memperkecil disparitas IPM Sumatera Utara.²

Penurunan kesenjangan IPM cukup menggembirakan, namun upaya pemerataan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Kesenjangan pembangunan manusia di Sumatera Utara terjadi akibat perbedaan yang signifikan antara Kota Medan dengan Kabupaten Nias Barat. Pemerintah tentunya harus mempertimbangkan daerah yang menjadi prioritas agar kesenjangan juga semakin mengecil. Bagai sebuah paradoks, peningkatan

yang signifikan di suatu wilayah, akan memperbesar jurang perbedaan jika tidak diimbangi oleh pembangunan wilayah lainnya.^{1,2}

Kesehatan merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas hidup manusia. Setiap orang sesungguhnya pasti mendambakan untuk dapat hidup lebih lama. Diperlukan derajat kesehatan yang lebih baik agar manusia dapat berumur panjang. Kesehatan juga menentukan kualitas hidup manusia. Derajat kesehatan sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang.²

Penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata merupakan tanda keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan. Oleh sebab itu diperlukan rencana tindak lanjut dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Utara melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fokus utama pada pemikiran guru besar ini adalah pada Peningkatan Kesehatan Masyarakat yang kemudian akan turut berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia.^{2,3}

Henrik L. Blum menyatakan teori bahwa derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Perhitungan angka mortalitas didasarkan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun. Umur Harapan Hidup (UHH) dapat menunjukkan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya. Pada tahun 2020 capaian UHH Sumatera Utara sebesar 69,10 tahun, meningkat 0,15 poin dari tahun 2019 atau tumbuh sebesar 0,22 persen. Sedangkan morbiditas dinilai berdasarkan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi morbiditas berarti semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengaruh dari kondisi kesehatan yang buruk juga mempengaruhi usia harapan hidup dan tingkat mortalitas. Berdasarkan data Susenas tahun 2020, angka morbiditas penduduk di Sumatera Utara adalah 12,24 persen. Angka tersebut sedikit meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 11,97 persen.²

Tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk berdasarkan teori Henrik L. Blum, yang merupakan ukuran dari derajat kesehatan masyarakat dimana terdapat empat faktor penentu yang mempengaruhinya yaitu faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang paling besar dengan pengaruh sebesar 45 persen. Sedangkan faktor penentu tingkat mortalitas dan morbiditas lainnya yang berpengaruh seperti perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan kependudukan/keturunan sebesar 5 persen. Keempat faktor tersebut saling

berkaitan dan berinteraksi dengan faktor lingkungan dan perilaku kesehatan yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan manusia.²

Adapun masalah yang muncul dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut : ²

a. Kondisi Lingkungan Belum Sepenuhnya Sehat

Berdasarkan konsep derajat kesehatan yang dikemukakan oleh Blum, faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang yaitu faktor lingkungan. Dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang baik, faktor lingkungan sangat berpengaruh dimana lingkungan memberikan peran yang paling penting dan berpengaruh positif terhadap terwujudnya hal ini. Faktor lingkungan juga mempengaruhi penularan dan munculnya suatu penyakit. Oleh sebab itu, perlu diupayakan peningkatan kondisi lingkungan yang sehat dari masa ke masa. Selain itu, keturunan dan pelayanan kesehatan juga berhubungan secara tidak langsung dengan kondisi lingkungan yang baik. Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain adalah kepemilikan tempat buang air besar, kondisi sanitasi, sumber air minum layak, dan jenis lantai terluas yang dihuni.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020, terdapat 92,81 persen rumah tangga di Sumatera Utara yang sudah memiliki/menggunakan fasilitas tempat buang air. Dengan kata lain masih ada 7,19 persen rumah tangga di Sumatera Utara yang tidak ada fasilitas tempat buang air di rumahnya. Jika dilihat menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, persentase tertinggi rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air terdapat di Kabupaten Nias Selatan, yaitu 59,67 persen.

Indikator lain adalah akses sanitasi layak yang merupakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan (dilengkapi dengan kloset leher angsa dan dengan tempat pembuangan tangki septik). Faktor sanitasi sangat penting karena masyarakat membutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika sanitasi layak tidak terpenuhi, maka fasilitas tersebut akan rentan dalam menularkan dan menumbuhkan penyakit. Pada tahun 2020, penduduk Sumatera Utara yang sudah menikmati sanitasi layak sebesar 76,51 persen. Artinya masih terdapat 23,49 persen penduduk Sumatera Utara yang belum menggunakan fasilitas buang air dengan sanitasi layak.

Sementara itu, sumber air minum layak merupakan salah satu indikator yang juga berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Dengan adanya pembangunan sarana air bersih di suatu wilayah/daerah, beberapa infeksi oleh mikrobakteria, misalnya kolera, desentri, thypus dan lainnya dapat dikurangi. Namun demikian, suplai air bersih tersebut harus memenuhi standar kesehatan agar berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat.

Pada Tahun 2020, masih terdapat 27,01 persen rumah tangga di Sumatera Utara yang tidak memiliki sumber air minum yang bersih.

Artinya masih ada sekitar seperempat dari rumah tangga di Sumatera Utara yang rentan terhadap infeksi penyakit akibat mikrobakteria. Oleh sebab itu, pemerintah bertanggung untuk memberikan penyuluhan mengenai penggunaan air bersih oleh masyarakat, sekaligus juga memberikan fasilitas air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat. Selain beberapa indikator lingkungan diatas, jenis lantai rumah juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Syarat yang paling penting adalah tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan, sehingga penularan penyakit dapat dihindari. Kriteria lantai yang baik adalah yang berasal dari ubin atau semen, bukan dari tanah, karena tanah cenderung lembab dan tidak memenuhi kriteria tersebut. Namun demikian, pada tahun 2020 masih terdapat 1,47 persen rumah tangga di Sumatera Utara yang jenis lantai terluasnya adalah tanah.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, masih terdapat rumah tangga dengan lantai tanah diatas sepuluh persen, yaitu Kabupaten Nias Selatan (11,16 persen) dan Kabupaten Nias Utara (10,56 persen). Tingkat kemiskinan penduduk juga terkait dengan hal ini. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang harus dilakukan karena berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Dengan perkembangan berbagai indikator lingkungan diatas, maka secara umum kondisi lingkungan penduduk Sumatera Utara belum sepenuhnya aman terhadap penularan penyakit. Capaian indikator sanitasi dan sumber air minum yang layak, masih jauh dari angka ideal. Upaya memperbaiki lingkungan menjadi lebih sehat merupakan suatu hal prioritas untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Tanpa lingkungan yang sehat, berbagai penyakit akan cepat muncul dan menular sehingga dapat meningkatkan angka morbiditas yang pada akhirnya akan mengurangi angka harapan hidup.

b. **Praktek Persalinan yang Aman Belum Merata**

Salah satu indikator dalam upaya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu dan bayi adalah persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya). Hal ini diupayakan dalam rangka kesehatan reproduksi agar persalinan yang telah dilakukan oleh tenaga medis lebih aman dibandingkan oleh selain tenaga medis. Praktek persalinan yang aman menjadi salah satu faktor penentu keselamatan ibu dan bayi hingga pada akhirnya akan menurunkan resiko kematian keduanya.

Pemerintah Sumatera Utara telah berupaya menurunkan angka kematian bayi, salah satunya melalui peningkatan pelayanan persalinan. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 96,30 persen kelahiran bayi yang telah dibantu oleh tenaga medis (dokter, bidan/perawat), menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 96,40 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Jika dilihat lebih jauh,

persentase persalinan yang ditolong oleh dokter (dokter kandungan/umum) menunjukkan adanya peningkatan. Pada Tahun 2019, sebesar 32,73 persen persalinan ditolong oleh dokter (dokter kandungan/umum), naik menjadi 37,16 persen. Sebaliknya dalam periode yang sama, persentase persalinan yang ditolong oleh Bidan/Perawat mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 63,67 persen pada tahun 2019 menjadi 59,14 persen pada tahun 2020. Persentase penolong persalinan yang menggunakan jasa dukun beranak/paraji meningkat dari 2,86 persen pada tahun 2019 menjadi 3,07 persen pada tahun 2020.

Indikator lain sarana kesehatan masyarakat adalah ketersediaan fasilitas kesehatan. Dalam hal ini fasilitas tempat melahirkan anak lahir hidup. Melahirkan di klinik atau di rumah sakit dapat memudahkan mengakses fasilitas kesehatan yang lengkap, terutama jika terjadi masalah saat persalinan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 83,53 persen bayi lahir di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Praktek Nakes), meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 78,44 persen.

c. Kesadaran terhadap Perilaku Sehat Masih Kurang

Perilaku hidup sehat sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Dalam teori Blum, perilaku hidup sehat menyumbang 30 persen dalam mengukur derajat kesehatan manusia. Salah satu contoh perilaku hidup sehat adalah tidak merokok.

Di Sumatera Utara, menghindari merokok oleh sebagian penduduknya sepertinya sangat sulit dilakukan, khususnya penduduk laki-laki. Karena mengandung nikotin maka bahaya rokok bagi kesehatan sangat besar. Sue Armstrong pada tahun 1991 menyatakan bahwa nikotin merupakan salah satu racun paling keras dan merupakan bahan kimia yang tidak berwarna. Nikotin sangat berbahaya dalam jumlah besar,, yaitu antara 20 mg sampai 50 mg nikotin dapat menyebabkan terhentinya pernapasan. Mandagi pada tahun 1996 juga menyatakan bahwa selain nikotin rokok juga mengandung karbon monoksida dan tar yang berbahaya bagi kesehatan. Tidak hanya kandungan zatnya, asap rokok juga berbahaya karena mengandung polutan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu seseorang yang merokok tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, namun juga orang-orang disekitarnya, yang umum disebut perokok pasif. Rata-rata Jumlah Konsumsi rokok di Sumatera Utara sebesar 70 batang per minggu. Paling tinggi di Kabupaten Padang Lawas sebesar 120 batang. Dampak buruk rokok tidak hanya dari segi kesehatan tetapi juga kemiskinan. Bahkan rokok menempati urutan kedua terbesar untuk jenis komoditi makanan yang memberi sumbangan terhadap garis kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya agar masyarakat lebih sadar akan bahaya dari rokok.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya, sehingga tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Untuk mewujudkan hal ini maka manusia perlu berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.^{1,2}

Modal dasar pembangunan sekaligus aset kekayaan bangsa adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya dan berkontribusi dalam pembangunan.^{2,4}

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan penekanan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi arus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dimana 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan mencakup pula target-target dari 17 SDGs beserta indikatornya sebagai bagian yang tidak terpisahkan.⁶

Pada agenda ke 3 Pembangunan Nasional yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing maka sektor kesehatan harus fokus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi yang dijabarkan dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (PP) dan Proyek K/L. Masing-masing memiliki indikator dan target tahun 2020-2024.⁶

Strategi Pemecahan Masalah sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan IPM dapat dilaksanakan sejalan dengan program kesehatan masyarakat pada RPJM. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai strategi pemecahan masalah yang sinergis dengan RPJM dengan fokus pada 3 masalah utama terkait kondisi lingkungan belum sepenuhnya sehat, praktek persalinan yang aman belum merata, dan kesadaran terhadap perilaku sehat yang masih kurang, dengan rincian program yang dapat dilakukan sebagai berikut :⁶

a. Kondisi Lingkungan Belum Sepenuhnya Sehat

- Pengembangan Lingkungan Sehat
- Pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

- Pengawasan kualitas air minum
- b. Praktek Persalinan yang Aman Belum Merata
 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga bencana (KB), dan kesehatan reproduksi
 - Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
- c. Pelatihan tenaga kesehatan dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal
 - Penguatan Promosi Germas
 - Pembinaan kabupaten/kota dalam menerapkan kebijakan Germas
 - Penyusunan pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Germas

4. Rencana Tindak Lanjut

No	Program	Indikator	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaporan
1	Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah kabupaten/kota sehat (KKS)	Penanggung jawab di tingkat kabupaten/kota	Dilaksanakan dalam waktu 1 tahun	Setiap bulan
2	Pembinaan pelaksanaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Tim verifikasi disesuaikan dengan kebutuhan pada tingkatan mana verifikasi dilakukan	Dilaporkan setiap waktu setelah dilakukan verifikasi	Setiap bulan
3	Pengawasan kualitas air minum	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Dinas kesehatan kabupaten/kota, sanitarian, KKP	Sarana air minum dan penyelenggara air minum	Satu kali setahun
4	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Data dapat didapatkan dari Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan 10 tahun sekali dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan 10 tahun sekali (diantara 2 Sensus Penduduk).		
		Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	Data dapat didapatkan dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan 10 tahun sekali.		
		Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	Data bisa didapatkan dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan 10 tahun sekali.		
5	Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dokter/dokter spesialis kandungan atau bidan atau perawat dengan ketentuan tenaga penolong	Pelayanan dilaksanakan setiap ada ibu bersalin di fasilitas pelayanan	setiap bulan

No	Program	Indikator	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaporan
			minimal dua orang terdiri dari: Dokter dan bidan, atau Dokter dan perawat, atau 2 orang bidan, atau Bidan dan perawat	kesehatan (Puskesmas, klinik, rumah sakit, praktek mandiri bidan)	
		Cakupan kunjungan antenatal (persen)	Dokter/dokter spesialis anak atau bidan atau perawat di Polindes, Poskesdes, fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, klinik, rumah sakit, tempat praktek mandiri bidan)	Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan minimal 3 kali dengan ketentuan: Satu kali pada usia 6 – 48 jam, Satu kali pada usia 3 – 7 hari, Satu kali pada 8 – 28 hari	setiap bulan
6	Pembinaan Kesehatan Keluarga	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir	Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas, praktik mandiri bidan, jejaring dan jaringannya, klinik dan rumah sakit (dokter, bidan, perawat), dan kader kesehatan	sesuai ketentuan yang berlaku	setiap bulan
7	Pelatihan tenaga kesehatan dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kegawatdaruratan maternal dan neonatal	TOT dan pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi BBPK/Bapelkes/ institusi lain sesuai tujuan pelatihan	TOT dan pelatihan dilaksanakan selama 14 hari	Tiga bulan sekali
8	Penguatan Promosi Germas dan Pembinaan kabupaten/kota dalam menerapkan	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), UKBM	Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun	Dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan

No	Program	Indikator	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaporan
	kebijakan Germas		(Posyandu, Posbindu PTM, PosUKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll), yang dimotori oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan Bappeda.		
8	Penyusunan pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Germas	Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Germas	Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga, lintas program di Kementerian Kesehatan yang dimotori oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun	Dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan

5. Kesimpulan dan Saran

Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu pengukuran perbandingan antara harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak yang digunakan oleh semua negara di seluruh dunia. Pada tahun 2020, capaian IPM di Sumatera Utara sudah mencapai 71,77. Angka ini meningkat 0,03 poin dari capaian pada tahun 2019 yang sebesar 71,74.

Kesehatan merupakan salah satu komponen yang berperan dalam menentukan kualitas hidup manusia. Penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang tinggi merupakan tanda dari keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan. Oleh sebab itu diperlukan rencana tindak lanjut dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Utara melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Strategi Pemecahan Masalah sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan IPM dapat dilaksanakan sejalan dengan program kesehatan masyarakat pada RPJM. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai strategi pemecahan masalah yang sinergis dengan RPJM dengan fokus pada 3 masalah utama terkait kondisi lingkungan belum sepenuhnya sehat, praktek persalinan yang aman belum merata, dan kesadaran terhadap perilaku sehat yang masih kurang. Pada prinsipnya, peningkatan pelaksanaan RPJM akan meningkatkan IPM, maka upaya strategis untuk menjalankan RPJM merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan dan perlu menjadi prioritas pemerintah dalam pelaksanaannya sehingga dapat angka disparitas IPM di Kabupaten/Kota se-provinsi Sumatera Utara dapat diperkecil.

Daftar Pustaka

1. Garibaldi , M., dan Hidayat , P. 2014. Analisis Hubungan IPM Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol.2
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2020. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara 2020
3. Kacaribu,R.D. 2013. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Di Provinsi Papua.
4. Bangun, R.H. 2020. Determinan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara. Jurnal Administrasi Publik Uma, 8 (1) (2020): 32-39. Doi: 10.31289/Publika.V8i1.3066
5. Pardede, N.W., 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Sumatera Utara
6. Kementerian Kesehatan Ri. 2020. Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam RPJMN Dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD, K-GEH, Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Lahir di Sipirok pada tanggal 20 Februari 1954. Penulis memperoleh Gelar Dokter pada tahun 1980 pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Menyelesaikan pendidikan Spesialis Ilmu Penyakit Dalam pada tahun 1991 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Meraih Brevet Konsultan dalam Bidang Gastroentero-Hepatologi pada tahun 2003 dan gelar Doktor dalam Ilmu Kedokteran di Universitas Padjadjaran pada tahun 2018.

Penulis juga menyelesaikan beberapa program pendidikan pada tahun 2000 *Fifteenth International Workshop on Therapeutic Endoscopy (Hongkong)*, *Observer Training Attachment in the Department of Gastroenterology (Singapore General Hospital/Post Graduate Medical Institute, Singapore)*, *Advanced Clinical Training in Gastroenterology and Endoscopic Retrograde Pancreatography (ERCP) procedures (Mounth Elisabeth Hospital, Singapore)*. Pada tahun 2002 J.I.C.A. (Japan International Cooperation Agency) : *Training Course Detection of Early Gastrointestinal Cancer and Related Digestive Tumors* dan *Training Course of Diagnostic and Therapeutic Procedures in the Endoscopy Division (Tokyo, Japan)*.

Berawal dari tahun 1980-1981, bertugas sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Kaban Jahe Kab. Karo, Sumatera Utara, pernah menjabat antara lain Kepala Puskesmas Kec.Tiga Binanga, Kab. Karo, Sumatera Utara (1981-1985). Konsultan Penyakit Dalam di RSU Karang Baru, Kab. Aceh Timur (1989), Ahli Penyakit Dalam RSU Kaban Jahe (1991-1996), Staf Dept.I. Penyakit Dalam FK USU /RSUP H. Adam Malik (1996-1998), Staf Div Gastroentero-Hepatologi – Dept. Ilmu. Penyakit Dalam FK USU/RSUP H. Adam Malik Medan(1999-sekarang), Kepala Ruangan Dept I. Penyakit Dalam RSU. Tembakau Deli (2003), Ketua UPIM FK USU dan anggota UPP FK USU (2003-2005), Koordinator Seksi Pendidikan Dept. I . Penyakit Dalam FK USU (2003-2004), Anggota Team Pembentukan USU PT. BHMN (2004-2006), Redaksi Pelaksana MKN FK USU (2004-2008), Anggota Senat Non-Guru Besar USU (2004-2009), Pembantu Dekan I FK USU (2005-2007), Ketua Departemen Ilmu Keperawatan USU (2007-2008), Dekan Fakultas Kedokteran USU pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Sebagai Ketua Perkumpulan Gastroenterohepatologi Indonesia (PGI), Perhimpunan Endoskopi Gastrointestinal Indonesia (PEGI), Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI) Cabang Sumatera Utara pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang menjadi Kepala Divisi Gastroentero-Hepatologi FK USU/RSUP H. Adam Malik, dan sejak tahun 2016-2020 penulis menjadi Staf Ahli Rektor Bidang Akademik Universitas Sumatera Utara dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru Besar USU Periode 2018-2023.

Penulis telah banyak menerbitkan karya ilmiah/publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional dan Artikel Ilmiah Jurnal Internasional yang terindeks Scopus, pada tahun 2016 menerbitkan artikel dengan topik 1. *Serum TNF-a ,IL-8, VEGF levels in Helicobacter pylori infection and their association with degree of gastritis* (Q3); 2.

Serum IL-10, MMP-7, MMP-9 levels in Helicobacter pylori infection and correlation with degree of gastritis (Q3). Tahun 2017 menerbitkan artikel dengan judul : 1. Serum VEGF levels in Helicobacter pylori infection and correlation with Helicobacter pylori cagA and vacA genes (Q3); 2. The comparison of the effect between alginate-based raft-forming liquid and Alginate liquid on gastroesophageal reflux disease and gastric ulcer in rat (Q3). Tahun 2018 menerbitkan artikel dengan judul : 1. Association between vegf-634g>c gene polymorphism with gastric premalignant lesions and serum vegf levels in helicobacter pylori gastritis patients (Q3); 2. Risk factors of gastric premalignant lesion in gastritis patients (Q2); 3. Glutathione peroxidase level in patients with Helicobacter pylori-associated gastritis. Tahun 2019 menerbitkan artikel dengan judul: 1. Alternative Eradication Regimens for Helicobacter Pylori Infection In Indonesian Regions With High Metronidazole And Levofloxacin Resistance (Q1); 2. The Difference of Serum Gastrin-17 Level Based on Gastritis Severity and Helicobacter Pylori Infection (Q3); 3. Analysis of Risks of Gastric Cancer by Gastric Mucosa Among Indonesian Ethnic Groups (Q1); 4. Management of severe acute pancreatitis (Q3). Tahun 2020 menerbitkan artikel dengan judul: 1. Serum pepsinogens as a gastric cancer and gastritis biomarker in South and Southeast Asian populations (Q1); 2. The effect of bay leaf extract syzygium polyanthum (Wight) walp. on C-reactive protein (CRP) and myeloperoxidase (MPO) level in the heart of rat model of myocardial infarction (Q3); 3. Interleukin-8 heterozygous polymorphism (-251 T/A and +781 C/T) increases the risk of Helicobacter pylori-infection gastritis in children: a case control study (Q3); 4. The effect of roselle flower petals extract (Hibiscus sabdariffa Linn.) on reducing inflammation in dextran sodium sulfate-induced colitis (Q3); 5. The effect of bay leaf extract (Syzygium polyanthum) on vascular endothelial growth factor (VEGF) and CD31 (PECAM-1) expression in acute coronary syndrome (Q3). Tahun 2021 menerbitkan artikel dengan judul : 1. The Difference of Hypoxic Inducible Factor-1 α , Vascular Endothelial Growth Factor, and Transforming Growth Factor- β 1 Based on Liver Fibrosis Severity in Patients with Chronic Hepatitis B (Q3); 2. CYP2C19 Polymorphisms in Indonesia: Comparison among Ethnicities and the Association with Clinical Outcomes (Q1). Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and Neopterin Levels in Children with Steroid-sensitive and Steroid-resistant Nephrotic Syndrome (Q3)

Di tengah kegiatannya, penulis juga aktif menjadi Pembicara dan Moderator dalam Simposium Nasional dan Internasional; Juri Presentasi Oral dan Poster dalam Simposium Nasional dan Internasional dan Reviewer jurnal pada Arab Journal of Gastroenterology; Malaysian Journal of Medical Sciences; The Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology, and Digestive Endoscopy; Jurnal Anestesi Perioperatif dan Molecular Biology Reports.

Penghargaan yang pernah diterima penulis adalah Satyalancana Karya Satya XX Tahun pada tahun 2010, penghargaan dari Ikatan Dokter Indonesia tahun 2013 serta dari BPJS Kesehatan tahun 2015.

Peningkatan Mutu Lingkungan Melalui Daur Ulang Sampah Plastik Dalam Mewujudkan Produktivitas dan Ekonomi Masyarakat Sumatra Utara

Halimatuddahlia

Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

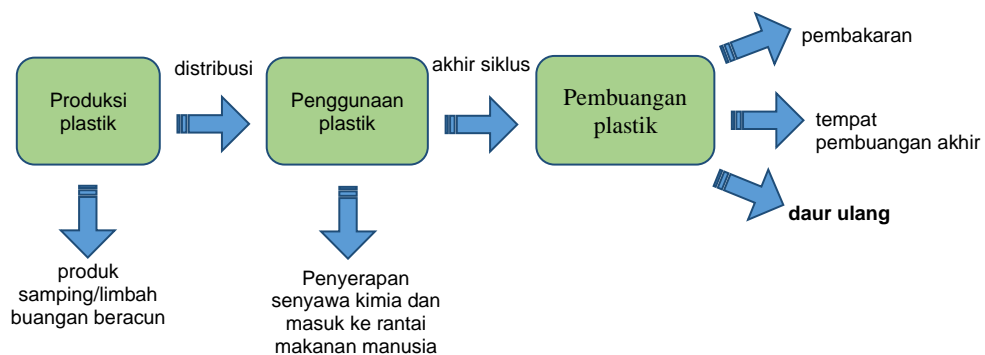
Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatra Utara Tahun 2019-2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Utara diamanatkan untuk melaksanakan empat Program Pembangunan Bidang Peningkatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu: 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 4. Program Pengelolaan Persampahan^[1]. Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan sampah terutama sampah plastik menjadi salah satu fokus dalam upaya mewujudkan produktivitas dan ekonomi masyarakat Sumatra Utara. Produksi sampah di Provinsi Sumatra Utara mencapai 10.091 ton per hari atau 3,69 juta ton per tahun. Sekitar 15 % dari total sampah tersebut adalah sampah plastik. Namun, sampah yang terkelola di Sumut baru 11 %^[2].

Kata "plastik" merupakan turunan dari kata *plasticus* (Bahasa Latin untuk 'dapat dibentuk') dan *plastikos* (Bahasa Yunani untuk 'cocok untuk dibentuk'). Plastik merupakan molekul panjang menyerupai rantai (polimer) dengan berat molekul tinggi yang disintesis dari minyak bumi yang dapat dibentuk, diekstrusi atau dicetak menjadi berbagai bentuk. Plastik bersifat kuat, ringan, fleksibel dan tahan lama serta menunjukkan sifat optikal yang lebih baik (bening, kilau dan warna). Plastik dapat dibentuk dengan mudah menjadi beragam bentuk dan ukuran serta memiliki kekuatan mekanik yang sangat baik (sifat tensil, ketahanan sobek dan dampak) walaupun tidak sekuat logam dan sekeras keramik/kaca. Pada beberapa aplikasi, plastik dimanfaatkan karena merupakan insulator listrik/panas yang baik serta tidak mengalami korosi ataupun pembusukan, tahan terhadap senyawa kimia, air ataupun minyak. Secara ekonomis plastik merupakan bahan yang praktis, murah, jangka waktu penggunaan yang relatif lama dan tersedia di manapun. Plastik merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Manusia menggunakan plastik dengan beragam cara, dari alat-alat rumah tangga hingga produk industri dan komersil

Plastik memiliki sifat antara lain tidak dapat terdegradasi secara biologis atau dapat mengalami degradasi tetapi, sangat lambat. Plastik biasanya memiliki titik lebur yang rendah sehingga mengembang ketika dipanaskan dan dapat terbakar serta melepaskan gas beracun ketika dibakar.

Plastik juga dapat mengontaminasi makanan dengan senyawa kimia yang sangat berbahaya.

Dampak negatif dari produksi plastik antara lain disebabkan resin plastik dibuat dengan menggunakan sumber daya alam tak terbarukan di mana sekitar 8% dari produksi minyak dunia digunakan untuk membuat plastik. Eksploitasi berlebih menyebabkan habisnya sumber daya alam. Di samping itu juga, mayoritas dari senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan plastik sangat beracun dan tidak dapat mengalami biodegradasi. Senyawa-senyawa kimia seperti benzena, vinyl klorida, xilem dan bisfenol A merupakan ancaman serius terhadap semua makhluk hidup di bumi. Benzena dan vinyl klorida telah dikonfirmasi merupakan karsinogen. Dalam lingkungan, plastik yang terpecah pecah menjadi partikel yang semakin lama semakin kecil dan menyerap senyawa kimia beracun, dicerna oleh hewan liar di darat dan di dalam laut dan masuk ke dalam rantai makanan manusia [3]. Gambar 1 berikut menyajikan siklus bahan plastik.



Gambar 1. Siklus bahan plastik

Bagi kesehatan manusia, dampak negatif bahan plastik disebabkan oleh senyawa kimia beracun yang terkandung dalam plastik mengakibatkan masalah saraf, kanker, cacat lahir, perubahan hormonal, bisul perut, masalah tiroid dan penyakit kardiovaskular. Senyawa kimia yang mengganggu endokrin / *endocrine disrupting chemicals* (EDC) pada plastik berkontribusi pada obesitas dan diabetes. Selain itu juga, botol plastik dapat menyerap senyawa kimia yang menyebabkan kanker seperti ftalat (komponen yang melembutkan plastik) dan bis-fenol A (komponen yang mengeraskan plastik). Bis-fenol A adalah suatu estrogen sintetis yang dapat mempengaruhi jantung dan dapat merusak DNA secara permanen.

Dampak negatif plastik terhadap tanah dapat terjadi baik secara fisika maupun kimia. Plastik dapat mengurangi kesuburan tanah dengan menjadi bagian dari zat pengotor selama bertahun-tahun. Plastik juga merusak estetika dan kebersihan lingkungan. Sementara itu, plastik di tempat pembuangan akhir (TPA) melepas senyawa organik volatil (*Volatile Organic Compound* / VOC) yang berbahaya. Plastik dalam tanah dapat mengurangi pertumbuhan dari tanaman dan pepohonan dengan menghalangi absorpsi mineral, air dan nutrisi lainnya dan dapat menyebabkan tanah longsor [4].

Adapun dampak negatif plastik terhadap udara meliputi keberadaan industri-industri plastik yang melepaskan karbon monoksida, dioksin dan hidrogen sianida dalam jumlah banyak. Polutan gas tersebut mengontaminasi udara dan menyebabkan penyakit pernafasan, kelainan sistem saraf dan melemahkan sistem imun dalam tubuh manusia. Selain itu, pembakaran sampah plastik melepaskan semua karbon yang tersimpan dalam plastik ke atmosfer, serta polutan udara seperti dioksin, furan, merkuri, dan bifenil poliklorinasi, yang beracun dan akan mengganggu kesehatan manusia [5].

Terhadap air segar, dampak negatif plastik antara lain adalah sampah plastik yang dibuang ke aliran air mengontaminasi dan meracuni air segar yang digunakan setiap hari. Ketika masuk ke badan air, plastik dapat masuk ke dalam rantai makanan manusia dengan mudah dan membahayakan kesehatan manusia. Sampah plastik juga dapat menyumbat aliran selokan dan menimbulkan *stagnant water* (air stagnan) yang merupakan habitat ideal untuk nyamuk dan parasit lainnya. Selokan yang tersumbat juga dapat mengakibatkan banjir ketika musim hujan.

Bagi kehidupan laut dampak negatif yang ditimbulkan meliputi kelilitan (*entanglement*) dan pencernaan sampah plastik oleh hewan laut, di mana banyak burung dan mamalia laut mati setiap tahun karena mencerna plastik. Plastik disalahartikan sebagai makanan dan dimakan oleh burung, kura-kura, ikan paus dan sebagainya. Hal ini dapat mengakibatkan kesedakan, keracunan dan mengganggu pencernaan.[6]

2. Masalah

Teknologi modern pada proses pembuatan plastik sampai pada tahap pengaplikasiannya dan pembuangannya berdampak pada lingkungan dan masyarakat, ada yang bersifat positif ataupun sebaliknya. Dalam hal ini, plastik memegang peranan penting dalam skema teknologi-ekonomi-lingkungan. Plastik yang diproduksi, dimanfaatkan dan dibuang melalui tahapan yang menggambarkan siklus bahan "*cradle to death*". Bahan baku plastik yang diperoleh dari habitat alam dengan cara pengeboran minyak bumi selanjutnya dimurnikan dan dikonversi menjadi bahan polimer. Sintesis dan proses selanjutnya menghasilkan produk yang direkayasa menjadi plastik. Polutan mungkin saja dibuang ke tanah, udara dan air selama tahap sintesis dan rekayasa. Selanjutnya bahan plastik yang telah direkayasa dibentuk dan dimodifikasi menjadi berbagai produk yang dapat diaplikasikan. Konsumen membeli produk dan menggunakannya hingga akhirnya rusak atau tidak dapat digunakan lagi dan kemudian dibuang. Pada tahap ini, plastik dapat digunakan kembali (di mana akan dimuali lagi siklus bahan yang baru) atau dibuang sebagai limbah, biasanya diinsenerasi (dibakar) atau dibuang dalam bentuk limbah padat yang ditanam di alam (*land fill*). Plastik dapat mengakibatkan kerusakan serius terhadap lingkungan ketika dalam proses produksi sampai tahap pembuangannya. Interaksi dan dampak pada lingkungan alam akan terjadi pada seluruh tahap siklus bahan. Kondisi

atmosfer alam, air, dan tanah bergantung besar pada bagaimana cara kita melewati siklus bahan ini. Beberapa kerusakan ekologi dan tanah merupakan dampak yang pasti terjadi pada saat fasa pengambilan bahan baku.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Kesadaran terhadap masalah lingkungan adalah hal yang penting karena seiring waktu berjalan, eksploitasi sumber alam akan terus meningkat diiringi dengan tingkat polusi yang juga akan terus mengkhawatirkan. Eksploitasi sumber alam selain memiliki dampak pada konsumsi bahan baku dan energi, juga berdampak pada kontaminasi tanah, air dan udara, sehingga:

1. Polutan yang dibuang ke tanah, udara dan air selama tahap sintesis dan pemrosesan plastik perlu dikurangi dan selanjutnya secara bertahap dihilangkan. Menyelesaikan masalah lingkungan yang berhubungan dengan pemrosesan akan mempengaruhi harga produk. Biaya produksi biasanya lebih tinggi untuk sebuah produk yang ramah lingkungan daripada produk yang diproduksi tanpa memperhatikan masalah lingkungan. Sehingga, pemerintah/industri biasanya menghadapi suatu dilema dari potensi ekonomi-lingkungan dan kemudian memutuskan kebijakan ekonomi-lingkungan.
2. Produk akhir, perangkat atau peralatan sebaiknya didesain dengan baik sehingga selama proses pemakaiannya akan menghasilkan dampak lingkungan yang minimal. Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah/industry untuk memperbaharui kinerja lingkungan suatu produk dikenal sebagai analisis siklus hidup. Dengan pendekatan melalui perencanaan produk, pertimbangan dampak produk tersebut terhadap lingkungan, ekstraksi material ke pembuatan produk dan pengaplikasiannya, sampai kepada pemakaian ulang dan pembuangan. Pendekatan ini disebut dengan "*green design*". Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengukur berbagai masukan (misalnya material dan energi) dan keluaran (misalnya limbah) untuk setiap jumlah dari siklus hidup bahan. Penilaian dilakukan relatif terhadap dampaknya baik lingkungan global dan lokal dalam hal efek pada ekologi, kesehatan manusia, dan cadangan sumber daya.
3. Kebijakan untuk mendaur ulang komponen bahan atau setidaknya dibuang dengan kemampuan degradasi alam (*biodegradable*) harus dibuat. Mendaur ulang produk yang telah digunakan lebih baik daripada membuangnya sebagai limbah, hal ini berkaitan dengan:
 - a. Menggunakan material yang didaur ulang mengurangi kebutuhan untuk mengambil bahan baku dari alam, sehingga dapat melestarikan sumber daya alam dan mengurangi dampak ekologi yang terlibat dalam proses pengambilan bahan baku.

- b. Kebutuhan energi pada proses pemurnian dan pemrosesan bahan daur ulang adalah biasanya lebih rendah daripada proses aslinya (baru).

Tahapan penting dalam siklus bahan adalah proses daur ulang dan pembuangan. Masalah dari kemampuan didaur ulang maupun dibuang adalah penting ketika material baru direncanakan dan dibentuk. Lagipula, selama pemilihan proses material, disposisi akhir dari material seharusnya menjadi kriteria penting.

Dari sudut lingkungan, material yang ideal seharusnya dapat seluruhnya didaur ulang atau terurai. Dapat didaur ulang artinya bahwa suatu material, setelah mengalami masa aktifnya dalam suatu komponen, dapat diproses lagi, dapat diulang kembali proses material dan dapat digunakan kembali dalam komponen lain. Seluruhnya terurai, diartikan, melalui interaksinya dengan lingkungan (kimia alami, mikroorganisme, oksigen, panas, sinar matahari, dan sebagainya), material memburuk dan kembali ke keadaan yang hampir sama. Beberapa bahan menunjukkan tingkatan yang berbeda dalam kemampuan daur ulang dan penguraiannya secara alami.

Proses daur ulang plastik secara umum melibatkan beberapa tahapan yaitu sampah plastik dipilih dan dipisah-pisahkan. Penyortiran berdasarkan jenis dan warna adalah hal yang penting. Selanjutnya dipotong/dicacah kecil-kecil dan dicuci untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Sampah plastik yang sudah bersih kemudian dikirim ke penggilingan untuk dilebur kembali (biasanya menggunakan ekstruder) dan selanjutnya diolah menjadi bahan baku sesuai dengan produk yang diinginkan.

Polimer termoplastik, seperti polietilena tereptalat (PET), polietilena (PE) dan polipropilena (PP), adalah plastik yang paling banyak untuk diubah dan didaur ulang, karena memungkinkan untuk berubah bentuk selama pemanasan. Gambar (2) menunjukkan kode daur ulang dan material yang bersangkutan. Kode ini biasanya tercantum pada produk plastik. Daur ulang plastik menjadi rumit dengan adanya pengisi yang ditambahkan untuk memodifikasi sifat aslinya. Plastik daur ulang memiliki harga yang lebih rendah daripada plastik murni, dan kualitas serta penampilannya akan menurun dengan setiap daur ulang.



Gambar 2. Kode daur ulang beberapa jenis plastik

Adapun aplikasi material murni sebelum dan setelah bahan di daur ulang terkait kode daur ulang plastik di atas adalah ^[7] :

1. PETE/PET (Polyethylene terephthalate); produk sebelum daur ulang berupa wadah minuman, botol untuk makanan; produk daur ulang berupa botol, kuas, plaster, tempat telur, karpet dan sebagainya
2. HDPE (High density polyethylene); produk sebelum daur ulang berupa wadah (susu, air, jus), tas belanja,mainan, botol deterjen cair; produk daur ulang berupa tutup botol minuman ringan, pot bunga, pipa saluran air, tong sampah dan sebagainya
3. V/PVC (Polyvinyl chloride); produk sebelum daur ulang berupa kemasan makanan, botol sampo; produk daur ulang berupa matras, pipa, selang dan sebagainya
4. LDPE (Low density polyethylene); produk sebelum daur ulang berupa wadah roti, wadah makanan beku, tas belanja; produk daur ulang berupa kaleng sampah, tas belanja, kantong serbaguna dan sebagainya
5. PP (Polypropylene); produk sebelum daur ulang berupa botol kecap, wadah yoghurt dan bak margarin, botol obat; produk daur ulang berupa ember cat, baki makanan cepat saji, kemudi mesin pemotong rumput, bagian baterai mobil dan sebagainya
6. PS (Polystyrene); produk sebelum daur ulang berupa *compact disc*, cangkir kopi; pisau, sendok, dan garpu; baki-baki tempat makan; produk daur ulang berupa aksesoris desktop, tempat berkas, baki servis makanan, pot bunga, tong sampah dan sebagainya
7. *Other*, termasuk akrilik, polikarbonat, nilon, glasfiber, produk sebelum daur ulang berupa kacamata hitam, nilon; produk daur ulang berupa kayu plastik.

4. Rencana Tindak Lanjut

Daur ulang sampah khususnya sampah plastik menjadi salah satu upaya peningkatan mutu lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah. Daur ulang sampah plastik menjadi suatu upaya yang dapat mengurangi volume sampah plastik di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara. Sampai saat ini, upaya pengelolaan sampah plastik di Sumatra Utara terus ditingkatkan, sehingga seluruh sampah plastik dapat terkelola dan di daur ulang. Hal ini menyebabkan sampah plastik yang biasanya hanya ditumpuk di sekitar sumber sampah, dibuang di saluran air, dibakar secara terbuka, dan ditimbun di pekarangan, sehingga mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan dapat dikelola dengan baik.

Selain itu, pemerintah Provinsi Sumatra Utara juga dapat membebaskan kepada produsen atau pelaku usaha/industri untuk menyusun program pendauran ulang sampah khususnya plastik sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya. Peran industri juga tidak bisa dilepaskan dengan kaitannya untuk mendukung kesuksesan sistem daur ulang sampah plastik. Manajemen pengurangan serta pengolahan sampah berbasis lingkungan yang berkelanjutan perlu diterapkan. Secara tidak langsung, dengan adanya

kewajiban untuk menerapkan pengolahan sampah plastik, pihak industri dituntut untuk:

1. Menghasilkan suatu produk yang dapat diolah kembali menjadi material atau energi baru yang memiliki nilai ekonomis.
2. Pihak pelaku usaha atau industri bersama-sama pemerintah juga harus melakukan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada konsumen untuk berperan dalam rantai daur ulang.
3. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk menarik kembali kemasan plastik yang telah dipergunakan untuk didaur ulang.
4. Proses penanganan sampah plastik dilakukan dengan memilah beberapa jenis sampah, yang salah satunya adalah sampah yang dapat di daur ulang hingga akhirnya sampah tersebut dapat diolah kembali baik dalam bentuk daur ulang untuk menghasilkan materi atau energi.
5. Khusus untuk pelaku usaha kecil seperti UMKM, pemerintah dapat memberi bantuan/hibah berupa instrumen/mesin daur ulang sampah seperti mesin pencacah dan ekstruder untuk mengubah sampah plastik menjadi bijih plastik.

Bentuk dukungan lain yang diberikan pemerintah bagi pihak yang menyukseskan pelaksanaan kegiatan daur ulang adalah pemberian penghargaan atau insentif. Pemerintah melalui Gubernur Sumatera Utara dapat memberikan insentif bagi setiap pihak yang melakukan pengurangan sampah dan daur ulang sampah plastik. Penghargaan tersebut salah satunya dapat berbentuk penghargaan atau publikasi penilaian kinerja baik. Insentif yang diberikan dapat berupa pemberian hibah berupa peralatan yang dapat lebih memaksimalkan proses daur ulang sampah plastik. Pemerintah juga turut memberikan sanksi kepada pihak pengelola sampah khususnya plastik yang terbukti melawan hukum dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah plastik yang tidak sesuai dengan standar yang terdapat dalam undang-undang (termasuk dengan kegiatan pengelolaan yang tidak menerapkan kegiatan daur ulang).

Dalam hal kaitannya dengan ekonomi, pelaksanaan daur ulang sampah juga digalakkan melalui bank sampah. Bank sampah menjadi salah satu media peningkatan partisipasi masyarakat untuk dapat terjun langsung dalam proses pengurangan sampah serta penanganan sampah. Hal ini diimplementasikan dengan adanya sistem bagi hasil penjualan sampah antara masyarakat sebagai penabung dengan pengelola bank sampah.

5. Kesimpulan dan Saran

Dampak lingkungan yang disebabkan penggunaan bahan plastik telah dimulai dari eksploitasi bahan baku sampai kepada tahap produksi dan limbah. Dalam hal ini, keseluruhan siklus material merupakan pertimbangan penting; siklus ini termasuk ekstraksi, sintesis/pemrosesan, perancangan/

pembuatan produk, interaksi lingkungan/perubahannya. Masalah lingkungan melibatkan kerusakan ekologi, polusi, dan pembuangan limbah merupakan tanggung jawab seluruh aspek kehidupan mulai dari pemerintah, pelaku usaha sampai kepada lapisan masyarakat. Daur ulang sampah plastik dan memanfaatkan *green design* dapat meniadakan beberapa masalah lingkungan tersebut. Melalui daur ulang sampah plastik mutu lingkungan di wilayah Provinsi Sumatra Utara akan meningkat sehingga produktivitas dan ekonomi masyarakat akan terwujud.

Secara umum penanggulangan permasalahan sampah plastik berkisar pada upaya yang terkenal dengan istilah 3R, yaitu *Reuse* (memakai kembali), *Reduce* (mengurangi), dan *Recycle* (mendaur ulang). Untuk produk kemasan plastik yang digunakan sebagai wadah makanan/minuman/cairan, biasanya bahan yang digunakan hanya sesuai untuk sekali pakai (*disposable*). Oleh karena itu, penerapan *reuse* terbatas untuk produk dari produk bahan plastik tertentu. Sedangkan mengurangi/menekan pemakaian plastik (*reduce*) dapat dilakukan dengan gerakan pengurangan sampah plastik yang telah dicanangkan Gubernur Sumatera Utara. Sementara itu, pendaurulangan (*recycle*) sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan harapan selain mengurangi sampah plastik tersebut juga dapat menghasilkan produk yang baru.

Daftar Pustaka

1. <http://bappeda.sumutprov.go.id/page/?t=dokumen-rpjmd>
2. <https://sumatra.bisnis.com/read/20200216/533/1202014/89-persen-sampah-di-sumut-tak-terkelola>
3. <https://bkpp.demakkab.go.id/2020/06/dampak-negatif-sampah-plastik-kesehatan.html>
4. <https://environment-indonesia.com/dampak-plastik-terhadap-lingkungan/>
5. <https://www.gramedia.com/literasi/pencemaran-lingkungan/>
6. <https://www.idntimes.com/science/discovery/nurfi/bahaya-fatal-sampah-plastik-di-laut-exp-c1c2/2>
7. Callister, W.D., *Materials Science and Engineering; an Introduction*, 5th ed., John Wiley & Sons, USA, 2000.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Halimatuddahlia, S.T., M.Sc., Guru Besar Tetap Bidang Teknik Kimia di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Lahir di Medan pada tanggal 8 April 1973. Penulis menyelesaikan menyelesaikan strata 1 (S1) pada tahun 1997 di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Dari tahun 1998 sampai sekarang penulis menjadi staf pengajar pada Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Pada tahun 2002 penulis menyelesaikan Program Magister (S2) yang dilanjutkan Program Doktor (S3) dalam bidang Teknologi Polimer pada Universiti Sains Malaysia, dan selesai pada tahun 2006. Bidang keahlian yang ditekuni oleh penulis adalah Teknologi Komposit berbasis Polimer/ Biopolimer. Penulis menjadi pengasuh beberapa mata kuliah di Departemen Teknik Kimia untuk jenjang S1, S2 dan S3 seperti Teknologi Polimer, Teknologi Bahan dan Korosi, Metodologi Penelitian, Perpindahan Panas, Teknologi Polimer Lanjut, Ekologi Industri, dan Teknologi Biopolimer. Selain sebagai staf pengajar pada Departemen Teknik Kimia beliau juga mendapat tugas tambahan sebagai Kepala laboratorium Kimia Organik (2017-sekarang). Penulis aktif meneliti dan menulis serta mengikuti seminar-seminar skala international serta berperan aktif membuat pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga merupakan salah satu tim reviewer internal bersertifikat Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara.

Peran Perguruan Tinggi Membangun Pendidikan Bermutu dan Bermartabat di Sumatera Utara

Harry Agusnar

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Dalam menghadapi era globalisasi, perguruan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan multi-dimensional dengan berbagai perubahan yang memberi dampak muncul persaingan bebas, munculnya perguruan tinggi luar di Indonesia sehingga membawa dampak dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Engkoswara (1999) menyatakan bahwa kehidupan manusia Indonesia menjelang tahun 2020 akan semakin membaik dan dinamis, namun dituntut kemampuan kualitas kemandirian yang tangguh untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan yang diakibatkan terjadinya perubahan (1).

Menurut Tampubolon (2002) Indonesia akan menghadapi tiga tantangan utama yang saling berkaitan, sangat kompleks dan akan dihadapi dalam waktu yang bersamaan, yaitu heterogenitas penduduk Indonesia, tingkat perkembangan masyarakat yang berbeda, dan pengaruh proses perkembangan sosio-ekonomi. Untuk menghadapi kondisi ini, maka Perguruan Tinggi dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang tidak saja harus mampu bersanding dengan SDM dari negara-negara lain tetapi juga harus mampu bersaing dengan mereka. Untuk itu, perguruan tinggi harus meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan, sehingga dalam menjalankan misi utamanya, perguruan tinggi dapat membentuk SDM yang bermutu yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi handal yang diperlukan untuk membangun masa depannya serta mampu mengamalkan ilmu, budaya, seni dan teknologi yang dikuasainya (2).

Perguruan tinggi sebagai wadah untuk mendidik kader-kader pemimpin bangsa, terutama calon ekonom memerlukan suatu cara pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan instansi non pendidikan, karena dalam wadah ini berkumpul orang-orang yang berilmu dan bernalar. Tanggung jawab pendidikan tidak saja beban pemerintah namun oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengelolaan Pendidikan Tinggi yang mengacu pada upaya peningkatan kualitas pelayanan manajemen yang berkelanjutan, program pembelajaran yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang bermutu menjadi dasar tercapainya tujuan Pendidikan (3). Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas pelayanan akademik. Mengetahui kualitas jasa pendidikan dapat dilakukan dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan yang diperoleh atau diterima secara nyata oleh mereka dengan pelayanan yang sesungguhnya.

Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, pelayanan dapat dikatakan bermutu. Sebaliknya jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, pelayanan dapat dikatakan tidak bermutu. Namun apabila kenyataan sama dengan harapan, maka kualitas pelayanan disebut memuaskan. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat didefinisikan seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang diterima mereka.

2. Masalah

Masalah penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana manajemen perguruan tinggi diatur dalam suatu manajemen yang rapi, efisien dan transparan serta akuntabel, sehingga memiliki arah yang jelas yakni mutu lulusan yang baik. Perguruan Tinggi yang berkualitas dapat dilihat berdasarkan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pada institusi tersebut akan bermuara yang diikuti dengan terjadinya peningkatan kinerja lembaga dan mutu produk yang dikembangkan

3. Strategi Pemecahan Masalah

Pentingnya peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu yang harus dilakukan untuk dapat menghadapi perubahan yang semakin kompleks. Berbicara mengenai mutu pendidikan sebenarnya membicarakan tentang dua sisi yang sangat penting yaitu proses dan hasil. Mutu dalam “proses pendidikan” melibatkan berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru) sarana-prasarana lembaga pendidikan, dukungan administrasi, berbagai sumber daya dan upaya penciptaan suasana yang fair dan nyaman untuk belajar. Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh lembaga pendidikan pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester/cawu, akhir tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun).

Pentingnya Mutu Pendidikan

Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil test kemampuan akademis dan dapat pula berupa prestasi di bidang lain seperti cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya: komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi lembaga pendidikan dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangibile*) seperti suasana disiplin, keramahtamahan, keakraban, saling menghormati, kebersihan, toleransi, dsb. Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan satu sama lainnya, akan tetapi agar proses pendidikan dapat bermutu dan tepat sasaran, maka mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh Lembaga Pendidikan. Lembaga Pendidikan wajib menetapkan target yang jelas untuk dicapai setiap tahun atau kurun waktu tertentu.

Pendidikan tinggi sebagai mana tertuang dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Mempersiapkan sumber daya manusia menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan Tugas dan fungsi serta kewajiban yang terumus dalam “Tridarma” perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor determinan bagi keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Berangkat dari sini maka suatu negara yang ingin maju harus mengembangkan kualitas sumber daya manusianya, ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas berperan aktif dalam mengantarkan kemajuan bagi bangsanya. Menurut A.R., Tilaar, bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang unggul, sadar akan identitasnya, serta sadar akan wawasan nusantara. Pandangan lain menurut Azyumardi Azra, bahwa sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki kualitas seimbang, beriman, berilmu (beriptek) dan beramal, cakap baik secara lahiriyah maupun batiniah(4).

Sumber daya manusia yang berkualitas di atas dengan mencirikan manusia yang berkualitas di antaranya: memiliki iman dan taqwa, serta moralitas, memiliki tanggung jawab pribadi dan sikap jujur, memiliki fisik atau jasmani yang sehat, menghargai ketepatan waktu, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki visi yang jelas mengenai masa depannya, menghargai dan memiliki ilmu pengetahuan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komperhensif dalam berfikir dan bertindak, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, berwawasan yang luas, professional, dan mampu mengantarkan lulusannya pada pencapaian pengetahuan dan kompetensi yang dapat menjawab tantangan global.

4. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada setiap lembaga pendidikan di Indonesia umumnya, maka diperlukan partisipasi aktif dan dinamis dari para pimpinan lembaga atau seluruh civitas akademik, para orang tua, mahasiswa, staf pengajar dan staf lainnya termasuk institusi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan lembaga pendidikan.

Lembaga Pendidikan perlu membentuk sebuah unit kerja yang bertugas melakukan penyusunan basis data dan profil lembaga pendidikan secara sistematis yang menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa, guru, staf), dan keuangan. Semua proses ini harus dipantau secara teratur

dan berkesinambungan, sehingga akan terasa hasilnya. Informasi yang terangkum dengan sistematis tersebut selanjutnya diteruskan pihak lembaga pendidikan sehingga dapat memahami secara jelas pada posisi mana derajat kualitas pendidikan sebuah lembaga pendidikannya berada saat ini. Para konsultan menyajikan data secara terperinci sehingga para pengambil kebijakan di lingkungan lembaga pendidikan dapat mengambil keputusan penting yang menyangkut pembangunan konsep pendidikan dan arah rencana pendidikan ke depan yang akan dicapai(5).

Selama ini pembangunan pendidikan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan sedangkan faktor proses pendidikan kadang terabaikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka lembaga pendidikan harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. Setiap lembaga pendidikan harus memiliki otonomi dan kewenangan untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan yang dimiliki peserta didik. Kewenangan tegas untuk tidak membiarkan (*let go*) peserta didik yang tidak sanggup mengikuti pelajaran di kelas berikutnya perlu diterapkan sehingga mahasiswa yang berada pada level berikutnya adalah benar-benar seorang peserta didik yang sanggup untuk mencerna pengetahuan dan mengakses informasi.

Bagi pengelola PT, peningkatan mutu pada hakekatnya berinti pada perbaikan yang terus-menerus untuk memperkuat dan mengembangkan mutu produk PT. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan pelanggan selalu berubah dan dalam kinerja yang selalu mungkin masih mengalami kekurangan. Menurut Jalal dan Supardi (2001) bahwa kebijakan program untuk strategi peningkatan mutu pendidikan pada PT harus sesuai dengan relevansi pendidikan yang meliputi empat aspek, yaitu a) kurikulum, b) penyedia, c) tenaga ahli kependidikan, sarana pendidikan, d) kepemimpinan satuan pendidikan. Sedangkan Tampubolon (2002) menyatakan bahwa strategi yang dapat dilakukan PT dalam peningkatan mutu pendidikan adalah: a) menciptakan dan mengembangkan situasi Menang-Menang (*Win-Win Solution*), b) menumbuhkan Motivasi Instrinsik, c) peningkatan mutu berkelanjutan, d) menumbuhkan persaingan dalam konteks Kerjasama, e) mencegah lebih baik daripada memperbaiki(6).

Untuk itu, Perguruan Tinggi perlu melakukan strategi perencanaan pembelajaran yang bermutu. Perkuliahan bermutu dimaksudkan adalah semua proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian (pelaksana rencana) materi perkuliahan, evaluasi proses, produknya dan unsur-unsur yang terlibat dalam usaha memenuhi kebutuhan pelanggan terutama mahasiswa maupun dunia kerja.

Proses Pendidikan di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan wahana tenaga ahli yang diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi sumbangan kepada pembangunan. Sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan empat kebijakan pokok dalam bidang pendidikan yaitu (1) pemerataan dan kesempatan; (2) relevansi pendidikan dengan pembangunan; (3) kualitas pendidikan; dan (4) efisiensi pendidikan. Khusus untuk perguruan tinggi akan lebih diutamakan membahas mengenai relevansi pendidikan dengan pembangunan yang dalam langkah pelaksanaannya dikenal dengan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*).

Pendidikan sebagai suatu proses meliputi: *pertama*; mengenal adanya *raw-input* dan *instrumental input* *Raw input* merupakan peserta didik, sedangkan *instrumental input* terdiri dari : gedung, perpustakaan, pedoman akademik, dosen, kurikulum, metode dan lain-lain. *Kedua*; *raw input* dan *instrumental input* masuk dalam proses, yang ini akan memakan waktu delapan (8) semester. *Ketiga output* (hasil didik) yang sesuai dengan kriteria institusi dan siap untuk masuk kedalam persaingan sumber daya manusia. Dosen merupakan instrumen yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan, karena dari dosenlah perpindahan ilmu dilakukan kepada peserta didik. Perguruan tinggi yang memiliki tenaga-tenaga dosen yang berkualitas akan banyak diminati oleh masyarakat. Program untuk meningkatkan kualitas para dosen adalah merupakan kewajiban yang tidak ditawar-tawar lagi pada saat ini dan pada masa mendatang. Perguruan tinggi yang tidak mau mengikuti arus perkembangan perubahan sekarang dan pada masa yang akan datang akan ditinggalkan oleh masyarakat dan lambat atau cepat akan mengalami kemunduran, yang akhirnya akan mengalami keruntuhan.

Di sisi lain, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Kurikulum dibagi dalam kurikulum inti dan kurikulum lokal (institusional). Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik, dalam penyelesaian suatu program studi. Selanjutnya, kurikulum lokal (institusional) adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan(7).

Pembenahan Manajemen Pendidikan

Untuk mengantisipasi perubahan yang dinamis itu, maka perguruan tinggi haruslah menyiapkan manajemen pendidikan yang *adaptif* dan berorientasi pada kebutuhan *customer*. Perguruan Tinggi (PT) dituntut memiliki misi, visi dan orientasi yang jelas, terbuka dan mempunyai tujuan jangka panjang yang dapat menciptakan produktivitas lulusan yang dapat berdaya saing di tingkat nasional, serta bersaing dengan lulusan dari

pendidikan luar negeri. Selain itu, manajemen merupakan salah satu tuntutan karena manajemen PT merupakan jantung dari dunia pendidikan tinggi yang akan memberikan atmosfer bagi pemenuhan kebutuhan pasar, serta mampu menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, peningkatan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan PT sudah sangat mendesak, termasuk dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern yang berorientasi pada mutu/ kualitas, yaitu prinsip manajemen yang tidak kaku.

Selanjutnya, Perguruan Tinggi (PT) setidaknya dapat melakukan pembenahan pada pola manajemen adaptif terhadap perubahan, manajemen partisipatif sesuai dengan budaya lokal dan desentralisasi, dan membentuk organisasi yang *flat* tanpa hirarki yang berlebihan serta manajemen mengambil peranan moral dan etika dalam mengelola PT. Langkah-langkah yang harus dilakukan PT adalah melakukan proses internalisasi yang dikemas dalam pembentukan budaya organisasi yang sesuai dengan misi, visi dan tujuan jangka panjang PT. Dalam mengantisipasi proses perubahan tersebut mau tidak mau harus dilakukan berbagai upaya agar dapat mengikuti kemajuan dan perkembangan transformasi yang semakin canggih. Khusus dalam bidang pendidikan yang dulunya telah dipolitisir untuk menunjang '*struktur kekuasaan*', yang diarahkan kepada berbagai keseragaman sangat urgen untuk melakukan berbagai perubahan maupun pembenahan ke arah pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.

Untuk itu, pemberdayaan pendidik harus didukung oleh sistem manajemen pendidikan yang efektif. Melalui manajemen pendidikan yang efektif memungkinkan pendidik melakukan tugasnya secara profesional dengan kreatif serta produktif. Manajemen pendidikan harus mencakup fungsi mengenai : a) Profesionalisme, standard, kriteria; b) perekrutan dan penempatan; c) Tingkat dan mutasi; d) Gaji, perangsang dan jasa; dan e) pengawasan dan dukungan. Sudjarwo menyebutkan bahwa apapun pembaharuan pendidikan dilakukan jika tidak menyentuh apa yang digelar dosen di muka kelas, maka pembaharuan dan apapun namanya tidak berarti apa-apa. Sementara terkait dengan partisipasi mahasiswa, proses pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada kesadaran dari peserta didik bahwa proses pembelajaran itu orientasinya ada pada peserta didik itu sendiri, bukan pada pendidik(8).

Secara skematik, Model Peran Pendidikan Menuju Bangsa Yang Bermartabat dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Dari skematik di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Martabat bangsa dapat diwujudkan apabila mutu penyelenggaraan pendidikan menjadi prioritas.
2. Martabat bangsa akan terwujud jika semua elemen bangsa peduli terhadap pendidikan
3. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja
4. Inventasi bidang pendidikan memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama.

5. Kesimpulan dan Saran

Pendidikan dan pengajaran dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka program studi yang tersedia seyogyanya harus sesuai dengan minat masyarakat, selaras dengan tuntutan jaman, calon mahasiswanya haruslah baik, tenaga pengajarnya berbobot, proses pendidikannya harus dapat berjalan dengan baik, serta sarana dan prasarannya harus memadai. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan strategi peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi antara lain:

a. Mahasiswa yang Dididik.

Untuk dapat menghasilkan produk yang baik, maka harus menanam bibit-bibit yang baik. Untuk mendapatkan bibit yang baik perlu seleksi yang baik pula. Kendalanya yang dihadapi di hampir perguruan tinggi dalam mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai kualitas baik adalah terbentur dengan beberapa faktor misalnya dengan motto Universitas : *Biaya Terjangkau Mutu Terjamin*, yang harus tetap dilaksanakan. Sejarah pendirian suatu perguruan tinggi swasta adalah untuk menampung calon mahasiswa yang tidak bisa diterima di PTN, serta target penerimaan mahasiswa baru sebanyak-banyaknya. Dengan demikian sistem seleksi yang belum mempertimbangkan segi mutu calon mahasiswa yang

sesungguhnya, karena standar kelulusan untuk dapat diterima di suatu fakultas belum begitu ketat dilakukan. Penerapan seleksi yang mengedepankan mutu dan target penerimaan mahasiswa baru sebanyak-banyaknya masih menjadi pertimbangan yang belum dapat dilaksanakan.

Satu sisi penting untuk menerima calon mahasiswa yang bermutu, tetapi dari sisi yang lain dihadapkan pada target minimal; yang juga sulit untuk menentukan jumlah minimalnya. Dengan mendapatkan jumlah mahasiswa yang memadai, maka perguruan tinggi itu akan memiliki dukungan dana yang kuat; karena cenderung menerima jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, dari calon mahasiswa harus betul-betul dapat dijaring dengan seleksi yang ketat supaya calon mahasiswa yang diterima itu mempunyai standar kualitas yang baik. Mahasiswa ada tidak lepas an berdiri sendiri, tetapi ada hubungan tanggung jawab perkembangan sebuah perguruan tinggi.

Di samping itu tingkat kedisiplinan mahasiswa perlu ditingkatkan, karena melalui disiplin yang tinggi ini mahasiswa benar-benar dapat mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan ilmu pengetahuan yang diterimanya. Untuk menambah mutu serta kemampuan mahasiswa Ketika mahasiswa mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi, maka perlu ditambah dengan kemampuan berorganisasi, sebab di dalam organisasi ini akan mampu mengembangkan potensi pribadi bagi mahasiswa dan menambah pengalaman guna menunjang ilmu pengetahuan yang diterimanya.

b. Dosen Sebagai Pendidik dan Pengajar

Pengelolaan sumberdaya manusia di perguruan tinggi khususnya dosen, perlu diarahkan pada pembedayaan dosen itu sendiri. Paradigma tenaga pengajar (dosen) itu menurut Bambang Kesit (2009), dikatakan harus dimulai dengan melakukan orientasi pendidikan, yang meliputi : *Pertama*; dari belajar terminal ke belajar sepanjang hayat, *Kedua*; dari belajar berfokus penguasaan pengetahuan ke belajar holistik, *Ketiga*; mengubah citra hubungan dosen - mahasiswa yang bersifat konfrontatif ke citra hubungan kemitraan, *Keempat*; mengubah orientasi dari pengajar yang menekankan pengetahuan skolastik (akademik) ke penekanan keseimbangan fokus pendidikan nilai, *Kelima*; mengubah orientasi dari pola konvensional menuju pola pendekatan teknologi informasi dan budaya, *Keenam*; dari penampilan tenaga pengajar (dosen) yang terisolasi ke penampilan dalam tim kerja (*partnership* kepada institusi/ bukan subordinatif dengan institusi pendidikan). Dengan paradigma tenaga pengajar tersebut di atas diharapkan nantinya lembaga pendidikan dapat menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan yang bersifat kompetitif yang berimplikasi kepada munculnya *comparatif advantage* terhadap suatu eksistensi lembaga pendidikan di tengah-tengah masyarakat.

Dosen harus mempunyai kualifikasi yang diperlukan bagi penyampaian ilmunya kepada mahasiswa. Dengan tenaga dosen yang

berkompeten dan berkualitas akan memudahkan penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang disampaikan kepada mahasiswa dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan mahasiswa dengan kajian bidang ilmu yang dipilihnya. Kaitannya dengan kualifikasi ini, seorang dosen senantiasa minimal telah mendapat penyetaraan jabatan fungsional dari Departemen pendidikan Nasional, dengan jabatan Asisten Ahli. Semakin tinggi jabatan fungsional dosen ini menunjukkan tingkat kualifikasi seseorang, baik dari aspek prestasi ataupun prestisenya.

c. Sarana dan Prasarana

Untuk menghasilkan kualitas tenaga lulusan perguruan tinggi, maka harus bekerja sama dengan pihak dunia usaha/industri sebagai penyerap dan pemakai tenaga lulusan perguruan tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan unsur mahasiswa, alumni dan perusahaan-perusahaan yang mewakili dunia usaha, untuk memberikan masukan yang berguna untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang diharapkan mampu berkiprah di era globalisasi. Untuk itu, maka perlu perbaikan terhadap kurikulum dengan menambahkan program-program baru seperti: penguasaan bahasa internasional, teknologi komputer, program magang dan etika. Laboratorium sebagai ajang latihan dan praktik mahasiswa perlu dilengkapi dengan fasilitas yang cukup serta program pelatihannya harus disesuaikan dengan perkembangan dunia industri dan jasa, sedangkan perpustakaan sebagai jantungnya perguruan tinggi perlu diperkaya dan dilengkapi dengan berbagai jurnal dan literatur yang terbaru.

Saran

Setiap PT harus ada perangkat yang lengkap memungkinkan mahasiswa dapat melakukan interaksi secara global termasuk menggali pengetahuan lewat internet. Demikian pula gedung atau ruang perkuliahan serta perlengkapannya sebagai penunjang proses pendidikan dan pengajaran sangat perlu mendapat perhatian dari segi kebersihan, keindahan serta kenyamanannya.

Daftar Pustaka

1. Engkoswara. (1999). Menuju Indonesia Modern 2020. Bandung: Yayasan Amal Keluarga
2. Tampubolon, Biatna. D (2007). Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan Dan Faktor Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi Yang Telah Menerapkan SNI 19-9001-2001. Jurnal Standardisasi. No 9. Hal: 106-115.
3. Fitrah, M. (2017). Peran Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Jurnal Penjaminan Mutu, 31-42.
4. H.A.R. Tilaar. (1994) *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
5. Widodo, H. (2016). Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Cendekia: Jurnal Kependudukan dan Kemasyarakatan, 293-308.
6. Sulistyorini. (2018). Partisipasi Stakeholder Eksternal dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, 347-372.
7. Wijaya, EY., Sudjimat, DA., & Nyoto, A. (2016). Transformasi Pendidikan Abad 21 sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika, Volume 1 Universitas Kanjuruhan Malang, hlm. 263-278.
8. Alawiyah, F. (2012). Kebijakan dan Pengembangan Pembangunan Karakter melalui Pendidikan di Indonesia: Aspirasi, Vol. 3, No. 1, hlm. 87-101.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Harry Agusnar. M. Sc.,M. Phil lahir di Langsa (Aceh) pada 17 Agustus 1953. Pendidikan S-1 Kimia di Universitas Sumatera Utara. Pada tahun 1990 menyelesaikan S-2 Kimia di University Kebangsaan Malaysia (UKM). Menyelesaikan pendidikan S-3 (Doktor Kimia) di Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2006. Menjadi dosen tetap program studi kimia FMIPA USU sejak 1 Maret 1983. Sejak 1 November 2009 ditetapkan menjadi Guru Besar Kimia Universitas Sumatera Utara. Jabatan yang dipegang saat ini sebagai Ketua Umum Himpunan Kimia Indonesia Cabang Sumatera Utara, Ketua Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Wilayah Sumatera Utara dan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Tanggung Jawab Orang Tua Untuk Mendidik dan Melindungi Anaknya Guna Menjadi Generasi Emas Bangsa di Sumut

(Tinjauan Berdasarkan UU Tentang Perlindungan Anak)

Hasim Purba

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Orang tua dalam kamus bahasa Indonesia diartikan Ayah dan Ibu.¹ Orang tua adalah ayah dan ibu yang mempunyai kewajiban untuk mengurus dan membina serta melindungi anak-anak mereka, baik dari segi aspek jasmani maupun rohani sampai anak tersebut menjadi dewasa dan dapat hidup secara mandiri. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung; atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.² Keluarga adalah umat terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.³

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa), yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga menjadi tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peran strategis dalam menentukan kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang. Oleh karena itu perlindungan dan pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga dan orang tua.

Setiap orang tua tentunya menginginkan seluruh anaknya menjadi orang yang tumbuh dan berkembang secara sempurna. Mereka menginginkan agar anak-anak yang dilahirkan itu kelak menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani; trampil, cerdas, pandai, akhlaq dan iman yang baik. Kunci keberhasilan anak adalah bagaimana pendidikan yang diperoleh dalam rumah tangga (keluarga) dari orang tuanya adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda; tentang kewajiban orang tua mendidik anak yang artinya : *"Tiada seorang anakpun yang lahir, kecuali ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang*

¹Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 1987, hal. 688.

²Pasal 1 angka 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³Ibid Pasal 1 angka 5

⁴Ibid Pasal 1 angka 1

menjadikan anak itu beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (H.R. Bukhari-Muslim).

Negara yang baik adalah negara yang mengayomi dan melindungi semua anak yang ada di negaranya. Oleh karena itu pemenuhan seluruh hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan asset utama. Tumbuh kembangnya anak sejak dini adalah menjadi tanggung jawab semua pihak (orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara).

Kita menyadari bahwa dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi, maupun kultural, yang terkadang menyebabkan tidak terpenuhi hak-hak anak. Untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak maka peranan instrumen hukum; aparaturnya; sarana dan prasarana, serta sikap dan budaya masyarakat menjadi variabel penting dan tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan Mukaddimah Konvensi hak-hak anak, yang diturunkan dari semangat Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, menyatakan bahwa anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus. Selain itu, demi pengembangan kepribadian secara utuh dan harmonis, maka anak harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam suasana kebahagiaan, kasih sayang dan pengertian. Hal ini berarti selain pemerintah dan negara, masyarakat, keluarga, terutama orang tua berkewajiban mengakui dan menghormati hak anak sebagai bagian dari landasan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak seperti hak tumbuh berkembang, kelangsungan hidup, hak perlindungan serta hak partisipasi tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

2. Masalah

Bagaimana Pengaturan dan Penjabaran Tanggungjawab Orang Tua dalam Mendidik dan Melindungi Anak Guna Mewujudkan Generasi Emas dalam Pembangunan.

3. Strategi Pemecahan Masalah

1. Landasan Hukum Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak
 1. Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.
 8. KEPRES Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak).
2. Hak – Hak Anak Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002
1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, (Pasal 4).
 2. Hak atas identitas dan status kewarganegaraan, (Pasal 5).
 3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua, (Pasal 6).
 4. Dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan berhak mengetahui orang tuanya, (Pasal 7 ayat (1)).
 5. Hak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain bila karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, (Pasal 7 ayat (2)).
 6. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial, (Pasal 8).
 7. Anak memperoleh pendidikan, termasuk anak yang menyandang cacat serta anak yang memiliki keunggulan khusus, (Pasal 9 ayat (2)).
 8. Hak menyatakan dan mendengarkan pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan, (Pasal 10).
 9. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, berteman, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan, (Pasal 11).
 10. Perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, perlakuan kejam, perlakuan keras dan penganiayaan, perlakuan tidak adil, dan perlakuan salah.
 11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, (Pasal 12).
 12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, (Pasal 14).
 13. Hak memperoleh perlindungan khusus, perusakan sosial, sengketa persenjataan, kegiatan politik dan lain-lain, (Pasal 15).
 14. Korban atau pelaku anak berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya, (Pasal 18).

4. Rencana Tindak Lanjut

1. Implementasi Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anaknya

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Selanjutnya orang tua juga berkewajiban memenuhi kebutuhan anak terutama kebutuhan primer yaitu berupa makan, pakaian, tempat tinggal sesuai dengan tingkat sosial ekonomi dari orang tua si anak (Pasal 62 UU Perlindungan Anak). Kebutuhan hidup dimaksud adalah kewajiban memberi nafkah kepada anak sesuai dengan batas kemampuan yang ada pada si orang tua. Orang tua juga berkewajiban untuk memenuhi hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran guna pengembangan diri si anak. Pendidikan anak harus dijadikan prioritas, karena melalui pendidikanlah si anak dapat hidup dan bersaing dengan tuntutan zaman yang semakin kompetitif; dan pendidikan menjadi dasar/ modal bagi sang anak kelak dapat hidup dengan baik.

Pendidikan yang diberikan kepada si anak haruslah pendidikan yang sebaik-baiknya, sehingga dapat membentuk kualitas dan kepribadian anak apabila telah dewasa menjadi manusia yang berguna baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Apabila setiap keluarga dapat mendidik dan menumbuh kembangkan anak-anaknya secara baik dan berkualitas terpelihara jasmani dan rohani serta mempunyai keterampilan yang menjadikannya anggota masyarakat yang sanggup berdiri sendiri, dan bukan malah menjadi beban masyarakat. Untuk membentuk anak menjadi orang yang mampu membekali diri sendiri dalam hidup dan kehidupan, maka pemenuhan kebutuhan pendidikan yang berkualitas bagi anak mutlak diperlukan.

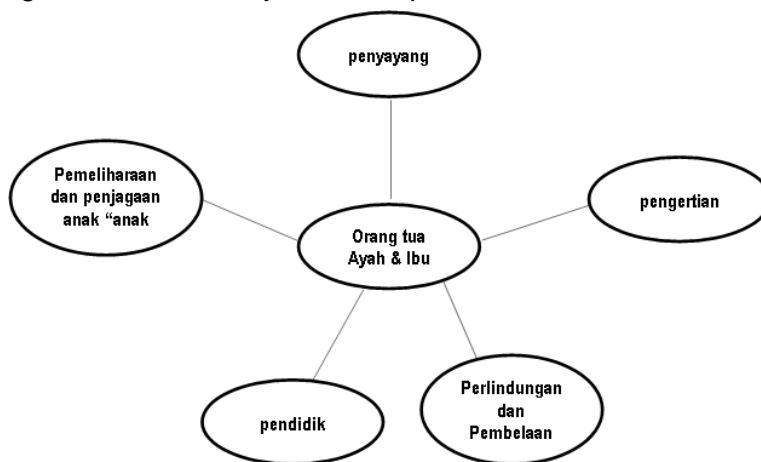
Peraturan lain yang menjelaskan tanggung jawab orang tua, adalah Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selanjutnya Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami Isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmana, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Sebagai orang tua yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya, maka orang tua harus menunjukkan sikap :



2. Perlindungan Anak Dan Anak Yang Mengalami Permasalahan Hukum

a. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 1 butir (2) Jo Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002).

Mengapa Perlu Perlindungan Anak

1. Jumlah anak berkisar 50% dari jumlah penduduk.
2. Anak belum mampu mandiri.
3. Anak dalam proses berkembang baik fisik maupun mental.
4. Masa depan bangsa tergantung pada kualitas anak.
5. Anak merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga.

Prinsip Perlindungan Anak (Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002)

- i. Non diskriminasi.
- ii. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- iii. Kelangsungan hidup dan perkembangan.
- iv. Penghargaan terhadap pendapat anak.

b. Anak Yang Mengalami Permasalahan Hukum

Melihat fenomena yang berkembang, banyak anak yang mengalami permasalahan sosial dan permasalahan hukum yang perlu mendapatkan perlindungan secara khusus. Untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, penanganan dan penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) menuntut Indonesia harus benar-benar memiliki komitmen dan konsekwen untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Istilah anak berhadapan dengan hukum adalah istilah yang dikenal dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak berhadapan dengan hukum terdiri atas :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. Anak korban tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah melakukan tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan salah satu kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Secara substansial, ada pengertian dasar yang harus dipahami dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai pengertian dasar seperti :

- *Sistem Peradilan Pidana Anak*, adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.
- *Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- *Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana*, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- *Keadilan Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

- *Diversi*, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari perlindungan khusus.

- Upaya tersebut adalah :
 - (1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - (2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - (3) Penyediaan sara dan prasarana khusus;
 - (4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - (5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - (6) Pemberian jaminan untuk memperhatikan hubungan dengan orang tua atau keluarga; atau
 - (7) Perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sedangkan bagi anak yang menjadi saksi korban, perlindungan terhadap anak tersebut dapat mengacu kepada Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 63 ayat (3) tersebut, bagi anak yang menjadi saksi korban, maka dapat dilakukan perlindungan melalui :

- (1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- (2) Upaya perlindungan dari identitas melalui media massa dan untuk menghindari pelabelan;
- (3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan
- (4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan terhadap anak, bukan hanya menjadi tanggung jawab (Pemerintah) petugas, akan tetapi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam Pasal 93 UU Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara :

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak.
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui *Diversi* dan pendekatan keadilan Restoratif;
- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;

- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak;
- g. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Hak anak dalam undang-undang dapat disimpulkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan pemeliharaan dan perlindungan.
2. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dan utama terhadap anak, yaitu mengasuh, membesarkan, merawat, mengarahkan menuju kedewasaan serta menanamkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Disamping itu orang tua juga harus mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri anak, memberi teladan dan mengembangkan pertumbuhan pribadi dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.
3. Dalam hal terjadi kasus anak yang berhadapan dengan hukum maka penyelesaian yang ditempuh adalah mengambil tindakan yang terbaik bagi kepentingan si anak.

Saran

1. Sebagai generasi emas penerus pimpinan bangsa maka anak harus mendapat perhatian secara khusus tidak saja dari orang tua, keluarga tetapi juga dari masyarakat, bangsa dan negara.
2. Sebaiknya ada dibentuk lembaga / badan khusus yang menangani persoalan-persoalan anak yang menghadapi permasalahan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafii dan Tim Tazkia. 2011. *Menata Keluarga Harmonis, Managing A. Harmonious Family*. Jilid 3. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Asy. Sya'rawi, M. Mutawalli. 1992. *Anda Bertanya Islam Menjawab*. Jilid 1-5. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhdi, Masjufuk. 1997. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Biodata Penulis



Prof. Dr. H. Hasim Purba, S.H., M.Hum, Lahir di Parbutaran, 3 Maret 1966, Menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Hukum USU tahun 1991. Selanjutnya menempuh Pendidikan Magister Hukum (S-2) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum USU dan lulus Cumlaude tahun 2001. Pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Sekolah Pascasarjana Hukum USU dan lulus pada tahun 2010 dengan predikat mendapat pujian (Cumlaude). Sejak tahun 1993 aktif mengajar di Fakultas Hukum USU sebagai Asisten Dosen dan mendapat pangkat Guru Besar (Profesor) TMT 1 Agustus 2015. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU periode tahun 2010–2015, selain mengajar di almamater Fakultas Hukum USU program S-1, S-2, dan S-3 yang bersangkutan juga mengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di UISU Medan, UMA Medan dan UDA Medan. Selain aktif sebagai Staff Pengajar, penulis juga aktif sebagai narasumber dalam pertemuan Ilmiah Seminar, Simposium, FGD, dan Tim Reviewer/Penguji calon penerima beasiswa S-2–S-3 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta menulis berbagai opini hukum dan sosial di berbagai media massa. Penulis juga aktif dan menjabat pimpinan diberbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Saat ini Penulis telah menghasilkan beberapa buku ajar yang telah diterbitkan melalui penerbit resmi. Aktivitas lainnya, saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Dewan Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017– 2020 dan Periode 2020 - 2023 dan Ketua Lembaga Etik dan Hukum UISU periode 2016–2019; Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan Periode 2020 - 2023 dan Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI Medan. Saat ini dipercaya sebaga Ketua Komisi Monitoring dan Evaluasi Majelis Wali Amanat (MWA) USU.

Pembangunan Masyarakat Sumatera Utara: Review Data dan Masukan Strategi kepada Pemangku Kepentingan

Himsar Ambarita

Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Republik Indonesia memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang 20 tahunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. RPJPN 2005 – 2025 dibagi atas 4 tahapan jangka menengah yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada saat ini, Indonesia sedang melaksanakan RPJMN tahap IV yaitu RPJMN 2020-2024. Sesuai arahan RPJPN 2005 – 2025, sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing [1]. Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, telah dicanangkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi ini dicanangkan 9 Misi yang dikenal sebagai Nawa cita Kedua. Misi ini terdiri atas: (a) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (b) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, (c) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (d) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (e) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (f) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, (g) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, serta (h) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Pembangunan periode 2020 – 2024 ini dikenal juga sebagai tonggak penting untuk mencapai visi Indonesia 2045 yang dikenal dengan Indonesia Maju. Fokus utama menuju Visi Indonesia 2045 adalah penguatan transformasi ekonomi untuk keluar dari *middle income trap* dan bertransformasi untuk mencapai infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. *Middle income trap* adalah kegagalan sebuah negara untuk naik kelas dari pendapatan menengah-bawah (*lower-middle income*) ke menengah-atas (*upper-middle income*). Penyebabnya adalah negara tersebut tidak mampu lagi bersaing dengan negara-negara berpenghasilan lebih rendah karena bergantung kepada sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah. Sementara untuk bersaing dengan negara maju, kualitas manusia dan teknologi yang dimiliki belum mampu mendukung [2]. Untuk mencapai Indonesia 2045 yang maju Indonesia harus mampu

keluar dari *middle income trap* ini dengan mengandalkan pembangunan manusia dan penguasaan teknologi. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pembangunan SDM dan penguasaan teknologi yang harus dipersiapkan pada periode ini. Atas dasar ini Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan Pencapaian Visi Indonesia 2045 [3]. Kelima arahan ini mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infra struktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pada keempat dokumen perencanaan tersebut, RPJPN 2005 – 2025, RPJMN 2020 – 2024, Visi Indonesia 2045, dan Nawacita kedua yang dicanangkan Presiden Jokowi, terdapat satu benang merah yaitu Pembangunan Manusia Indonesia. Terciptanya Manusia Indonesia yang Unggul dan Berdaya Saing diharapkan memiliki ciri antara lain pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industri dan talenta global. Karakteristik SDM Indonesia yang seperti ini diharapkan akan mampu membawa Indonesia menuju Visi 2045 dan keluar dari *middle income trap*.

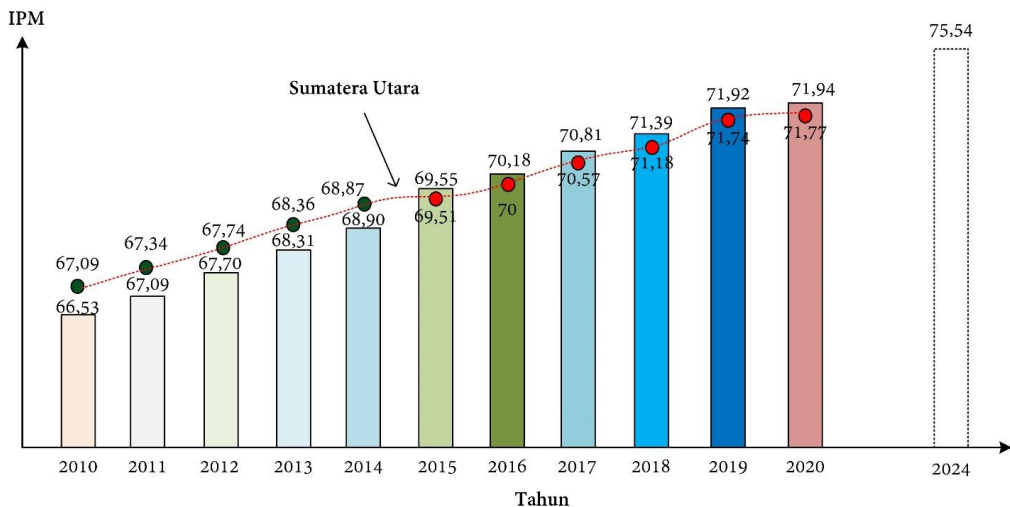
Sejalan dengan perencanaan di tingkat nasional, setiap provinsi juga memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang akan dijalankan. Provinsi Sumatera Utara pada saat ini sedang menjalankan RPJMD 2018 – 2023. Pada dokumen ini telah ditetapkan 5 (lima) sasaran utama pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Sasaran tersebut adalah: (a) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen, (b) angka inflasi pada kisaran 2,75 persen plus minus 1, (c) Penurunan Angka Kemiskinan menjadi 7,39 persen, (d) meningkatnya Indeks Pembangunan manusia menjadi 73,32 persen, dan (e) peningkatan pemerataan pendapatan melalui capaian indeks ini menjadi 0,305 [3]. Hal ini juga menunjukkan pentingnya pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara dan telah ditetapkan nilai terukur melalui IPM yang telah menetapkan target sebesar 73,32 persen.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia sangatlah penting dan sudah menjadi focus utama dalam pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini juga menjadi sangat penting mengingat Indonesia harus bersiap keluar dari *middle income trap* untuk menuju Visi Indonesia Maju 2045. Hal inilah yang menjadi latar belakang tulisan ini, yaitu memberikan pemikiran dalam membangun manusia Sumatera Utara agar mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional secara signifikan.

2. Masalah

Permasalahan yang dihadapi akan di analisis dengan menggunakan data statistic tentang perkembangan pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Para meter terukur yang di jadikan acuan dalam menyatakan keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia

(*Human Index Development*) atau biasa disingkat dengan IPM. Parameter ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana penduduk data mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dimensi dasarnya dibagi atas 3 bagian, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Parameter ini diperkenalkan oleh United Nation Programme (UNDP) dan setiap tahun diumumkan secara global. IPM merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan membangun masyarakat suatu negeri atau daerah dan untuk Indonesia indikator ini dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja pemerintah serta acuan menentukan dana alokasi umum [4]. Dengan menggunakan data yang ada untuk masing-masing komponen maka IPM Indonesia selama periode 2010 sampai dengan 2020 ditampilkan pada Gambar 1. Target IPM pada akhir RPJMN 2020 – 2024 juga ditampilkan pada gambar. Pada gambar tersebut, IPM provinsi Sumatera Utara pada periode yang sama juga ditampilkan.



Gambar 1. IPM Indonesia selama periode 2010 – 2020 dan target 2024 [3,4]

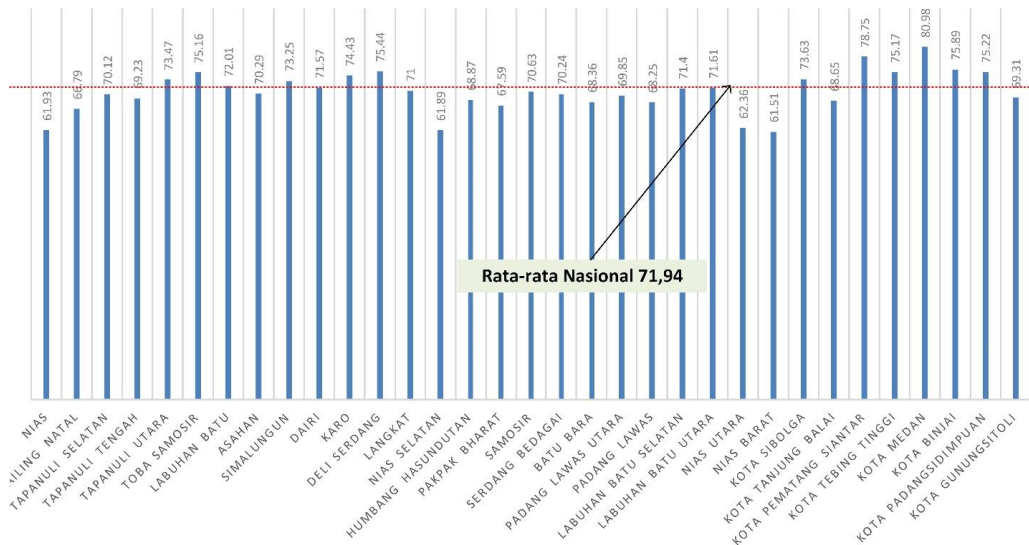
Pada gambar dapat dilihat bahwa nilai IPM Indonesia mengalami peningkatan dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,94 pada tahun 2020. Selama periode ini terjadi pertambahan rata-rata sebesar 0,541 per tahun. Selama periode 2019 ke 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2020 IPM Indonesia berada pada angka 70,94 atau naik 0,02 poin jika dibandingkan dengan IPM tahun 2019 yaitu 70,92. Hal ini merupakan pengaruh dari Pandemic Covid 19. Hal yang paling terdampak akibat pandemic ini adalah pendapatan rata-rata. Jika dipilah berdasarkan kategori, maka komponen usia harapan hidup (UHH) manusia Indonesia mengalami kenaikan dari 71,34 tahun menjadi 71,47 tahun pada tahun 2020. Kenaikan juga terjadi pada komponen Pendidikan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masing masing nilainya 12,98 dan 8,48.

Penurunan terjadi pada sisi pengeluaran per kapita untuk tahun 2020 sebesar 11 juta rupiah atau turun dari 11,29 juta rupiah pada tahun 2019. Meskipun capaian IPM ini termasuk tinggi, tetapi pencapaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan 75,54 pada tahun 2024. Hal ini perlu mendapat perhatian dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk tingkat global, berdasarkan laporan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh UNDP, Indoensia menempati urutan 107 dari 189 negara. Pada posisi ini Indonesia masih digolongkan tinggi. Di kawasan ASEAN Indonesia menempati posisi ke 5 setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.

Permasalahan Pembangunan Manusia di Indonesia masih memiliki disparitas yang tinggi. Jika dipilah berdasarkan provinsi maka terlihat perbedaan yang mencolok. Ada 22 provinsi yang dikategorikan tinggi berada di angka diatas 70, sementara 11 provinsi dapat dikatakan sedang, karena berada pada rentang 60 – 70. Khusus untuk provinsi Sumatera Utara, perkembangan IPM selama periode 2010 – 2020 juga mengalami kenaikan dari 67,09 di tahun 2010 menjadi 71,77 di tahun 2020. Secara rata-rata pertambahan IPM provinsi Sumatera Utara adalah 0,468 per tahun. Pertambahan ini masih di bawah pertamabahan rata-rata nasional. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1, bahwa IPM provinsi Sumatera Utara untuk periode 2010 – 2014 berada di atas IPM Indonesia. Tetapi karena pertambahannya lebih kecil, sejak tahun 2015 sampai dengan 2020, IPM provinsi Sumatera Utara berada di bawah IPM Indonesia. Hal inilah yang menjadi masalah pembangunan masyarakat Sumatera Utara yang harus dicari solusinya. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan pembangun masyarakat Sumatera Utara tertinggal dari rata-rata nasional sejak tahun 2015. Kemudian sebagai Guru Besar merasa perlu memberikan masukan untuk menyelesaikan masalah ini untuk menaikkan IPM masyarakat Sumatera Utara.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Sebelum memberikan strategi penyelesaian masalah, pada bagian ini dilakukan analysis masalah lebih detail. Pada Gambar 2 ditampilkan distribusi IPM di provinsi Sumatera Utara untuk setiap kabupaten dan kota pada tahun 2020. Pada gambar garis yang menyatakan IPM rata-rata nasional sebesar 71,94 juga ditampilkan. Pada gambar dapat dilihat bahwa di provinsi Sumatera Utara nilai IPM di setiap kabupaten dan kota sangat tidak merata. Yang tertinggi adalah kota Medan dengan nilai 80,98 kemudian disusul Pematang Siantar dengan nilai 75,89 dan pada posisi 3 adalah Binjai dengan nilai 75,89. Hanya Sebagian kecil kabupaten dan kota yang nilai IPM nya melebihi rata-rata nasional. Berdasarkan gambar hanya ada 11 kabupaten / kota. Fakta ini sebaiknya digunakan untuk membuat strategi pengembangan yang sesuai.



Gambar 2. IPM Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 [4]

Pada masing-masing komponen, usia harapan hidup masyarakat Sumatera Utara adalah 69,1 tahun. Sementara HRS dan RLS masyarakat Sumatera Utara pada Tahun 2020 masing-masing adalah 13,23 tahun dan 9,54 tahun. Pada komponen pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara ada pada angka 10,42 juta rupiah per tahun. Data-data ini menunjukkan bahwa UHH masyarakat Sumatera Utara masih lebih pendek dari rata-rata nasional, demikian juga nilai HLS, nilai RLS, dan nilai pengeluaran per kapita per orang seluruhnya lebih kecil dari rata-rata nasional.

4. Rencana Tindak Lanjut

Strategi pembangunan masyarakat Sumatera Utara harus lebih difokuskan pada 3 kelompok komponen ini. Strategi penyelesaian masalah dapat dibagi atas 3 komponen yaitu penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas dan pembangunan karakter. Pada komponen layanan dasar dan perlindungan social hal yang harus dilakukan adalah: (1) memperbaiki tata Kelola kependudukan, (2) perlindungan sosial, (3) kesehatan, (4) pendidikan, (5) pengentasan kemiskinan, dan (6) kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pada komponen produktivitas hal-hal yang menjadifokus strategi adalah: (1) pendidikan dan pelatihanvokasi, (2) Pendidikan tinggi, (3) iptek dan inovasi, dan (4) prestasi olah raga. Sementara pada komponen Pembangunan Karakter pusat perhatian adalah: (1) revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila, (2)

pemajuan dan pelestarian kebudayaan, (3) modernisasi beragama, dan (4) budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

Lessons learned from other nations

Ranis dan Steward [5] membandingkan strategi peningkatan IPM di beberapa negara berkembang. Tujuannya untuk mengidentifikasi elemen utama yang menentukan suksesnya pengembangan IPM sebuah negara berkembang dengan menggunakan data selama 10 tahun pembangunan. Ada 9 (Sembilan) elemen yang merupakan kunci sukses pembangunan manusia di negara-negara yang dijadikan bahan kajian. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- i. Pertumbuhan pendapatan per kapita (*growth in per capita income*)
- ii. Distribusi pendapatan (*Income distribution*); parameter ini dihitung dengan menggunakan *Gini Coefficient*
- iii. Rasiobelanja (*Expenditure ratio, government expenditure as % of GDP*)
- iv. Rasioalokasisosial (*Social allocation ratio*)
- v. Belanja Pendidikan dasar dan menengah dibandingkan dengan belanja seluruh Pendidikan (*Primary and secondary education expenditure as a % of total expenditure*)
- vi. Belanja social terhadap GDP (*Social expenditure as % of GDP*)
- vii. Pendaftaran total perempuan di sekolah dasar (*Gross primary female enrolment*)
- viii. Rasio siswa perempuan dan laki-laki di sekolah dasar (*Ratio of female to male primary enrolment*)
- ix. Porsi Wanita menerima pemasukan (*Share of females in earned income*)

Berdasarkan atas data-data pembangunan yang digunakan selama periode tahun 1960-- 1990, terdapat 12 negara berkembang yang dianggap sukses membangun masyarakatnya yang dinyatakan dengan Human Development Index atau IPM. Faktor penentu sukses masing-masing negara dinyatakan pada Tabel 1. Sebagai catatan, ada 3 elemen ini yang berhubungan langsung dengan peranperempuan. Sudah banyak studi yang membuktikan peranpenting perempuan pada pembangunan manusia sebuah negara. Sebagai contoh pada rumah tangga di negara negara seperti Gambia, Philipina, dan Pantai Gading, semakin banyak perempuan yang mengontrol makanan akan meningkatkan konsumsi kalori, dan belanja kekomponen lainnya akan semakin berkurang [6,7].

Tabel 1. Elemen kunci sukses pembangunan manusia

Negara	Nomor Elemen								
	i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
Bostwana	++	-	++	0	++	++	+	++	+
Chile	0	-	+	+	0	+	++	++	-
Costa Rica	0	0	+	++	0	+	++	++	0
Cuba	-	++	++	0	0	++	++	++	0
Jamaika	-	+	+	+	+	++	++	++	+
Korea	++	+	0	0	++	+	++	++	0
Lesoto	+	-	++	++	++	+	++	++	0
Madagaskar	-	0	0	0	++	0	++	++	+
Malaysia	++	0	+	++	+	+	+	++	0
Mauritus	+	+	+	+	++	+	+	++	0
Singapore	++	+	0	+	+	0	++	++	+
Sri Lanka	+	+	++	+	+	0	+	++	+

Arti simbol: ++: Sangat Baik, +: Baik, 0: Moderat, -: Buruk/Kurang

Data pada table menunjukkan tidak ada rumus sukses pengembangan manusia yang sama untuk semua negara. Elemen kesuksesan dalam pengembangan manusia sangat bervariasi dari sebuah negara terhadap negara lainnya. Hal yang menarik adalah peran Pendidikan perempuan sangat penting dalam pembangunan manusia. Seluruh negara yang dijadikan kajian menunjukkan bahwa rasio perempuan yang mengikuti sekolah dasar yang baik memiliki kontribusi yang sangat positif bagi pembangunan manusia. Secara rata-rata di negeri berkembang rasio perempuan dan laki-laki yang mengikuti sekolah dasar adalah 87%. Seluruh negara yang dijadikan studi menunjukkan angka lebih dari 95%. Kemudian peran perempuan yang menarik lainnya dalam hal mengontrol pendapatan. Secara rata-rata, pada negara sedang berkembang 32% perempuan yang mengontrol pendapatan. Dikatakan sangat baik (++) jika lebih dari 40% perempuan yang mengontrol pendapatan dan dikatakan baik (+) jika ada 32% – 40% perempuan yang mengontrol pendapatan dan moderate pada angka 25% - 32%, serta buruk jika pada angka kurang dari 25%. Pada studi ini hanya Chile yang dinyatakan buruk dan tidak ada negara yang sangat baik (++). Yang terbanyak adalah pada kategori moderate (0).

Sementara pada elemen ekonomi baik pertumbuhan (i) dan distribusi pendapatan (ii) tidak selalu menjadi faktor yang dominan untuk semua negara. Bahkan negara seperti Cuba, Jamaika dan Madagaskar memiliki pertumbuhan ekonomi yang buruk tetapi dapat menunjukkan peningkatan pembangunan manusia yang cukup baik. Demikian juga pada sector pemerataan pendapatan di negara-negara seperti Boswana, Lesotho, Chile dan Lesoto tidak begitu baik tetapi dapat menunjukkan angka pembangunan manusia yang sangat baik. Pada saat studi ini dilakukan ada 2 negara yang masih dikatakan sedang berkembang, tetapi sudah berhasil keluar dan menjadi negara maju pada saat ini. Ciri kedua negara ini hamper sama yaitu memiliki pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan kategori masing-masing sangat baik dan baik. Hal ini tidak dipelajari dan tidak dimiliki oleh

negara-negara lain. Pada sisi belanja pemerintah kedua negara juga menunjukkan angka yang tidak besar yaitu kategori moderat (0) besarnya sekitar 15 – 20%. Perbedaan kedua negara terdapat pada elemen *social allocation ratio* (iv).

Beberapa kesimpulan dari studi tersebut diformulasikan sebagai berikut. Setiap negara berhasil membangun masyarakatnya dengan kesuksesan pada beberapa elemen tersebut. Meskipun tidak ada negara yang sukses pada setiap elemen yang ada. Beberapa negara menunjukkan kesuksesan (nilai sangat baik dan baik) pada 7 dari 9 elemen yang ada. Pengecualian ditunjukkan oleh negara Madagaskar yang baik pada 4 element saja. Pengecualian ini terjadi karena Madagaskar hanya dibandingkan di tingkat regional. Hal ini menunjukkan, setiap negara yang ingin membangun masyarakatnya harus focus kepada pembangunan pada 9 elemen ini dan semakin banyak nilainya di atas rata-rata maka akan semakin baik pembangunannya.

Berdasarkan atas simpulan kajian tersebut berikut beberapa strategi yang dapat ditempuh pemerintah daerah Sumatera Utara untuk meningkatkan pembangunan masyarakatnya:

- a. Menggunakan kombinasi dari 9 elemen tersebut untuk membangun masyarakatnya. Tersedia beberapa alternatif yang dapat disesuaikan di provinsi Sumatera Utara. Misalnya jika pertumbuhan ekonomi tidak mendukung maka strategi kombinasi yang bisa dilakukan menguatkan elemenlainnya, karena kelamahan pada satu elemen dapat diimbangi dengan kekuatan pada elemen lain. Lemahnya pertumbuhan ekonomi dapat diimbangi dengan pemeretaan distribusi pendatan dan peningkatan belanja sosial.
- b. Rasio anak perempuan dan laki-laki yang masuk sekolah dasar (dan sekolah menengah) harus lebihdari 95%. Hal ini merupakan syarat mutlak pembangunan manusia.
- c. Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan adalah syarat mutlak untuk membangun manusia dan meningkatkan IPM. Hal ini harus menjadi pusat perhatian pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara.
- d. Melakukan realokasi dana pemerintah pada belanja social prioritas akan menjadi Langkah penentu untuk meningkatkan pembangunan manusia.

5. Kesimpulan dan Saran

Pada kajian pemikiran Guru Besar ini telah dilakukan review dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemeritah provinsi Sumatera Utara. Periode ini difokuskan untuk mempersiapkan Indonesia menuju negara maju yang dikenal dengan Indonesia 2045. Sebelum menuju pencapaian ini, salah satu tantangan utamanya adalah keluar dari *midle income trap*. Jebakan ini adalah kegagalan sebuah negara

untuk naik kelas dari pendapatan menengah-bawah (*lower-middle income*) menengah-atas (*upper-middle income*). Penyebabnya adalah negara tersebut tidak mampu lagi bersaing dengan negara-negara berpenghasilan lebih rendah karena bergantung kepada sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah. Faktor utama yang akan membuat Indonesia keluar dari jebakan ini adalah terciptanya Manusia Indonesia yang Unggul dan Berdaya Saing dengan ciri pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industri dan talenta global.

Fakta ini memperlihatkan pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama. Keberhasilan pembangunan manusia dinyatakan dengan sebuah angka terukur yang disebut dengan IPM. Berdasarkan data statistik, IPM masyarakat Sumatera Utara masih tertinggal dari IPM rata-rata nasional dan masih jauh dari target Indonesia 2045. Kelemahan utamanya adalah nilai IPM yang masih rendah pada beberapa kabupaten dan kota di provinsi ini. Berdasarkan studi yang dilakukan pada negara-negara berkembang di dunia yang dianggap sukses membangun manusianya maka telah dirumuskan beberapa strategi peningkatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera Utara. Strategi ini dibangun atas kombinasi 9 elemen sukses pembangunan manusia.

Daftar Pustaka

- [1]. Bappenas, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.
- [2]. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191205/9/1178275/mau-lepas-dari-middle-income-trap-perbaiki-sdm> (Diakses 13 Mei 2021).
- [3]. <https://waspada.co.id/2018/12/lima-sasaran-utama-pembangunan-sumut-dalam-rpjmd-2018-2023/> (Diakses 13 Mei 2021).
- [4]. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>
- [5]. Ranis G and Steward F, Strategies for success in Human Development, Journal of Human Development Vol.1 (2000)
- [6]. Garcia, M. (1990) 'Resource allocation and household welfare: a study of personal sources of income on food consumption, nutrition and health in the Philippines', Ph.D. thesis, Institute of Social Studies, The Hague
- [7]. Hoddinott, J. and Haddad, L. (1991) 'Household expenditures, child anthropometric status and the intrahousehold division of income: evidence from the Cote d'Ivoire', *Discussion paper 155*, Research Program in Development Studies, Woodrow Wilson School.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Eng. Ir. Himsar Ambarita, S.T., M.T., lahir di Simalungun 10 Juni 1972 anak pertama dari 7 bersaudara dari pasangan suami istri Bonar S. Ambarita dan Ruslina Saragih. Pendidikan SD dan SMP diselesaikan di Kabupaten Simalungun dan SMA di Kota Pematang siantar. Beliau menyelesaikan S-1 di Teknik Mesin USU pada tahun 1997, S-2 di Teknik Mesin ITB tahun 2001, dan S-3 dari Muroran Institute of Technology Jepang pada tahun 2007. Sejak tahun 2000, Penulis bertugas sebagai staff pengajar di Fakultas Teknik USU dengan mata kuliah yang diajarkan antara lain Matematika Teknik, Termodinamika Teknik, Perpindahan Panas, Metode Perhitungan Dinamika Fluida (CFD), Energi Surya dan Alat Penukar Kalor, Penulisan Karya Ilmiah di Program S-1, S-2, dan S-3 Teknik Mesin USU. Jabatan yang pernah di emban adalah Wakil Kepala Kantor Urusan Internasional USU dan saat ini masih menjabat sebagai Ketua Program Studi S-2 dan S-3 Teknik Mesin USU, ketua Tim Afiriasi Publikasi Ilmiah USU serta ketua Talenta Publisher USU. Penulis juga termasuk pendiri dan pembimbing pertama Tim Horas USU yang telah menyabet beberapa penghargaan tertinggi di level nasional dan internasional. Bersama Tim Horas USU penghargaan yang diraih antara lain Juara I Nasional Kontes Mobil Hemat Energi kategori Motor Bakar berbahan bakar Gasoline Tahun 2012, Medali Emas (Juara I) Kompetisi Mobil Hemat Energi Tingkat Asia Pasifik Tahun 2014 di Manila untuk Kategori Urban Konsep Etanol, dan beberapa medali Perak dan Perunggu pada jenis Lomba yang sama. Sebagai Peneliti, Penulis kerap melakukan Kerjasama baik tingkat nasional dan internasional. Kersama yang dilakukan antara lain dengan Kementerian ESDM, Bappenas, PT. PLN, Pertamina, UNDP Indonesia, UNIDO, Energy Centre for the Netherlands (ECN), MuroranIntitute of Technology, FH-Joanneum, Polytechnic University of Hauts-de-France, dan instutusi lainnya. Beliau juga aktif mempublikasikan tulisan ilmiah pada jurnal nasional dan internasional bereputasi serta buku. Saat ini sudah ada 127 judul karya ilmiah yang terindeks di Scopus dengan jumlah sitasi 597 (h-indeks = 14). Buku yang diterbitkan ada dua, yaitu Perpindahan Panas dan Massa serta buku Termodinamika Teknik. Memiliki dua Paten yang terdaftar di Jepang dan masih aktif melakukan presentasi karya-karya penelitiannya pada konferensi tingkat nasional dan internasional baik sebagai presenter maupun sebagai *Keynote speaker*.

Sebuah Laporan Perjalanan Sebagai Masukan Bagi Pembangunan Masyarakat Sumatera Utara di Bidang Energi dan Lingkungan

Irvan

Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Persoalan sampah masih menjadi masalah bagi sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah mencari cara agar pengelolaan sampah dapat ditingkatkan. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdapro) Sumatera Utara, Sabrina mengatakan produksi sampah di Sumatera Utara mencapai 10.091 ton per hari atau 3,69 juta ton per tahun, namun sampah yang dapat dikelola baru 11%, artinya 89% lagi masih belum dikelola [1].

Berkenaan dengan persoalan ini, sepuluh staf pengajar berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah mengikuti *training* mengenai pengolahan sampah (limbah) dan pembuatan biogas secara intensif selama tiga minggu di University of Borås – Swedia. Para peserta mengunjungi berbagai fasilitas pengelolaan limbah dengan proses yang berbeda, untuk melihat bagaimana fasilitas tersebut dioperasikan dan dikelola secara profesional. Proyek ini, yang dijalankan bersama oleh University of Borås, Chalmers University of Technology dan Universitas Gadjah Mada, terhubung dengan tujuh universitas di Indonesia: tiga di Sumatera, tiga di Jawa, dan satu di Kalimantan, yaitu: Universitas Tanjungpura, Universitas Gadjah Mada, Universitas Lampung, Universitas Sumatera Utara, Universitas Bung Hatta, Universitas Proklamasi 45, dan Institut Teknologi Bandung. Proyek kolaborasi, yang dimulai pada 2016 dan berakhir hingga 2019, didanai oleh Dewan Penelitian Swedia dan dikordinir oleh Prof. Mohammad Taherzadeh, dari University of Borås. Adapun staf pengajar USU yang mendapat kesempatan untuk mengikuti *training* ini adalah Ir. Seri Maulina PhD dan Prof. Dr. Eng. Ir. Irvan, M.Si.

Tujuan dari proyek ini adalah diharapkan para peserta dapat mengembangkan pelatihan yang didapat mengenai pemulihan sumber daya alam dan produksi biogas di lembaga masing-masing dengan bimbingan peneliti dari Swedia dan Indonesia. Tujuan penting lainnya adalah bahwa para peserta akan dapat melakukan penelitian dengan lebih efisien dan lebih terarah untuk dapat diaplikasikan di daerahnya masing-masing.

2. Masalah

Permasalahan sampah di Provinsi Sumatera Utara yang saat ini masih dicari jalan keluarnya, tidaklah semata-mata menjadi urusan PemprovSU.

Permasalahan sampah di Sumatera Utara saat ini merupakan tanggungjawab bersama, seluruh warga masyarakat dan Pemerintah. Perlu adanya kesetupaduan antara Pemerintah dan warga. Mustahil persoalan sampah ini dapat diselesaikan, sekalipun Provinsi Sumatera Utara memiliki peraturan dalam pengelolaan sampah. Berbagai masalah dalam penanganan sampah di Sumatera Utara, seperti belum tersedianya tempat pembuangan sementara di daerah-daerah, kesadaran masyarakat dalam mengelola sampahnya, adanya *reward and punishment* untuk program pengelolaan sampah, teknologi yang tepat untuk diaplikasikan dan lain sebagainya.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Pada bagian ini diberikan informasi-informasi yang diperoleh pada saat kunjungan/*training* di Swedia yang dapat dijadikan sebagai masukan oleh pemangku kepentingan sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah sampah di Sumatera Utara.

3.1. University of Borås

Kota Borås terletak di barat daya Negara Swedia, berjarak 400 km dari Stockholm (ibukota Swedia), 60 km dari kota Gothenburg, didirikan oleh raja Gustav II Adolf pada tahun 1621. Kota Borås berpenduduk sekitar 100.000 orang termasuk mahasiswa asing dan imigran dan mendiami sekitar 33.000 rumah dan apartemen [2]. University of Borås (UB) adalah universitas modern yang terletak di pusat kota Borås – Swedia. UB memiliki 11.000 mahasiswa dan 730 karyawan, memiliki beberapa program studi unik yang hanya dapat ditemukan di UB. Hal ini menarik siswa dari seluruh Swedia untuk belajar ke UB. Sejak 1 Juli 2014, UB memiliki tiga fakultas, yakni: *Faculty of Textiles, Engineering and Business, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare and Faculty of Librarianship, Information, Education and IT* [3].

3.2. *Training* Pengolahan Limbah & Pembuatan Biogas

Training dilaksanakan selama tiga minggu dari tanggal enam s/d dua tiga Agustus 2018, dengan perincian: satu minggu kuliah teori, satu minggu praktek di laboratorium dan satu minggu kunjungan ke fasilitas pengelolaan limbah di sekitar kota Borås. Jadwal Training pengolahan limbah dan pembuatan biogas diperlihatkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal training and signing MoU/MoA di University of Boras

No.	Day	Time	Activity	Responsible
1	Monday, August 6, 18	10:05:00 AM	10 participants Arrive to Landvetter Airport	Kinanti
2	Tuesday, August 7, 18	09:15-12:00	Lecture	Mohammad
		13:15-16:00	Lab safety + Tour	Sofie Svensson/Mohammad
3	Wednesday 8/8/2018	13:15-16:00	Lecture	Kamran
		09:15-12:00	Lecture	Tobias
4	Thursday, August 9, 18	09:15-16:00	Lab Energy	Tobias
5	Friday, August 10, 18		Free	
6	Monday, August 13, 18	09:15-12:00	Lecture	Ilona
7	Tuesday, August 14, 18	09:15-12:00	Lecture	Mohammad
8	Wednesday 8/15/2018	09:15-15:00	Lecture	Anita
9	Thursday, August 16, 18	09:15-16:00	Lab Biogas	Luki
10	Friday, August 17, 18		Free	
11	Saturday, August 18,18	13:30:00 PM	Dean of Engineering USU arrive at Stockholm	Seri Maulina
12	Sunday, August 19, 18	07:50:00 AM	Dean of Engineering USU arrive at Landvetter	Seri Maulina
11	Monday, August 20, 18	08:00-16:00	Study visit	Karina Mc Conell (Borås energy)
12	Tuesday, August 21, 18	08:00-16:00	Study visit	Robert Lundgren (VMAB)
13	Wednesday 8/22/2018	09:15-15:00	Lecture + Tour at Chalmers	Chalmers/Claes Niklasson
14	Thursday, August 23, 18	09:15-16:00	Lab Biogas	Luki
		09:30:00 AM	Sign MoA	Ilona
		11:00:00 AM	Sign MoU	Ilona
15	Friday, August 24, 18	6:05:00 PM	Departure from Landvetter	

Kuliah Teori

Kuliah teori mengenai pengelolaan limbah dan pembuatan biogas dilakukan di ruang kelas University of Boras oleh beberapa staf pengajar UB, yakni:

Topik

Waste and Energy Market
Biogas- Process & upgrading
Laboratory Safety and Tour
Source Separation
Combustion and Energy Recovery
Biogas-microbiology & biochemistry
Resource Recovery- overview

Narasumber

Prof. Mohammad Taherzadeh
 Prof. Mohammad Taherzadeh
 Dr. Sofie Svensson
 Dr. Kamran Rousta
 Prof. Tobias Richards
 Prof. Ilona Sarvari Horvath
 Prof. Anita Petterson



(a)



(b)

Gambar 1. Suasana di dalam kelas memperlihatkan suasana di dalam kelas di (a) University of Boras (b) Chalmers University of Technology.

Kerja Laboratorium

Sebelum melakukan kerja di laboratorium seluruh peserta mendapatkan *laboratory safety instruction* yang disampaikan oleh Prof. Mohammad Taherzadeh dan Dr. Sofie Svensson. Beberapa fasilitas untuk keselamatan telah tersedia di laboratorium seperti kotak P3K, jas lab, kaca mata (*google*), sarung tangan karet, *shower*, *fumehood*, dll (Gambar 2). Jas lab, kaca mata, sarung tangan karet harus selalu dikenakan selama melakukan percobaan di laboratorium.



Gambar 2. Berbagai fasilitas K3 laboratorium yang telah disediakan oleh universitas

Kerja Laboratorium hari pertama, para peserta *training* diajarkan bagaimana menentukan jumlah atau nilai kalor dari suatu benda (suatu tanaman dari Afrika) menggunakan peralatan Kalorimeter Bom, *Simultaneous Thermal Analysis* (TGA/DSC), dan kalorimeter. Kerja lab hari pertama ini dibimbing oleh Prof. Tobias. Pada hari kedua kerja laboratorium, para peserta *training* diajarkan bagaimana melakukan percobaan pembuatan biogas dari limbah makanan menggunakan proses *wet and dry digestion* di dalam digester bervolume 120 ml (batch) dan 2 L (semi kontinu). Kerja laboratorium hari kedua ini dibimbing oleh Dr. Luki.

Beberapa tahapan dilakukan seperti:

1. Persiapan bahan dan alat:
 - a. Persiapan/penimbangan bahan baku, inoculum, pelarut (air)
 - b. Pengusiran udara dari dalam digester menggunakan gas N_2
2. Proses inkubasi pada temperatur $55^{\circ}C$ (Termofilik) selama 4 hari
3. Analisa produk menggunakan Gas Chromatography

3. 3. Survey ke Pabrik Pengolah Limbah

a. Sistem Pengolahan Limbah di Swedia

Swedia adalah negara yang mengolah sampahnya hingga 99% dengan 1% berakhir di tempat pembuangan akhir. Fakta ini sesuai dengan target negara ini untuk mencapai *zero waste* pada tahun 2020. Penduduk

Swedia sudah terbiasa dengan memilah limbah. Limbah biasanya dibagi menjadi jenis limbah basah dan limbah kering. Limbah basah/limbah rumah tangga biasanya dibuang di tempat sampah yang berada di masing-masing apartemen. Sementara limbah kering dibuang di tempat sampah terpilah. Pada umumnya, limbah kering dibagi menjadi kertas, plastik, kaca, metal, alat elektronik, baterai, dan bola lampu. Gambar 3 penampakan tempat sampah terpilah yang mudah ditemukan di Stockholm [4].



Gambar 3. Bak sampah terpilah di kota Stockholm

Semua kantin-kantin universitas di Swedia sudah memiliki tempat sampah terpilah dan petunjuk pemilahan sampahnya seperti diperlihatkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Tempat Sampah terpilah di kantin *University of Boras*

Yang paling mengesankan adalah hampir semua warga aktif berpartisipasi dalam pemilahan sampah ini. Warga Swedia telah memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya memilah sampah. Di negara ini akan ditemukan kondisi lingkungan yang bersih dari sampah dan suasana kota sangat nyaman untuk tinggal menetap. Bahkan beberapa warga rela untuk membeli kendaraan khusus yang digandeng dengan mobil untuk membawa sampah mereka, seperti diperlihatkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Warga Borås yang membuang sendiri sampah ke TPS

Hal menarik lainnya di Swedia adalah warga akan memperoleh uang dengan memilah limbah botol. Cukup dengan memasukkan botol ke mesin penampung botol, mesin akan mendeteksi jenis botol minuman dan akan mengeluarkan kupon uang yang dapat digunakan untuk belanja di supermarket (Gambar 6).



Gambar 6. Botol kosong yang berharga 1 Kronor

Di Swedia, deposit pada botol dan kaleng disebut “*pant*” yang berasal dari kata *panta*, yang mengacu pada proses memasukkan botol bekas ke dalam mesin penukar biasanya dapat ditemukan di supermarket (Gambar 7). Secara umum, *panta* berarti menyerahkan sesuatu dan mendapatkan uang sebagai gantinya (seperti misalnya di pegadaian). Negara-negara lain yang sudah menggunakan metode ini adalah Jerman, Norwegia dan Denmark [5]. Program daur ulang botol kosong sangat menguntungkan, dimana kalau botol plastik/kaleng didaur ulang, maka akan diperoleh 1-2 kronor/botol. (1 kronor = kira-kira 1600 rupiah). Untuk dibayangkan, dengan mendaur ulang 10 botol plastik, bisa dibeli 1 karton susu volume 1 liter.



Gambar 7. Mesin *pant* untuk menukar botol kosong menjadi uang

Pada saat ini, sistem pemisahan/sortir sampah yang dapat didaur ulang di kota Borås adalah dengan sistem bawa (*bring-system*) yang umumnya dilakukan sendiri oleh penduduk Borås (Gambar 8). Pada sistem ini, kemasan dan bahan yang dapat didaur ulang seperti kertas koran, kertas, plastik, logam dan kaca harus dibawa ke stasiun daur ulang terdekat (*recycling station*) dan disortir ke dalam kontainer yang tepat (Gambar 9). Limbah khusus seperti limbah berbahaya (B3), limbah besar dan limbah kebun harus dibawa pusat daur ulang (*recycling center*) kota Borås. Ada lima lokasi, dua berada di Kota Borås sisanya di Viskafors, Dalsjöfors and Fristad. *Recycling centers* bertanggung jawab mengumpulkan limbah padat dari jenis elektronik, limbah B3, furnitur dan limbah tembikar. Penduduk Borås bertanggung jawab membawa sampah-sampah ini ke stasiun atau ke *recycle center*. Untuk sampah rumah tangga digunakan kantong plastik dengan dua warna yang berbeda, hitam dan putih. Kantong plastik hitam digunakan untuk sisa makanan, kantong putih untuk sampah lain dan/atau sampah yang mudah terbakar. Gambar 10 menunjukkan sistem pemilahan sampah di kota Borås.



Gambar 8. Pusat *Recycle* Sampah (*Recycling Center*)

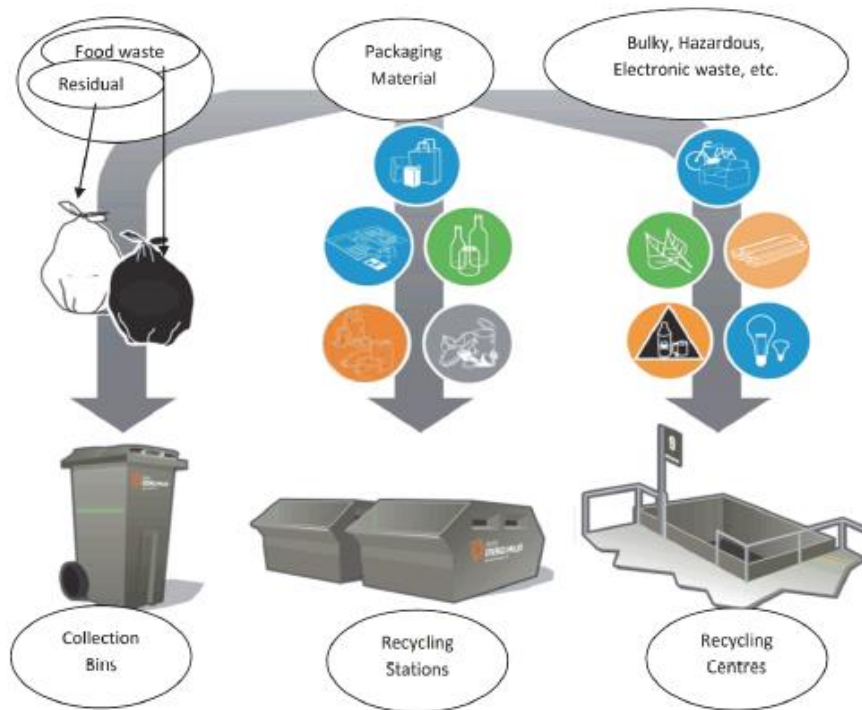


(a)



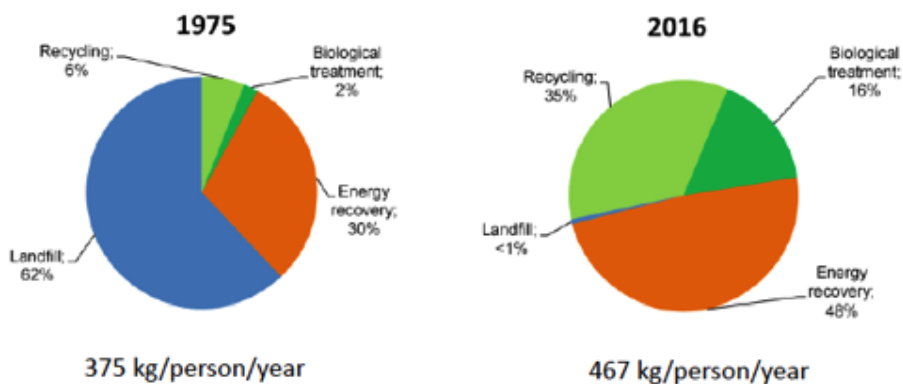
(b)

Gambar 9. a) Sampah Keramik/Kaca/Tembikar); b) Sampah Elektronik



Gambar 10. Sistem Pemilahan sampah di Kota Boras

Berdasarkan informasi yang dirilis di *official website* Swedia, hingga tahun 2016, 99% sampah rumah tangga di Swedia sudah didaur ulang, baik dengan cara daur ulang material, *energy recovery* (dari proses insinerasi) maupun dengan proses biologis (*anaerobic digestion* dan *composting* untuk sampah makanan) seperti terlihat pada Gambar 11.

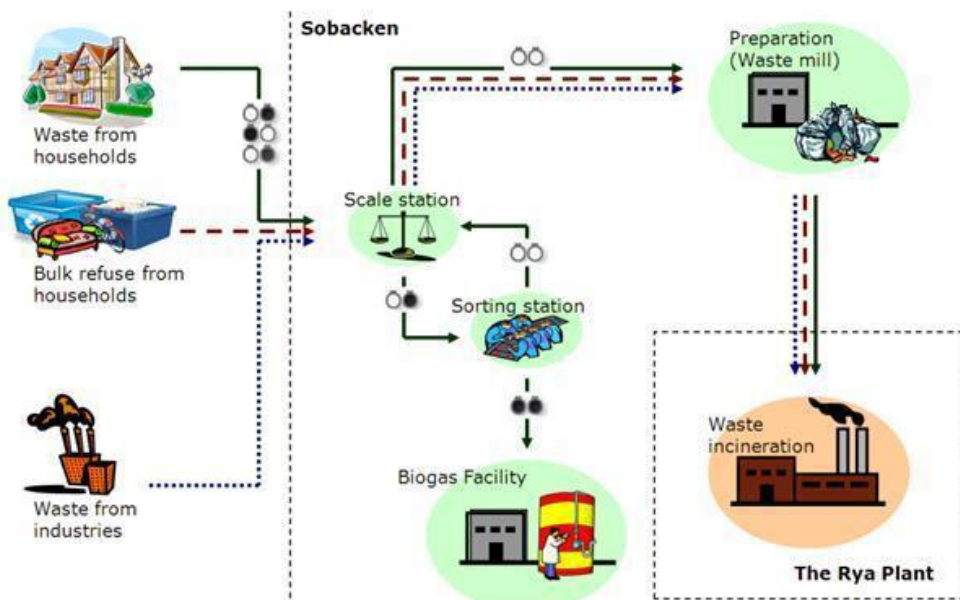


Gambar 11. Overview pengolahan limbah di Swedia tahun 1975 dan 2016

Proses pengolahan sampah ini dilakukan oleh pemerintah kota, sehingga insentif daur ulang sudah masuk ke dalam anggaran pemerintah Swedia. Pemerintah memiliki *blue print* dalam pengelolaan sampah tersebut. Selain itu, pemerintah memiliki budaya untuk meneruskan program – program dari pemerintah sebelumnya yang dirasa menguntungkan.

b. Sobackens miljöanläggning (Fasilitas Pengolahan Limbah Sobackens)

Fasilitas Pengolahan Limbah Sobacken didirikan pada tahun 1992 terletak sebelah selatan di pinggiran kota Borås berjarak 10 km. Fasilitas ini dimiliki dan dioperasikan oleh *Borås Energi och Miljö AB* (BEM) dan bertanggung jawab untuk limbah padat yang berasal dari rumah- rumah dan industri di kota Borås. Pada tahun 2005, sebanyak 49.000 ton limbah padat yang berasal dari kota Borås dan sekitarnya telah diolah. *Borås Energi och Miljö AB* dimiliki oleh kotamadya Borås, bertanggung jawab untuk menjamin pemanas dan listrik bagi rumah-rumah di kota Borås. BEM memiliki 150 karyawan, dengan omset pertahun 650 juta kronor, dan produksi per tahun 650 GWh untuk pemanas, delapan GWh untuk pendingin, sebelas GWh Biogas dan 180 GWh listrik. Alur dan foto fasilitas pengolahan limbah oleh *Borås Energi och Miljö AB* diperlihatkan pada Gambar 12 dan 13.



Gambar 12. Alur pengolahan limbah oleh *Borås Energi och Miljö AB*



Gambar 13. Foto Fasilitas Pengolahan Limbah Sobackens

- Stasiun Penerimaan dan Timbangan

Semua limbah dan bahan daur ulang yang diangkut ke Sobacken ditimbang dan diperiksa terlebih dahulu. Penduduk yang melakukan pembuangan di Sobacken harus mengisi pernyataan limbah yang menunjukkan jenis limbah dan dari mana asalnya. Biaya per ton dibebankan kepada orang yang membuang limbah dan diberikan tanda terima. Biayanya sangat berbeda tergantung pada jenis limbah dan jenis sortiran.

- Pengumpulan dan transportasi

Transportasi berlangsung secara terus-menerus ke dan dari Sobacken. Sebagian besar alat transportasi milik perusahaan *Energi och Miljö* dan dikelola sendiri. Saat ini perusahaan memiliki 18 truk pengangkut sampah dan hampir semua berbahan bakar biogas (Gambar 14), sehingga dapat mengangkut berbagai sampah terutama sampah rumah tangga, pengemasan dan kertas daur ulang. Perusahaan ini juga memiliki tiga truk pickup, sepuluh mobil kontainer, dan truk yang mengangkut limbah berbahaya.



Gambar 14. Truk sampah berbahan bakar biogas

- Pemilahan Optik

Penduduk Borås memasukkan sampah makanan ke dalam kantong plastik berwarna hitam dan sampah yang mudah terbakar ke dalam kantong warna putih. Kantong-kantong tersebut kemudian diangkut ke fasilitas Sobacken. Di Sobacken kantong-kantong tadi dipindahkan menggunakan *belt conveyor* yang melewati alat optik untuk memisahkan kantong putih dengan kantong hitam. Kantong hitam dipindahkan ke instalasi pengolahan limbah makanan, dan kemudian dipisah antara kantong plastik dan limbah makan yang diubah dalam bentuk *slurry*. *Slurry* kemudian memasuki ruang pengolahan untuk dikonversi menjadi biogas, sedangkan kantong plastik berwarna putih (Gambar 15) diteruskan ke ruang pengolahan sampah sebagai bahan bakar boiler.



Gambar 15. Kantong Plastik Putih yang sudah terpisah

- Pengolahan secara biologis

Kantong plastik hitam dibuka menggunakan pisau, limbah makanan dalam kantong tersebut dikirim ke digester dengan menggunakan *belt* dan merubahnya menjadi biogas sebagai *green fuel* untuk transportasi publik. Setelah produksi biogas, sisa padatan dari digester disentrifugasi untuk mengurangi kandungan air, kemudian diproses didalam *sequencing batch reactor* (SBR) untuk menghilangkan kandungan Nitrogen kemudian disaring untuk dijadikan pupuk atau bahan konstruksi. Sebanyak 130 m³/hari umpan dipompa masuk ke dalam digester, dengan HRT 20 hari dengan temperatur 52°C. Biogas plant di Sobacken diperlihatkan pada Gambar 16.



Gambar 16. Biogas Plant di Sobacken



Gambar 17. Unit pembangkit listrik tenaga sampah

- Pembangkit Listrik dari sampah (*Rya Plant*)

Kantong plastik putih juga dibuka dengan menggunakan pisau, kemudian dipress dan dicincang menggunakan hammer mill sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dari 100 mm, kemudian dipak dan dibungkus siap untuk dibakar didalam *furnace di Borås och Energy Miljö*, untuk menghasilkan pemanas untuk rumah-rumah warga kota (Gambar 17). Rya Plant dibangun oleh Metso Power pada tahun 2005 dan memiliki dua buah boiler berjenis *bubbling fluidized-bed boilers*, masing-masing boiler dapat beroperasi

sebesar tujuh ton limbah padat/jam dan menghasilkan lima MW listrik.

- Penanganan Limbah B-3 (*Sobacken Plant*)

Di Sobacken, terdapat storage untuk penanganan limbah B-3. Limbah B-3 yang meninggalkan *recycling center* atau yang dari proses dipindahkan ke Sobacken dengan transportasi khusus, yaitu truk khusus pengangkut limbah B-3 seperti terlihat pada Gambar 18. Di sini bahan-bahan kimia disortir dan didaftarkan. Limbah B-3 ditangani dengan cara yang rasional sebelum dipindahkan untuk dimusnahkan atau didaur ulang. Sekitar 8.000 ton limbah B-3 dikelola tiap tahunnya.



Gambar 18. Truk pengangkut limbah B-3

- dengan proses *Dry Digestion*

Biogas plant dengan proses *Dry Digestion* dibangun di Malmö pada tahun 2012 untuk mengolah limbah makanan dari 63.000 rumah tangga. *Plant* ini merupakan satu-satunya di negara Skandinavia yang menggunakan proses *dry digestion* (Gambar 19). Proses *dry digestion* dipilih karena proses ini lebih sederhana dan lebih efektif dibanding dengan proses *wet digestion*. Sejauh ini hasil yang diperoleh: Biogas yang dihasilkan 471 Nml CH₄/g VS atau 240 m³ biogas /ton umpan segar dengan komposisi 61% CH₄.



a) Limbah Makanan



b) Dry Digester



c) Produk Biogas



d) Padatan setelah fermentasi

Gambar 19. *Biogas plant* dengan proses *Dry Digestion*

3.4. Penandatanganan MoU & MoA Antara USU dan University of Boras

Pada hari Kamis, 23 Agustus 2018 bertempat di University of Boras telah ditandatangani MoU antara University of Boras oleh Prof. Björn Brorström selaku Vice Chancellor dan Universitas Sumatera Utara oleh Prof. Runtung selaku Rektor USU (Gambar 20 (a)). Sekaligus penandatanganan MoA antara Faculty of Textiles, Engineering and Business oleh Prof. Ragne Emardson selaku Dekan dan Fakultas Teknik USU oleh Dr. Seri Maulina selaku Dekan (Gambar 20 (b)). Kedua universitas sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang akademik dan penelitian dari tahun 2018 hingga lima tahun ke depan.



(b) MoA



(a) MoU

Gambar 20. Perjanjian Kerjasama antara University of Boras dan USU

4. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan atas informasi-infromasi yang dipaparkan sebelumnya, berikut beberapa tindak lanjut yang dapat ditempuh pemerintah daerah Sumatera Utara untuk meningkatkan pembangunan masyarakatnya khususnya dalam pengelolaan sampah.

1. Program Peningkatan Peran Masyarakat, Swasta dan Lembaga Pendidikan Dasar
Sangat penting untuk dijadikan suatu program prioritas dalam pengembangan pengelolaan persampahan.
2. Penyusunan SOP dan regulasi
Dengan adanya regulasi ini, maka dapat meningkatkan komitmen dari seluruh *stakeholder* dalam pengelolaan sampah
3. Peningkatan sarana
Jumlah sarana dan prasarana persampahan saat ini masih dianggap belum cukup untuk melayani seluruh wilayah Sumatera Utara
4. Kerjasama dan kemitraan
Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan untuk mendukung program pengelolaan persampahan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
5. Program penghargaan (award) pengurangan sampah

Misalnya penghargaan Adipura, penghargaan Adipura diberlakukan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup.

5. *Eco-labelling*

Pelabelan pada produk yang memberikan informasi tentang persentase konten yang dapat didaur ulang pada suatu produk dapat membantu konsumen untuk memilih produk yang ramah lingkungan atau dapat ditukar menjadi uang

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Sumatera Utara masih kekurangan lahan untuk tempat pembuangan sampah akhir (TPA) maupun tempat pembuangan sampah akhir (TPS) dalam mengolah sampah warganya
2. Kunci penyelesaian masalah sampah di Sumatera Utara tidak hanya ada di tangan pemerintah, namun juga melibatkan peran masyarakat dan swasta
3. Kerjasama sangat diperlukan dengan instansi lain yang terkait sehingga dapat mendorong kemauan dari pihak swasta agar ikut berpartisipasi dalam mengelola sampah.
4. Perlu dipilih teknologi pengolahan yang tepat untuk karakter sampah di Sumatera Utara

Saran

1. Sesegera mungkin mencari lahan TPA masing-masing zona sesuai dengan persyaratan penempatan lokasi TPA sampah.
2. Melakukan pemilahan sampah terlebih dahulu sebelum dibuang ke TPS atau ke TPA.
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan.
4. Menambah TPS di setiap wilayah sehingga beban TPA dalam mengelola tidak semakin banyak.
5. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta.
6. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip *good and cooperate governance*.
7. Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan.
8. Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan.

Daftar Pustaka

- [1]. <https://sumatra.bisnis.com/read/20200216/533/1202014/89-persen-sampah-di-sumut-tak-terkelola> (diakses 21 Mei 2021).
- [2]. <https://id.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%A5s> (diakses 21 Mei 2021).
- [3]. <https://www.hb.se/en/international-student/university-campus/> (diakses 21 Mei 2021)
- [4]. <https://titisari04.wordpress.com/2016/11/15/sistem-pengolahan-sampah-di-swedia/> (diakses 21 Mei 2021)
- [5]. <https://www.thelocal.se/20180328/thats-pant-the-story-behind-swedens-bottle-recycling-system/> (diakses 21 Mei 2021)

Biodata Penulis



Prof. Dr. Eng. Ir. Irvan, M. Si, lahir di Tebing Tinggi 20 Agustus 1968 anak ke-3 dari pasangan Matseh dan Hj. Zulfinar. Beliau mengenyam pendidikan SD, SMP dan SMA di P. Siantar dan kemudian menyelesaikan S-1 Teknik Kimia USU, S-2 Teknik Kimia ITB, dan S-3 di Toyohashi University of Technology, Jepang. Sejak tahun 1995 bertugas sebagai staf pengajar di Fak. Teknik USU, mata kuliah yang diasuh Menggambar Teknik, Komputasi Proses, Perancangan Proses, Proses Pemisahan, Energi Terbarukan di Program S-1, S-2 dan S-3 di Fakultas

Teknik Kimia USU. Pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Teknik Kimia dan Wakil Dekan III Fak. Teknik USU. Saat ini menjabat sebagai anggota MWA USU.

Beliau kerap melakukan kerja sama dengan pihak luar baik dalam maupun luar negeri seperti: Metawater Co. Ltd – Japan, Resource Efficient and Cleaner Production UNIDO, Toyohashi University of Technology, University of Boras-Sweden, University of Kitakyushu, Eindhoven University of Technology, CESPROM UKM Malaysia, PTPN III, Pertamina, PLN dan PDAM. Selain itu beliau aktif sebagai reviewer di berbagai Journal Internasional terindex Scopus seperti: JESTEC, Rasayan: Journal of Chemistry, dan Journal of Geomate.

Beliau aktif meneliti, hingga sekarang telah menghasilkan tiga delapan tulisan internasional terindex Scopus (H-index 11), Empat buah paten internasional terindex Scopus, dua buah HKI, dan telah mengikuti seminar-seminar skala nasional/internasional baik sebagai *keynote speaker* maupun sebagai *presenter*.

Pendidikan Karakter (Kejujuran) Sebagai Sarana Pembangunan Manusia Bermutu

Khairina Nasution

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Sekarang ini persoalan moral menjadi serius dihadapi masyarakat Indonesia. Hampir setiap saat masyarakat Indonesia berhadapan dengan adanya kemerosotan moral yang meliputi anak-anak, remaja, dan dewasa di masyarakat seperti adanya aksi kekerasan, tawuran massa, pembunuhan, perusakan, dan pemakaian narkoba. Dalam dunia pemerintahan juga terjadi kemerosotan moral berupa perilaku ketidakjujuran seperti adanya korupsi dan tindakan manipulasi lainnya. Aksi-aksi tidak bermoral seperti di atas dilakukan oleh kalangan masyarakat yang terdidik. Kejadian-kejadian seperti ini sangat mengherankan, karena saat ini bangsa Indonesia sudah memiliki ribuan lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai tempat. Hal ini menjadi pertanyaan apakah fungsi lembaga pendidikan yang ada sekedar mengutamakan nilai prestasi tetapi mengabaikan etika dan moral.

Masalah-masalah yang terjadi seperti yang tertera di atas mungkin disebabkan oleh sistem pendidikan yang ada terlalu berorientasi pada pengembangan otak kiri (kognitif) dan kurang memperhatikan pengembangan otak kanan (afektif, empati, dan rasa), seperti mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan karakter (budi pekerti dan agama) lebih menekankan pada aspek otak kiri (hafalan, atau hanya sekedar tahu). Padahal pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang melibatkan aspek *knowledge, feeling, loving, dan acting* (Suwartini: 2017).^{1,4,10} Untuk itu diperlukan kemauan untuk mengajak para orangtua, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan untuk ikut bertanggung jawab dalam upaya membentuk pribadi yang berkarakter (kejujuran).

Bila dilihat jumlah kasus korupsi di Indonesia juga terus meningkat. Kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dari 2014-2015 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya (Messi dan Harpan: 2017).² Kasus ini menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai karakter belum menjamin lahirnya pribadi-pribadi yang berkarakter seperti yang diharapkan.

Selanjutnya apabila dilihat tingkat kejujuran di kalangan generasi muda juga sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya milineal yang bolos dari sekolah, ada yang berkeliaran di pasar juga di tempat umum lainnya pada saat jam belajar sekolah sedang berlangsung. Selain itu banyak juga anak-anak yang menyontek pada waktu ulangan di sekolah maupun di perguruan tinggi, anak-anak yang suka berbohong untuk membela dirinya sendiri ketika berada di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.

Perkembangan manusia dari zaman ke zaman dengan adanya globalisasi juga dapat menimbulkan perubahan perilaku menjadi perilaku yang menyimpang sehingga terjadi ketidakjujuran misalnya banyaknya teknologi yang sudah masuk ke desa-desa, anak-anak tingkat SD, SMP dan generasi muda banyak yang putus sekolah dan banyaknya media elektronik yang menayangkan berbagai informasi, sinetron, film, budaya hidup mewah, dan model pakaian yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Perubahan zaman juga dapat mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku seseorang atau masyarakat yang mengakibatkan lunturnya budaya kejujuran seseorang atau menjadi bersikap pembohong disebabkan oleh faktor kepentingan. Para pakar biasa menggunakan rumus sikap "tergantungan kepada kepentingan"^{3,12,16}.

Ada beberapa faktor yang dapat menghilangkan kejujuran itu antara lain seseorang cenderung terjebak dengan berpikiran sempit yaitu ingin cepat-cepat mendapatkan sesuatu tetapi tidak memikirkan akibatnya. Misalnya seseorang yang ingin memiliki gaya hidup mewah padahal tidak sesuai dengan kemampuannya. Perilaku seperti ini menyebabkan terjadinya penyimpangan dari karakter (kejujuran) yang mengakibatkan terjadinya KKN dan pungli. Kasus KKN dan Pungli tersebut terjadi biasanya karena kejujuran tidak terkontrol. Seandainya kejujuran telah membudaya perilaku buruk seperti di atas ini tidak akan terjadi.

Mengantisipasi fenomena seperti di atas ini, semua komponen baik individu, masyarakat, dan pemerintah harus mempersiapkan diri melalui membudidayakan kejujuran karena budaya kejujuran dapat menyelamatkan manusia dari ujian baik berupa tantangan atau ancaman. Seseorang yang menyimpang dari kejujuran berarti dia telah mengkhianati diri dan keyakinannya sendiri.

2. Masalah

Bagaimanakah pendidikan karakter (kejujuran) yang harus diberikan kepada manusia baik anak-anak, remaja dan dewasa?

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat (Suwartini:2017).⁴ Karakter merupakan watak, tabiat, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Karakter dari suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kultur dari bangsa itu sendiri. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan Nasional yang terdapat pada UU. No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 13.⁵

Pendidikan karakter merupakan proses untuk membentuk perilaku yang baik di dalam mengembangkan karakter anak, remaja, dan orang dewasa serta sekaligus juga meningkatkan kualitas kehidupan di masa

mendatang. Pendidikan karakter di era global saat ini menjadi penting. Menurut Ningsih (2019) karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya hubungan karakter dengan prestasi yang diraih.⁶ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Beninga dan Berkowitz (2003) terhadap 120 sekolah di California (Amerika Serikat) menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki implementasi pendidikan karakter yang tinggi cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi meskipun kolerasi keduanya tidak terlalu kuat.⁷

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan karakter (akhlak) merupakan aspek pendidikan tersulit dalam dunia pendidikan secara umum. Hal itu disebabkan oleh pendidikan akhlak merupakan bagian dari pendidikan jiwa yang tidak dapat dilakukan secara instan seperti halnya pendidikan fisik. Pendidikan ini merupakan hal yang sangat urgen yang tidak dapat diabaikan karena berkaitan erat dengan kebahagiaan dan kesuksesan (Rohmawati: 2018).^{8,18}

Selanjutnya Suyanto (2010) menyebutkan ada sembilan nilai karakter yang bersumber dari nilai-nilai hukum universal yang layak dikembangkan yaitu:

1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya,
2. Kemandirian dan tanggungjawab,
3. Jujur/amanah,
4. Hormat dan sopan santun,
5. Dermawan, suka tolong-menolong dan gotong-royong,
6. Percaya diri dan pekerja keras,
7. Kepemimpinan dan keadilan,
8. Baik dan rendah hati dan
9. Toleransi, kedamaian, dan kesatuan.⁹

Tujuan pendidikan karakter menurut para ahli membentuk masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, serta berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa sekaligus berdasarkan Pancasila, sedangkan fungsinya antara lain mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik dan berperilaku baik, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultural dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif (Suwartini: 2017).¹⁰

Fungsi dan tujuan pendidikan karakter itu sendiri dapat dicapai apabila pendidikan karakter itu dilakukan secara benar dan menggunakan media yang tepat. Dengan demikian tugas pendidik tidak hanya terbatas pada pendidikan otak dengan berbagai ilmu pengetahuan baik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, tetapi juga memasukkan aspek agama dan moral. Faktanya pendidik harus mampu menjadikan perkataan dan tingkah lakunya menjadi baik hingga pada akhirnya nanti akan menanamkan pendidikan karakter yang baik pada anak-anak, remaja, dan dewasa di kemudian hari.

Pendidikan karakter yang berkualitas perlu diberikan sejak usia dini. Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter (kejujuran) pada seseorang sejak usia dini akan membentuk pribadi yang bermasalah pada waktu dewasanya nanti. Seorang pendidik tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Untuk mencapai pendidikan karakter (kejujuran) ini diperlukan secara aktif peran orangtua, guru, dosen, dan masyarakat yang saling bekerjasama secara aktif. Orangtua menjadi pendidik utama bagi anak-anaknya karena mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anak-anak tersebut. (Suparno:2021).¹¹ Berawal dari kebiasaan anak untuk jujur pada dirinya maka ia akan terbiasa berani untuk menyampaikan gagasan, ide-ide serta menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan baik. Guru, dosen, dan masyarakat harus mempunyai tujuan yang sama agar menjadikan anak-anak, remaja, dan yang dewasa menjadi cerdas dan berakhlak mulia.

Salah satu dari nilai-nilai pendidikan karakter adalah perilaku jujur. Jujur merupakan perilaku yang ditunjukkan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya tanpa manipulasi dengan cara berbohong. Kejujuran merupakan perbuatan yang mudah dilakukan namun tidak semua orang mau melakukannya. Perilaku negatif dari ketidakjujuran dapat dilihat dari perilaku anak seperti menyontek sewaktu ia masih di sekolah dasar, berbohong sesama teman dalam pergaulan, mencuri bahkan berakhir dengan korupsi setelah ia dewasa. Kejujuran adalah komponen rohani yang memantulkan untuk bersikap terpuji, *honorable*, *receptable*, *creditable*, dan *maqamam mahmudah*.

Jujur juga bermakna memiliki nilai moral yaitu berkaitan dengan pandangan batin yang harus dibuat mendarahdaging. Seseorang yang jujur dapat merasakan bahwa dengan bekerja benar, kreativitas akan tumbuh, etos kerja akan meningkat, disiplin dan kompetitif dalam segala pekerjaan. Jujur dalam bahasa Arab adalah 'siddiq' yang berarti 'nyata', 'benar' atau 'berkata benar', kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. (Muhasim: 2017).¹²

Perilaku jujur adalah perilaku yang diikuti dengan sikap tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya atau siap menghadapi risiko dan seluruh akibatnya dengan penuh suka cita (TT: 2021).¹³ Dalam KBBI (2018) kejujuran adalah sifat (keadaan, jujur, ketulusan hati). Kata ini berasal dari kata jujur yang bermakna 'lurus hati', 'tidak berbohong' (misal dengan berkata apa adanya), 'tidak curang' (misal dalam permainan dengan mengikuti aturan yang berlaku).¹⁴ Kejujuran merupakan sikap terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang. Namun membangun mental seseorang menjadi orang jujur bukanlah hal yang mudah. Sikap kejujuran ini perlu ditanamkan dalam diri setiap anak sedini mungkin karena ia merupakan tanggung jawab moral seseorang terhadap nilai-nilai dan norma agama di masyarakat.

Menurut Emosda (2011) bahwa ada empat hal yang penting untuk menanamkan kejujuran pada anak didik yaitu:

1. Hal-hal yang diajarkan kepada anak didik hendaknya dikaitkan dengan kenyataan dan praktik yang ada di lingkungan luar. Kesadaran akan kesenjangan antara yang diajarkan dengan praktik dapat menumbuhkan sikap kejujuran realistik yang mendorong upaya-upaya menemukan solusi.
2. Harus selalu berdekatan dengan adanya atmosfer lingkungan yang jujur, mulai dari keluarga, teman, sekolah, sampai perguruan tinggi, dan di masyarakat.
3. Pengenalan diri, tugas, fungsi dan perannya serta kemampuan bertindak sesuai tugas, fungsi dan martabatnya perlu menjadi atmosfer dunia pendidikan dan
4. Pentingnya untuk membentuk kemauan dan kehendak yang kuat dalam proses pendidikan untuk membiasakan anak-anak dan remaja dengan *softskill* yang diperlukan dalam kehidupan.¹⁵

Adapun Muhasim (2017) membagi jujur menjadi:

1. Jujur Tingkat Pertama
Jujur tingkat pertama adalah jujur dalam perkataan (kejujuran lisan) di setiap situasi baik yang berkaitan dengan masalah sekarang dan akan datang. Kejujuran ini biasanya terjadi pada waktu memberi berita dan kabar pada orang lain tentang kebenaran yang dikandung oleh kabar tersebut. Oleh sebab itu setiap orang diharapkan harus menjaga kata-katanya, tidak berbicara kecuali dengan jujur dan benar. Jujur yang seperti ini dapat dilihat dengan jelas oleh manusia.
2. Jujur Tingkat Kedua
Jujur tingkat kedua adalah jujur yang terdapat di dalam niat atau kehendak (hanya karena Tuhan). Kejujuran ini menunjukkan pada sikap ikhlas.
3. Jujur Tingkat Ketiga
Jujur tingkat ketiga adalah jujur dalam bertekad. Seseorang yang memiliki jujur tingkat ketiga ini memiliki niat yang kuat untuk melakukan sesuatu dan berjanji kepada dirinya sendiri untuk melakukannya. Misalnya seseorang mempunyai tekad yang kuat untuk bersedekah bila dikaruniai rezeki dan bertekad untuk berbuat adil bila dikaruniai kekuasaan.
4. Jujur Tingkat Keempat
Jujur tingkat keempat yaitu jujur memenuhi tekad. Seringkali pada awal mulanya jiwa memiliki kemauan yang kuat ketika berjanji tetapi kemudian melemah pada tahap pelaksanaan. Maksudnya berjanji dengan tekad yang bulat itu mudah dilakukan tetapi terasa berat ketika melaksanakannya.
5. Jujur Tingkat Kelima
Jujur tingkat kelima adalah kejujuran dalam beramal maksudnya kejujuran yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh di dalam beramal sehingga tidak mengekspresikan sesuatu yang ada di dalam

batinnya. Perlu ada keselarasan dan keseimbangan antara yang lahir dan yang batin.

6. Jujur Tingkat Keenam

Jujur tingkat keenam yaitu kejujuran yang paling tinggi tingkatannya yakni jujur dalam menegakkan agama. Misalnya, jujur dalam memiliki rasa takut kepada pencipta, kerelaan dan tawakal.

Keenam pesan moral di atas ini mengandung makna yang sangat tinggi yaitu bahwa manusia hidup di dunia ini hanya sementara, tempat menyiapkan bekal di akhirat. Oleh sebab itu setiap orang harus bekerja keras dan menjadikan budaya kejujuran menjadi dasar bagi setiap niat, ucapan, dan perbuatan.¹⁶

Penanaman karakter jujur pada anak penting dilakukan agar dapat membentuk masa depan sebagai generasi penerus bangsa yang jujur dan tidak berperilaku menyimpang dalam kehidupan dirinya sendiri maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar bisa efektif dan efisien guru harus mendampingi siswa selama mendapat pendidikan di sekolah, sedangkan peran orangtua harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai serta keperibadian yang baik agar dapat memberikan keteladanan kepada anak, terutama terkait dengan masalah kejujuran. Orangtua harus dapat menambahkan kesadaran kepada anaknya bahwa kejujuran akan menjadikan hal yang positif bagi kehidupannya.

Selain pendidikan karakter (kejujuran) berupa materi pendidikan di sekolah pendidikan karakter (kejujuran) ini untuk remaja dapat pula diberikan melalui permainan-permainan tradisional. Sebenarnya ini telah dilakukan oleh para leluhur kepada anak cucunya. Penyampaian pesan moral, dan nilai-nilai edukasi akan lebih mudah diterima oleh remaja dalam bentuk permainan tradisional. Secara tidak sadar melalui permainan tradisional remaja dilatih untuk memiliki sikap tanggung jawab, menghargai teman, dan bertindak jujur, dll.

Permainan tradisional atau disebut juga dengan permainan rakyat merupakan sebuah kegiatan rekreatif yang tidak hanya bertujuan untuk menghibur diri tetapi juga sebagai alat untuk memelihara hubungan sosial. Melalui permainan remaja diperkenalkan dengan berbagai macam keterampilan atau kecakapan yang sangat berguna setelah mereka dewasa. Misalnya permainan tarik tambang berguna untuk melatih kejujuran, kesehatan dan konsentrasi, sedangkan permainan *tak tik bom ware* dapat digunakan untuk melatih konsentrasi dan kejujuran. Permainan tradisional ini juga dapat menjadi salah satu benteng ketahanan dalam menghadapi unsur budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Suyitno (2012) menambahkan bahwa pada era sekarang ini dibutuhkan bukan hanya generasi muda yang berkarakter kuat tetapi juga benar, positif dan konstruktif.¹⁷

Tulisan ini membicarakan pendidikan karakter (kejujuran) sebagai sarana pembangunan manusia bermutu. Yang dimaksud dengan pembangunan manusia bermutu di sini adalah membentuk manusia yang berkualitas, memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, dan konstruktif.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Pendidikan karakter yang berbentuk kejujuran harus ditanamkan secara berkesinambungan mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Dengan mengacu pada pemikiran pemecahan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka untuk anak-anak pendidikan karakter (kejujuran) dapat dilakukan melalui:

1. Memberi keteladanan yaitu dengan memberi contoh perbuatan jujur dan penguatan untuk melakukan perbuatan jujur melalui peniruan dan pembiasaan di rumah dan di sekolah. Dengan adanya contoh sekecil apapun yang diberikan kepada anak-anak namun bermakna akan selalu diingat, membekas dan tumbuh subur dalam dirinya dan akan menjadi jati dirinya di masa yang akan datang. Sesuai dengan apa yang dikatakan Rohmawati (2018) untuk menumbuhkan sikap jujur harus melalui keteladanan yakni dengan memberi contoh melakukan perbuatan jujur dan memberi penguatan kepadanya.¹⁸
2. Memberikan pendidikan agama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter (kejujuran) ini harus diberikan dari sejak dini karena pada usia inilah anak-anak yang dianggap relatif mudah untuk dibentuk. Sebaiknya pendidikan karakter (kejujuran) pada tahap ini dilakukan melalui metode *quantum learning* yaitu metode yang menggunakan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkesan pada anak-anak.
3. Pendidikan karakter (kejujuran) ini sebaiknya dikembangkan melalui mata pelajaran (dimasukkan ke dalam kurikulum) secara terintegrasi melalui pengembangan diri dan budaya, mata pelajaran agama, PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) dan mata pelajaran lain yang sesuai.
4. Memberi sanksi bagi yang tidak melakukan pendidikan karakter (kejujuran) di setiap kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Untuk menanamkan pendidikan karakter (kejujuran) pada remaja dapat dilakukan melalui:

1. Memberikan pendidikan agama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengimplementasikan pembiasaan sikap dan perilaku jujur di lingkungan remaja seperti di sekolah, kampus dan tempat bekerja.
3. Memasukkan pendidikan karakter (kejujuran) ke dalam mata kuliah secara terintegrasi melalui pengembangan diri dan budaya, serta memasukkannya dalam mata kuliah agama, PKn, dan mata kuliah lain yang sesuai secara terus-menerus, tidak hanya satu semester saja karena pendidikan karakter (kejujuran) harus dilaksanakan secara kontinu mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
4. Menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional yang sesuai untuk remaja karena melalui permainan ini remaja dilatih untuk

memiliki sikap tanggung jawab, menghargai teman dan bertindak jujur. Selain itu juga perlu memberikan pendidikan *softskill* yang diperlukan dalam kehidupan.

5. Memberi sanksi bagi yang tidak melakukan pendidikan karakter (kejujuran) di setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Adapun pendidikan karakter (kejujuran) untuk manusia dewasa dapat dilakukan melalui:

1. Mengamalkan agamanya dengan baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang menjalankan agamanya dengan baik akan memiliki kepribadian yang baik dan dapat dipercaya oleh orang banyak.
2. Banyak bersosialisasi dengan orang yang memiliki kejujuran atau berada di lingkungan orang-orang jujur karena jujur adalah perilaku positif yaitu sama antara perkataan dengan perbuatan dan harus berkesinambungan. Misalnya bila berteman harus dengan orang yang benar, seperti pepatah mengatakan bila seseorang berteman dengan penjual minyak wangi akan kecipratan wanginya. Sebaliknya jika seseorang berteman dengan orang yang suka minum-minuman yang memabukkan, sekali waktu ia akan terjebak dalam kehidupan itu.
3. Meyakini bahwa perbuatan baik dengan adanya kejujuran selalu mendapat balasan yang baik di akhirat nanti dan perbuatan curang akan mendapat balasan yang setimpal dari Sang Pencipta.
4. Memberi sanksi yang tegas bagi orang yang melakukan perbuatan tidak jujur di setiap kegiatan.

4. Rencana Tindak Lanjut

Pendidikan karakter (kejujuran) sangat tepat apabila dimasukkan ke dalam agenda pendidikan formal secara terus-menerus tidak hanya di tingkat sekolah dasar tetapi juga di tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi. Pendidikan ini sebaiknya difokuskan pada pendidikan *emotional quotient* (EQ). Selain itu pendidikan nonformal dan informal juga tetap harus diarahkan kepada pendidikan karakter (kejujuran). Pendidikan karakter (kejujuran) sebaiknya mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti orangtua, pemangku pendidikan, termasuk di dalamnya isi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan mata pelajaran, penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik, dan pembinaan masyarakat. Media dakwah juga harus dibuat memiliki peluang untuk membudidayakan kejujuran karena mayoritas rakyat Indonesia memiliki kepercayaan yang sangat kuat sesuai agama yang dianutnya. Selain itu memberi contoh melalui keteladanan juga sangat efektif untuk selalu dilakukan.

Bagi remaja pendidikan karakter (kejujuran) itu sangat penting diberikan sebagai sarana pembentuk perilaku dan kepribadian terutama

dalam berperilaku di media internet dan kehidupan sehari-hari. Salah satu alternatif pembentukan karakter (kejujuran) bagi remaja ini adalah dengan mengaktifkan kembali permainan tradisional anak yang memiliki gerak yang banyak dan mengandung ajaran moral yang masih relevan dengan kehidupan zaman sekarang.

Bagi manusia dewasa harus selalu mengamalkan agamanya dengan baik dan mengusahakan agar selalu berada di lingkungan orang yang jujur setiap saat. Berikutnya adalah memberikan sanksi yang tegas bagi orang yang tidak melakukan perbuatan jujur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

5. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil simpulan bahwa pendidikan karakter (kejujuran) harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Untuk membudayakan kejujuran harus dimulai dari masing-masing individu di rumah tangga. Lembaga-lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi harus memasukkan program pengajaran yang terkait dengan pendidikan karakter (dalam hal ini nilai-nilai kejujuran) ke dalam pendidikan agama dan PKn baik di SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Penanaman kejujuran kepada anak dan remaja tidak terlepas dari peran orangtua, guru dan lingkungan. Memberi pemahaman melalui keteladanan sangat efektif untuk mendidik anak dan remaja menjadi jujur. Untuk mendukung pendidikan karakter (kejujuran) ini diperlukan metode quantum learning yang menggunakan aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Pendidikan karakter (kejujuran) untuk remaja dapat ditanamkan melalui pengimplementasian pembiasaan sikap dan berperilaku jujur di mana saja baik dengan cara melaksanakan ajaran agama dengan baik atau dengan cara menghidupkan kembali permainan tradisional daerah masing-masing. Sebagai manusia dewasa seharusnya meyakini bahwa perbuatan yang baik dengan berlaku jujur akan mendapat balasan yang baik dan perbuatan yang curang akan dibalas juga dengan balasan yang setimpal dari yang kuasa dan selanjutnya dianjurkan untuk selalu bersosialisasi dengan lingkungan orang-orang yang jujur. Pemberian sanksi harus diberikan kepada orang-orang yang berbuat tidak jujur.

Pendidikan karakter (kejujuran) atau membudayakan kejujuran sama dengan mempertahankan nilai-nilai moral. Nilai-nilai kejujuran ini dapat dijadikan benteng agar manusia tidak terbawa ke pengaruh globalisasi yang negatif karena globalisasi tidak hanya berkaitan dengan kemajuan kebudayaan manusia dibidang industri yang sifatnya positif tetapi juga mampu mempengaruhi perilaku manusia yang bersifat negatif.

b. Saran

Pendidikan karakter (kejujuran) baru akan berhasil diberikan apabila ada kerjasama antara orangtua di rumah, pemangku kepentingan di dunia pendidikan dan pemerintah. Pendidikan ini harus diberikan secara kontinu mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Selain itu diperlukan juga peran serta masyarakat secara bersama-sama untuk membentuk pribadi yang jujur di tengah-tengah pergaulan di masyarakat. Kepada semua aparat dan pejabat diharapkan mengutamakan kejujuran di dalam melakukan pekerjaan karena kejujuran awal dari makmur dan bahagiannya suatu negara. Semuanya diharapkan berusaha untuk tidak berbuat salah. Berbuat salah bukan karena takut dihukum tetapi karena takut ditulari oleh generasi muda yang ada di bawah kita.

Daftar Pustaka

1. Suwartini, Sri. 2017. *Pendidikan Karakter dan Pembangunan Sumber Daya Manusia keberlanjutan*. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-Sd-an, Vol. 4, Nomor 1, September 2017, hlm. 220-234.
2. Mersi dan Harpan (2017). *Menanamkan Nilai-Nilai Kejujuran Di Dalam Kegiatan Madrasah Berasrama (Boarding School)*. JNKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan). Volume. 1, No 1 Juli-Desember 2017.
3. Muhasim. 2017. *Budaya Kejujuran Dalam Menghadapi Perubahan Zaman Palapa*: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan. Volume 5, No 1, p- ISSN. 2338-2325; e-ISSN 2540-9697; hal 174-195.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. 2016. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara.
5. Ningsih, Sulistia. 2019. *Quantum Learning Membangun Pendidikan Karakter Kejujuran Siswa*. Proceeding of ICECRS (ojs.umsida.ac.id/index.php/volume 2).
6. Beninga, J.S and Berkowitz, M.W. (2003). *Support the Relationship of Character Education Implementation and academic Achievement in Elementari Schools*. International Journal of Research in Character Education 1.
7. Rochmawati, N. (2018). "Peran Guru dan Orangtua Membentuk Karakter Jujur Pada Anak". Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam 1.
8. Suyanto. 2010. *Urgensi Pendidikan*. <http://waskitamandiribk.wordpress.com./2010/06/01/urgensi-pendidikan-karakter>.
9. Suparno, P. (2001). *Pendidikan Demokrasi, Indonesia 20*.
10. T.T (2001). *Kecerdasan Rohaniah*. Jakarta: Gema Insani Press.
11. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*: Jakarta.
12. Emosda. 2011. *Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Dalam Menyiapkan Karakter Bangsa*. Innovation, vol. X, No 1: 151-166.
13. Suyitno, Imam. 2012. *Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal*. Jurnal Pendidikan Karakter Tahun II No 1, hal 1-13.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Khairina Nasution, M.S. adalah staf pengajar di Prodi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya USU dan di Prodi Linguistik Pascasarjana USU. Dilahirkan di Medan tanggal 4 November 1962. Menyelesaikan S-1 tahun 1986 di Fakultas Sastra USU, menyelesaikan S-2 tahun 1992 di Pascasarjana UGM, dan menyelesaikan S-3 tahun 2011 di Pascasarjana USU dalam bidang Morfologi.

Blue Print Penyelesaian Masalah Pertanahan Sumatera Utara

Muhammad Yamin Lubis

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Sampai saat ini masyarakat memahami sebuah istilah semakin banyak manusia berada di atas tanah, semakin banyak permasalahan tanah yang beragam corak dan jenisnya. Tanah itu tidak hanya dimiliki oleh perseorangan, tetapi juga oleh pemerintah atau perusahaan, baik yang legal maupun yang tidak legal. Begitu pula yang sudah terdaftar atau pun yang belum terdaftar, memiliki permasalahan yang sama dari dahulu sampai sekarang. Dengan demikian manusia lah yang membuat tanah itu menjadi persoalan atau menjadi sengketa. Bukan tanah yang bersengketa tetapi manusianya dengan segala kerakusan manusia itulah sebagai titik sentral sengketa tersebut. Persoalan atau permasalahan ini hanya mungkin dapat diminimalisir dengan menggunakan manajemen pertanahan. Hal ini digunakan agar dapat mengelola manusia yang melakukan aktivitas di atas tanah tersebut, sehingga persoalan kecil atau besar dapat di atasi dengan baik. Artinya saat ini tata Kelola tanah harus bermakna bagi manusia itu dengan berorientasi pada satu tujuan yakni tanah harus dapat dikelola agar memberikan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Manajemen pertanahan diperlukan untuk mengatur kepemilikan tanah dan fungsi tanah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang tinggal di atas tanah tersebut. Dengan beragamnya kegiatan manusia yang terus membuat tanah itu semakin dianggap kurang dalam jumlah bagi manusia tersebut membuat manusia terkadang tidak mengindahkan aturan apa lagi tak ada aturan atau tidak mau diaturnya manusia di atas tanah. Negara memang sudah hadir dalam mengelolanya dengan regulasi agar benar-benar bermanfaat atau dapat dimanfaatkan untuk semua yang ada di atas tanah tersebut agar tidak ada yang saling berkuasa dan menguasai sendiri di atas kemampuan manusia mengelolanya. Namun kenyataannya Negara saja juga ikut memosisikan diri untuk bersama-sama rakyat yang secara privat ingin memiliki dan ingin mencari keuntungan juga. Sehingga Kewenangan Hak Menguasai Negara yang diamanatkan UU pada Negara dalam mengelola tanah di Negara ini masih belum cukup juga efektif menurutnya, kalau hanya diberi kewenangan dalam Menguasai saja. Sehingga kewenangan mengelola tanah ini pun diperbesarnya sampai ikut Negara mengeksekusi tanah atas nama Hak Menguasai Negara tadi, padahal sejak awal kewenangan ini sudah tepat, namun untuk saat ini Negara merasa kurang besar sehingga aturan pun dibuat negara lah untuk ikut mengeksekusi hak tersebut dalam berbagai kegiatan pertanahan (lihat UU CiptaKerja No 11 tahun 2020), maka kita

saksikan lah apa yang akan terjadi jika Negara sudah melampaui kewenangan HMN dilaksanakannya dalam ranah keperivatan tanah ini. Apalagi tanpa dukungan semua masyarakat dalam melaksanakan aturan pertanahan di atas tanah tersebut tentu yang terjadi persoalan demi persoalan akan mewarnai penguasaan dan pemanfaatan tanah ini. Jika memang dikaji secara teoretis adanya manusia di atas tanah memiliki hubungan khusus (Khas) yang disebut *rent*. Bentuk *rent* ini membedakan manusia di atas tanah dengan makhluk lain selain manusia itu. Dalam kajian teoretis, *Rent* tersebut bermacam-macam jenisnya: ada *rent* recardian. Ada *rent* politik, ada *rent* ekonomi, *rent*social, *rent* lingkungan, dan *rent* religi yang juga mempengaruhi keberadaan hubungan manusia dengan tanah. Orang akan membedakan tanah yang berlokasi di kota dengan di pinggiran kota atau di luar kota. Orang akan membedakan harga tanah di satu tempat dengan di tempat lain yang berbeda dan orang akan membedakan yang punya tanah luas dengan pemilik tanah yang sedikit. Timbulnya pembedaan inilah yang menjadi *rent* tersebut Ketika manusia di atas tanah tersebut. Jika makhluk lain seperti lembu yang di atas tanah itu, tak mungkin dia akan membedakan tanah luas dengan tanah sempit dan tanah hutan dengan tanah sawah. Hewan ini tidak akan marah atau berkelahi atas tanah yang sempit dan yang luas, cukup asal berumput maka dia (hewan) tidak akan melirik tanah tetangga dan bernafsu untuk menyatakannya lebih hijau dari rumput yang dihadapannya itu, dan pasti tidak berkelahi karena tanah itu. Hewan itu tetap membuat prilaku yang sama yakni menikmati rumput hijau yang ada di atas tanah yang di depannya saja. Bagi hewan *rent* tersebut tidak ada. Hewan itu memerlukan tanah dalam melanjutkan kehidupann yaitu, namun diyakini lembu itu tidak pernah iri atau tidak akan lebih tertarik atas rumput tetangganya itu.

2. Masalah

Sudah pasti bagi manusia yang membangun dengan segala sifat kedinamisannya, tanah memiliki arti penting pada masa depan. Sudah lama pendapat mengatakan bertambahnya jumlah manusia akan semakin tinggi arti pentingnya tanah tersebut bagi manusia, apalagi jumlah fisik tanah itu tidak akan bertambah lagi disbanding dengan bertambahnya manusia dengan segala aktifitasnya. Artinya tanah bagi manusia masa depan yang sangat penting. Tanah baik dalam arti fisik, dalam arti luasan dan dalam arti *right* selalu mengikat bagi diri dan kesatuan masyarakat yang mau mengembangkan dan memakmurkan kehidupannya itu. Sejalan dengan itu lah maka manusia yang ada di atas tanah akan dapat berbuat yang terkadang tidak sejalan dengan hukum, akan tetap dilakukan demi memperoleh tanah yang semakin langka tadi. Bahkan setelah diperolehnya pun tanah ini, persengketaan di atas tanah juga tidak habis dan akan mungkin muncul lagi atas tuntutan menambah luas dan atau menggunakannya, sehingga akan muncul lagi seperti sengketa batas, sengketa peralihan milik tanah (mewariskan dan pembagiannya), sengketa mafia tanah dan sederet lainnya

dan bahkan penggunaan yang sembarangan dan tidak tepat guna, yang memungkinkan tanah itu tidak berkualitas mendukung kehidupan, atau bahkan menjadi tanah itu terlantar karena keserakahan manusianya. Jika terjadi pewarisan di atas tanah yang terus-menerus menyebabkan terjadinya fragmentasi tanah yang berakibat tidak akan banyak memberikan hasil lagi bagi pemiliknya atau terjadi konversi lahan yang sembarangan tanpa memikirkan daya dukung dan kesejajaran peruntukan. Kenyataan ini pula harus sebaiknya ada pemikiran dalam mengelola tanah dengan baik, sehingga kedepannya manusia akan bertambah Tanah dan fungsinya dapat digunakan dengan baik demi mendukung kehidupannya taman usia yang terus bertambah tadi. Program ini lah yang selama ini dilaksanakan pemerintah dengan nama Reforma Agraria untuk mengawasi dan menjaga agar kualitas tanah dan daya dukung penggunaan dapat terus tertata tanpa mengorbankan kepemilikan dan penggunaannya, sehingga kemakmuran di atas tanah itu benar-benar terwujud dalam kehidupan manusia yang terus berkembang ini. Kenyataannya Reforma Agraria (lihat PP 86 tahun 2018) yang dijadikan sebagai program nyata pertanahan oleh pemerintah, yang sudah mengatur jenis, fungsi, dan manfaatnya, juga belum berhasil untuk menyelesaikan persoalan tanah yang berkeadilan ini. Perlu diingat bahwa, kealfaan melihat aspek hukum sebagai penyelesaian persoalan tanah dalam kehidupan manusia, mengakibatkan kepastian dan keadilan akan masa depan tanah tidak pernah terwujud. Ditambah dengan ketidak mampuan membaca paradigma atau hubungan subjek dengan objek yang terjadi di atas tanah membuat tanah itu semakin harisemakin tak terselesaikan bila muncul persoalan di atas atau pada tanah tersebut. Maka dari sejak awal seharusnya Pemerintah dengan segala kekuasaan dan kewenangannya pada tanah sudah memprioritaskan pengelolaan tanah dalam mengatur pemanfaatan tanah lebih dahulu baru kemudian mengatur kepemilikannya untuk dapat baik penggunaan itu (Use-nya) dan berkepastian hukum yang dapat dirasakan manusia itu pada haknya *-(right-nya)* agar manfaat masa depan tanah tetap terpelihara dengan baik (ingat konsep membangun di atas tanah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan). Mengapa Pemerintah sebagai pengelola dalam mengelola pertanahan sudah muncul persoalannya besar, mungkinkah Pemerintah masih lalai atau masih membiarkan masyarakat menyelesaikan sendiri persoalan tanah? Seperti yang dikatakan di atas, sudah diamanatkan pada Negara, agar persoalan tanah tidak timbul ?. Tentulah akan timbul sebaliknya jika pemerintah sudah membiarkan keikut sertaannya mengelola pertanahan dengan juga ikut bersaing Bersama masyarakat untuk mencari keuntungan di atasnya, dapat dipastikan persoalan tanah ini tidak akan semakin kurang sebagai manatelah diketahui banyak orang di Republik Indonesia, tak terkecuali di Sumatera Utara.

Jika dianalisis keadaan ini dalam wilayah Sumatera Utara saja, akan dapat kita urut beberapa persoalan tanah yang hingga kini masih menghiasi kehidupan bernegara di daerah ini. Masih terdengar ada kasus tanah yang memperebutkan lahan eks PTPN II, meskipun sudah dibentuk beberapa kali badan penyelesaiannya yang saat itu disebut Panitia B Plus, yang akan

bekerja dalam menyelesaikan kepemilikan dan penggunaan kepemilikan di atas tanah yang hanya seluas kurang lebih 5.700 hektar, sampai saat ini tidak ada solusi yang memberikan kepastian hukum. Tanah yang diragukan kepastian hukumnya itu, membuat masyarakat merasa ada ketidakadilan penguasa. Mengapa mereka yang menjadi tuan-tuan tanah dapat memiliki dan atau menguasai tanah ini sementara rakyat yang memang membutuhkan tanah hanya setengah hektar tidak pernah dapat diperoleh dan akan dikenai semacam sanksi, jika tanah tersebut terus ingin dimiliki. Sebagai contoh Tanah Sari Rejo yang hingga kini juga tetap menjadi api dalam sekam. Tanah garapan diberbagai tempat pada areal Perkebunan Nasional yang masih aktif saja dikelola saja, masih muncul sengketa batas kepemilikan dengan kampung atau sengketa lain. Ada tanah yang bersengketa atas pelaksanaan ganti kerugiannya seperti pelaksanaan pembangunan jalan Tol Medan Binjai saat itu masih terdengar ada, Tanah-tanah lain yang berbatasan dengan antar Kabupaten, tanah-tanah wakaf yang masih juga tidak ada penyelesaiannya hinggasaat ini. Ada tanah hutan dengan hadirnya SK Menhut 44 tahun 2004 dan disusul dengan SK Menhut 579 tahun 2016, juga mempunyai persoalan yang sama. Ada juga tanah yang disebut sebagai tanah hutan, bukan lagi disebut sebagai tanah hutan. Sengketa di areal register Padang Lawas, sengketa di areal hutankawasan Danau Toba. Ada juga sengketa tanah Hutan di daerah Langkat yang juga bermasalah seolah-olah dibiarkan oleh Pemerintah Sumatera Utara. Hal ini diibaratkan “bagai air mengalir” yang penting masyarakatnya aman-aman saja, atau dianggap tidak mengganggu pemerintahannya mereka. Sepanjang tidak diberitakan atau tidak terjadi pertumpahan darah di atasnya, tanah dianggap aman. Tentu bila Pemerintah membiarkan hal ini, sama dengan membiarkan beban Pemerintah Sumatera Utara untuk membangun daerah ini semakin lama semakin berat adanya.

Jika melihat sejarah pertanahan Sumatera Utara yang pada saat itu disebut Sumatera Timur, persoalan tanah yang disebutkan diatas, sudah hamper tidak dapat. Sebenarnya usaha penyelesaiannya sudah dilalui dengan penyelesaian negara yang pada saat awal kemerdekaan dikenal dengan Perjanjian Meja Bundar. Setelah merdeka masih juga menyisakan sengketa tanah di areal Perkebunan atau bekas perkebunan. Saat itu sudah ada kebijakan Pemerintahan untuk Sumatera Timur atau pada areal bekas Perkebunan yang akan berakhir dan atau sudah berakhir malah menjadi persoalan baru. Khususnya masyarakat masuk Kembali ke areal lahan perkebunan untuk menggarap dengan berbagai modus dan bahkan ada juga memalsukan bukti-bukti kepemilikan, sehingga dianggap legal sebagai penguasa tanah, sepertisurat KRPT. Faktanya KRPT saat itu saja tidak digunakan, untuk dapat sebagai bukti Hak milik, apalagi digunakan pula sama dengan KRPT. Saat ini KRPT akan dijadikan bukti milik tertentu, bahwa KRPT yang kemudian menjelma menjadi KRPT (lihat SKB 5 Menteri: Menteri Agraria, Pertanian, Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman No 1 tahun 1955 tertanggal 30 Juni 1955 dan SK Menteri Agraria no SK 102/Ka/1955 tgl 30 Juni 1955 dalam rangka UU No 8 tahun 1954) adalah sebagai badan yang akan menyelesaikan pertanahan di areal

perkebunan Negara. Dengan adanya Badan ini juga masih kewalahan dan tidak banyak memberikan solusi penyelesaian yang diharapkan, tetapi kenapa sekarang ini kartu keanggotaan satu badan yang tanahnya akan diselesaikan tersebut hanya dengan memunculkan KRPT, lalu dianggap ada yang memperlakukan sebagai bukti Hak atas tanah saat ini, mengapa tidak dilihat dari aspek kesejarahan atas KRPT tersebut?. Dampaknya saat ini masyarakat semakin gencar masuk ke areal perkebunan Negara yang tidak diperpanjang HGU nya, atau habis masa berlaku HGU-nya dianggap tanah Negara yang boleh di okupansi secara legal dengan berakhirnya HGU. Hal itu dianggap menjadi tanah Negara bebas untuk dimiliki atau didirikan usaha tanpa hak sekalipun oleh oknum –oknum masyarakat atau hanya dengan menunjukkan KRPT –nya yang belum tentu benar secara historis apalagi secara legal. Penyelesaian yang tidak jelas bagi penggarapan ini, atau yang tidak selesai hingga kini kelihatannya menjadi pengalaman pahit dalam mengelola tanah perkebunan besar dan terus menjadi kebiasaan pula bagi masyarakat untuk melakukan okupansi liar di atas areal Perkebunan Negara yang belum atau tidak diperpanjang HGUnya tersebut. Pemerintah kelihatannya kewalahan dan bahkan tidak ada solusi. Perkebunan lebih kewalahan karena kenyataannya masyarakat terus mengokupansi liar di tanah arealnya. Sungguh pun sudah ada upaya *pemberiansuguhhati*¹ agar tidak melakukan penggarapan lagi, namun malah terus berlanjut bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang diadakan saja oleh mereka yang terkadang tidak benar atau palsu, dan masyarakat semakin berani jadi penggarap sekalipun harus berperkara di pengadilan. Ada masyarakat pernah menang sebagai penggarap, tetapi bukan sebagai pemilik tanah dalam perkara di Pengadilan merebut tanah dengan okupansi liar. Meskipun ada masyarakat setelah menang dengan Putusan Pengadilan, namun tetap saja dapat dieksekusi bukan miliknya masyarakat. Kenyataan ini akhirnya sering disebut penyelesaian tanah yang gantung atau tidak tuntas (*peusedo solution*). Permasalahan tanah seperti di Sumatera Timur ini ada yang menyebut dengan “macam dipelihara”, khususnya bagi orang-orang yang mau mengail di air keruh. Pertanyaan sering muncul” apa gunanya jika memang adanya sengketa tanah ini dipelihara dan diselesaikan secara gantung atau tidak tuntas ? Apakah oknum ini tidak merasa berdosa untuk terus bergerilya mengumbar janji penyelesaian baik pada masyarakat penggarap dan atau pemerintah?. Jika demikian bukankah yang diuntungkan tidak untuk para pihak yang berseteru di atas tanah sebagai disebutkan di atas. Atau dibiarkan sehingga yang untung adalah para makelar (termasuk makelar perkaranya) dan atau mungkin yang disebut mafia-mafia tanah tadi, yang memanfaatkan situasi di atas perseteruan tanah ini. Siapapun mafia tanah tersebut, tetap

¹ Semacam pemberian uang ganti kerugian tanah/hak atas tanah kepada penggarap, tetapi bukan uang ganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan Pengadaan tanah versi UU No 2 tahun 2012. Lihat disertasi Kusbianto, Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan pada Areal Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan Di Sumatera Utara, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum, Fak Hukum, Universitas Sumatera Utara, tahun 2016.hal.295

saja hal ini adalah pelaksanaan yang tidak bijak. Perselisihan tanah atas masyarakat, makelar, dan pemerintah, sangat diperlukan penyelesaian yang bijak. Bagaimanalah Negara memberikan kemakmuran atas sumber daya alam di Sumatera ini adil untuk rakyatnya, jika persengketaan tanah belum terselesaikan dengan baik di Sumatera atau Indonesia. Asumsi yang disebutkan di atas bahwa permasalahan tanah di negeri ini adalah benar “dipelihara”. Lalu siapa yang memelihara itu, benarkah adalah Mafia tadi atau orang-orang dalam (siapa dalam yang dimaksud mohon ditafsirkan sendiri) atau bersekongkol orang dalam itu dengan orang yang punya grup baik legal maupun grup tidak legal dalam kelompok dan organisasi disitu ?. Dengan rumusan yang pernah disebutkan “Aku menekan mu, Kau menekan dia dan Dia menekan saya” atas satu tujuan memelihara demi keuntungan kita untuk tetap kita nikmati dahululah, sepanjang kita di area ini. Tentu jika demikian adanya tak pernahlah lagi selesai persoalan tanah di negeri Sumatera Utara ini, jika apalagi memang niat untuk menyelesaikan juga tak ada. Oleh karena itu menurut saya selaku peminat yang mendalami hukum agrarian tidak dapat dibiarkan persoalan tanah ini lagi dan haruslah dituntaskan. Atau harus dapat diselesaikan sehingga tidak adalagi persoalan tanah ini di Sumatera Utara dan masyarakatnya akan menikmati manfaatnya, serta harus diatur oleh hukum sebagai mana tujuan hadirnya Undang-Undang Agraria ini (lihat pasal 2 ayat 3).

Untuk keadaan menyelesaikan masalah tanah ini, tentu yang tepat jangan tanya pada Gubernur apa penyelesaian tanah masyarakat ini, dan jangan tanya juga pada perusahaan apa yang harus diperbuat untuk menyelesaikan persoalan tanah di areal atau di bekas areal perusahaan perkebunan ini, seperti di perkebunan. Harapan masyarakat tanah milik negara ini diberikan pada masyarakat yang tidak memiliki tanah secara gratis atau dengan pembayaran yang murah dan terjangkau masyarakat. Apakah Perusahaan juga dapat semudah itu memberikan tanah yang digarap masyarakat itu diberikan tanpa proses dan prosedur hukum yang berlaku di perusahaan itu. Jika diberikan akan berkuranglah lahan usahanya, karena jika demikian usahanya pasti rugi jika areal tanahnya terus berkurang atas adanya masyarakat yang menggarap memperjuangkan tanah itu menjadi miliknya. Lalu bagi yang belajar Ilmu Sosiologi Hukum yang terus mengamati dan bahkan melakukan penelitian di atas tanah sengketa tak mungkin pula diam tak ada penyelesaian dan dibiarkan tanpa kepastian dan keadilan di dalam penguasaan dan pengusahaan tanah itu kedepan. Dengan latar belakang dan fenomena di atas, sangat perlu dianalisis sengketa tanah dan masyarakat pengguna tanah sengketa tersebut. Jika dikaji dari pandang anilmusosiologi hukum ini akan ditemukan aspek aspek sosial apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan persoalan tanah di Sumatera Utara ini. Perlu dicatat bahwa Hukum berfungsi sebagai seni ilmu atau strategi penyelesaian masalah masyarakat dari yang bermasalah menjadi tidak bermasalah atau dari yang dismarmoni menjadi harmoni.

Selayaknya harus ada langkah-langkah konkrit dilakukan sebagai suatu pandangan rancang awal mengenai *Blue print* penyelesaian persoalan

tanah Sumatera Utara ini. Bukan hendak menggurui dan apalagi untuk menanam-nanam pemikiran yang tidak berdasar, karena Pemerintah pun sudah juga melaksanakan segala konsep penyelesaian namun masih kurang dirasakan masyarakat memberikan keadilan. Sekalipun hanya sebuah pengantar awal pemikiran yang disajikan sebagai buah-buah pikir yang mengantar atau membuka jalan awal atas dasar paradigmatic keadaan nyata masalah tanah saat ini. Sangat diyakini akan bermanfaat jika juga dimanfaatkan untuk digunakan sebagai solusi oleh siapa saja yang memang telah berpikir atas penyelesaian tanah ini, seperti penyelesaian dengan melibatkan orang yang beseteru atau mengikutkan penggarap dan penguasa tanah untuk Bersama sama memberikan pemikirannya. Atau membuat suatu kelembagaan resolusi konflik pada tingkat terbawah (dengan meminjam istilah Roth dalam Satyawan Sunito menyebutnya *legal pluralism*).²

3. Strategi Pemecahan Masalah

Jika pendekatan kajian ini adalah pendekatan ilmu hukum, maka apa yang pernah dikemukakan oleh AP. Parlindungan, (2016)³ sebagai Guru Hukum Agraria masih dianggap relevan barang kali saat ini. Beliau menyebutkan dalam Pendahuluan Buku Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria “ Tidak ada masalah yang sangat membingungkan banyak Pejabat dan instansi, terutama dari pihak perbankan, selain dari pada masalah Pertanahan”. Menurutnya “sungguhpun sering disebutkannya bahwa untuk memahami UUPA harus dilakukan dengan logika (UUPA), dengan maksud bahwa penyelesaian masalah agrarian itu, haruslah memahami bahwa persoalan itu adalah persoalan agraria yang hanya dapat dituntaskan jika ditafsirkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Agraria itu sendiri, bukan menurut logika yang mungkin kita pikirkan”. Hanya dengan menggunakan aturan agrarian dengan pendekatan filosofi agrarialah baru masalah agrarian itu tuntas dan memberikan kepastian hukum⁴.

Ini artinya jika persoalan tanah Sumatera Utara ini juga tidak diselesaikan dengan menggunakan logika agrarian itu sendiri maka persoalan agraria yang ada ini hamper tidak akan memberikan penyelesaian hukum yang adil dan berkepastian, apalagi memberi manfaat sesuai yang diharapkan. Maka Langkah awal, diletakkan terlebih dahulu pemikiran “bahwa persoalan pertanahan haruslah menyelesaikannya dengan menggunakan

² Roth, Dik (2005) *The Role of Legal Pluralism In Resource Tenure; Dilemmas and Challenges*, Dim Yayasan Kemala; Tanah Masih Dilangit, Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak kunjung tuntas di era reformasi, Yayasan Kemala & The Ford Foundation dalam makalah Satyawan Sunito, Urgensi Pelaksanaan PPAK Dalam Penyelesaian Konflik Keagrariaan di Tanah Air; Simposium Agraria Nasional, Medan 15 Nov 2006.

³ A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal Pengantar.

⁴ Muh. Yamin Lubis & Abd Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal. 105

hukum agrarian atau pertanahan”.⁵ Jika persoalan perdata tanah, atau persoalan Administratif maka tidak harus pula diselesaikan secara agraria, sehingga Langkah awal yang benar tadi perlulah diidentifikasi apakah persoalan tanah ini menyangkut agraria dan atau sudah menyangkut perdata. Sudah diketahui bahwa hal ini adalah ranah perdata atau ranah administratifkah yang akan menyelesaikan persoalan ini. Engan memisahkan letak persoalannya akan diketahui pula hukum agraria yang harus memberikan solusi atau hukum perdata. Tidak dicampur adukkan jika memang mau dituntaskan. Membedakannya itulah yang disebut harus dengan Logika Agraria. Kemampuan menggunakan logika agrarian ini akan mempercepat penyelesaian persoalan agraria. Sebagaimana disebutkan pada awal tulisan ini misalnya bahwa persoalan tanah adalah persoalan manusia di atas tanah, sementara tanah ini diketahui memiliki *rent* bagi kehidupan manusia, maka tanpa memperhatikan *rent* ini apalagi hanya dilihat dari satu dimensi pada *rent* yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik dalam artian *rent* politiknya, sosialnya, kulturalnya, sejarahnya dan ekonomi serta dimensi kemanusiaan lainnya maka diyakini persoalan pertanahan tadi tidak akan selesai atau terwujud dengan apa yang diharapkan oleh tuntutan manusia hidup yang memiliki masalah tanah tersebut.

Konkritnya bilalah persoalan agrarian ini untuk diselesaikan, sehingga dengan penyelesaian tersebut dapat mewujudkan kepastian hukumnya, maka teori yang dikemukakan A.P Parlindungan tersebut pun harus diangkat sebagai pedoman penyelesaian. Dimaksudkannya “dalam menanggulangi kesulitan menyelesaikan agraria, maka harus dicarikan penyebab masalahnya itu sudah tepat adalah masalah agraria yang akan diselesaikan dengan berkepastian hukum agraria, karena menurutnya tidak mungkin begitu saja keadaan persoalan tanah yang sudah sejak lama tersebut dibiarkan terus berlangsung. Maka dengan berpijak pada adanya *rent* tadilah, agar penyelesaian ini adil dan berkepastian, AP. Parlindungan⁶ mengatakan harus lebih dahulu berpijak pula dalam suatu teori tentang:

- a. Pandangan mengenai political will;
- b. Pandangan mengenai perumusan *planning political will*;
- c. Pandangan mengenai *programming*;
- d. Pandangan mengenai pelaksana dan pelaksanaan;
- e. Pandangan mengenai pengawasan, dan
- f. Pandangan mengenai ketahanan nasional.

Jika keenam landasan ini dicermati dengan kondisi saat ini, secara komprehensif persoalan tanah tersebut tidak timbul lagi baik secara local maupun secara nasional. Dengan memanfaatkan logika agrarian ini akan memberikan koridor yang jelas untuk menuntaskan persoalannya. Kebiasaan

⁵ Lihat beberapa tulisan Penulis dalam Harian WASPADA, Opini, tertanggal 2 Oktober 2012; 31 Mei 2013; 18 Januari 2017; 15 Pebruari, 2017

⁶ A.P Parlindungan dalam, Pemahaman Kepastian Hukum Atas Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Peraturan Yang Berkaitan, Makalah Seminar Fak Hukum USU tanggal 19 Oktober 1996

yang biasa digunakan dalam solusi tidak dijadikan hal yang biasa lagi dan tidak menjadi kebiasaan lagi tanpa solusi dan ada hasil penyelesaian. Persoalannya seperti dalam mengurus tanah tidak berhari-hari dan gelap serta berbelit-belit, tentu orang akan memaknai bahwa untuk menyelesaikan di Lembaga saja pun bermasalah apalagi yang sudah menjadi masalah, tentulah yang seperti ini juga harus menjadi perhatian agar bagi mereka yang ingin memastikan tanahnya terlindungi dengan baik, dapat diwujudkan atau diciptakan surat pemilik tanah. Seharusnya secara teoretis pada era digital saat ini, pengurusan tanah yang lama dan berbelit-belit ini sudah tidak adalagi. Sebaiknya terwujudlah pola pelayanan yang mengikuti dasar bekerja GCG (Good Corporate Gouvernant) yang berlandaskan wawasan kebangsaan yang luas itu dapat dipedomani lebih awal sebagai peniada masalah. Dengan kata lain, dengan cara ini dapat diminimalisir persoalan lanjutan yang akan timbul dalam pertanahan tersebut. Artinya jika persoalan pertanahan ini ada di hulu maka diperbaiki di hulu lebih dahulu untuk tidak menimbulkan persoalan di hilir. Jika persoalan juga ada di hilir harus pula diselesaikan yang di hilir ini juga sungguh punpenyebabnya berawal dari hulu, sehingga dengan kemampuan menyelesaikan, seperti inilah perlu keenam hal yang disebutkan itu harus jadi pedoman yang konkrit dilaksanakan oleh mereka yang berwenang untuk segera menjalankan keenam teori tersebut agar persoalan pertanahan tidak menjadi muncul.

4. Rencana Tindak Lanjut

Teori akan lebih dahulu mencari ruang pada akar persoalannya, dan menganalisis semua aspek yang berkaiatan dengannya. Maka untuk menyelesaikan persoalan tanah di Sumatera Timur ini khususnya, karena misalnya akarnya ada pada *sejarahpertanahan*⁷ di Sumatera Utara, maka harus di kaji atau diawali analisisnya dari segi sejarah kepemilikannya lebih dahulu, lalu di kaji dari kebenaran subjeknya yang ada diatasnya, kemudian dikaji dari aspek bagaimana kemepemilikan yang tumbuh di atasnya saat itu hingga saat ini, dan yang lebih penting bagi yang salah dalam kepemilikan di atas tanah itu harus mau menerima kesalahan atas perilakunya berkuasa dan memanfaatkan tanah. Bagi yang memiliki dan mengusahakan tanah secara benar menurut hukum yang saat ini dan sudah menjadi pemilik dan terdaftar dengan benar harus juga mau memelihara milik itu sehigga tidak memunculkan persoalan lain. Pemilik juga tidak boleh kenyang sendiri di atas tanah, tetapi mau berbagi manfaat atau keuntungan secara adil, untuk dibagi

⁷ Bandingkan bahwa akar konflik agraria yang paling menonjol yang melatarinya saat itu disebutkan: 1). Adalah kombinasi dari perbedaan persepsi mengenai keadilan, tekanan politik sesaat, perubahan haluan politik golongan elit yang menguasai Negara; 2).kategori konflik yang dipicu oleh ketimpangan kekuasaan dibarengi oleh ketidak pastian hak-hak tanah rakyat serta sistim peradilan yang tidak berfungsi; 3) adalah kategori sengketa agrarian yang dipicu oleh pendefenisian secara sepihak oleh Negara kawasan hutan dan tanah Negara disertai oleh pengabaian hak-hak adat masyarakat local. Dalam Satyawan Sunito, ibid, halaman 5 & 6.

kepada masyarakat yang sangat butuh kehidupan yang baik di atas tanah yang dikelola oleh perusahaan tadi. Jika memang sudah melampaui batas luas untuk dapat dimiliki. Pemerintah diharapkan sebagai pengawas untuk mengawasi dan mengatur hal ini, juga harus memperoleh pemasukan untuk mengelola pemerintahannya dengan baik bergandeng tangan dengan pengusaha yang memiliki lokasi usaha di kawasan areal tanah pemerintahan ini .

Bagaimana ini dilaksanakan, seharusnya jangan lagi ada masyarakat yang ingin menguasai tanah dengan modus memalsukan surat surat kepemilikan, jangan ada lagi oknum-oknum yang mendulang di air keruh tadi, dan mafia tanah juga harus mau menahan diri untuk tidak bertindak secara legal atau tidak memalsukan bukti dengan memanfaatkan Pengadilan. Setelah ada putusan pengadilan yang tetap dijadikan alasan untuk melegalisasi berpindahnya milik tersebut dengan segala kecerdasan yang dimiliki. Melawan aturan dengan memiliki tanah luas (bertentangan dengan asas latifundia). Bagaimana bukti bukti seperti KRPT yang dibuat dan dikerjakan sendiri, tidak melembaga, untuk dijadikan sebagai alas hak atas tanah, pada hal KRPT itu adalah kependekan dari Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah atau badan yang dibentuk saat itu untuk menyelesaikan sengketa petani dengan pengusaha perkebunan akibat penggarapan yang terus terjadi di areal tanah perkebunan atau bekas kebun yang dinasionalisasi, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Ada *grant* yang juga dibuat sendiri di lokasi yang tidak seharusnya ada *grant* terdapat di lokasi tersebut juga muncul sebagai alas hak. Bahkan ada juga berbagai surat keterangan yang dikeluarkan oleh orang atau instansi yang tidak berwenang untuk itu dimanfaatkan juga sebagai alas hak. Terdapat juga Akte tanah yang dasarnya tidak benar lalu di pindahkan haknya dengan akte tersebut pada pihak lain lalu diperbuatlah hukum berikutnya diperlakukan sebagai yang sah, dan masih banyak lagi hal-hal yang terindikasi dan dipalsukan ini yang kemudian diterima pula oleh pengadilan sebagai bukti materil yang sah. Secara formal yang terkadang dapat dibenarkan artinya fisiknya surat itu benar surat, tetapi substansinya secara material atau apa yang disebut dalam isi surat alas hak tersebut belum tentu benar. Kenyataan inilah seharusnya di Sumatera Utara ini, setiap siapa saja yang menggunakan surat, harus menyadari yang salah adalah salah dan tidak digunakan lagi sebagai bukti hukum yang benar, sehingga persoalan tanah tidak lagi muncul atau akan dapat diselesaikan persoalan hukumnya. Sebaiknya kalau ada pendamping pendamping masyarakat yang lapar tanah ini jangan lagi aktif untuk memanas suasana sekalipun suatu saat kelak masyarakat di areal lokasi tanah diperlukan suaranya membesarkan organisasi dalam perjuangan politiknya, dengan mengumbar janji-janji akan memperjuangkan tanah masyarakat untuk menjadi miliknya. Pesan tulisan ini beritahulah bahwa perbuatan yang salah memperjuangkan tanah tidak mungkin diperjuangkan untuk menang jikapun nantinya harus diperjuangkan di Pengadilan, tetapi hanya orang-orang yang benar punya bukti yang benar, tetapi bermasalah tanahnya yang dapat diperjuangkan sebagai pemilik untuk dapat menang

yang nantinya sebagai pemilik tanah legal. Dengan pemberitahuan yang benar inilah masyarakat tidak bernafsu lagi mengokupansi liar di areal-areal tanah yang ada pemiliknnya namun belum dikerjakan dengan alasan teknis, tetapi bukan ditelantarkan atau dibiarkan jadi objek spekulasi.

Jika demikian cara yang digunakan mendalami penyelesaian konflik pertanahan yang terdapat di Sumatera Timur ini, niscaya akan dapat diselesaikan tanpa ada korban yang lebih banyak, dari pada melakukan penggusuran dan intervensi terhadap penggarap liar seperti yang sudah sudah kita saksikan. Berdamailah dengan nafsu mu untuk dapat diselesaikan persoalan tanah ini, dan tidak lagi memaksakan diri sebagai pemilik tanah di tanah orang lain. Bukankah siapapun yang mengelola tanah ini harus diorientasikan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat? (lihat pasal 2 ayat 3 UUPA). Jika semua pihak yang menggunakan tanah orientasinya, kebahagiaan bersama di atas tanah tentu akan selesaikanlah persoalan tanah ini. Seperti di areal tanah Garapan masyarakat di lokasi bekas perkebunan atau tanah yang sedang proses perpanjangan hak atas tanahnya. Dapat juga dilakukan dengan mendirikan hak baru di atas hak lama dengan suatu perjanjian. Atau membuat Kerjasama usaha yang saling menguntungkan demi menjaga tanah Bersama dengan jujur dan iktikad baik. Artinya kita relakan haknya atau miliknya ada tetap di tangan pemerintah tetapi fungsinya oleh pemerintah dapat diberikan pada rakyat. Mungkin dengan pola bagihasil akan dapat memberikan keuntungan yang sama-sama diharapkan. Sunguhpun tidak sama dalam arti keadilan, tetapi jika memenuhi harapannya pasti akan menjadi adil. Jadi beberapa urutan penyelesaian permasalahan tanah sebagai mana disebutkan terdahulu itulah yang dapat menjadi tawaran solusi alternatif yang ingin dikemukakan dalam tulisan ini, itupun jika sudah ada yang buntu dalam menyelesaikan permasalahan tanah di negeri Sumatera Timur ini.

5. Kesimpulan Dan Saran

Mengawali apa yang harus di perbuat dalam menyelesaikan persoalan tanah di Sumatera Utara ini, tentulah harus diawali dengan melakukan investigasi yang mendasar atas letak akar persoalan awalnya. Hal yang berkaitan dengan sejarah pertanahan, atau sudah sampai pada persoalan kepemilikan dan sudah juga sampai pada persoalan pembuktian surat surat yang menjadi dasar haknya atau perbuatan-perbuatan hukum di atas tanah atau perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah tersebut. Tentulah menyelesaikan permasalahan jika bermasalah harus dengan Langkah melakukan identifikasi atasnya dan dilanjutkan secara bersama-sama yang memberikan masukan apa yang menurut mereka baik dalam menyelesaikan persoalan mereka yang bersengketa. Jika ini sudah disepakati sebagai solusi tentu akan dapat dilaksanakan menjadi solusi bersama yang bermanfaat. Negara ikut di dalamnya hanya sebagai fasilitator saja. Semua tanah yang jadi permasalahan hukum ini, harus bermuara untuk dapat memiliki dan atau minimal dapat ikut memanfaatkan penggunaan tanah demi membesarkan

kehidupan Bersama rakyat. Oleh karena itu harus dibuat pendirian Hak Barudi atas Hak lama. Jika tidak demikian permasalahan tanah di Sumatera Utara ini tidak akan habis atau tidak akan pernah selesai. Narasi dari uraian ini hanyalah sekedar alur yang disebut sebagai pengantar dari *blue print* kecil, karena ruangan ini tidak mungkin menguraikan dengan seluruhnya lengkap, oleh karena itu perlu untuk diteliti lebih lanjut.

Daftar Pustaka

1. A.P. Parlindungan. 2016. *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju
2. Lubis, Muhammad Yamin. 2012. "Logika Agraria Menuntaskan Persoalan Tanah". *Harian Waspada*, Opini, 2 Oktober 2012.
3. Lubis, Muhammad Yamin. 2013. "Tanah Rakyat dikuasai Pemerintah". *Harian Waspada* Opini, 31 Mei 2013
4. Lubis, Muhammad Yamin. 2017. "Persoalan Tanah Garapan" *Harian Waspada*, Opini, 18 Januari 2017
5. Lubis, Muhammad Yamin. 2017. "Mencari Keadilan Agraria" *Harian Waspada*, Opini, 15 Pebruari, 2017
6. Muh. Yamin Lubis & Abd Rahim Lubis. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Edisi Revisi) Bandung: Mandar Maju
7. Roth, Dik. 2005. The Role of Legal Pluralism In Resource Tenure; Dilemmas and Challenges, Dlm Yayasan Kemala; Tanah Masih Dilangit, Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak kunjung tuntas di era reformasi, Yayasan Kemala & The Ford Foundation dalam makalah Satyawati Sunito, Urgensi Pelaksanaan PPAN Dalam Penyelesaian Konflik Keagrariaan di Tanah Air; Simposium Agraria Nasional, Medan 15 Nov 2006.
8. Kusbianto. 2016. "Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan pada Areal Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan Di Sumatera Utara". Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum, Fak Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Muhammad Yamin Lubis, SH, MS, CN; Lahir di Tamiang Mandailing Natal, 1 Januari 1961. Guru Besar Pada Fakultas Hukum USU (2006), Beralamat di Jalan Ambai No 16 Medan, Sumatera Utara, (E-mail yaminlubis16@gmail.com), Lulus S-1 Fakultas Hukum USU (1985), S-2 Pasca Sarjana Ilmu Sosial Prodi Ilmu Hukum UGM (1997) dan Lulus S-3 Prodi Ilmu Hukum USU (2003). Menulis Bukudengan Judul *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria* (2010) Pustaka Bangsa Press, *Gadai Tanah sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil* (2010) Pustaka Bangsa Press, *Hukum Pendaftaran Tanah* (2012) Penerbit Mandar Maju Bandung, *Pencabutan Hak, Pembebasan dan Pengadaan Tanah* (2011) Penerbit Mandar Maju, Bandung, *Kepemilikan Properti di Indonesia* (2013) Penerbit Mandar Maju Bandung, Aktif Menulis Artikel di halaman Opini Pada Harian Waspada Medan. Saat Ini Anggota Tim Serap Aspirasi (2020-2021) PP UU CIPTA KERJA di bawah Kementerian Perekonomian Indonesia.

Pembangunan Pertanian di Sumatera Utara

Noverita Sprinse Vinolina
Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Salah satu sektor yang paling berpotensi adalah Sektor Pertanian. Sektor ini adalah salah satu sektor ekonomi yang paling tidak terdampak oleh pandemi COVID-19 (Laure,2020 : Soedjana,2020). Sebagai sektor penentu esensial keberlanjutan ketahanan pangan, permintaan pasar terhadap sektor ini akan selalu kontinu dan cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sektor pertanian berpengaruh tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah.

Tabel 1. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (persen), 2019

Lapangan Usaha	%
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	20,48
Industri Pengolahan	18,98
Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,95
Konstruksi	14,19
Real Estate	5,11
Transportasi dan Pergudangan	5,06
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,42
Informasi dan Komunikasi	2,14
Jasa Pendidikan	1,84
Pertambangan dan Penggalan	1,27
Jasa Perusahaan	1,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02
Jasa lainnya	0,59
Pengadaan Listrik dan Gas	0,11
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,10
Total	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) (1)

Di Provinsi Sumatera Utara, sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian

Tabel 1 menunjukkan sektor ini merupakan sektor penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 20,48% terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi pada tahun 2019. Kondisi tersebut menempatkan sektor ini sebagai salah satu penggerak perekonomian utama di Sumatera Utara. Pengembangan dan penguatan sektor ini dinilai dapat berpotensi untuk menyerap banyak tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara

Jumlah terdampak PHK tersebut diprediksikan akan terus bertambah, sehingga jumlah pengangguran diprediksikan akan melonjak tajam. Pada tahun 2020, jumlah pengangguran nasional diperkirakan akan bertambah sebanyak 4 – 5,5 juta orang. Sementara pada tahun 2021, jumlah pengangguran diprediksikan akan mencapai sebanyak 10,7 sampai 12,7 juta orang. Para pengangguran tersebut diperkirakan berasal dari sector yang paling terdampak yakni pada sektor perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa perusahaan dan akomodasi makanan dan minuman (2)

2. Masalah

Krisis ekonomi yang dipicu oleh wabah COVID-19 telah memengaruhi situasi ketenagakerjaan di Sumatera Utara. Penutupan bisnis sementara atau permanen, serta pengurangan karyawan untuk memangkas biaya produksi telah menyebabkan peningkatan PHK dan tingkat pengangguran. Untuk mengatasi peningkatan pengangguran yang besar, maka perlu didorong penyerapan tenaga kerja.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Sektor pertanian sampai saat ini masih berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan atas nilai Location Quotient sebesar 1,206 mengindikasikan bahwa sektor pertanian memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi untuk penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara. Namun di tengah potensi yang ada, terjadinya penurunan daya serap tenaga kerja pada Sektor Pertanian di Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu mengindikasikan bahwa sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian lebih dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dan mendukung pada penguatan sektor ini, seperti produktivitas ketenagakerjaan pada sektor pertanian, pengembangan investasi maupun perluasan lahan pertanian. Sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling tidak terdampak oleh pandemi COVID-19 dan berkontribusi besar terhadap perekonomian di Sumatera Utara. Penguatan dan pengembangan sektor pertanian di Sumatera Utara

dinilai akan dapat menarik banyak tenaga kerja dan mengurangi lonjakan angka pengangguran pada masa pademi COVID-19. (3)

Strategi Pemecahan Masalah yang dapat dilakukan:

1. Sumatera Utara harus segera menyelesaikan masalah kesehatan akibat pandemi Covid-19 melalui kedisiplinan bagi seluruh warga dan ketegasan dalam menjalankan protokol kesehatan serta pemberian vaksin secara cepat dan tepat bagi seluruh warga.
2. Penting untuk mendorong pembangunan dan pengembangan lapangan usaha yang memberi dampak ekonomi yang luas dan pemanfaatan tenaga kerja yang tinggi. Sektor pertanian adalah suatu sektor yang prospek, karena setiap manusia butuh makan dan minum.
3. Perlu dilakukan pembangunan dan perbaikan fasilitas layanan sektor prioritas dengan penciptaan lapangan pekerjaan.
4. Sistem pelayanan investasi, kemudahan prosedur, pemberian kepastian dalam berinvestasi, pemberian kenyamanan dalam menjalankan produksi, promosi dan pendampingan yang berkelanjutan.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan berbagai pendekatan baik melalui sekolah lapang, latihan kerja dengan menyesuaikan keadaan perkembangan dunia usaha saat ini.
6. Kurikulum yang diberi muatan lokal untuk menciptakan kaum milenial yang kreatif pada sektor pertanian.
7. Program pemerintah yang berbasis padat karya dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada secara bijak.

Strategi Kekuatan Ekonomi Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kerjasama mutualisme antara pemerintah, swasta serta elemen-elemen masyarakat menengah (LSM, Akademisi, Profesional dan lainnya) dapat mendorong ekonomi mikro.

1. Pemerintah harus bisa menciptakan regulasi yang pro terhadap ekonomi mikro, misalnya dalam era otonomi daerah ini pemerintah daerah yang sangat mengedepankan peraturan daerah, maka peraturan daerah tersebut harus bisa mendorong kekuatan ekonomi lokal,
2. Pemerintah, swasta dan elemen masyarakat yang diwakili oleh LSM harus bisa membuat lembaga-lembaga keuangan mikro yang kuat serta mengedepankan distribusi keadilan dalam prosesnya. Dengan demikian usaha mikro bisa terhindar dari rentenir karena bunga pinjaman tinggi.
3. Lembaga keuangan mikro harus bisa berkompetisi dengan lembaga keuangan yang informal dengan mengedepankan pelayanan yang pro terhadap usaha mikro, sehingga usaha mikro akan tertarik serta nyaman dalam melakukan pinjamannya dan tanpa proses yang berbeli-belit.
4. Komitmen dalam bekerjasama dalam merealisasikan visi dan misi untuk melenyapkan kemiskinan di Indonesia.

4. Rencana Tindak Lanjut

Besarnya lonjakan jumlah pengangguran perlu diatasi dengan dorongan penyerapan tenaga kerja dari sektor-sektor lain yang tidak terlalu terdampak. Caranya adalah melakukan penguatan pada sektor-sektor prioritas yang dinilai mampu untuk menyerap banyak tenaga kerja. Tindakan ini diharapkan dapat meredam lonjakan angka pengangguran. Salah satu sektor yang paling berpotensi adalah Sektor Pertanian. Sektor ini adalah salah satu sektor ekonomi yang paling tidak terdampak oleh pandemi COVID-19 (4)(5).

Sebagai sektor penentu esensial keberlanjutan ketahanan pangan, permintaan pasar terhadap sektor ini akan selalu kontinu dan cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sektor pertanian berpengaruh tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah.

Strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia meliputi tiga aspek penting, yaitu.

1. Pembangunan Pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 aspek dari pembangunan pertanian yang dapat memberikan kontribusi cukup besar bagi pengurangan kemiskinan, terutama daerah pedesaan. Kontribusi bagi peningkatan pendapatan pedesaan dan pengurangan kemiskinan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk pembangunan sarana irigasi. Kebijakan tersebut, profitabilitas produksi padi diharapkan dapat ditingkatkan nantinya, sehingga pendapatan pertanian padi akan dapat meningkat.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia.

3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM, dalam beberapa hal dapat menjangkau golongan miskin dan dirasa lebih efektif dibandingkan dengan program-program pemerintah. LSM memainkan peranan yang lebih besar di dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan, karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang mereka bina. Keterlibatan aktif dari LSM tersebut di dalam program pemerintah cenderung untuk meningkatkan penerimaan masyarakat pedesaan terhadap program-program pemerintah, karena akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan LSM juga dapat mengurangi biaya finansial staf dalam pengimplementasian program padat karya untuk mengurangi kemiskinan.

Solusi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkesinambungan antara lain :

- 1). Pemerintah harus segera merealisasikan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat luas bagi rakyat, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, bendungan, pelabuhan udara laut, listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi. Selain dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, tersedianya infrastruktur pembangunan tersebut dapat menjadi daya pikat investasi dan sekaligus menumbuhkembangkan serta meningkatkan kapasitas dan efisiensi usaha sektor ekonomi produktif.
- 2). Sektor ekonomi berbasis SDA (sumber daya alam) penting untuk dikembangkan, yang mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultur, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, industri bioteknologi, pariwisata, serta pertambangan dan energi. Apabila kita mengelola pembangunan ekonomi berbasis SDA ini, secara profesional dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, etos kerja unggul, dan akhlak mulia, maka dalam waktu lima sampai 10 tahun ke depan Indonesia akan mampu menghasilkan bahan pangan, sandang, papan (bahan bangunan), obat-obatan, kosmetik, bahan tambang, mineral, energi, bahan mentah untuk berbagai jenis industri pengolahan, manufaktur yang berkualitas, harga yang relatif murah, dan jumlah yang cukup, baik untuk kebutuhan nasional (swasembada) maupun ekspor. Sektor ekonomi berbasis SDA yang dikelola secara profesional ini niscaya mampu mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia (6).

5. Kesimpulan dan Saran

Strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia meliputi tiga aspek penting, yaitu pembangunan pertanian, pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan turut berperannya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kerjasama mutualisme antara pemerintah, swasta serta elemen-elemen masyarakat menengah (LSM, Akademisi, Profesional dan lainnya) dapat mendorong ekonomi mikro. Pemerintah harus dapat menciptakan regulasi yang pro terhadap ekonomi mikro. Pemerintah, swasta dan elemen masyarakat yang diwakili oleh LSM harus dapat membuat lembaga-lembaga keuangan mikro yang kuat serta mengedepankan distribusi keadilan dalam prosesnya. Lembaga keuangan mikro dapat berkompetisi dengan lembaga keuangan yang informal dengan mengedepankan pelayanan yang pro terhadap usaha mikro, sehingga usaha mikro akan tertarik serta nyaman dalam melakukan pinjamannya dan tanpa proses yang berbeli-belit serta komitmen dalam bekerjasama dalam merealisasikan visi dan misi untuk melenyapkan kemiskinan di Indonesia.

Solusi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkesinambungan antara lain Pemerintah segera merealisasikan

pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat luas bagi rakyat, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, bendungan, pelabuhan udara dan laut, listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi. Pengembangan sektor ekonomi berbasis SDA (sumber daya alam) dikembangkan, mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultur, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, industri bioteknologi, pariwisata dan pertambangan, serta energi, sehingga kita mampu menghasilkan bahan pangan, sandang, papan, obat-obatan, kosmetik, bahan tambang dan mineral, energi, dan bahan mentah untuk berbagai jenis industri pengolahan serta manufaktur yang berkualitas dengan harga relatif murah, dan jumlah yang cukup, baik untuk kebutuhan nasional (swasembada) maupun ekspor.

Daftar Pustaka

1. BPS PSU. Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 Provinsi Sumatera Utara. Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara; 2020. 39 p.
2. Mochammad Firman Hidayat. Strategi Penanggulangan peningkatan pengangguran dan pemulihan ekonomi nasional: perspektif makroekonomi dan jangka menengah, direktorat perencanaan makro dan analisis statistic. 2020;10 juli.
3. Saputra Sebayang J. Potensi penyerapan tenaga kerja melalui penguatan sektor pertanian di sumatera utara. 2020;02(05):58–66.
4. Larue B. Labor issues and COVID-19. *Can J Agric Econ.* 2020;68(2):231–7.
5. Vinolina NS. Food Estate sebagai Strategi Ketahanan Pangan Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 Pemikiran Guru Besar USU Tentang Corona Virus Disease-19. 2020.
6. Gunastri ni made, rendi astuti, Ketut N. Strategi pemberdayaan ekonomi rakyat dalam penanggulangan kemiskinan di indonesia. 2014;12:38–53.

Biodata Penulis



Noverita Sprinse Vinolina lahir di Padang Halaban dan besar di Medan. Staf Pengajar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia sejak 1993 sampai sekarang. Saat ini bertugas di Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Gelar Insinyur Pertanian (S1) diperoleh dari Fakultas Pertanian, Jurusan Budidaya Pertanian Universitas Sumatera Utara (1992). Gelar Magister Pertanian (S2) diperoleh dari Program Studi Agronomi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (1997), Gelar Doktor (S3) diperoleh dari Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara (2014). Pendidikan S1, S2, dan S3 telah selesai dilaksanakan dengan didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Tahun 2011 memperoleh kesempatan untuk mengikuti Sandwich-like Program yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Departemen Biologi / Biologi Molekuler dan Farmasi di Auburn University, USA. Tahun 2006, 2014 dan 2015 memperoleh pencapaian sebagai Dosen Berprestasi, di Kopertis Wilayah I. Penulis tertarik untuk menulis tentang Pembangunan Manusia di Sumatera Utara dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui sektor pertanian pada masa pandemi covid-19. Sekalipun kondisi saat ini belum berakhir namun demikian kita semua harus tetap optimis untuk mencapai Indonesia Maju. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, atas ide untuk kemajuan Bangsa dan semangat untuk mewujudkan Indonesia Maju. Bersama kita bisa.

Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Strategi Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara

Prihatin Lumbanraja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan baik ditingkat daerah maupun tingkat nasional pada berbagai bidang terutama terkait dengan kesejahteraan rakyat. Indeks pembangunan manusia, merupakan sebuah indikator dalam menentukan tingkat pembangunan ekonomi di suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini melalui tingkat keberhasilan pembangunan yang dilihat dari kualitas hidup manusia (masyarakat), terdapat tiga dimensi utama yang dipakai untuk mengukur kualitas hidup manusia (masyarakat) tersebut, yaitu : tingkat kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup dan kehidupan yang sehat), tingkat pendidikan, yang diukur dengan rata-rata angka harapan sekolah dan angka harapan lama sekolah, serta tingkat kesejahteraan atau standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Dengan kata lain, Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain.

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah: 71.18, 71.71, 71.77. Hal ini dapat dikatakan mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut, tetapi sebenarnya masih berada dibawah IPM Indonesia selama tiga tahun berturut-turut: 71.39, 71.92, 71.94 [1]. Disamping itu, meskipun secara rata-rata IPM Provinsi Sumatera Utara telah berada pada posisi IPM tinggi, yaitu ($70 \leq \text{IPM} < 80$: IPM tinggi), namun angka ini boleh dikatakan masih pada posisi "marginal", artinya belum terlalu jauh melampaui angka IPM Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$) atau masih terlalu jauh dari angka IPM sangat tinggi ($\text{IPM} \geq 80$) [2]. Kondisi ini menggambarkan bahwa pembangunan kualitas manusia di Sumatera Utara masih memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek, terutama untuk tiga dimensi utama yaitu : aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek ekonomi.

2. Masalah

Meskipun secara perhitungan IPM Provinsi Sumatera Utara tidak tergolong rendah, namun jika ditilik secara lebih dalam, maka tiga dimensi yang membentuk kontribusi terhadap IPM Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

Aspek Kesehatan, Aspek Pendidikan dan Aspek Ekonomi masih memerlukan pembenahan dan pengelolaan yang serius. Dari dimensi kesehatan, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya berbagai kasus tentang kesehatan di Provinsi Sumatera Utara, seperti: penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Penyakit Menular (PM) dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang masih relatif tinggi [3]. Penurunan berbagai kasus stunting, peningkatan cakupan program imunisasi, serta percepatan eliminasi tuberkulosis [4]. Sementara dari dimensi pendidikan, masih banyak dijumpai berbagai permasalahan yang berhubungan dengan bidang pendidikan, antara lain: masih terdapat sekitar 0,93 % penduduk berusia 15 tahun ke atas yang buta huruf, sekitar 1,52 % penduduk berusia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah. Persoalan lain adalah masalah ketimpangan yang terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan. Seluruh penduduk yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan dan juga yang mengalami buta huruf adalah penduduk yang mayoritas tinggal di pedesaan [5]. Selanjutnya jika dilihat dari dimensi ekonomi atau sering disebut dengan standar kehidupan yang layak, maka persoalan yang menjadi tantangan bagi Provinsi Sumatera Utara adalah: peningkatan angka kemiskinan Sumatera Utara yang mengalami peningkatan sebesar 0,39 poin yaitu dari 8,75% pada Maret 2020 menjadi 9,14% pada September 2020. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,36 juta jiwa pada September 2020, atau bertambah sekitar 73 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Persentase penduduk miskin pada September 2020 di daerah perkotaan sebesar 9,25%, dan di daerah pedesaan sebesar 9,02%. Daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,5%, sedangkan daerah pedesaan mengalami peningkatan sebesar 0,25 poin jika dibandingkan Maret 2020 [6].

Berbagai permasalahan yang telah dikemukakan, mengindikasikan bahwa ketimpangan yang terjadi antara penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dan penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan, nampaknya menjadi sumber masalah yang harus mendapat perhatian yang serius. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum penduduk atau masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan memiliki sejumlah keterbatasan, seperti : masalah ekonomi, hal ini disebabkan karena lapangan kerja di sektor formal yang sangat sulit. Banyak dari mereka yang hanya bekerja sebagai petani , nelayan ataupun sebagai peternak dan tidak sedikit pula dari mereka yang menganggur. Masalah lain yang menjadi keterbatasan bagi masyarakat di wilayah pedesaan adalah kualitas pendidikan, karena kualitas pendidikan umumnya masih di bawah kualitas pendidikan di perkotaan. Kondisi ini diakibatkan karena baik sarana pendidikan maupun juga tenaga pengajar yang kurang memadai, sehingga hal tersebut menjadi penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan di pedesaan [7]. Yang pada gilirannya hal ini akan menyebabkan kurang terserapnya tenaga kerja masyarakat pedesaan untuk lapangan pekerjaan yang formal. Minimnya sarana dan pra sarana untuk kepentingan umum, seperti: jalan yang tidak memadai, sekolah, fasilitas kesehatan dan bahkan adakalanya fasilitas listrik yang masih belum dapat diikmati masyarakat pedesaan. Berbagai kondisi keterbatasan tersebut

mengakibatkan masyarakat di wilayah pedesaan “kurang terberdayakan” terutama dalam melakukan berbagai pilihan bagi kehidupan mereka.

Pemikiran Pemecahan Masalah

Ketidak-berdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau bahkan wilayah-wilayah yang terpencil/terisolasi menyebabkan mereka tidak mampu menentukan berbagai pilihan bagi kehidupan mereka, sehingga sebenarnya perbaikan atau peningkatan IPM harus memprioritaskan masyarakat yang termarginalkan ini. Mereka harus diberdayakan, artinya bahwa mereka harus diberikan “daya atau kekuatan”, sehingga mereka dapat segera memiliki kekuatan untuk mandiri, terutama untuk membuka akses kepada tiga dimensi utama yang membentuk IPM, yaitu: dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi ekonomi. Paradigma pemberdayaan masyarakat adalah paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat yang merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah.[8] Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan [9]. Oleh sebab itu pendekatan manajemen pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pendekatan yang sangat sesuai jika dihubungkan dengan upaya peningkatan dan pemeliharaan Indeks Pembangunan Manusia secara umum dan di Provinsi Sumatera Utara khususnya.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Konsep Manajemen Pemberdayaan Masyarakat sangat relevan jika diterapkan sebagai strategi pemecahan masalah yang berkaitan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengingat pendekatan ini akan mampu memberikan daya atau kekuatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang lemah, terhadap berbagai kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia (masyarakat), yang dapat diwakili oleh tiga dimensi utama yang membentuk IPM, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi ekonomi. Meskipun konsep pemberdayaan masyarakat bukan lah merupakan hal yang baru, namun tingkat keberhasilan implementasinya dirasakan belum optimal. Oleh sebab itu perlu selalu dilakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilannya.

Manajemen pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang disertai dengan berbagai nilai-nilai sosial didalamnya. Dalam hal ini, konsep manajemen yang paling sesuai

adalah “Manajemen Partisipatif”, sebuah proses manajemen yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang selalu mengedepankan keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan yang dilaksanakan, sehingga dalam hal ini pihak agen pembangunan (Pemerintah) hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki. Pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang sekaligus merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yang berpusat pada manusia atau masyarakat (*people centered*), yang mengutamakan partisipasi dari seluruh masyarakat yang akan dibangun (*participatory*), memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki masyarakat, seluruh kompetensi yang terdiri atas kemampuan, keterampilan (*skill*) dan berbagai perubahan perilaku yang mendukung (*empowering*), serta dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan (*sustainable*)[10]. Dalam hal ini pemerintah sebagai agen pembangunan hanya bertindak sebagai fasilitator, yang memberikan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, konsep manajemen pemberdayaan masyarakat yang akan diterapkan dalam membangun masyarakat hendaknya selalu memperhatikan berbagai prinsip antara lain : (1).Demokratis, (2). Sesuai Kebutuhan, (3). Fokus Kepada Masyarakat, (4). Kearifan Lokal, (5). Berkelanjutan, (6). Keragaman Budaya, (7). Sosial Ekonomi, (8).Tidak Diskriminatif, (9). Partisipatif. Sementara berdasarkan proses kegiatan manajemen pemberdayaan masyarakat, maka kegiatan tersebut terdiri atas : (1) Proses Perencanaan, (2) Proses Pelaksanaan dan (3) Proses Pengawasan.

Proses Perencanaan : Bentuk perencanaan yang paling sesuai dalam pemberdayaan masyarakat adalah bentuk perencanaan partisipatif, yang mengharuskan masyarakat terlibat secara langsung untuk menentukan masalah yang dihadapi, kebutuhan yang diperlukan, penetapan skala prioritas, sampai kepada pengambilan keputusan dalam penanganan masalah yang dihadapi serta mencari solusi yang paling tepat. Dalam bentuk perencanaan partisipatif, pihak praktisi pembangunan (Pihak Pemerintah) hanya berposisi sebagai fasilitator atau pendamping dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat. Supaya berhasil dalam proses pendampingan, maka sebaiknya para praktisi pembangunan memiliki beberapa kompetensi, antara lain: kemampuan melakukan diskusi kelompok yang terarah/teratur dan terfokus, serta dapat memfasilitasi analisis pola keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses perencanaan. Jika perencanaan suatu program/kegiatan disusun dengan baik dan bertanggung jawab, berdasarkan hasil identifikasi masalah dan kebutuhan

masyarakat, serta didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang lengkap, yang berasal dari hasil informasi berbagai pihak yang terkait/stakeholder, dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek, dan disesuaikan dengan kondisi social budaya masyarakat setempat, maka dapat diperkirakan bahwa kesuksesan suatu kegiatan akan dapat terwujud.

Proses Pelaksanaan Pembangunan : Setelah dilakukan proses perencanaan partisipatif yang baik, maka proses selanjutnya adalah “bagaimana melaksanakan perencanaan” tersebut kedalam suatu kegiatan yang dapat digunakan sebagai strategi dalam pemberdayaan masyarakat. Berbagai pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri atas:

- (1) Sosialisasi Dalam Perberdayaan Masyarakat : Dalam menyusun kegiatan sosialisasi bagi masyarakat yang akan diberdayakan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, kebutuhan utama masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, materi apa yang akan menjadi pokok pembahasan, metode yang paling tepat untuk diterapkan dalam menyampaikan materi agar dapat dimengerti, dipahami, dan dapat dijalankan oleh masyarakat sebagai pelaku utama, waktu yang terbaik untuk melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan (penyuluhan, pelatihan/kursus, demonstrasi/praktek dll), bentuk partisipasi atau dukungan yang diharapkan dari masyarakat, bentuk dan partisipasi yang diharapkan dari para pemangku kepentingan (tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat, mitra usaha dll), fasilitas bantuan apa saja yang disiapkan oleh pelaksana (Pemerintah) [11]
- (2) Pendekatan Metode Pemberdayaan: Pada dasarnya metode yang akan digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah metode yang dapat lebih mudah diterima, dimengerti, dan mudah dipahami oleh kelompok sasaran atau masyarakat. Para praktisi pembangunan seharusnya sudah mengetahui secara jelas bahwa masyarakat yang akan diberdayakan rata-rata mempunyai tingkat pendidikan yang minim, bahkan mungkin ada yang buta huruf, sehingga metode yang sangat dibutuhkan tentunya melalui suatu tindakan nyata, atau dengan kata lain kita lebih banyak melakukan praktik dari pada berteori. Dalam hal ini terdapat dua metode yang sering diterapkan pada pelaksanaan kegiatan/program pemberdayaan masyarakat, yaitu : (a) Metode Participatory Rural Appraisal (PRA), sebuah metode pengkajian desas secara partisipatif. Dalam pengembangan masyarakat, PRA dapat diaplikasikan di desa (rural) dan di kota (urban), maupun sub-urban, sehingga akan lebih mewakili jika PRA diartikan sebagai kajian masyarakat secara partisipatif. Dalam hal ini penerapan metode PRA, memiliki beberapa prinsip, antara lain: prinsip mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan), prinsip pemberdayaan (penguatan) masyarakat, prinsip masyarakat sebagai pelaku, dan orang luar sebagai fasilitator, prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan, prinsip santai dan informal, prinsip triangulasi, prinsip

mengoptimalkan hasil, prinsip orientasi praktis, prinsip keberlanjutan dan selang waktu, prinsip belajar dari kesalahan, prinsip keterbukaan. (b). Metode Partisipasi Assesment dan Rencana (MPA). Metode MPA ini terdiri atas empat langkah : 1). menemukan masalah, 2) menemukan potensi, 3) menganalisis masalah dan potensi, serta 4). memilih solusi pemecahan masalah [12]

- (3) Fokus Materi dalam Pemberdayaan Masyarakat: materi yang akan diberikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a). Pembinaan bagi masyarakat, terdiri atas peningkatan kemampuan masyarakat, baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik serta peningkatan posisi tawar-menawar masyarakat, baik untuk membangun kekuatan bersama maupun untuk membangun jejaring (*networking*). (b) Pembinaan bagi usaha masyarakat. Dalam hal ini sering diarahkan terhadap kemampuan masyarakat dalam pembinaan usaha mereka melalui UMKM, dengan memanfaatkan potensi yang terdapat pada masyarakat itu sendiri. (c). Pembinaan bagi lingkungan di sekitar tempat tinggal masyarakat, sehingga masyarakat sadar akan kelestarian lingkungan dan mampu menghindari kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan kehidupan mereka sendiri. (d) Pembinaan kelembagaan bagi masyarakat. Hal ini terutama menyangkut pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan bagi masyarakat tersebut, serta seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk tersebut telah berfungsi secara efektif.
- (4) Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Pada dasarnya strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan berpodoman kepada : (a). Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dan dari hasil temuan pengamatan lapangan; (b) Membangun pemahaman dan komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat. (c) Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

Proses Evaluasi dan Pengawasan Pemberdayaan Masyarakat: Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dari program atau kegiatan yang dilaksanakan, maka perlu melakukan monitoring dan evaluasi (*monev*) serta melakukan pengawasan yang memadai, untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi, guna perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

4. Rencana Tindak Lanjut

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi yang jauh lebih penting adalah keberhasilan dalam pembangunan manusia. Pembangunan manusia diartikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi disegala bidang pembangunan. Dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia secara umum, terlebih secara khusus di Provinsi Sumatera Utara, maka strategi pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan sebuah strategi yang harus selalu diterapkan, dievaluasi dan diperbaiki untuk penyempurnaannya di masa-masa yang akan datang.

Banyak bukti menunjukkan kegagalan pembangunan yang dilakukan karena proses pembangunan tersebut tidak mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat sesuai jika diterapkan melalui strategi pemberdayaan masyarakat, karena pada umumnya masyarakat yang masih mengalami ketertinggalan dalam tiga dimensi utama yang berkontribusi dalam pembentukan IPM, yaitu : dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi ekonomi mayoritas adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, terpencil dan terisolasi yang pada umumnya tidak atau belum terberdayakan. Oleh sebab itu diperlukan sebuah pendekatan yang mampu melibatkan masyarakat sepenuhnya dalam sebuah proses pembangunan dari mulai kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pengawasannya, maka salah satu bentuk strategi yang harus selalu dilakukan adalah strategi pemberdayaan masyarakat.

5. Kesimpulan dan Saran

Strategi manajemen pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang mengutamakan keikutsertaan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, tidak terkecuali dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan pemberdayaan masyarakat antara lain adalah : memperkuat kemandirian masyarakat, memperkuat kemampuan kelompok terutama kelompok yang lemah baik dari segi internal (sikap dan persepsi yang mereka miliki), maupun dari segi eksternal (ketidakadilan yang mereka alami di masyarakat), serta memberikan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kelompok masyarakat sasaran.

Secara menyeluruh tujuan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya perbaikan terhadap berbagai aspek kehidupan, antara lain : perbaikan pendidikan, perbaikan kesehatan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan usaha, perbaikan kelembagaan, perbaikan pendapatan, perbaikan

lingkungan, perbaikan kehidupan dan perbaikan masyarakat. Jika berbagai tujuan tersebut dihubungkan dengan Indeks Pembangunan Manusia, maka tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut jauh lebih luas jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia, oleh sebab itu strategi manajemen pemberdayaan masyarakat layak diterapkan dalam setiap upaya untuk peningkatan IPM.

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistic. *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. Jakarta Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Metode Baru, 2017.
- [2] Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020
- [3] Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, tahun 2020
- [4] Rakerkesda Provinsi Sumatera Utara tahun 2018
- [5] <https://utamanews.com/opini/Tantangan-Pendidikan-di-Sumatera-Utara>
- [6] Publikasi Berita Resmi Statistik (BRS) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020
- [7] <http://alfarisyi15.blogspot.com/2011/11/masalah-pedesaan-dan-perkotaan.html>
- [8] Alfitri, Community Development, Teori dan Aplikasi. PustakaPelajar. Yogyakarta, 2011
- [9] Mardikanto T dan Poerwoko S,. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung, 2012
- [10] Alfitri, Community Development, Teori dan Aplikasi. PustakaPelajar. Yogyakarta, 2011
- [11] Hamid Hendrawati, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, Penerbit De La Macca, Makassar 2018.
- [12] Nawawi I, Pembangunan Dan Problema Masyarakat, Putra Media Nusantara, 2009.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Prihatin Lumbanraja, S.E., M.Si merupakan dosen sekaligus guru besar bidang sumber daya manusia dan perilaku organisasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Beliau dilahirkan di Pematang Siantar, 13 Oktober 1959. Beliau menyelesaikan studi jenjang Strata-1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara pada tahun 1986 dan mulai aktif mengajar sebagai dosen pada tahun yang sama. Tahun 1997 menyelesaikan studi jenjang magister pada program Pengembangan Wilayah Desa di Universitas Sumatera Utara. Beliau menyelesaikan

studi program Doktor pada Tahun 2007 dari Universitas Brawijaya.

Tahun 2012 dinobatkan sebagai Guru Besar dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara periode 2016- 2021. Beliau aktif melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tahun 2020 dan tahun 2021 beliau menjadi ketua pelaksana desa binaan Universitas Sumatera Utara yang mengembangkan ekowisata mangrove di Kampung Nelayan Seberang, Sumatera Utara. Ditengah kesibukannya sebagai dosen, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan profesi, seperti Forum Manajemen Indonesia (FMI/Pengurus), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI/Pengurus), dan juga Asosiasi Ilmuwan Manajemen Indonesia (AIMI/Pengurus).

Pembangunan Manusia di Sumatera Utara: Keterbatasan dan Tidak Meratanya Dokter Spesialis di Provinsi Sumatera Utara

Ridha Dharmajaya

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Berbagai persoalan pelayanan dokter terutama dokter spesialis menjadi persoalan di seluruh Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara. Kurang maksimalnya pelayanan Kesehatan khusus spesialisasi menjadikan kurangnya tingkat kesehatan di masyarakat. Turunnya tingkat Kesehatan berhubungan dengan turunnya kesejahteraan di daerah tersebut.

Dokter spesialis adalah salah satu komponen yang paling penting dalam pelayanan kesehatan. Dokter spesialis juga menjadi hilir dalam hirarki system rujukan pelayanan kesehatan di masyarakat. Berdasarkan *continuum of care*, maka dokter spesialis memberikan pelayanan tingkat tertinggi dan memberikan rekomendasi pelayanan paripurna.

Jumlah dokter spesialis di Indonesia juga terbatas dengan rasio yang sangat rendah, pada tahun 2007 dilaporkan rasio 5,18 jumlah dr spesialis dengan jumlah penduduk. Selanjutnya perbandingan antara penyebaran dokter spesialis di kota dan pedesaan pun mengalami perbedaan yang besar, dengan perbandingan pedesaan 0,8 per 100.000 penduduk sedangkan daerah perkotaan dengan nilai 8.4 per 100.000 penduduk (Gambar 1). Selain itu berdasarkan data dinyatakan bahwa jumlah dokter umum di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 50.198 orang, sementara jumlah dokter spesialis berjumlah 31.073.

Persoalan ini pada akhirnya dijadikan pembahasan dan akar permasalahan antara lain fasilitas kurang lengkap di daerah dan pendapatan yang kurang dari dokter spesialis.

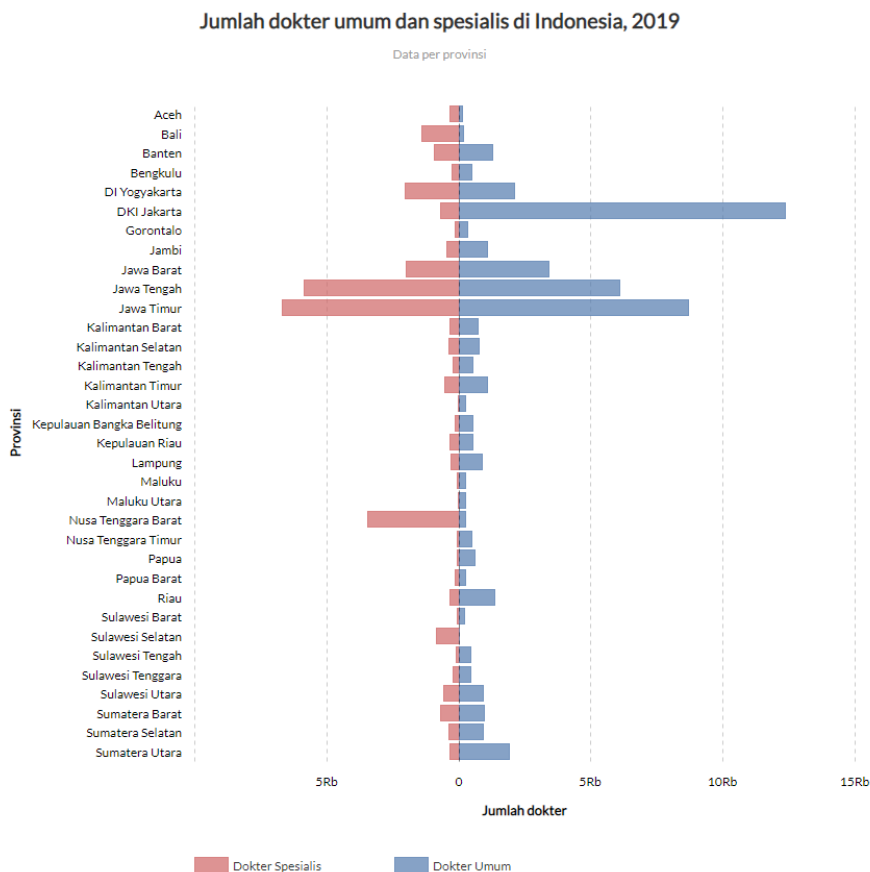
Tidak meratanya distribusi dokter spesialis di sejumlah wilayah dinilai menjadi salah satu persoalan kurang maksimalnya pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di daerah. Minimnya fasilitas kesehatan yang ada menjadi salah satu alasan penting. Di lain pihak, upaya pemerintah untuk meratakan distribusi tersebut justru mengalami kesulitan oleh putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 yang membahas tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang diterbitkan Presiden Joko Widodo. Saat ini pemerintah melancarkan berbagai program agar dokter spesialis bersedia untuk ditempatkan di daerah-daerah yang membutuhkan, walaupun klausul “wajib” dalam perpres tersebut telah diubah menjadi sukarela melalui perpres yang baru.

Penelitian menunjukkan juga bahwa dokter spesialis menumpuk di daerah provinsi dengan jumlah penduduk paling besar dan sangat minim di

daerah dengan jumlah penduduk sedikit. Namun penelitian menyebutkan juga bahwa tidak ada hubungan antara kapasitas fiscal suatu daerah dengan ketersediaan dokter spesialis. Kapasitas fiscal besar ditemukan sama jumlah dokter spesialis dengan kapasitas fiscal yang kecil.

Sebaran dokter spesialis juga tidak merata terutama di daerah rumah sakit umum di provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara dibandingkan daerah kecillainnya. Namun demikian terdapat hubungan negative antara jumlah dokter dengan jumlah rumah sakit pemerintah. Semakin banyak rumah sakit pemerintah jumlah dokter spesialis tidak cenderung meningkat, bahkanmenurun.Terdapat tambahan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan positif bermakna antara jumlah dokter spesialis dengan jumlah rumah sakit swasta. Semakin banyak rumah sakit swasta maka semakin banyak pula jumlah dokter spesialis.

Persoalan ini yang semestinya dicermati terutama di daerah Sumatera Utara, dimana masih menjadi persoalan dalam pemenuhan dokter spesialis di daerah. Sumatera Utara adalah provinsi yang tingkat Kesehatan dan kesejahteraan harus ditingkatkan. Untuk itu pemenuhan fasilitas pelayanan ini. Hal ini terkait dengan peningkatan pemberdayaan pembangunan manusia di Sumatera Utara.



Gambar 1. Distribusi dokter umum dan spesialis di Indonesia tahun 2019

2. Masalah

Permasalahan yang dapat diambil dari peningkatan pemberdaan pembangunan manusia di Sumatera Utara ini adalah bagaimana dengan

- Tidak meratakan distribusi dokter spesialis,
- Belum ada solusi menguntungkan bagi semua pihak,
- Kurangnya fasilitas yang mendukung baik secara fisik atau social,
- Berbagai jenis usaha yang belum memberikan hasil maksimal.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Dinas Kesehatan Sumatera Utara melaporkan bahwa untuk meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, salah satu indikatornya yaitu persentase rumah sakit kabupaten / kota kelas C yang memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis penunjang. Empat dokter spesialis dasar yang dimaksud yaitu dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis bedah, sedangkan tiga dokter spesialis penunjang yaitu dokter spesialis radiologi, dokter spesialis anestesi, dan dokter spesialis patologi klinik. Dari 21 RSUD Kelas C di Provinsi Sumatera Utara, jumlah RSUD yang memenuhi standar ada 19 RSUD (90,48%) sedangkan yang belum memenuhi standar ada 2 RSUD (9,52%).

Table 1. Jumlah dan rasio tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Utara

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Ratio per 100.000 pddk	Standar per 100.000 pddk
1	Dokter Spesialis	4.021	27,61	6
2	Dokter Umum	5.558	38,16	40
3	Dokter Gigi & Sp.Gigi	1.086	7,46	11
4	Perawat	21.134	145,12	118,5
5	Bidan	20.924	143,68	92,49
6	Tenaga Kefarmasian	2.622	18,00	10
7	Tenaga Kesmas	2.351	16,14	40
8	Tenaga Keslingk	565	3,88	40
9	Tenaga Gizi	1.118	7,68	22
10	Ahli Lab. Medik	1.407	9,66	
11	Tenaga Teknik Biomedik	428	2,93	
12	Keterampilan Fisik	391	2,68	-
13	Keteknisian Medis	997	6,85	-

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota 2019

Adapun RSUD Kelas C yang sudah mempunyai empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis penunjang adalah RSUD Gunung Sitoli (Kab. Nias), RSUD Penyabungan (Kab. Mandailing Natal), RSUD Tapanuli Selatan (Kab. Tapanuli Selatan), RSUD Gunung Tua (Kab. Padanglawas Utara), RSUD Pandang (Kab. Tapanuli Tengah), RSUD Hadrianus Sinaga (Kab. Samosir), RSUD Doloksanggul (Kab. Humbang Hasundutan), RSUD Porsea (Kab. Toba Samosir), RSUD H. Abdul Manan Simatupang (Kab. Asahan), RSUD Perdagangan (Kab. Simalungun), RSUD Tuan Rondahaim Pematang Raya (Kab. Simalungun), RSUD Sidikalang (Kab. Dairi), RSUD Kabanjahe (Kab. Karo), RSUD Tanjung Pura (Kab. Langkat), RSUD Salak (Kab. Pakpak Bharat), RSUD Batubara (Kab. Batubara), RSUD Kotapinang (Kab. Labuhanbatu Selatan), RSUD Aek Kanopan (Kab. Labuhanbatu Utara) dan RSUD dr. Tengku Mansyur (Kota Tanjungbalai). Sedangkan 2 RSUD Kelas C yang belum mempunyai empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis penunjang adalah RSUD Sibuhuan (Kab. Padanglawas), RSUD Sultan Sulaiman (Kab. Serdang Bedagai) Untuk mengetahui jenis ketenagaan dan rasionya terhadap jumlah penduduk, berikut ini akan disajikan jumlah tenaga kesehatan menurut masing-masing rumpun tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019.

Pemikiran pemecahan masalah antara lain sudah ada usaha dari pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan strategi dalam “mengundang” dokter spesialis untuk bertugas di daerahnya antara lain pemberian insentif dokter spesialis (2001), jasa tindakan (2003), tugas belajar dokter spesialis (2005), dan penyesuaian tarif (2007). Begitupun persoalan ini masih belum menyelesaikan dengan tuntas pelayanan dokter spesialis di Sumatera Utara.

Pemikiran masalah lain adalah dengan mengundang program Pendidikan spesialis tahap akhir untuk melaksanakan Pendidikan sesuai kompetensi yang telah dicapai. Hal ini memberikan kesempatan pemerintah daerah bekerjasama dengan institusi Pendidikan dalam menyediakan pelayanan dokter spesialis. Namun hal ini tentunya tidak menyelesaikan secara tuntas kebutuhan dokter spesialis merata di Sumatera Utara. Program lain yang diusulkan oleh Pemerintah Sumatera Utara adalah Program Dokter Spesialis Terbang, yang sampai saat ini masih dalam proses pengembangan. Untuk itu pemecahan masalah ini dapat dirumuskan guna mengatasi keterbatasan dan distribusi tidak merata dokter spesialis di Sumatera Utara.

4. Rencana Tindak Lanjut

Strategi pemecahan masalah dalam hal ini ada beberapa usulan yaitu:

- Regulasi penyebaran izin praktik dokter spesialis yang lebih mendukung proses distribusi merata,
- Pemerintah daerah mengundang dokter untuk bekerja di suatu daerah dengan menyediakan fasilitas yang layak,

- Rumah sakit yang telah terakreditasi memaksimalkan penyediaan peralatan yang memadai dan kompeten dalam mendukung kerja dokter spesialis,
- Memberikan dukungan fasilitas sosial yang memadai termasuk lingkungan yang aman, dukungan sarana dan prasarana yang baik, Pendidikan untuk keluarga yang ikut Bersama dokter spesialis,
- Kesiapan dari kabupaten untuk memintakan bantuan dokter spesialis,
- Kesiapan dokter spesialis tetap di rumah sakit untuk menerima penambahan tenaga dokter baru sebagaiantisipasi keterbatasan dalam melayani pasien,
- Pemberian insentif yang memadai,

Usulan lain yang dapat mendukung penyebaran dokter spesialis lain adalah:

- Pemberian asuransi yang tepat sehingga hal ini mendukung kesejahteraan dokter spesialis.
- Pengaktifan dokter umum untuk kemahiran kompetensi yang ada, jadi dalam hal ini pelatihan-pelatihan yang rutin diadakan untuk dokter umum diberikan guna memberikan kemampuan yang lebih bagi dokter umum,
- Peningkatan upaya preventif promotif yang lebih komprehensif yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya Kesehatan sehingga pada gejala klinis awal untuk segera dapat ditangani dengan benar oleh dokter umum, dan menanamkan pemahaman peran dokter spesialis adalah sebagai rujukan.

5. Kesimpulan dan Saran

Distribusi dokter spesialis masih tidak merata di seluruh Provinsi Sumatera Utara, yang menjadikan pelayanan Kesehatan menjadi tidak maksimal. Walaupun pemerintah pusat dan daerah telah mengupayakan untuk mengatur distribusi dokter spesialis, namun masih terlihat tidak maksimalnya proses tersebut. Sebaiknya pengaturan dokter spesialis melihat beberapa aspek antara lain adalah regulasi, insentif, penyediaan peralatan yang kompeten, penyediaan fasilitas fisik, penyediaan dukungan sosial, meningkatkan kompetensi dokter umum, dan yang paling penting adalah peningkatan upaya preventif dan promotive untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Daftar Pustaka

- Loka Data, Jumlah dokter umum dan spesialis di Indonesia tahun 2019, diakses: <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-dokter-umum-dan-spesialis-di-indonesia-2019-1563946699>, diunduh 20 Juni 2021.
- Badan PSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses:
http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/distribusi_sdmk_rs_per_prov?prov=12, diunduh 20 Juni 2021.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, diakses:
http://dinkes.sumutprov.go.id/common/upload/d9/93344c3888193ac75711f1fae30e9b_Buku%20Profil%20Kesehatan%20%202019.pdf, diunduh 20 Juni 2021.
- Meliala A dan Trisnantoro L, Forum kebijakan pendapatan dokter dan BPJS, diakses:
<http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/images/2013/launching/Forum%20Kebijakan-Pendapatan%20Dokter%20&%20BPJS.pdf>, diunduh 19 Juni 2021.

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Ridha Dharmajaya, SpBS (K) adalah Ketua Departemen Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. lahir di Medan, pada tanggal 14 Mei 1973. Lulus Sarjana Kedokteran dan Kependidikan Klinik sebagai dokter pada tahun 1997 di Universitas Sumatera Utara (FK-USU) dan melanjutkan Pendidikan Spesialis Bedah Saraf di Universitas Indonesia (FK-UI) dan lulus pada tahun 2007. Lulus program Doktorat (S3) di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012. Prof. Dr. dr. Ridha Dharmajaya, SpBS (K) aktif dalam kegiatan penelitian dan pelayanan kedokteran sesuai profesi. Belajar dan mengembangkan teknik-teknik operasi Bedah Saraf, demikian pula riset neurosains yang telah menghasilkan beberapa bentuk paten. Aktif menulis, baik yang diterbitkan dalam buku maupun tulisan yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional.

Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan Pola Pikir Kewirausahaan Pada Masa Covid-19

Ritha F. Dalimunthe

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa ataupun wilayah, karena sumber daya manusia memiliki kreativitas dan inovasi yang dapat menjawab tantangan serta melihat peluang bagi pengembangan suatu daerah. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, yang dapat menggerakkan serta mendorong pembangunan, apalagi masa Covid-19 yang terjadi di Indonesia bahkan diseluruh dunia sejak awal tahun 2020. Adanya virus Covid-19 memerlukan perubahan pola dalam berperilaku dan aktivitas ekonomi, khususnya dalam menjalankan protokol kesehatan yang meliputi 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan menghindari aktivitas di luar rumah. Hal ini tentu saja mengharuskan adanya perubahan pola pikir dari sumber daya manusia agar pembangunan terus berkelanjutan serta terhindar dari virus Covid-19 yang dapat dengan mudah menyebar dan membunuh seseorang atau sekelompok orang, bila tidak menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Adapun perubahan pola pikir menurut penulis, diperlukan membangun sumber daya manusia berbasis kewirausahaan, agar dapat memberikan solusi dalam menjawab tantangan yang terjadi akibat adanya virus Covid-19 yang juga telah menghancurkan ekonomi masyarakat Indonesia serta ekonomi wilayah lainnya di seluruh dunia.

Menurut Gollwitzer,P.(2012) pola pikir adalah inti dari *self learning* atau pembelajaran diri. Hal ini yang menentukan potensi, kecerdasan, serta tantangan maupun peluang sebagai suatu proses yang perlu diupayakan secara tekun, kerja keras, dan usaha dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dapat disimpulkan, bahwa manusia pada umumnya melakukan sesuatu karena didorong oleh pola pikirnya. Jadi pola pikir lah yang menggerakkan, mendorong, atau sebagai landasan seseorang dalam melakukan sesuatu. Inilah sebabnya kalau hendak melarang seseorang untuk tidak melakukan suatu hal atau sebaliknya mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu maka hal pertama yang harus dipengaruhi lebih dulu adalah pola pikirnya. Pola pikir berubah maka tindakan berubah.

Pola pikir merupakan pandangan mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi suatu fenomena. Pola pikir merupakan seperangkat asumsi, cara, atau catatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang tertanam sangat kuat. Menurut Mulyadi (2007:71), pola pikir merupakan sikap mental yang dibentuk melalui

pendidikan, pengalaman dan prasangka. Oleh karena itu kepercayaan ataupun sekumpulan kepercayaan, mempengaruhi sikap dan pandangan seseorang.

Pola pikir disebut juga sebagai *Mindset*, yang terdiri atas 2 suku kata, yaitu *mind* dan *set*. *Mind* merupakan kata dari bahasa Inggris yang memiliki arti pikiran, sedangkan kata *set* dalam *Mindset* menunjukkan sebuah kata kerja yang menggambarkan secara *perceptual* dalam mendeteksi seseorang dalam menanggapi situasi tertentu. Oleh karena itu, pola pikir (*mindset*) adalah sekumpulan kepercayaan (*belief*) atau cara berpikir yang mempengaruhi sikap seseorang, yang dapat menentukan keberhasilan hidupnya. Oleh karena itu, dalam masa pandemic Covid-19, pola pikir seseorang bila ingin diubah maka yang harus diubah adalah kepercayaannya (*belief*) terhadap adanya Covid-19, serta bahaya virus Covid-19 ini terhadap keberlangsungan hidupnya dan orang lain. Dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan pada masa Covid-19 ini perlunya pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kepercayaan (*belief*) yang harus diubah, sehingga ada pengembangan ide dan konsep agar menjadi informasi untuk membangun keyakinan seseorang untuk dapat mengubah pikiran, kesadaran, perasaan, dan sikap dalam beradaptasi terhadap adanya Covid-19 di sekitar lingkungan dirinya dan oranglain.

2. Masalah

Bagaimana membangun pola pikir kewirausahaan dalam membangun perilaku sumber daya manusia sehingga mempengaruhi kehidupan seseorang pada masa pandemic Covid-19.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Pola pikir seseorang biasanya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pergaulan di tengah masyarakat, pendidikan, dan keyakinan.

a. Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah tempat untuk seseorang dapat mengembangkan kebiasaan, seperti makan bersama, bermain, membaca buku, ataupun kebiasaan mematikan lampu setelah selesai digunakan, dan kebiasaan positif lainnya yang menyebabkan anggota keluarga yang memiliki pola pikir atau keyakinan terhadap nilai-nilai yang dibangun bersama oleh keluarga tadi. Pola pikir seseorang yang berasal dari keluarga dengan sistem nilai positif dipastikan akan lebih unggul dari keluarga yang tidak mempunyai sistem nilai.

b. Pergaulan di tengah masyarakat

Seseorang yang berteman dengan pengusaha, cenderung memperlihatkan pola pikir seperti pengusaha. Seseorang yang berteman dengan politikus, cenderung akan mengikuti gaya berpikir politikus. Seseorang yang berteman dengan tukang

penggosip biasanya akan menjadi penggosip. Dan bila seseorang berteman dengan orang yang sholeh, cenderung memiliki cara berpikir orang sholeh tersebut. Konsekuensinya, bila seorang ingin memiliki pola pikir yang baik, akan berhati-hati dalam melakukan pergaulan, karena teman dan lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan solusi dalam membentuk pola pikir yang unggul. Seseorang yang hobi membaca buku, akan rajin *update* dirinya sendiri melalui seminar yang bermanfaat, serta menggunakan internet untuk mencari berbagai informasi yang dapat mendukung karirnya, sehingga orang tersebut memiliki nilai positif serta berusaha untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Individu ini bukan hanya mengejar selembarnya ijazah atau kebanggaan menyandang sederet gelar akademik dalam melakukan pendidikan, tapi karena kesadaran untuk terus meningkatkan kompetensi diri. Orang tersebut tidak akan membiarkan dirinya untuk menyia-nyiakan waktunya.

d. Sistem Kepercayaan

Faktor yang paling dominan mempengaruhi pola pikir adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang. Sistem kepercayaan memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap pola pikir seorang. Seseorang bila dihadapkan pada peluang melakukan kejahatan, satu-satunya yang sanggup mencegah perbuatan tersebut bukanlah sanksi dari atasan atau dari Kepolisian, tetapi rasa takutnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki keyakinan bahwa suatu hari nanti, setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Sistem kepercayaan, atau sistem keyakinan, juga mampu mengarahkan seseorang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua orang yang berurusan dengannya, baik itu masyarakat, atasan, bawahan, atau teman sejawat. Jadi, keyakinan dalam diri seseorang menentukan pola pemikiran dan menentukan tindakannya.

Adapun sumber kekuatan yang mempengaruhi proses berpikir manusia:

a. Orang Tua

Dari orang tua lah seseorang belajar tentang ucapan, ekspresi wajah, gerakan tubuh, perilaku, keyakinan beragama, dan nilai positif lainnya. Orang Tua adalah guru yang pertama di dunia, yang membentuk pola pikir seorang anak pertama kalinya.

- b. Keluarga
Setelah orang tua maka keluarga yang dapat memberikan informasi untuk melengkapi pola pikir yang telah kita peroleh dari orang tua.
- c. Masyarakat
Dunia lain yang akan dikenal adalah lingkungan masyarakat sekitar, dengan semakin bertambahnya informasi dan disatukan dengan apa yang telah didapat akan membuat proses pembentukan pikiran menjadi semakin kuat.
- d. Sekolah
Sekolah mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam proses pembelajaran seseorang, peraturan-peraturan yang diterapkan sekolah maupun perilaku dan sikap guru dapat memperkaya proses pembentukan pola pikir yang sudah ada.
- e. Teman
Berteman merupakan aktualisasi diri yang pertama dalam kehidupan, karena dalam suatu pertemanan, seseorang yang menentukan pilihan akan berteman dengan siapa, tidak ada larangan dalam menentukan teman.
- f. Media Massa
Merupakan unsur pengidolaan pada suatu tontonan dapat menimbulkan peniruan seseorang, baik itu yang sifatnya negatif maupun yang positif. Contohnya model rambut seorang artis akan ditiru oleh fansnya.
- g. Diri sendiri
Sebagai faktor penentu dari suatu pola pikir, baik buruknya suatu pengaruh sangat ditentukan oleh diri sendiri, yang dapat memilih sesuatu yang baik atau buruk.

4. Rencana Tindak Lanjut

Seorang akan sulit beradaptasi atau berkembang pada masa Covid-19 ini bila tidak memiliki *mindset* wirausaha yaitu kreatif, inovatif dan melihat peluang dalam dirinya dan lingkungan sekitar. Kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia agar dapat melakukan aktivitas atau mengembangkan usahanya untuk lebih sukses. Oleh karena itu dalam mengembangkan sumber daya manusia suatu wilayah pada masa pandemic Covid-19 ini perlu dilakukan upaya dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki pola pikir kewirausahaan. Adapun pola pikir kewirausahaan berkaitan dengan kejujuran, tanggungjawab, komitmen,

disiplin, taat hukum, menghormati dan mengejar prestasi. Oleh karena itu setiap orang diharapkan dapat memiliki kepercayaan (*belief*) untuk melihat bahwa melakukan adaptasi perilaku terhadap aktivitas yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, serta sumber daya manusia dalam melakukan aktivitasnya tidak lupa menjalankan 5M serta dapat melihat peluang yang ada untuk keberlanjutan aktivitasnya pada masa Covid-19. Oleh karena itu sumber daya manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, perlu melihat peluang walaupun dalam masa krisis seperti pandemic Covid-19.

Peluang artinya kesempatan, usaha, dan upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Peluang usaha merupakan salah satu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan (keuntungan, uang, kekayaan) dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Salah satunya adalah pengertian peluang usaha menurutnya yaitu berarti adanya penerapan sebuah kreativitas atau inovasi.

Peluang adalah suatu keadaan pada setiap saat kehidupan mulai sejak bangun pagi hingga larut malam. Peluang dapat muncul dalam berbagai bentuk, tergantung cara seseorang melihatnya. Yang terpenting adalah bukan sekedar cara melihat atau memandang suatu hal, atau suatu masalah ketidaksempurnaan itu dapat berubah menjadi peluang yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar.

Peluang akan menjadi peluang yang prospektif bila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sedang dibutuhkan oleh pasar
2. Memecahkan kesulitan atau masalah yang sedang dihadapi pasar
3. Menyempurnakan yang sebelumnya
4. Benar-benar beda dan memiliki nilai tambah
5. Temuan yang orisinal (inovatif)
6. Memberi keuntungan yang nyata
7. Ada unsur yang dibanggakan oleh pembeli
8. Dapat diwujudkan.

Cara mengenali peluang apabila seseorang peka terhadap hal-hal positif, yang dapat atau mampu melihat peluang untuk dapat dilakukan menjadi suatu bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, seseorang dalam mengelola peluang, harus berani melakukan tindakan, memiliki pengetahuan tentang bisnis, serta mempunyai modal atau sumber daya lainnya, yang dapat di kembangkan lebih lanjut. Selain itu sumber daya manusia yang memiliki pola pikir kewirausahaan tidak gampang menyerah atau putus asa, dengan kerja keras sebagai kunci sukses dalam mengatasi masalah.

Mengelola Peluang Dalam Mengembangkan Pola Pikir

Oleh karena itu dalam membangun sumberdaya manusia diperlukan pola pikir kewirausahaan yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat mengelola peluang dan memiliki sikap mental (berani bertindak), pengetahuan (melaksanakan jadi produk/ bisnis), dan adanya fasilitas pendukung (modal,

peralatan dan sumber daya lain). Sehingga pengembangan sumber daya manusia sebaiknya merupakan pola pikir yang dapat melatih sikap pantang menyerah dan pantang berputus asa sebagai suatu kunci kesuksesan.

Ada 3 (tiga) cara dalam mengelola peluang yaitu :

- a. Memulai (adanya keberanian menghadapi risiko gagal)
- b. Mengembangkan (adanya kekuatan pendorong menjadi lebih besar)
- c. Mempertahankan (adanya daya tahan untuk tetap sehat)

5. Kesimpulan dan Saran

Membangun sumber daya manusia pada masa covid-19 adalah membangun pola pikir kewirausahaan yang akan mengubah perilaku seseorang, sehingga yang memiliki kreativitas, inovatif, dan dapat melihat peluang sehingga mempengaruhi kehidupan orang tersebut dalam masa pandemic Covid-19. Pola pikir seseorang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pergaulan, pendidikan, dan system kepercayaan atau keyakinan.

Saran

Dalam membangun Sumberdaya Manusia diperlukan penguatan dalam kemampuan berpola pikir kewirausahaan yang memiliki jiwa keberanian, motivasi, dan secara berkesinambungan agar dapat mengembangkan diridalam masa krisis seperti pandemic Covid-19.

Daftar Pustaka

- Prastiwi, Yudi dkk. 2019. "Pola Pikir Dan Perilaku Kewirausahaan UMKM di Buleleng, Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*". Volume 4, No. 1, Juni 2019 <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen>
- Khuzaeva, Eva Siti .2014. "Mengembangkan Pola Pikir Cerdas, Kreatif dan Mandiri melalui Telematika. *Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)* Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014, p.138 –138
- Susanto Didit (2013) "Pengaruh Enterprenuer skill dan Strategi terhadap daya saing UKM "(study kasus pada sentra usaha keripik di Bandarlampung)"
- Maulina, Syf. Irma. 2013. "Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak. Publik A, *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Vol.2 No. 1*.
- Khera, Aman. 2015. "Impact of Employee Empowerment on Job Satisfaction: An Empirical Analysis of Bank in Chandigarh". (India). *International Research Journal of Human Resources and sosial Sciences. Vol. 2 No.1*.
- Mulyadi. 2014. "Sosialisasi Ketentuan Jaminan Sosial" (*Jurnal Elektronik*) diakses pada 10 September 2014; <https://id.scribd.com>

- Amir,A.2008. “Pengaruh Penyuluhan Model Pendampingan Terhadap Perubahan Staus Gizi Anak Usia 6 – 24 Bulan”. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Dipenogoro. Semarang
- Story, J., & Barbuto, J. (2011). “Global Mindset: A construct clarification and Framework.” *Journal of Leadership & Organizational Studies*,18(3),377-384.<http://dx.doi.org/10.117/1548051811404421>.
- Gupta, A.dan Govindarajan,V.(2002). Cultivatinga Global Mindset. *Academy of Management Executive .Journal*, 16(1), 116-126.
- PearceRobinson.1997. Manajemen Stratejik Formulasi,Implementasi dan Pengendalian Jilid 1,(Jakarta:BinarupaAksara,1997), 231.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Ritha F. Dalimunthe, SE., M.Si, Guru besar tetap Bidang Ilmu Manajemen, Kewirausahaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Lahir di Jakarta pada tanggal 24 oktober 1962. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Pada Tahun 1985, mendapat gelar Magister dari Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara tahun 1995 dan mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2002.

Jabatan struktural (di dalam maupun diluar Institusi, Termasuk Sebagai Ketua/ Sekretaris Suatu Himpunan Profesi) yaitu sebagai Staf Pengajar di Departemen Manajemen FEB USU tahun 1986 sampai dengan sekarang, Pengurus Puslitdal Lembaga Penelitian USU tahun 1995-1997, Kepala Divisi pemasaran CIKAL tahun 1997-2006, Staf Pengajar Luar Biasa FISIP USU tahun 2001-2010, Staf Pengajar Pasca Sarjana USU tahun 2003-sekarang, Staf Pengajar Luar Biasa Pasca Sarjana Universitas Medan Area tahun 2003-2018, Ketua Dewan Manajemen FE USU tahun 2003-2010, Sekretaris Dewan Riset Daerah Sumatera Utara tahun 2004-2015, Ketua Bidang Pengembangan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2014, Kepala Pusat Inkubator bisnis Cikal USU tahun 2010-2015, Wakil Sekretaris POKJA tahun 2010-2015, Sekretaris Dewan Guru Besar Sumatera Utara tahun 2009-2014, Anggota Senat Akademik USU tahun 2009-2014, Reviewer FMI (Forum Manajemen Indonesia) tahun 2017, Anggota Komisi Program Akademik Senat Akademik USU tahun 2009-2014, Kepala Pusat Inkubator Bisnis Cikal USU tahun 2015-2019, Ketua dewan pertimbangan FEB USU tahun 2016-2021 dan wakil Ketua Tim Pengembangan Pusat Unggulan Teknologi Komunikasi Pemasaran Produk Pertanian Indigenous USU tahun 2017-sekarang.

Ringkas pekerjaan Di lingkungan Badan Usaha Pemerintah/ Swasta Penulis menjabat Dewan Riset Daerah SUMUT tahun 2004-2010, ICMI wilayah SUMUT tahun 2009-2014, KAHMI wilayah SUMUT tahun 2010-2015, Badan Wakaf Indonesia SUMUT tahun 2011-2018, Pengawas Islamic Center SUMUT 2018-sekarang, BPPT Prov.SUMUT tahun 2014 dan menjabat sebagai Rektor di Universitas Harapan Medan tahun 2017-2019, Ketua PSGA USU 2019-sekarang, Ketua Ja-PUK (Jaringan Perempuan untuk Kesejahteraan) 2020-2025, Pengurus ASWGI tahun 2019-2021, Ketua PEN 2020 dalam gugus satuan Covid-19 SUMUT.

Penghargaan yang pernah diraih penulis adalah Satyalencana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun. Pidato Pengukuhan Guru Besar Penulis : Peranan Penting Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Usaha Kecil.

Pembangunan Manusia Berkarakter di Sumatera Utara

Robert Sibarani

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pembangunan suatu bangsa adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya sehingga peningkatan SDM menjadi aspek yang menentukan keberhasilan sebuah bangsa. Maju-mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Melihat begitu pentingnya dampak dan peran dari SDM, dapat kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh beberapa negara yang ada di dunia. Beberapa negara kurang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang signifikan untuk dapat dimanfaatkan dalam kemajuan negaranya, namun di balik kekurangan tersebut, negara tersebut memiliki kualitas SDM yang sangat mumpuni sehingga negara-negara tersebut yang bukannya hanya berhasil menutupi keterbatasan SDA. Melainkan juga berhasil menjadi negara maju di dunia. Fenomena seperti ini dapat kita lihat pada Negara-negara yang berhasil meningkatkan kualitas SDM-nya seperti Jepang, China, dan Singapura sebagai contoh negara maju secara ekonomi di Asia maupun tingkat dunia. SDM menjadi faktor yang penting dalam mendorong kemajuan dan keberhasilan suatu negara.

Melihat keberadaan negara kita dan merefleksikan kondisi sekarang ini, kita menemukan kontradiksi yang sangat mencolok dengan apa yang dialami oleh negara yang disebutkan di atas padahal Indonesia memiliki potensi dan kekayaan SDA yang melimpah. Di berbagai sektor, Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang sangat berlimpah seperti pada sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan. Dengan kondisi SDA yang melimpah ini, sudah selangkah Indonesia menjadi negara maju di dunia, namun realitanya sampai sekarang Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang, berbanding terbalik dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia saat ini. Hal ini diakibatkan oleh salah satu faktor penting, yaitu terbatasnya SDM yang mampu mengolah SDA menjadi katalisator kemajuan bangsa. Ketidakmampuan SDM kita dalam mengolah SDA yang berlimpah ruah ini menjadi perenungan yang mendalam untuk lebih meningkatkan kualitas SDM generasi muda kita sebagai generasi penerus bangsa.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multietnis, kebudayaan, agama, dan latar geografis, yang semuanya membentuk ciri keunikan masyarakat Indonesia. Setiap Provinsi di Indonesia juga terdapat suku-suku berbeda yang mendiami provinsi tersebut. Provinsi Sumatera Utara juga terdiri atas beragam suku, etnis, agama, kebudayaan, dan latar geografis. Keberagaman itu merupakan sumber nilai budaya dan norma sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai kearifan lokal untuk membentuk karakter masyarakat Sumatera Utara. Suku-suku yang ada di Sumatera Utara ini

seperti suku rumpun Batak (Karo, Simalungun, Toba, Pakpak-Dairi, dan Angkola-Mandailin), Melayu, Nias, dan suku-suku pendatang lainnya memiliki kearifan lokal masing-masing yang dapat dimanfaatkan pembentukan karakter untuk SDM yang bermanfaat membangun Sumatera Utara. Salah satu ciri yang secara stereotip melekat pada salah satu suku di Sumatera Utara adalah karakter 'kerja keras'. Jika karakter kerja keras itu dipraktikkan dan diwariskan, Sumatera Utara akan memiliki SDM yang berkualitas untuk membangun provinsi ini dengan memanfaatkan SDA yang tersedia.

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di Sumatera Utara, yang merupakan salah satu unsur terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara, kita perlu membentuk manusia berkarakter berbasis kearifan lokal. Berkarakter adalah memiliki etos kerja dan etika baik sehingga disebut berkarakter etos kerja dan berkarakter etika baik. Pembangunan karakter ini akan menghasilkan SDM yang berkualitas yang dapat membangun masyarakat Sumatera Utara yang sejahtera dan damai. Kemajuan masyarakat Sumatera Utara dengan sendirinya menjadi gambaran Provinsi Sumatera Utara, yang pada gilirannya berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia.

2. Masalah

Salah satu masalah yang sering muncul di Sumatera Utara, termasuk juga di wilayah lain di Indonesia, adalah mudahnya terjadi perkelahian, perselisihan atau konflik di masyarakat. Konflik itu dapat mengakibatkan lambatnya jalan pembangunan atau bahkan terhambatnya pembangunan. Kemacetan pembangunan atau keterhambatan pembangunan pada gilirannya akan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat Sumatera Utara. Perkelahian, perselisihan, dan konflik harus diatasi agar hidup masyarakat bahagia dengan kondisi yang aman dan nyaman.

Masalah lain yang dialami sebagian masyarakat di Sumatera Utara, termasuk di wilayah lain di Indonesia, adalah kemiskinan, padahal sumber daya alam melimpah dan potensi peningkatan pendapatan tersedia. Kemiskinan terjadi pada sebagian masyarakat karena kurang rajin atau ada kecenderungan malas bekerja.

Kedua masalah tersebut perlu dipecahkan sejak sekarang untuk mempersiapkan SDM unggul untuk pembangunan di Sumatera Utara. Strategi berikut diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam membentuk kualitas SDM.

3. Strategi Pemecahan Masalah

3.1 Pembentukan Karakter sebagai Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pembentukan karakter berkaitan dengan jenis, metode, prosedur, dan tipe pembentukan karakter. Ada empat jenis pembentukan

karakter, yaitu pendidikan karakter, penyuluhan karakter, pelatihan karakter, dan praktik karakter. Metode pembentukan karakter antara lain ceramah, diskusi, simulasi, dan perenungan. Prosedur pembentukan karakter mencakup pengisian pengetahuan (kognitif), pembekalan perasaan (afektif), dan pemotivasian pelaksanaan (psikomotorik). Tipe pembentukan karakter mencakup penanaman karakter, pengembangan karakter, penguatan karakter, dan pembijaksanaan karakter. Jenis dan metode pembentukan karakter dijelaskan berikut ini, sedangkan prosedur dan tipe pembentukan karakter dijelaskan pada rencana tindak lanjut.

Pendidikan karakter sebaiknya dilakukan terencana di sekolah formal terutama dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang memiliki kurikulum tersendiri. Dalam kondisi masyarakat di Sumatera Utara, peran sekolah formal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi sangat diperlukan untuk memberhasilkan pembentukan karakter. Penyuluhan karakter dan pelatihan karakter dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga nonformal dengan sasaran pada usia sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Praktik karakter diharapkan peran orang tua, kerabat, dan tetangga untuk memotivasi orang mempraktikkan karakter di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Keempat tipe pembentukan karakter tersebut dengan peran pendidikan formal, nonformal, dan informal saling mengisi untuk membentuk karakter SDM yang unggul.

Metode ceramah untuk mengisi pengetahuan dan menyentuh perasaan sehingga mengetahui karakter dan dapat merasakan diperlukan dari orang-orang yang mendalami pembentukan karakter. Meskipun terasa terlalu ilmiah, metode ceramah ini diperlukan agar materi yang diberikan memiliki dasar ilmiah dengan bahan ceramah yang teruji. Metode diskusi antarpeserta diperlukan untuk penyamaan persepsi dan untuk pendalaman materi karakter. Metode simulasi dianggap penting sebagai praktik buatan sebelum berhadapan dengan realitas yang sebenarnya. Melalui simulasi pemecahan masalah diharapkan para peserta dapat mempraktikkan pengetahuan karakter yang dipelajarinya. Oleh karena karakter lebih condong pada penerapan kearifan, metode perenungan sebagaimana yang dianjurkan filsafat sangat diperlukan. Karakter adalah jati diri etos kerja dan etika baik yang berasal dari diri sendiri untuk dipraktikkan baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Pembangunan karakter merupakan upaya membentuk seseorang untuk memiliki etos kerja dan etika baik. Upaya itu harus dilakukan secara sengaja, teratur, terencana, dan berkesinambungan. Melalui upaya pembentukan karakter, seseorang atau sekelompok orang beretos kerja dan beretika baik. Kadar prestasi seseorang diukur dari sejauh mana etos kerja yang dia praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kadar kewibawaan seseorang diukur dari sejauh mana etika baik yang dia perlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Etos kerja yang hebat akan menghasilkan kesejahteraan, sedangkan etika baik yang terpuji akan menghasilkan kedamaian. Dengan demikian, sumber daya manusia yang beretos kerja akan berprestasi dan lebih sejahtera, yang pada gilirannya dapat

menularkan prestasi dan kesejahteraan kepada orang lain di lingkungannya. Sumber daya manusia yang beretika baik akan berwibawa dan lebih damai, yang pada gilirannya dapat menularkan wibawa dan kedamaian kepada orang lain di lingkungannya.

Sebuah karya besar tidak dihasilkan oleh orang pintar, melainkan oleh pekerja keras. Hal itu bisa dilihat dari pengalaman sehari-hari. Dalam dunia akademik, buku sebagai karya ilmiah dan jurnal internasional bereputasi biasanya dihasilkan oleh para penulis dan peneliti yang memiliki kerja keras. Kerja keras selalu diikuti oleh kerajinan, disiplin, dan kreativitas. Karakter pekerja keras, rajin, disiplin, dan reaktif tersebut termasuk karakter etos kerja. Pada akhirnya, lewat karya-karya itulah para penulis dan peneliti dievaluasi sebagai orang pintar. Para mahasiswa yang menghasilkan karya skripsi, tesis, dan disertasi tepat pada waktunya juga adalah orang-orang yang memiliki kerja keras. Meskipun seorang mahasiswa pada awalnya lebih pintar dari mahasiswa lain, dia tidak akan menghasilkan karya skripsi, tesis atau disertasi apabila dia tidak memiliki kerja keras dengan kerajinan, disiplin, dan kreativitas menulis setiap hari. Mahasiswa seperti ini bahkan lama menyelesaikan studi dan bahkan ada yang putus studi. Demikian juga SDM dalam posisi lain di Sumatera Utara, apapun jabatannya, dia akan menghasilkan karya besar apabila dia memiliki karakter etos kerja. Dengan memiliki karakter etos kerja yang hebat, SDM Sumatera Utara akan dapat menghasilkan karya-karya besar untuk kemajuan daerah ini, menaikkan prestasi yang membanggakan, dan membawa kesejahteraan masyarakatnya.

Sebuah amanah, jabatan atau pekerjaan tidak diberikan kepada orang pintar, melainkan kepada orang terpercaya. Jabatan adalah amanah yang "dipercayakan" kepada seseorang. Jika dia tidak dipercaya, amanah atau jabatan tidak akan "dipercayakan" kepadanya. Itu berarti bahwa yang menerima amanah atau jabatan belum tentu pintar, tetapi dipercaya dapat menjalankan amanah itu dengan kerja tim. Orang pintar belum tentu diberikan amanah jika dia tidak terpercaya. Orang yang terpercaya pada umumnya memiliki kejujuran, sopan santun, dan komitmen atau tanggung jawab, yang semuanya termasuk karakter etika kebaikan. Apabila SDM Sumatera Utara berkarakter etika baik, mereka akan hidup nyaman, terhindar dari perselisihan, dan menciptakan kedamaian.

Pembentukan karakter beretos kerja dan beretika baik merupakan strategi pemecahan masalah yang dihadapi Sumatera Utara termasuk juga wilayah lain Indonesia. Pembangunan ditentukan oleh kualitas SDM dan kualitas SDM ditentukan oleh karakter etos kerja dan etika baik yang dimilikinya. Dengan demikian, pembentukan karakter harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Sumber karakter yang ditanamkan, dikembangkan, dikokohkan, dan dibijaksakan sebaiknya bersumber dari kearifan lokal yang dimiliki masyarakat setempat.

3.2 Pembentukan Karakter berbasis Kearifan Lokal

Pembentukan karakter yang bersumber dari kearifan lokal akan lebih mudah mengena untuk kepribadian seseorang. Kearifan lokal adalah nilai

budaya dan norma sosial yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian suatu komunitas. Kearifan lokal disebut juga kearifan praktis. Kearifan lokal mengacu pada nilai budaya atau norma sosial yang berlaku “setempat”, sedangkan kearifan praktis mengacu pada nilai budaya dan norma sosial yang “dipraktikkan” suatu komunitas.

Setiap komunitas memiliki tradisi budaya, religi, praktik sosial, dan pemerintahan lokal, yang di dalamnya ada nilai budaya dan norma sosial. Meskipun kearifan lebih dominan pada kandungan tradisi budaya, pada hakikatnya kearifan juga terdapat pada tradisi religi, praktik sosial, dan pemerintahan lokal. Keempat hal tersebut telah bersinergi dalam kehidupan suatu komunitas sekarang ini. Nilai dan norma dari ketiga tradisi itu menjadi pedoman sebagai kearifan untuk memecahkan persoalan-persoalan sosial. Jika kearifan itu digali dari tradisi budaya, tradisi itu lebih sering disebut “kearifan lokal”, tetapi jika kearifan itu digali dari religi, praktik sosial, dan pemerintahan lokal, kearifan itu sering disebut “kearifan praktis”. Dalam tulisan ini, keduanya disebut dengan kearifan lokal.

Kearifan lokal sebagai kandungan inti tradisi budaya, religi, praktik sosial, dan pemerintahan lokal dapat dimanfaatkan secara arif untuk memecahkan persoalan-persoalan sosial seperti perselisihan dan kemiskinan untuk menciptakan kedamaian dan meningkatkan kesejahteraan. Kearifan lokal yang bermanfaat untuk menciptakan kedamaian meliputi (1) keterpercayaan, (2) kejujuran, (3) kesopansantunan, (4) kendali diri, (5) komitmen, (6) kesetiakawanan sosial, (7) kerukunan dan toleransi, (8) kepedulian, (9) persahabatan dan keramahan, (10) pikiran positif, dan (11) rasa syukur. Kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan meliputi (1) kerja keras, (2) kerajinan, (3) kedisiplinan, (4) kreativitas dan inovasi, (5) mandiri dan hemat, (6) gotong royong, (7) pendidikan, (8) kesehatan, (9) pengelolaan gender, (10) pelestarian budaya, dan (11) peduli lingkungan (Sibarani, 2012; 2014: 135-136).

Pada hakikatnya, unsur-unsur kearifan lokal yang berorientasi pada kesejahteraan dan kedamaian tersebut sangat tepat dimanfaatkan sebagai dasar pembentukan karakter. Itulah yang disebut dengan pembentukan karakter berbasis kearifan lokal. Proses itu termasuk dalam pelestarian kearifan lokal, yakni dengan cara perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pembentukan karakter. Proses itu juga termasuk revitalisasi kearifan lokal, yakni penggalan, pengelolaan, dan pewarisan karakter ke generasi muda untuk pembangunan manusia yang berkarakter. Kearifan lokal yang berasal dari nilai budaya dan norma sosial yang terwujud dalam tradisi, religi, dan praktik sosial sebagai warisan leluhur masa lalu dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa masa kini demi mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih damai dan sejahtera. Pembentukan karakter berbasis kearifan lokal lebih memperhatikan keberlanjutan masa lalu ke masa kini untuk masa depan demi menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Pembentukan karakter berbasis kearifan lokal sebagaimana terlihat dalam komponennya sejalan dengan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan tujuan 17 yang telah digariskannya. Pelestarian dan revitalisasi kearifan lokal sebagai dasar pembentukan karakter merupakan proyeksi masa depan yang berkelanjutan untuk membangun manusia berkualitas.

Pembentukan karakter berbasis kearifan lokal yang berkenaan dengan kedamaian akan menghasilkan manusia berkarakter etika baik yang (1) terpercaya, (2) jujur dan adil, (3) sopan santun, (4) kendali diri, (5) berkomitmen, (6) setiakawanan, (7) rukun, dan toleran, (8) peduli, (9) bersahabat, dan ramah, (10) berpikir positif, dan (11) bersyukur. Pembentukan karakter berbasis kearifan lokal yang berkenaan dengan kesejahteraan meliputi (1) pekerja keras, (2) rajin, (3) disiplin, (4) kreatif dan inovatif, (5) mandiri dan hemat, (6) bergotong royong, (7) edukatif, (8) hidup sehat, (9) pro-gender, (10) cinta budaya, dan (11) peduli lingkungan. Karakter etika baik dan karakter etos kerja pada komponen nomor 1-5 pada hakikatnya merupakan karakter perseorangan, yang dapat berhasil dilakukan oleh seorang individu tanpa perlu ada bantuan orang lain. Keberhasilan karakternya sangat ditentukan oleh seorang individu. Namun, karakter etika baik dan karakter etos kerja pada komponen nomor 6-11 memerlukan bantuan orang lain. Karakter bergotong royong atau bekerja sama, misalnya, ditentukan oleh beberapa orang sehingga keberhasilannya tidak hanya di tangan seorang individu.

Alur pembentukan karakter berbasis kearifan lokal itu pun memiliki bobot yang berbeda. Karakter etos kerja didominasi oleh karakter kerja keras atau belajar keras yang tentunya diikuti oleh karakter rajin dan disiplin. Demikian juga karakter etika baik didominasi oleh karakter terpercaya yang diikuti oleh kejujuran dan kesopansantunan. Masing-masing tiga karakter tersebut merupakan dasar karakter manusia, yang implementasinya diikuti oleh komponen-komponen karakter lain.

Pada bagan alur pembentukan karakter berbasis kearifan berikut ini sengaja dikelompokkan komponen-komponen dalam kotak alir untuk memperlihatkan alur pembentukan karakter dari yang paling dasar (*core*) ke yang melengkapi (*complementary*) meskipun semuanya penting dalam pembentukan karakter. Di satu sisi, komponen-komponen dasar tersebut dapat dilakukan secara sempurna apabila dilengkapi dengan komponen-komponen lainnya. Di sisi lain, komponen-komponen pelengkap itu dapat dilakukan apabila didasari oleh komponen-komponen dasar.



Bagan 1: Alur pembentukan Karakter berbasis Kearifan Lokal

4. Rencana Tindak Lanjut

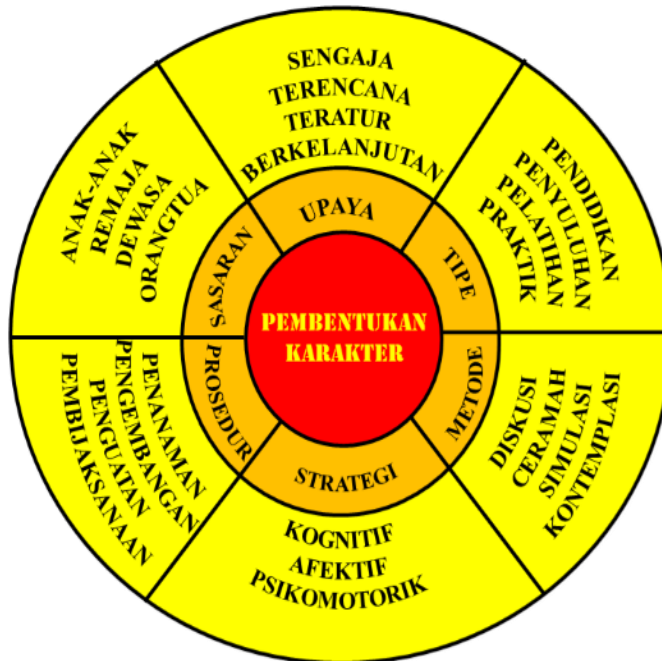
Upaya tindak lanjut untuk pembentukan karakter dalam rangka membangun manusia berkualitas mesti dilakukan dengan upaya sengaja, terencana, teratur, dan berkesinambungan. Upaya sengaja adalah upaya yang secara sadar dilakukan dalam pembentukan karakter. Pembentukan karakter bukan *taken for granted* 'diterima atau dilakukan begitu saja', tetapi secara sadar dilakukan dan dipelajari. Upaya terencana adalah upaya yang secara bertahap dilakukan dalam pembentukan karakter. Pembentukan karakter membutuhkan prosedur yang jelas. Upaya teratur adalah upaya yang secara rapi dan beraturan dilakukan dalam pembentukan karakter. Upaya pembentukan karakter bukan *mamereng disi ma i* 'lihat situasi nantilah', tetapi sudah dikemas sedemikian rupa. Upaya berkesinambungan adalah upaya yang terus-menerus dilakukan sepanjang hidup sesuai dengan sasaran pembentukan karakter. Proses pembentukan karakter adalah proses yang tiada akhir (*never ending process*). Upaya pembentukan karakter tersebut mengindikasikan bahwa pembentukan karakter memerlukan modul atau panduan, pengajar atau pelatih, dan juga penganggaran yang jelas. Dengan demikian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu mempersiapkan

upaya pembentukan karakter tersebut apabila ingin membangun manusia berkarakter untuk memajukan Sumatera Utara ke depan.

Di samping upaya pembentukan karakter tersebut, perlu juga kita perhatikan tipe, metode, strategi, prosedur, dan sasaran pembentukan karakter. Tipe pembentukan karakter mencakup pendidikan karakter, penyuluhan karakter, pelatihan karakter, dan praktik karakter. Metode karakter mencakup antara lain diskusi, ceramah, simulasi, dan perenungan. Strategi pembentukan karakter mencakup antara lain mengetahui secara kognitif, menyukai atau menyenangkan secara afektif, dan melakukannya secara psikomotorik. Prosedur pembentukan karakter mencakup antara lain penanaman karakter sebagai langkah pertama, pengembangan karakter sebagai langkah kedua, penguatan karakter sebagai langkah ketiga, dan pembijaksanaan karakter sebagai langkah keempat. Sasaran pembentukan karakter mencakup antara lain anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua (Sibarani, 2015).

Baik upaya, tipe, metode, strategi, prosedur maupun sasaran pembentukan karakter perlu diperhatikan dalam rangka rencana tindak lanjut pembangunan manusia berkarakter di Sumatera Utara. Upaya pembentukan karakter sangat penting untuk menyelaraskan strategi, prosedur, dan sasaran pembentukan karakter di Sumatera Utara. Sasaran penanaman karakter ditujukan kepada anak-anak, pengembangan karakter ditujukan kepada remaja, penguatan karakter ditujukan kepada orang dewasa, dan pembijaksanaan karakter ditujukan kepada orang tua. Ketiga sasaran dan prosedur pembentukan karakter tersebut diselaraskan pada strategi pembentukan karakter. Baik penanaman karakter untuk anak-anak, pengembangan karakter untuk remaja, penguatan karakter untuk orang dewasa maupun pembijaksanaan karakter untuk orang tua semuanya berhubungan dengan aspek pengetahuan atau kognitif, aspek suka terhadap sesuatu atau disebut afektif, serta aspek tindakan atau aksi yaitu psikomotorik. Semua harus mengetahui karakter yang baik (*knowing the good*), menyukai karakter yang baik (*loving the good*), dan melakukan karakter yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari (*doing the good*).

Rencana tindak lanjut pembentukan karakter tersebut dapat dilihat secara lebih ringkas pada bagan berikut ini:



Bagan 2:Pembentukan Karakter

5. Kesimpulan

Pembentukan karakter berbasis kearifan lokal sangat perlu membangun manusia berkarakter etika baik dan berkarakter etos kerja. Manusia berkarakter etika baik selalu berniat baik, menyampaikan kata-kata baik, dan menabur kebaikan sehingga dia dapat membawa dan menciptakan kedamaian di sekitarnya. Manusia berkarakter etos kerja selalu berniat bekerja dan belajar keras, menyukai kerja dan belajar keras, dan melakukan kerja keras sehingga dia selalu termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya dan lingkungannya.

Atas dasar itu, pembentukan karakter menjadi strategi penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini, yakni peselisihan yang mudah mengemuka dan kemiskinan yang masih ada di mana-mana termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Apabila upaya pembentukan karakter berbasis kearifan lokal itu dilaksanakan secara sengaja, teratur, terencana, dan berkelanjutan, Sumatera Utara akan memiliki sumber daya manusia yang dapat membangun daerah ini jauh lebih damai dan lebih sejahtera di masa-masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Lickona, Thomas. 1991. *Educating For Character*. New York: Bantam.
- Lickona, Thomas. 2013. *Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Terjemahan oleh Juma Abdu Wamaungo. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Samani, Muchlas dan Hariyanto. 2013. *Konsep dan Konsep Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sibarani, Robert. 2011. "Peran Kearifan Lokal dalam Pembentukan Karakter." Makalah dalam Seminar Sehari "Peran Bahasa dan Budaya dalam Pengembangan Jatidiri Bangsa" di Universitas Methodist Indonesia, Medan tanggal 27 Agustus 2011
- Sibarani, Robert. 2012. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: ATL.
- Sibarani, Robert, 2015. *Pembentukan karakter: langkah-langkah berbasis kearifan Lokal*. Jakarta: ATL
- Sibarani, Robert et al. "Concerning Toba Batak's Local wisdom and cultural values for regional character Building". *Indian journal of Science and Technology*, vol 11(20), DOI:10.17485/IJST/2018/v11/20/114298, May 2018.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Robert Sibarani, MS yang lahir di Toba Samosir tanggal 12 Februari 1964 ini menjadi Guru Besar dalam bidang antropolinguistik terhitung mulai 01-10-2001 dengan SK Mendiknas No. 21676/A2.III.1/ KP/2001 tanggal 29 September 2001.

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya USU ini menyelesaikan S3 (doktor) di Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 27 Januari 1994 dan mengikuti post-doktor di Universität Hamburg pada Februari-November 1994. Pada bulan Oktober-Desember 2011 dia mengikuti PAR (*Program of Academic Recharging*) di Universiteit Leiden, Belanda. Pada bulan Desember 2013-Maret 2014, dia mengikuti SAME (*Scheme for Academic Mobility Exchange* (SAME) di University of Naples L'Orientale Italy.

Pengalaman struktural yang pernah diembannya adalah Rektor Universitas Tapanuli 1995-1999, Kapuslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian USU 2000-2005, Rektor Universitas Darma Agung dua periode 2002-2006 dan 2007-2011, Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat USU 2005-2011, Direktur Sekolah Pascasarjana USU 2016-2021, Ketua Lembaga Penelitian USU 2021-2026. Dalam organisasi profesi, dia Ketua Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) Wilayah Sumatera Utara (2017-2022) dan Ketua Bidang Usaha Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) Pusat (2017-2022); Ketua Forum Pimpinan Pascasarjana (FORPIMPAS) Wil Barat Indonesia 2018-2021; Ketua Forum Antropolinguistik Indonesia 2020-2025.

Beberapa kali melakukan *visiting professor* seperti ke University of Munster Jerman 1996, Tohoku University (2016), University of Cologne Jerman (2018), University of Naples L'Orientale Italy (2018 & 2019), dan University of Hamburg Jerman (2019). Beberapa naskah kerja sama telah ditandatangani dengan universitas luar negeri dan telah ditindaklanjuti dengan program internasionalisasi.

Sebagai akademisi, dia telah menulis puluhan buku dalam bidang tradisi lisan atau tradisi budaya seperti *Kearifan Lokal* (2012) *Pembentukan Karakter* (2014), *Marsirinpa: Gotong Royong pada Masyarakat Batak Toba* (2016) yang ketiga-tiganya telah mendapat HAKI dan telah mempublikasikan puluhan artikel di Jurnal Internasional Bereputasi termasuk yang terindeks Scopus (19dokumen), Thomson Reuters (1 dokumen), dan Copernicus (12 dokumen).

Pembangunan Manusia di Sumatera Utara Dalam Menurunkan Angka Kebutaan Karena Katarak

Rodiah Rahmawaty Lubis

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Kebutaan dan gangguan penglihatan merupakan suatu masalah kesehatan masyarakat di dunia. Menurut estimasi perhitungan WHO pada program pencegahan kebutaan terdapat 285 juta orang di dunia mengalami gangguan penglihatan (*visual impairment*) yang terdiri atas 39 juta mengalami kebutaan (*blind*) dan 246 juta mempunyai penglihatan lemah (*low vision*). Enam puluh lima persen dari gangguan penglihatan yang 85 % kebutaan tersebut dialami oleh orang berusia di atas 50 tahun yang merupakan 20 % dari total populasi penduduk. Penyebab kebutaan terbesar adalah katarak. WHO mencanangkan *Universal Eye Health* dengan *Global Action Plan 2014-2019* dengan visi: “*A world in which nobody is needlessly visually impaired, where those with unavoidable vision loss can achieve their full potential and where there is universal access to comprehensive eye care services.*” (Tidak ada lagi orang di dunia dengan gangguan penglihatan, untuk orang dengan kebutaan yang tidak dapat diterapi harus diberikan akses mudah ke pusat pelayanan kesehatan mata yang komprehensif). Target dari visi ini adalah menurunkan prevalensi *avoidable* gangguan penglihatan sebesar 25% pada tahun 2019.¹

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan membangun tingkat sosial ekonomi masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan Nasional 2015-2019 berupaya memmbangun kemandirian dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik, dan berkepribadian dalam budaya yang lebih dikenal dengan istilah “TRISAKTI”. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan TRISAKTI tersebut dengan menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas, yang pada agenda ke-5 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang dicapai melalui Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera.²

Program Indonesia sehat terdiri atas 3 komponen yang akan diwujudkan, yaitu:²

1. Mewujudkan Paradigma Sehat
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan
3. Jaminan Kesehatan Nasional

Data dari *Global Burden of Disease Study* pada tahun 2015 memperkirakan angka kebutaan pada populasi global sebanyak 36 juta

dengan penyebab terbanyak adalah katarak (12,6 juta) diikuti oleh kelainan refraksi yang tidak terkoreksi (7,4 juta) dan glaukoma (2,9 juta) dan perkiraan jumlah orang dengan gangguan penglihatan sedang sampai berat sebanyak 216,6 juta dengan penyebab terbanyak adalah kelainan refraksi yang tidak terkoreksi (116 juta), katarak (52,6 juta), age-related macular degeneration (8,4 juta), dan diabetik retinopati (2,6 juta). Data kebutaan di Indonesia dari survei RAAB didapatkan angka kebutaan sebesar 2,8%.^{2,3}

Vision 2020 menyebutkan bahwa: *The Right to Sight* adalah suatu program global dengan tujuan menurunkan angka kebutaan yang dapat dihindari sampai pada tahun 2020. Program ini merupakan kolaborasi antara WHO (*World Health Organisation*) dan IAPB (*International Agency for Prevention of Blindness*) yang diluncurkan pada 18 Februari 1999. Advokasi dari program ini dilakukan pada tingkat global dan regional. Perencanaan strategis dilakukan secara nasional namun implementasi secara aktual dilakukan pada tingkat area rural.^{4,5}

Pada dokumen WHO, tahun 2013, Menuju Universal Eye Health 2014-2019, terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan kesehatan mata di tingkat nasional di suatu negara, yaitu:

1. Prevalensi kebutaan dan gangguan penglihatan
2. Jumlah tenaga kesehatan mata
3. Jumlah operasi katarak, yang dapat berupa angka CSR (*Cataract Surgical Rate*) atau CSC (*Cataract Surgical Coverage*).

Ketiga indikator ini merupakan target global dan telah ditetapkan pula di dalam *action plan*. Target penurunan prevalensi gangguan penglihatan yang dapat dicegah sebesar 25% pada tahun 2019 dari *baseline* tahun 2010. Untuk Indonesia, sesuai Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan di Indonesia 2017-2030, target penurunan prevalensi gangguan penglihatan yang dapat dicegah pada 2030 sebesar 25% dari prevalensi hasil *Rapid Assessment of Avoidable Blindness* (RAAB) pada 2014-2016.^{3,6}

Klasifikasi gangguan penglihatan yang digunakan adalah sesuai dengan klasifikasi WHO, yaitu berdasarkan tajam penglihatan. Gangguan penglihatan ringan jika tajam penglihatan berkisar $<6/12 - \geq 6/18$, gangguan penglihatan sedang dan berat jika tajam penglihatan berkisar $<6/18 - \geq 3/60$ dan buta jika tajam penglihatan kurang dari 3/60. Istilah gangguan penglihatan merujuk pada kebutaan dan gangguan penglihatan berat sedang. Sebesar 55% dan penderita gangguan penglihatan adalah perempuan. Jika menurut umur, proporsi terbesar terjadi pada umur 50 tahun ke atas, yaitu 86% dari penderita kebutaan, 80% dari penderita gangguan penglihatan sedang hingga berat dan 74% dari penderita gangguan penglihatan ringan. Lima negara dengan prevalensi gangguan penglihatan terbesar (buta dan gangguan penglihatan beratsedang) adalah Afghanistan (9,09%), Nepal (8,17%), Laos (7,71%), Eritrea (7,66%) dan Pakistan (7,54%), sedangkan lima negara dengan jumlah penduduk yang mengalami gangguan penglihatan terbanyak adalah Cina, India, Pakistan, Indonesia dan Amerika Serikat.^{6,7}

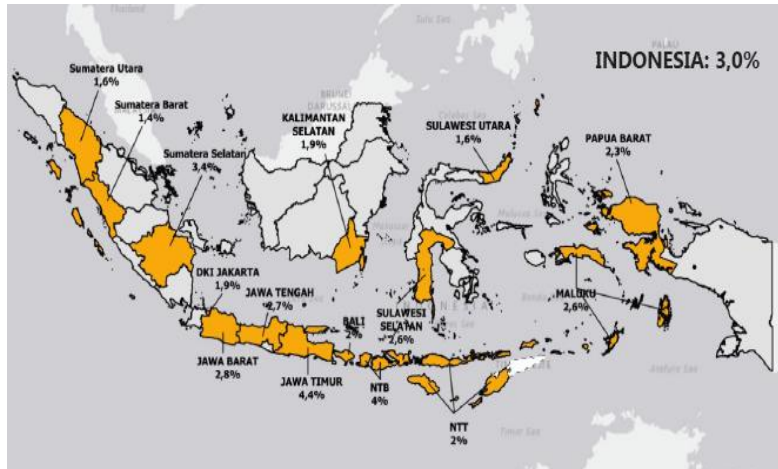
Penyebab gangguan penglihatan terbanyak di seluruh dunia adalah gangguan refraksi yang tidak terkoreksi (48,99%), diikuti oleh katarak

(25,81%) dan *Age related Macular Degeneration* (AMD, 4,1%). Penyebab kebutaan terbanyak adalah katarak (34,47%), diikuti oleh gangguan refraksi yang tidak terkoreksi (20,26%), dan glaukoma (8,30%). Lebih dari 75% gangguan penglihatan merupakan gangguan penglihatan yang dapat dicegah. Katarak adalah kekeruhan pada lensa mata yang merupakan proses degeneratif yang sangat dipengaruhi oleh faktor usia. Oleh karena itu, kasus ini akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang lanjut usia. Meskipun kasus katarak lazimnya dialami oleh penduduk lanjut usia, namun katarak dapat juga diderita oleh bayi, anka-anak, yang dapat disebabkan oleh proses dalam kandungan seperti infeksi, malnutrisi selama usia anak-anak, meskipun kasus ini jarang dijumpai. Kasus katarak juga dapat dialami oleh usia dewasa muda yang dapat disebabkan oleh trauma pada mata.^{2,7}

RAAB merupakan survei berbasis populasi untuk penderita kebutaan dan gangguan penglihatan dan layanan perawatan mata pada orang-orang berumur 50 tahun ke atas yang direkomendasikan oleh WHO, melalui *Goibal Action Plan (GAP) 2014-2019*, mengingat berbagai penelitian didapatkan sekitar 85% kebutaan terdapat pada umur 50 tahun dan lebih. RAAB dapat memberikan prevalensi gangguan penglihatan dan kebutaan, penyebab utamanya, output dan kualitas layanan perawatan mata, hambatan, cakupan bedah katarak dan indikator lain dari layanan perawatan mata di daerah geografis tertentu. Survei RAAB di Indonesia sampai saat ini telah dilakukan di 15 provinsi pada tahun 2014-2016 yaitu 3 provinsi di Sumatera, 4 provinsi di Jawa, 1 provinsi di Kalimantan, 2 provinsi di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua untuk dapat mewakili kondisi Indonesia.²

Sejak tahun 2000 Indonesia bergabung dengan Inisiatif Global VISION 2020: *The Right to Sight* dalam upaya menurunkan prevalensi gangguan penglihatan dan kebutaan di dunia. Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) dan beberapa *Non Governmental Organizations* (NGO) selalu berusaha membantu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam menurunkan prevalensi kebutaan di Indonesia.⁴

Prevalensi kebutaan pada penduduk Indonesia umur 50 tahun ke atas hasil data RAAB di 15 provinsi. Survei RAAB di Indonesia sampai saat ini telah dilakukan di 15 provinsi pada tahun 2014-2016 yaitu 3 provinsi di Sumatera, 4 provinsi di Jawa, 1 provinsi di Kalimantan, 2 provinsi di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua untuk dapat mewakili kondisi Indonesia. Beberapa diantaranya yakni 4,4% (Jawa Timur), 3,6% (Sumatera Selatan), 2,9% (Maluku), sedangkan 1,7% (Sumatera Utara). Dari data-data tersebut, maka penyumbang kebutaan dan gangguan penglihatan terbesar pada penduduk umur di atas 50 tahun di Indonesia adalah katarak yang tidak dioperasi dengan proporsi sebesar 77,7%.²



Gambar1. Prevalensi Kebutaan pada Penduduk Umur \geq 50 Tahun di Indonesia pada Tahun 2014-2016.⁸

Katarak merupakan penyebab utama kebutaan baik pada laki – laki (71,7%) maupun perempuan (81,0%). Katarak atau kekeruhan lensa mata merupakan penyebab utama kebutaan di Indonesia, 77,7% kebutaan disebabkan oleh katarak. *Cataract Surgical Coverage (CSC)* adalah jumlah orang yang telah menjalani operasi katarak dibandingkan dengan jumlah orang yang memerlukan operasi katarak baik di satu atau kedua matanya. Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk yang padat di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan angka CSC yang tinggi yakni sekitar 70-80%. Alasan utama masyarakat Sumatera Utara yang menderita katarak belum dioperasi adalah kendala biaya dan data pasti mengenai prevalensi kebutaan di Provinsi Sumatera Utara belum ada.²

Ada model perencanaan program pencegah kebutaan secara umum yang terdiri dari 9 tahap, terbagi dalam 4 bagian yaitu:^{1,5}

1. Melakukan analisis situasi mengenai kebutuhan dan sumber daya yang ada untuk menilai keadaan layanan kesehatan saat ini.
2. Membuat tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dijabarkan lebih spesifik dalam aktivitas dan sub-aktivitas.
3. Melakukan perencanaan yang jelas dengan membuat *timetable* dan *budgeting*.
4. Melakukan manajemen yang baik serta melakukan monitoring dan pelaporan.

2. Masalah

Katarak merupakan penyebab utama gangguan penglihatan di Indonesia. Sekitar 70 - 80% gangguan penglihatan berat dan kebutaan disebabkan oleh katarak, sehingga prioritas Program Penanggulangan

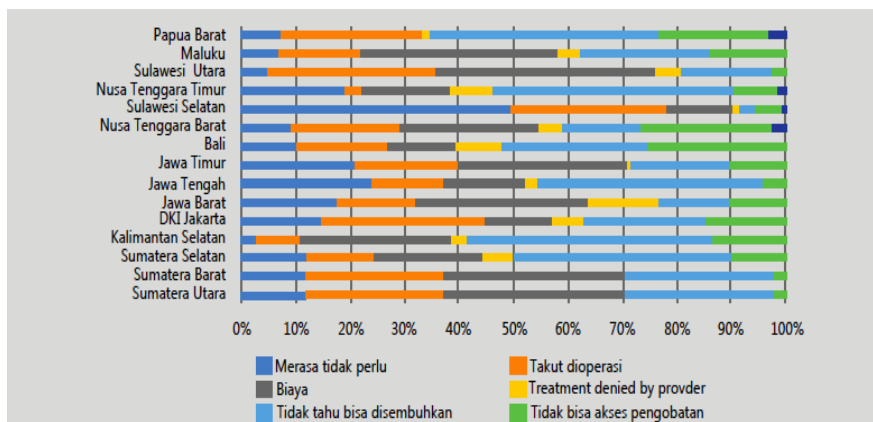
Gangguan Penglihatan pada Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan Di Indonesia Tahun 2017 – 2030 adalah untuk menurunkan prevalensi gangguan penglihatan akibat katarak, dengan tetap melakukan upaya penanggulangan gangguan penglihatan dengan penyebab lainnya.³

Berdasarkan hasil Rapid Assessment of Avoidable Blindness yang dilakukan terhadap 15 Provinsi di Indonesia, Sumatera Utara pada tahun 2016 memiliki angka kebutaan sebesar 1,7%, dengan jumlah kebutaan sebesar 30.252, dan presentase akibat katarak adalah sebesar 77,8%.²

Ada beberapa hal yang dapat menjadi masalah sehingga angka kebutaan katarak masih tetap tinggi, yaitu:

1. Masyarakat

Kurangnya informasi dan edukasi yang diberikann kepada masyarakat tentang apa itu katarak, penyebab, dan akibat kebutaan oleh katarak, sehingga masyarakat masih tidak tahu dan tidak memahami secara baik. Ketakutan untuk menjalani prosedur tindakan operasi masih dialami masyarakat terhadap katarak yang dialaminya. Hal ini dapat dilihat pada data RAAB 2014-2016, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan menemukan ada berbagai faktor seperti faktor takut dioperasi, tidak tahu dapat disembuhkan, merasa tidak perlu dioperasi, sulitnya akses pengobatan yang dapat dijangkau, dan biaya yang dibutuhkan.



Gambar 2. Alasan Belum Mau Operasi Katarak di 15 Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016

Jika dilihat dari gambar 2., maka 3 alasan terbanyak/permasalahan yang kerap dialami bagi penderita katarak yang belum mau dioperasi di Sumatera Utara adalah permasalahan biaya, tidak tahu dapat disembuhkan, dan takut dioperasi

2. Tatakelola

Andil yang masih kurang dilakukan pemerintah dalam meregulasi kebijakan dan aturan mengenai upaya pencegahan, deteksi dini dan tatalaksana kebutaan katarak. Walaupun sudah dibentuk Komite Mata Nasional berdasarkan Keputusan Menkes RI NOMOR HK.02.02MENKES/291/2016.

3. Sumber Daya Manusia

Belum terpenuhi dan terdistribusi dengan baik jumlah dokter spesialis mata yang profesional sesuai dengan jumlah penduduk. Penanganan gangguan penglihatan membutuhkan tenaga dokter spesialis mata, yang dalam *Strategic Plan for Vision 2020: The Right to Sight – Elimination of Avoidable Blindness in the South East Asia Region*, ditargetkan distribusi dokter spesialis mata sebesar 1:50.000 penduduk pada tahun 2020. Untuk Indonesia, sesuai Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan di Indonesia Tahun 2017-2030, ditargetkan distribusi dokter spesialis mata sebesar 1:250.000 penduduk.

4. Akses Layanan

Masih kurangnya pelayanan kesehatan mata yang komprehensif, berkualitas, dan terjangkau yang terselenggara secara rutin dan berkesinambungan pada semua tingkat pelayanan kesehatan. Pada poin ini yang masih menjadi masalah pokok adalah:

- a. Deteksi dini gangguan penglihatan (kebutaan katarak) pada posyandu maupun pelayanan kesehatan lainnya masih dianggap kurang dan di bawah standar kelayakan.
- b. Identifikasi penderita katarak di puskesmas oleh tenaga kesehatan yang akan merujuk ke RS terdekat yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan bedah katarak yang mumpuni.
- c. Jumlah operasi katarak masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah orang yang membutuhkan. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu analisis fasilitas layanan operasi katarak di rumah sakit dan meningkatkan kapasitas Dokter Spesialis Mata dalam melakukan operasi katarak dalam jumlah yang banyak, dapat juga dengan melakukan layanan operasi katarak massal melalui kegiatan bakti sosial sehingga jumlah operasi katarak dapat lebih meningkat.

5. Finansial

Finansial kerap menjadi kendala penuntasan berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia. Kekhawatiran terhadap jumlah biaya yang tidak terjangkau dan ketidakmampuan membayar biaya pelayanan kesehatan yang akan dihadapi membuat masyarakat enggan dan takut untuk mendatangi pelayanan/fasilitas kesehatan.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Secara umum telah disusun strategi melalui tujuh langkah sebagai berikut, yaitu:

1. Mengidentifikasi besarnya permasalahan gangguan penglihatan di masing-masing wilayah.
2. Melakukan komunikasi, menyampaikan informasi, dan edukasi kepada pasien dengan gangguan penglihatan mengenai penyakitnya secara baik dan benar. Sehingga masyarakat paham, dan mengerti mengenai kondisi penyakitnya/katarak. Penderita katarak harus diberikan edukasi bahwa katarak dapat disembuhkan dengan cara operasi, secara singkat tentang penanganan operasi dengan harapan mereka tidak lagi merasa takut dan cemas tentang katarak yang dialami serta operasi yang akan dilakukan.
3. Menganalisis situasi dan pembuatan *Plan of Action* di tiap provinsi dan kabupaten/kota.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk penanggulangan gangguan penglihatan. Hal ini dengan cara meningkatkan distribusi, dan jumlah dokter spesialis mata profesional di seluruh Indonesia. Selain itu tenaga paramedis lain sebagai penunjang diharapkan juga ditingkatkan agar terbentuk kerjasama yang baik dalam upaya penanganan kebutaan katarak.
5. Penguatan sistem informasi dan rujukan. Hal ini bertujuan agar mempermudah penyampaian informasi dan sistem rujukan yang sistematis antarfasilitas kesehatan.
6. Integrasi pelayanan kesehatan mata dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
7. Meningkatkan jumlah tindakan operasi katarak yang dilakukan oleh dokter spesialis mata sehingga angka jangkauan katarak menjadi lebih luas.

Penguatan sistem pelayanan kesehatan sangat ditentukan juga dengan terjaminnya akses seluruh masyarakat pada pelayanan kesehatan. Akses masyarakat pada pelayanan kesehatan sangat menentukan keberhasilan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Selain 7 (tujuh) strategi di atas, dapat juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat suatu slogan yang dikenal dengan Slogan **LIHAT**, yaitu sebuah singkatan dari:

L: Lakukan pemeriksaan mata melalui kegiatan posyandu

I: Identifikasi gangguan tajam penglihatan oleh kader

H: Hitung jari dengan jarak 6 (enam) meter

A: Antarkan ke fasilitas kesehatan (rujuk) bila tidak bias hitung jari pada jarak 6 meter

T: Terapi operasi jika didiagnosa katarak

Dalam menghadapi permasalahan finansial yang kerap dialami masyarakat, pemerintah dan berbagai NGO telah banyak berupaya untuk membantu masalah finansial bagi pasien penderita katarak dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan secara gratis atau jaminan, seperti pada kegiatan bakti sosial ataupun melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga masalah finansial ini tidak menjadi kendala bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pengobatan dan tindakan operasi katarak

4. Rencana Tindak Lanjut

Berbagai daya dan upaya dilakukan pemerintah guna menanggulangi terjadinya kebutaan akibat katarak. Beberapa diantaranya yaitu:³

1. Meningkatkan jumlah, kualitas, dan cakupan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait katarak secara cepat dan optimal.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas SDM bagi kader di masyarakat baik yang berada di Posyandu maupun Pos Binaan Terpadu (Posbindu)
2. Meningkatkan jumlah, kualitas, dan cakupan deteksi dini dan operasi katarak secara cepat dan optimal.
Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan khusus bagi kader Posbindu maupun Posyandu tentang gejala klinis katarak maupun dengan melakukan slogan "LIHAT"
3. Mendorong pelaksanaan penanggulangan katarak di setiap daerah secara komprehensif dan inklusif dengan mempertimbangkan aspek demografi dan geografi serta prevalensi kebutaan akibat katarak.
4. Meningkatkan jumlah, kualitas, dan cakupan rujukan dan operasi katarak secara cepat dan optimal mulai dari tingkat masyarakat, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), hingga ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
5. Membuat model sistem penanggulangan katarak yang disesuaikan dengan sumber daya di masing-masing Kabupaten/Kota.

Di provinsi Sumatera Utara sendiri masih terus tetap digalakkan berbagai upaya dalam menanggulangi kebutaan katarak, dikarenakan tingginya prevalensi kebutaan katarak yang terjadi. Berbagai program kerja dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang berkerjasama dengan berbagai instansi tetap dilakukan guna menurunkan prevalensi kebutaan katarak. Salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan deteksi dini massal dan bakti sosial operasi katarak secara gratis yang dilakukan secara periodik yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Persatuan Dokter Mata Indonesia cabang Sumatera Utara. Oleh karena itu, maka diharapkan dengan dilakukannya berbagai perencanaan dan pelaksanaan yang baik, maka angka kebutaan di Indonesia khususnya angka kejadian kebutaan oleh karena katarak di Provinsi Sumatera Utara dapat diturunkan.

5. Kesimpulan dan Saran

Katarak merupakan penyebab kebutaan tertinggi di Indonesia, walaupun demikian katarak juga merupakan penyebab kebutaan yang dapat dicegah. Oleh sebab itu berbagai upaya dan kebijakan harus dilakukan untuk dapat mengurangi angka kebutaan oleh katarak dan juga menaggulangi pencegahan kebutaan oleh katarak .

Penanggulangan gangguan penglihatan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sektor kesehatan namun juga membutuhkan peran lintas sektor, organisasi profesi dan masyarakat, termasuk sektor swasta dan lembaga non pemerintah (NGO). Peranan lintas sektor seperti organisasi profesi, sektor swasta, dan NGO tersebut terkoordinasi melalui keanggotaan di Komite Mata Nasional.

Daftar Pustaka

1. Hutabarat DA, Syumarti, Halim A. Panduan Sistem Kesehatan Mata Area Rural. Pusat Mata Nasional. Rumah Sakit Mata Cicendo. Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran. Bandung. 2020.
http://perpustakaanrsmcicendo.com/opac1/index.php?p=show_detail&id=6522
2. Ismandari F. Infodatin Situasi Gangguan Penglihatan. Kementerian Kesehatan RI Pus Data dan Inf [Internet]. 2018;11. Available from: <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-Gangguan-penglihatan-2018.pdf>
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peta Jalan Penanggulangan gangguan penglihatan di Indonesia Tahun 2017-2030 [Internet]. 2019. 2018. 1–38 p.
Available from: <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/buku-peta-jalan-penanggulangan-gangguan-penglihatan-di-indonesia-tahun-2017-2030>
4. Malla OK. Vision 2020: the right to sight. Kathmandu Univ Med J (KUMJ). 2004;21:2.
5. Dyer G. Planning for VISION 2020 at the District Level. Iseh [Internet]. 2006;1–122.
Available from: https://www.iapb.org/wp-content/uploads/Planning-for-VISION-2020-at-the-District-Level_A-Manual.pdf.
6. IAPB Vision Atlas. <https://atlas.iapb.org>.
7. Bourne RRA, Flaxman SR, Braithwaite T, Cicinelli M V., Das A, Jonas JB, et al. Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Glob Heal*. 2017;5(9):e888–97.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil Survey Rapid Assessment of Avoidable Blindness Tahun 2014-1016 di Indonesia

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, M.Ked(Oph), Sp.M(K) adalah dosen tetap Ilmu Kesehatan Mata pada Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara. Dilahirkan di Medan pada tanggal 17 April 1976.

Menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Bhayangkari Medan (1982), pendidikan dasar di SD Bhayangkari Medan (1988), Pendidikan Menengah Pertama pada SMP Negeri 1 Medan (1991), dan Pendidikan Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Medan (1994). Pendidikan S1 dan Profesi Dokter diselesaikan di Fakultas Kedokteran USU pada tahun 2000. Pada tahun 2005 menyelesaikan Pendidikan Spesialis pada program studi Ilmu Kesehatan Mata pada Fakultas Kedokteran USU. Pada tahun 2010 Mengikuti pendidikan Fellowship Rekonstruksi, Okuloplasti, dan Onkologi, RSUD. Dr. Soetomo, Universitas Airlangga, Surabaya. Tahun 2012 menyelesaikan pendidikan jenjang Magister (S-2) pada program studi Magister Kedokteran Klinis, dan kemudian menyelesaikan program Doktor (S-3) pada program studi Doktor Ilmu Kedokteran di Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara. Pada tahun 2016 berhasil memperoleh gelar Konsultan pada Seminat Rekonstruksi, Okuloplasti dan Onkologi dari Kolegium Ophthalmology Indonesia.

Jabatan yang diemban pada saat ini sebagai Ketua Program Studi Magister Kedokteran Klinis, FK USU periode tahun 2017-2021. Aktif dalam berbagai organisasi profesi kedokteran seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI) dan Indoneisa Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (INASOPRS).

Aktif melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat) serta aktif mempublikasikan karya ilmiah dan hasil penelitian pada Jurnal Internasional Bereputasi dan Jurnal Nasional Terakreditasi.

Penghargaan yang pernah diterima penulis adalah Satyalancana Karya Satya X Tahun pada tahun 2019 dan Dosen Berprestasi 1 Tingkat Fakultas Kedokteran USU pada tahun 2019.

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Peningkatan Kualitas Nakes Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak

Sarma N Lumbanraja

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan ibu selama kehamilan merupakan hal penting bagi ibu hamil maupun bayi yang dikandungnya. Upaya pelayanan tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap kondisi buruk yang dapat terjadi pada seorang ibu hamil (Departemen kesehatan (Depkes) RI, 2015). Berbagai kondisi dapat terjadi pada seorang ibu hamil. Adapun kondisi paling buruk yang dapat terjadi pada seorang ibu hamil adalah kematian. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dari tingkat kesehatan suatu daerah. Dengan kata lain, tingginya angka kematian ibu, menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan di daerah tersebut (Agustini, et al, 2013). Data dari The World Bank (2015), menunjukkan AKI pada tahun 2012 sebesar 148/100.000 kelahiran hidup, ditahun 2013 menjadi 140/100.000 kelahiran hidup, kemudian tahun 2014 menurun menjadi 133/100.000 kelahiran hidup, tahun 2015 menurun menjadi 126/100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan evaluasi Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia masih pada posisi 305 per 100.000 kelahiran. Padahal target yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 102 per 100.000 kelahiran. Kematian ibu hamil dan bersalin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan dan pengetahuan, sosial budaya, sosial ekonomi, geografi dan lingkungan, aksesabilitas ibu pada fasilitas kesehatan serta kebijakan makro dalam kualitas pelayanan kesehatan. Adapun penyebab dasar kematian ibu, dapat digunakan model 3 terlambat yang terdiri atas 1) Terlambat mengenal bahaya dan mengambil keputusan merujuk ke fasilitas kesehatan; 2) Terlambat mencapai fasilitas pelayanan rujukan; dan 3) Terlambat memperoleh pelayanan adekuat di fasilitas rujukan.

Saat ini semua negara di dunia menghadapi virus mematikan yaitu *corona virus diseases (covid-19)*. WHO menetapkan status covid-19 sebagai pandemi. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada manusia tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Masa inkubasi penyakit ini berkisar antara 5-6 hari, paling lama 14 hari telah merenggut nyawa jutaan manusia di dunia. Adapun gejala penyakit ini yaitu sesak napas, demam dan disertai batuk dapat menular kepada siapapun yang kontak dengan penderita. Di Indonesia, Covid-19 tercatat dari awal Maret 2020 dan terus menyebar hingga saat ini tercatat sebanyak 410.088 terkonfirmasi terinfeksi Covid-19 dengan korban meninggal sebanyak 13.869 jiwa (Satgas Covid-19, 2020). Di Provinsi Bengkulu, tercatat

sebanyak 1.081 terkonfirmasi telah terinfeksi covid-19. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Bengkulu lebih memperketat pelaksanaan pencegahan penularan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat antara lain menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Masa pandemi ini menyebabkan masyarakat enggan berkunjung ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Masyarakat akan pergi ke pelayanan kesehatan jika merasa kesehatannya sudah tidak dapat diobati sendiri. Hal ini sangat beresiko pada kondisi kesehatan ibu hamil disebabkan selama menjalani kehamilan, seorang ibu hamil harus memeriksakan kondisi kehamilannya minimal 4 kali selama kehamilan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu adalah pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas yaitu pemeriksaan kehamilan (Depkes RI, 2014). Selain dari pada itu, peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang hal yang terkait kehamilan dan persalinan perlu diberikan. Penelitian yang dilakukan oleh Suwanti (2014) menyebutkan bahwa ada hubungan antara frekuensi kunjungan ANC dengan pemilihan penolong persalinan karena semakin sering ibu melakukan kunjungan ANC maka lebih mengetahui kondisi kehamilannya serta dapat memilih tenaga kesehatan yang akan menolong saat persalinannya nanti. Penelitian yang dilakukan oleh Sulastris (2014) mengatakan bahwa kunjungan antenatal yang baik dan rutin dapat mendeteksi secara dini komplikasi yang mungkin muncul selama kehamilan, dalam hal ini membuktikan bahwa kunjungan antenatal yang tidak adekuat selama kehamilan menjadi faktor dominan persalinan *sectio caesarea*. Penelitian Utami (2013), menyebutkan tidak ada hubungan antara kunjungan ANC dengan kelahiran premature, karena kualitas pelayanan ANC yang kurang optimal. Pada tahun 2020 merupakan masa sulit bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan seseorang untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan dan seminimal mungkin untuk tidak ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak buruk bagi ibu hamil mengingat ibu hamil perlu melakukan pemeriksaan minimal 3x selama kehamilan dan perlu mendapatkan pengetahuan tentang kehamilan terutama pada ibu primigravida (kehamilan pertama).

Lebih dari setengah juta wanita berusia 15–49 tahun meninggal karena kasus yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan, dan menjadi penyebab utama kematian wanita pada kelompok usia tersebut. Hampir semua (99%) kematian ibu terjadi di negara sedang berkembang. Penyebab dari mayoritas kasus kematian ibu sesungguhnya dapat dicegah, dan diperkirakan lebih dari 40% wanita hamil memiliki risiko kelainan obstetri yang tidak terlalu fatal. Sekitar 15% kelahiran terjadi komplikasi karena keadaan fatal yang membutuhkan perawatan emergensi (WHO, 2001). Oleh karena tingginya kasus serta luasnya dampak dari kematian ibu maka kematian ibu menjadi salah satu tujuan (goal) dari pembangunan milenium atau Milenium Development Goals (MDGs), menjadi tujuan yang ke-5 untuk meningkatkan

kesehatan ibu (Bappenas, 2012). Saat ini Indonesia mengalami kegagalan dalam pencapaian target penurunan angka kematian ibu. Sejak tahun 1994 telah terjadi penurunan angka kematian ibu secara bertahap dari 390 per 100 000 kelahiran hidup menjadi 334 per kelahiran hidup pada tahun 1997, dan semakin turun pada tahun 2007 menjadi 228 per 100 000 kelahiran hidup (Bappenas, 2012), dan terjadi peningkatan drastis pada tahun 2012. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 angka kematian ibu melonjak sangat signifikan menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup. Mencermati fakta mengejutkan mengenai tingginya angka kematian ibu di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kita apa yang menjadi penyebabnya? Bagaimana kontribusi berbagai program di sektor kesehatan selama ini dijalankan? Fenomena melonjaknya angka kematian ibu terutama dijumpai di beberapa daerah di Indonesia

2. Masalah

Angka kematian ibu di Sumatera Utara sepanjang 2020 sebanyak 187 kasus dari 299.198 sasaran lahir. Sehingga angka kematian ibu tahun 2020 sebesar 65,50 per 100.000 kelahiran hidup. Ini berdasarkan laporan pemantauan wilayah setempat (PWS) kesehatan ibu dan anak (KIA). Sementara untuk jumlah kasus kematian bayi sepanjang tahun 2020 sebanyak 715 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup, sehingga angka kematian bayi 2020 sebesar 2,39 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun jumlah kasus kematian ibu dan anak sepanjang tahun 2020 masih tinggi, jumlah tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah kasus kematian pada tahun 2019. Untuk kasus kematian ibu pada 2019 sebanyak 202 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup. Sementara kasus kematian bayi sebanyak 790 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup. Tingginya AKI di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor yang mendasari timbulnya resiko maternal diantaranya yaitu status gizi, higiene, sanitasi, kesadaran hidup sehat, jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan, status ekonomi, pendidikan, ketidaktahuan, tradisi sosial budaya dan geografis, status reproduksi seperti kehamilan resiko tinggi yang tidak disadari masalahnya oleh ibu hamil juga mendasari timbulnya resiko maternal.(Roeshadi, 2006) Selain itu, banyak komplikasi yang memperparah seperti keterlambatan penanganan kasus emergensi/komplikasi maternal ataupun Trias Tiga Terlambat yang memperbesar angka kematian ibu, yaitu terlambat memutuskan untuk mencari pertolongan bagi kasus kegawatdaruratan obstetri, terlambat mencari tempat rujukan yang disebabkan oleh keadaan geografis dan masalah transportasi dan yang terakhir yaitu terlambat memperoleh penanganan yang adekuat di tempat rujukan karena kurangnya sumber daya dan fasilitas kesehatan pada tempat rujukan.(Roeshadi, 2006). Ada juga faktor keempat terlalu yaitu terlalu muda (35 tahun), terlalu dekat

jaraknya (2 tahun) dan terlalu banyak anaknya (>3 tahun).(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015)

3. Strategi Pemecahan Masalah

Salah satu terobosan baru yang dapat memicu peningkatan indikator persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (proksi) dalam upaya menurunkan AKI yaitu dengan adanya pelatihan tenaga kesehatan melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). P4K adalah salah satu upaya dalam penurunan AKI dengan melalui tehnik penempelan stiker di rumah ibu hamil, tehnik ini berguna untuk melihat perkembangan ibu hamil secara intensif, sehingga apabila teridentifikasi kesakitan yang dapat menyebabkan kematian ibu, akan dapat dicegah sedini mungkin. Bidan berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan P4K yang dapat meningkatkan komunikasi persuasif masing – masing di wilayah kerjanya. Hal ini berguna untuk mewujudkan kerjasama antara Bidan dengan ibu hamil, keluarga serta masyarakat setempat agar mampu untuk meningkatkan keterlibatan para masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan perempuan. Salah satu program dalam P4K yaitu dengan menggunakan stiker. Dimana fungsi dalam penempelan stiker ini untuk mendukung keikutsertaan suami, keluarga dan masyarakat setempat untuk dapat berpartisipasi dalam merencanakan suatu persalinan yang aman bagi ibu hamil guna untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Program ini juga diharapkan mampu untuk dapat meningkatkan persiapan dalam menghadapi suatu komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan maupun melahirkan serta merencanakan pemakaian alat/ obat kontrasepsi pasca persalinan (Kemenkes RI, 2017) Komponen penyelenggaraan P4K memiliki 3 pokok kegiatan yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak (KIA), pelayanan siap, antar dan jaga (SIAGA) dari para masyarakat serta dari pendukung lainnya seperti dari pihak pemerintah. Beberapa kegiatan dalam P4K untuk masyarakat meliputi penempelan dengan stiker, persiapan calon donor darah, persiapan tabungan ibu bersalin (tabulin) dan danasosial bersalin (dasolin), serta persiapan transportasi/ ambulan desa (Kemenkes RI, 2009). P4K diharapkan dapat memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan diri selama masa kehamilan, proses persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan terampil, dan pemeriksaan pasca nifas serta memberikan bayi pemeriksaan termasuk skrining status imunisasi lengkap pada bayi. Seorang ibu harus memperoleh motivasi dalam melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) dan memberikan ASI eksklusif paling singkat selama 6 bulan (Kemenkes RI, 2010). Untuk mencapai tujuan dari P4K maka suatu organisasi harus mampu melaksanakan manajemen dengan baik. Dari sisi manajemen, ada beberapa fungsi manajemen yang harus terlaksanakan agar nantinya dapat mencapai tujuan dari organisasi. Fungsi manajemen yaitu mampu untuk mengorganisir, memberikan pengarahan kerja, mengkoordinir untuk melaksanakan rencana

yang telah ditetapkan, serta mampu untuk melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan kerja. Kegagalan dari suatu program terjadi akibat dari tidak adanya suatu perencanaan yang matang, sehingga dalam pencapaiannya banyak masalah yang ditimbulkan seperti anggaran yang dibutuhkan cukup besar serta tenaga yang digunakan tidak sesuai dengan kemampuannya. Hal ini terjadi karena fungsi-fungsi manajemennya tidak berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

World Health Organization (2015), mengemukakan dalam penelitiannya bahwa ada unsur BPCR (Birth Preparedness and Complications Readiness) yaitu tempat persalinan yang diinginkan oleh ibu; penolong persalinan yang diinginkan, tempat persalinan, dana, persediaan dan bahan yang diperlukan untuk membawa ke fasilitas, pendamping persalinan, dukungan keluarga dalam menjaga rumah dan anak-anak lain saat ibu itu pergi, transportasi, dan identifikasi donor darah. Upaya ini dilakukan oleh tenaga kesehatan dan masyarakat untuk meminimalkan mortalitas dan morbiditas dalam bidang kesehatan. Dengan pelaksanaan unsur BPCR dengan baik, hasil yang diharapkan juga akan sesuai dengan tujuan. (Herlina, 2017) Berdasarkan atas hasil penelitian Hasmawati dkk (2014) di Kota Ambon, menunjukkan bahwa implementasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) oleh bidan di Kota Ambon belum berjalan baik. Disebutkan belum tersedianya suatu kebijakan yang menunjang dari daerah yang dapat mendukung P4K, pemberian informasi kepada masyarakat juga masih kurang, tenaga bidan, sarana dan anggaran juga belum memadai terhadap kelangsungan program P4K, lemahnya manajemen kontrol serta belum tersedianya SOP dari pihak Dinas Kesehatan Kota Ambon. Hasil penelitian Indah Retnowati dan Asih Dwi Astuti (2010), menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) oleh ibu hamil dengan upaya pencegahan komplikasi kehamilan di Puskesmas Sidorejo Kidul Salatiga. Selanjutnya, hasil penelitian Silvia Eka Yula Kushadinasari dkk (2016), menunjukkan bahwa bidan telah melaksanakan P4K sesuai dengan indikator P4K. Tetapi dilihat dari segi sarana dan prasarana, peran bidan belum maksimal, karena fasilitas masih kurang memadai.

Puskesmas merupakan suatu unit pelayanan kesehatan di tingkat pertama yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik, aman, cepat, murah, dan efisien. Puskesmas juga dapat menyelenggarakan suatu pelayanan dalam bidang promotif dan preventif, sehingga derajat kesehatan yang jauh lebih baik dapat tercapai. Salah satu cara meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah dengan menerapkan suatu program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K). (Kemenkes RI, 2009).

Di Indonesia sendiri mempunyai target untuk Puskesmas yang melaksanakan P4K sebanyak 89,75%. Diketahui bahwa dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 26 Provinsi yang sudah mencapai target 100% dan 8 Provinsi yang belum mencapai target. Salah satu Provinsi yang telah

mencapai target dalam pelaksanaan P4K di Puskesmas adalah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk Daerah dengan capaian P4K terendah yaitu dari Daerah Provinsi Papua Barat, Papua dan Kalimantan Barat (Direktorat Kesga, 2017)

4. Rencana Tindak Lanjut

Pendekatan Model Sosioekologi

Model sosioekologi disingkat (MSE) dikembangkan berdasarkan teori atau pendekatan yang telah ada di beberapa disiplin keilmuan, seperti ilmu politik, sosiologi, psikologi dan komunikasi. Dengan demikian MSE merupakan suatu pendekatan komprehensif di bidang kesehatan masyarakat, yang tidak hanya ditujukan untuk melihat faktor risiko pada individu, tetapi juga aspek norma, kepercayaan dan sistem sosial ekonomi (CDC, 2002). Ada dua konsep kunci dalam pendekatan ini: 1) perilaku memengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi yang bersifat multi level (bertingkat); 2) membentuk perilaku dan perilaku yang dibentuk oleh lingkungan sosial yang menunjukkan hubungan kausal bersifat timbal balik (*reciprocal causation*). MSE menekankan interaksi antara dan saling ketergantungan dari berbagai faktor di dalam dan antarlevel perilaku, dan memperhatikan bahwa sebagian besar tantangan di bidang kesehatan masyarakat terlalu kompleks untuk dipahami dengan *single-level analysis* (Stokols, 1996). Dalam menganalisis kebutuhan ini adalah individu tidak dipandang sebagai bagian yang terpisah dari suatu unit sosial yang lebih besar di mana mereka tinggal, mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dan meningkatkan perubahan perilaku yang berkelanjutan (Townsend & Foster, 2002).

Model sosio ekologi berfokus pada hubungan antara individu dan lingkungannya. Asumsi dasarnya adalah bahwa suatu pendekatan komprehensif lebih efektif dari pada pendekatan satu level. Lima level dalam model sosio ekologi yang memengaruhi perilaku kesehatan adalah faktor individu (*intrapersonal*), proses *interpersonal*, faktor institusi, faktor komunitas dan kebijakan publik. Model sosio ekologi secara skematis diperlihatkan pada gambar 4. Dalam aplikasinya MSE dapat digunakan untuk pendekatan di berbagai bidang dalam lingkup kesehatan masyarakat, untuk menganalisis perilaku kesehatan, seperti dalam menganalisis faktor obesitas pada anak (Kumanyika et al., 2002), aktivitas fisik (Mehtala et al., 2014) ataupun promosi perilaku makan sehat (Townsend & Foster, 2011). Model ini menyediakan kerangka berpikir yang sangat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang berbagai faktor dan hambatan yang berdampak pada perilaku sehat.

Pendekatan *Continuum of Care*

Merupakan konsep lintas tahapan dalam siklus hidup, serta lintas dari rumah tangga sampai rumah sakit. Lintas tahap siklus hidup, terutama dari masa prakonsepsi, konsepsi hingga pascapersalinan. Konsep ini sangat

penting diterapkan untuk mengatasi masalah kesehatan pada masa reproduksi, masa kehamilan, persalinan dan masa nifas (pascapersalinan). Konsep *continuum of care* diharapkan dapat memenuhi tantangan dalam meningkatkan kesehatan dan survival dari ibu, bayi baru lahir dan anak (Sines et al., 2006). Ada dua dimensi dari *continuum of care* yaitu dimensi waktu dan dimensi tempat. Dimensi waktu dari continuum of care adalah dengan memperhatikan kesehatan maternal, bayi baru lahir, dan anak (MNCH). Sedangkan dimensi tempat dari continuum of care adalah dari rumah tangga hingga rumah sakit (HHCC). Tujuan dari pendekatan HHCC adalah untuk meyakinkan ketersediaan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk ibu hamil dan bayi baru lahir yang tersedia mulai dari rumah, masyarakat, pusat pelayanan kesehatan dasar, hingga ke rumah sakit. Alur atau link dalam suatu sistem pelayanan kesehatan (*primaryhealth-care system*) yang terintegrasi dari rumah, komunitas, jangkauan dan pelayanan berbasis fasilitas (*facility-based care*). Tentunya alur kontinum ini difokuskan untuk MNCH. Konsep *continuum of care* MNCH berdasarkan asumsi bahwa kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi baru lahir dan anak-anak, saling terkait satu sama lain dan harus ditangani dalam kesatuan.

Model ini akan melibatkan ketersediaan dan akses pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan reproduksi untuk (a) wanita dari remaja hingga hamil, melahirkan dan pascamelahirkan; (b) untuk bayi baru lahir hingga masa kanak-kanak, hingga masa dewasa muda (Sines et al., 2006; Unicef, 2014). Konsep pelayanan kesehatan dari hulu ke hilir adalah mengacu pada konsep dan pendekatan continuum of care ditinjau dari dimensi tempat. Pelayanan atau Intervensi di hulu merupakan semua bentuk pelayanan di level rumah tangga dan masyarakat seperti program KB, perbaikan gizi, wanita, dan social ekonomi. Intervensi di hilir adalah bagaimana meningkatkan mutu pelayanan klinik untuk ibu dan anak di rumah sakit. Konsep pelayanan kesehatan dari hulu ke hilir secara sederhana dapat digambarkan secara skematis seperti pada gambar 5. Menurut Trisnantoro (2011) strategi intervensi untuk menurunkan angka kematian ibu harus berdasarkan analisis kebijakan, dilakukan kegiatan untuk mencari kebijakan di masa mendatang (*analysis for policy*). Prinsip yang dipergunakan adalah: Menggunakan pendekatan dari hulu ke hilir. Kebijakan dan program KIA dapat dibayangkan sebagai sebuah model hulu yang berisikan program-program preventif dan promotif yang banyak menggunakan pendekatan lintas sector (*One Health*) dan determinan social. Hilirnya adalah kegiatan-kegiatan klinis. Menggunakan jumlah kematian absolut sebagai indikator kinerja program KIA. Angka *Rates* akan dipergunakan sebagai *cross-check* dan dilakukan dalam dua pendekatan: (1) berdasarkan data dari angka absolut; dan (2) berdasarkan data survey. Menggunakan filosofi utama dalam kebijakan KIA yaitu mengembalikan "*sense of urgency*" dan adanya "peningkatan adrenalin" dalam program. Untuk itu diperlukan penggunaan surveilans-respon kematian ibu dan anak. Kematian ibu dan anak yang tidak perlu (*avoidable*) harus dapat dicegah. Memperbaiki perencanaan dan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan pendekatan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*).

Preconception Care dan Antenatal Care

Pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, hingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Pemeriksaan kehamilan merupakan pemeriksaan ibu hamil baik fisik dan mental serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas, sehingga keadaan mereka post partum sehat dan normal, tidak hanya fisik tetapi juga mental. Kunjungan ANC adalah kunjungan ibu hamil ke bidan atau dokter sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil untuk mendapatkan pelayanan/asuhan antenatal. Pada setiap kunjungan ANC, petugas mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kondisi ibu melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan diagnosis kehamilan intrauterine serta ada tidaknya masalah atau komplikasi. Konsep tentang preconception care baru didiskusikan sejak Juni tahun 2005, ketika US *Center for Disease Control* (CDC) membentuk *the Select Panel on Preconception Care* yang bertugas untuk mengembangkan konsep dan strategi perawatan kesehatan prakonsepsi. Area kerja dari panel ini meliputi aspek klinis, kesehatan masyarakat, kebijakan dan financial, konsumen, dan surveillance dan riset (Curtis, 2008; Jack et al., 2008; Coonrod et al., 2008; Moos et al., 2008). Mengacu definisi dari *preconception care* sebagai “*a series of intervention that aim to identify and modify biomedical, behavioral, and social risk to women’s health and couple before conception*” (WHO, 2013; Curtis, 2008), maka dengan menekankan pemeriksaan kesehatan prakonsepsi diharapkan seorang wanita yang menginginkan atau merencanakan kehamilan akan mencapai derajat kesehatan yang baik sejak sebelum hamil, sehingga akan mendapatkan hasil kehamilan (*pregnancy outcomes*) yang berkualitas. Dalam kaitannya dengan preconception care, Moos et al (2008), tidak hanya menekankan aspek kesehatan (*maternal preconception health*), tetapi lebih jauh lagi menerapkan konsep kesejahteraan sebelum hamil (*preconception wellness*). Aspek klinis dalam pemeriksaan prakonsepsi meliputi pemberian suplementasi, terutama suplemen mikronutrient (Jack et al., 2008), dan pelayanan imunisasi (Coonrod et al., 2008). Bahkan WHO merekomendasikan suatu pemeriksaan yang holistik mencakup pemeriksaan fertilitas, pemeriksaan kelainan genetik bahkan penggunaan alkohol dan rokok (WHO, 2013). Konsep pemeriksaan prakonsepsi seperti yang direkomendasikan oleh US-CDC maupun WHO tentu saja tidak dapat seluruhnya dilaksanakan di negara sedang berkembang, terutama deteksi kelainan genetik kaitannya dengan risiko penyakit, karena di negara sedang berkembang masih sangat terbatas sumber daya alat dan sumber daya manusia.

5. Kesimpulan dan Saran

Perlunya peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan penyengseran perlu dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan janin di Indonesiam khususnya pada masa pandemia dimana adanya keterbatasan dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak. penerapan P4K menjadi penting untuk diterapkan kembali yaitu: 1). Fungsi Planning/ perencanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K); 2) Fungsi organizing/ pengorganisasian program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K); 3) Fungsi actuating/ penggerakkan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) ; 4) Fungsi *controlling*/ pengawasan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K). Selain itu konsep sosio ekologi perilaku sehat dan *continuum of care* yang telah diuraikan sebelumnya. Penerapan kedua konsep tersebut dipadukan sebagai satu kesatuan pendekatan yang bersifat komprehensif dalam mengatasi masalah tingginya angka kematian ibu di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2012. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011. Jakarta. Bappenas.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Jakarta. BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2013. Jawa Timur dalam Angka. Surabaya. BPS.
- Bale, J.R., Stoll, B.J., Lucas, A.O (Eds). 2003. Improving Birth Outcomes. Washington DC. National Academic Press.
- Black, R.E., Allen, L.H., Bhutta, Z.A., Caufield, L.E., De Onis, M., Ezzati, M., Rivera, J. 2008. Maternal and child under nutrition: Global and regional exposures and health consequences. The Lancet Series on Maternal and Child Undernutrition 1. Lancet 2008, Publish on line Jan 17. doi:10.1016/S0140- 6736(07)61690-0.
- Braveman, P., Gruskin, S. 2003. Defi ning equity in health. J Epidemiol Community Health 2003;57: 254–258.
- Center for Diseases Control (CDC-US). 2002. The Ecological Model and Risk/ Protective Factors in Preventing Child Abuse and Neglected. World Report on Violence and Health. Coonrod, D.V., Jack, B.W., Bogger, K.A., et al. The clinical content of preconception care: immunizations as part of preconception care. Am J Obstet Gynecol. 2008;(Suppl Dec): S290-95.
- Curtis, M.G. Preconception care:a clinical case of “think globally, act locally”. Am J Obstet Gynecol. 2008;(Suppl Dec): S257-258.

- Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 2013. *Profil Kesehatan Kota Surabaya 2012*. Surabaya. Dinkes Kota Surabaya.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2013. *Profil Kesehatan Jawa Timur 2012*. Surabaya. Dinkes Prov. Jatim.
- Global Health Europe. 2009. Inequity and inequality in health. <http://www.globalhealtheurope.org/index.php/resources/glossary/values/179-inequityand-inequality-in-health>. (sitasi tanggal 5 Mei 2014)
- Jack, B.W., Atrash, H., Bickmore, T., Johnson, K. The future of preconception care: a clinical perspective. *Women Health Issues*. 2008;18(6 Suppl): S19-25.
- Jack, B.W., Atrash, H., Coonrod, D.V., Moos MK, O'Donnell J, Johnson K. The clinical content of preconception care: an overview and preparation of this supplement. *Am J Obstet Gynecol*. 2008;(Suppl Dec): S266-79.
- Kawachi, I., Subramanian, S.V., Almeida-Filho, N. 2002. A glossary for health inequalities. *J Epidemiol Community Health* 2002;56: 647–652.
- Kemenkes, RI. 2013a. *Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta.
- Kemenkes, RI. 2013b. *BPJS Kesehatan*, Jakarta.
- Kumanyika, S., Jeffery, R.W., Morabia, A., et al. 2002. Public Health Approaches to the Prevention of Obesity (PHAPO) Working Group of the International Obesity Task Force (IOTF). Obesity prevention: the case for action. *Int J Obes Relat Metab Disord* 93, 1168–1173.
- Mehtälä, M.A.K., Sääkslahti, A.K., Inkinen, M.E., Poskiparta, T. 2014. A socio-ecological approach to physical activity interventions in childcare: a systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*; 2014; 11: 22.
- Moos, M.K., Dunlop, A.L., Jack, B.W., et al. Healthier women, healthier reproductive outcomes: recommendations for routine care of all women of reproductive age. *Am J Obstet Gynecol*. 2008;(Suppl Dec): S280-89.
- Moos, M.K. From concept to practice: reflections on the preconception health agenda. *J Womens Health*. 2010;19: 567–7.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013.
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). 2007. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). 2010. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). 2013. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Sines, E., A, Tinker, J, Ruben. 2006. The Maternal–Newborn–Child Health Continuum of Care: A Collective Effort to Save Lives. *Bulletin Save The Children*. March 2006: 1–6.

- Stokols, D. 1996. Translating social ecological theory into guidelines for community health promotion. *Am J Health Promot* 10, 282–293.
- Townsend, N., C, Foster. 2011. Developing and applying a socio-ecological model to the promotion of healthy eating in the school. *Public Health Nutrition*: 1–8. doi:10.1017/S1368980011002655.
- Trisnantoro, L. 2011. Strategi Luar Biasa untuk Penurunan Kematian Ibu dan Bayi *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* Vol. 14, No. 4 Desember 2011: 175-176.
- Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Whitehead, M. 1992. The concepts and principles of equity in health. *Int J Health Serv* 1992; 22: 429–445.
- World Health Organization (WHO). 1996. Revised 1990 Estimates of Maternal Mortality: A New Approach by WHO and UNICEF. Geneva: WHO.
- World Health Organization (WHO). 1999. Reduction of Maternal Mortality: A Joint WHO/UNFPA/UNICEF/World Bank Statement. Geneva: WHO.
- World Health Organization (WHO). 2001. Maternal mortality in 1995: Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA. Geneva: WHO.
- World Health Organization ((WHO). 2013. Meeting to develop a global consensus on preconception care to reduce maternal and childhood mortality and morbidity. Meeting report. Geneva: WHO.

Biodata Penulis



Prof. Dr.dr. Sarma Nursani Lumbanraja, M. Ked (OG), Sp. OG(K)-KFM, Lahir di Pakpahan pada tanggal 30 Juli 1959. Pada Tahun 1978 hingga 1985 mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Tahun 1994 hingga 1997 menjalani pendidikan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di FK USU. Selanjutnya, pada tahun 2000 hingga 2002 melanjutkan pendidikan sub spesialis fetomaternal di FK UI kemudian menjalani program pendidikan Doktor di FK USU pada tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 1986 hingga 1993, bertugas sebagai dokter di Puskesmas dinas Kesehatan Kotamadya Medan. Menjabat sebagai staf SMF Obgyn di RSUD Pirngadi Medan pada tahun 1998 hingga 2009 dan kini aktif bertugas sebagai sekretaris program studi di SMF/Departemen Obgin RSUP H Adam Malik Medan.

Pembangunan Manusia Dalam Daya Kompetitif

Suwardi Lubis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Pembangunan manusia sangat berkaitan dengan pendidikan, karena pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam membangun manusia yang mampu berkompetitif.

Pendidikan memiliki orientasi dalam pembangunan manusia yaitu orientasi individu yang berperan dalam pembentukan insan terdidik melalui proses pengembangan potensi diri. Potensi diri ini merupakan pemahaman diri, yang berupaya mengadaptasi dan partisipasi dalam lingkungan dan perubahan (inivator), sehingga individu memiliki keunggulan dalam kompetitif sehingga terwujudnya transformasi sosial. Orientasi Masyarakat, pendidikan memiliki peran utama membentuk masyarakat antara lain agen konservatif (innovation), dan agen perubahan (*agent of change*). Sebagai agen konservatif, pendidikan secara operasional praktis melalui kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada penanaman dan pelestarian nilai-nilai sosial-budaya asli (*indigeneous*) yang memiliki ketangguhan dan ketahanan (*homeostatic*). Dengan demikian, masyarakat akan memiliki jati diri dalam menyikapi arus globalisasi.

Sebagai agen inovatif, pendidikan memiliki peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, mendesiminasikan, mensosialisasikan, dan mengaplikasikannya. Melalui perannya tersebut, pendidikan akan menghasilkan masyarakat pembelajar (*learning society*) yang diekspresikan dengan gemar mencari informasi, menggunakan, dan mengkomunikasikannya. Sedangkan sebagai agen perubahan, pendidikan memiliki konsekuensi terhadap aplikasi dari produk inovasi pendidikan, sehingga pendidikan menjadi katalisator bagi terjadinya transformasi sosial. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada masa sekarang, melainkan bersifat dinamis dan antisipatif bagi terjadinya perubahan.

2. Masalah

Konpetitif merupakan hal sangat penting dalam kehidupan yang serba dinamis, sehingga terjadi persaingan.

Pembangunan manusia masalah kompetitif harus menjadi perhatian utama dari pengamatan terakhir penulis generasi muda khususnya di Sumatera Utara memiliki daya kompetitif lemah. Ini menjadi masalah penulisan karya buku ini.

Pemikiran Pemecahan Masalah

Pembangunan manusia sebenarnya memiliki daya kompetitif adalah mereka yang memiliki kemampuan ikut serta dalam persaingan. Apabila kita memandang bahwa melaksanakan tugas adalah suatu persaingan, maka Pembangunan manusia yang memiliki daya kompetitif adalah mereka yang dapat berfikir kreatif dan produktif. Pembangunan manusia yang berfikir kreatif dapat bersaing dan dapat memunculkan kreasi-kreasi baru. Berfikir kreatif dilandasi dengan kemampuan berfikir eksponensial dan mengeksplorasi berbagai komponen secara tekun dan ulet hingga menghasilkan suatu inovasi.

Pembangunan manusia yang inovatif tidak hanya terbatas pada kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya, melainkan kemampuan mencari dan menggunakan cara baru dalam menyelesaikan tugasnya tersebut. Sikap tekun dan ulet dalam melaksanakan tugas hanya dapat menghasilkan prestasi temporer, sedangkan tekun dan ulet dalam berfikir kreatif akan menghasilkan prestasi berkelanjutan.

Salah satu sifat manusia yang inovatif adalah mereka yang tidak merasa puas dengan apa yang telah dikerjakan dan dihasilkannya, melainkan merasa penasaran atas kinerjanya. Pembangunan manusia yang inovatif hanya dapat dihasilkan melalui proses pengembangan kemampuan berfikir kreatif (*creative thinking*). Artinya, Pembangunan manusia yang memiliki daya kompetitif harus memiliki kecerdasan intelektual agar dapat memiliki banyak alternatif dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat.

Mereka dapat mengembangkan potensi diri dan sumber daya lainnya seoptimal mungkin. Dengan kemampuannya tersebut, Pembangunan manusia yang unggul dapat mencapai prestasi untuk kemajuan dirinya, lembaga, bangsa dan negara. Mereka yang memiliki keunggulan dapat *survive* dalam kehidupan yang kompetitif, karena mereka memiliki banyak pilihan dan kecerdasan untuk mengambil keputusan yang tepat. Terdapat dua jenis Pembangunan manusia unggul, yaitu: keunggulan individualistik dan keunggulan partisipatoris.

Pembangunan manusia unggul secara individualistik adalah mereka yang memanfaatkan kemampuan dirinya untuk kepentingan pribadi. Hal ini sangat berbahaya, karena Pembangunan manusia yang unggul individualistik dapat melahirkan manusia tipe homo homini lupus. Sedangkan Pembangunan manusia unggul secara partisipatoris adalah mereka yang memiliki keunggulan dalam mengembangkan potensi diri untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan, baik yang bersifat kompetitif maupun kooperatif dan solidaritas sosial.

Dengan demikian, pengembangan Pembangunan manusia bidang pendidikan adalah upaya peningkatan kualitas Pembangunan manusia yang unggul partisipatoris. Untuk itu, sangat penting kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual dikembangkan secara terintegratif, karena akan menjadi kekuatan sinergis dalam melaksanakan tugas.

Kemampuan kerja sama (*teamwork*) sangat penting di era globalisasi, karena dengan kemampuan tersebut akan menjadi kekuatan potensial bagi

suatu organisasi atau institusi. Sesungguhnya, era globalisasi bersifat potensial yang menuntut kemampuan menyeleksi dan mendayagunakannya agar teraktualisasikan hingga bernilai guna. Salah satu upaya mengatualisasikan potensi tersebut adalah melalui kerja sama.

Namun demikian, aspek penting dalam proses seleksi dan memanfaatkan potensi tersebut adalah kemampuan menyelaraskannya dengan nilai-nilai indigeneous. Pada tataran praktis operasional, Pembangunan manusia yang memiliki nilai-nilai indigeneous tersebut adalah memahami visi dan misi lembaga, serta merefleksikannya dalam pelaksanaan tugas.

Pembangunan manusia yang memiliki kemampuan kerja sama harus diimbangi dengan kemampuan untuk mengembangkan jaringan-jaringan kerja sama (*network*). Pentingnya jaringan kerja sama dan kerja sama menjadi katalisator bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja. Kemampuan yang dibutuhkan dalam kerja sama adalah mengembangkan kemampuan untuk mengintegrasikan kemampuan diri dengan kemampuan mitra kerja terhadap orientasi kerja sama.

Untuk itu, pengembangan pada aspek dedikasi, disiplin, dan kejujuran sangat mutlak dalam suatu kerja sama, termasuk jujur terhadap kemampuan diri. Pentingnya sikap jujur dalam suatu kerja sama dikemukakan Fukuyama (1996), tanpa kejujuran tidak mungkin seseorang dapat melakukan bekerja sama dengan baik.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Pengembangan Pembangunan manusia pada lima domain tersebut merupakan upaya mewujudkan Pembangunan manusia berkualitas untuk mempersiapkan masyarakat dan bangsa dalam menghadapi transformasi sosial yang kompetitif. Di mana pendidikan dan latihan menjadi wahana efektif bagi terwujudnya Pembangunan manusia berkualitas tersebut. Namun demikian, disinyalir banyak pihak bahwa pada tataran empiris, Pembangunan manusia yang telah melalui proses pendidikan dan latihan belum signifikan peningkatan kualitasnya.

Untuk itu, terhadap pengembangan Pembangunan manusia pada kelima domain di atas masih diperlukan upaya pengendalian mutu terpadu atau *total quality control* (TQC) dari pihak yang memiliki wewenang (*authority*), pada lembaga di mana Pembangunan manusia bertugas. Selain itu, pendidikan dan latihan sebagai wahana pengembangan Pembangunan manusia diperlukan suatu program diklat terpadu agar tercapai efektivitasnya.

Pengembangan Pembangunan manusia bidang pendidikan hendaknya tidak hanya sebatas pada peningkatan kemampuan untuk mempersiapkan masyarakat dalam mengikuti perubahan, melainkan lebih jauh ke depan adalah kemampuan mempersiapkan insan inovator bagi perubahan. Pembangunan manusia yang memiliki kemampuan tersebut menjadi aset strategis dalam merealisasikan peran pendidikan sebagai *agent of innovation*

dan *agent of changes*. Selain itu, dapat menghasilkan insan-insan yang memiliki daya kompetitif yang tidak meninggalkan nilai-nilai indigeneous, sehingga mampu menunjukkan jati diri yang bermoral-etis dan identitas lembaga pada percaturan global.

Peran penting pendidikan dalam pembangunan bangsa dengan jelas telah ditunjukkan secara yuridis formal dan praktik empiris operasional. Pembangunan manusia yang diperlukan dalam bidang pendidikan adalah Pembangunan manusia yang berkualitas dalam berfikir dan berbuat. Artinya, Pembangunan manusia yang menguasai IPTEK dan mengembangkannya sehingga mereka memiliki kemampuan secara konseptual dan kemampuan teknis yang dapat disumbangkan bagi peningkatan kualitas proses dan produk pendidikan. Untuk itu, sangat penting upaya pengembangan Pembangunan manusia agar dapat menunjukkan peran penting dan strategis pendidikan dalam transformasi sosial.

Pengembangan Pembangunan manusia adalah upaya peningkatan kualitas tenaga kependidikan, melalui pendidikan dan pelatihan. Terdapat dua jenis pengembangan Pembangunan manusia, yaitu pengembangan secara formal dan secara informal. Kedua jenis pengembangan Pembangunan manusia tersebut dalam kenyataannya tidak bersifat dikotomis, melainkan saling melengkapi sebagai suatu upaya peningkatan kualitas Pembangunan manusia. Terdapat lima domain penting dalam pengembangan Pembangunan manusia bidang pendidikan, yaitu: profesionalitas, daya kompetitif, kompetensi fungsional, keunggulan partisipatif, dan kerja sama. Pengembangan pada kelima domain tersebut diperlukan upaya pengendalian mutu terpadu atau *total quality control* (TQC). Selain itu, pendidikan dan latihan sebagai wahana pengembangan Pembangunan manusia diperlukan suatu program diklat terpadu agar tercapai efektivitasnya.

4. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia sebaiknya merupakan hal yang sinergis dalam mewujudkan pembangunan yaitu meningkatkan daya kompetitif individu dalam baik perekonomian dan lain-lain. Di samping itu pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan harus sungguh-sungguh melibatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan sehingga terwujudnya daya kompetitif secara berkelanjutan. Disamping itu perlu difokuskan pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan asset yang ada dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya. Aspek partisipasi pada pembangunan. Ini dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Selanjutnya dalam proses pendidikan perlu mulai dari pendidikan dasar dilatih belajar berkelompok (diskusi) agar tercipta daya kompetitif.

5. Kesimpulan dan Saran

- a. Pembangunan manusia masih memerlukan perhatian yang serius dan mutlak oleh sebab itu perlu adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan investasi sosial
- b. Daya Kompetitif belum terealisasi secara umum. Ini dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
- c. Belum terealisasinya sumber daya kompetitif lokal dalam peningkatan upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi. Dengan memberdayakan ekonomi lokal maka dipercaya akan mendorong upaya penguatan ekonomi nasional dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat.

Daftar Pustaka

1. Azwar, Syaifudin, 2007, Sikap Manusia, Teori dan Penjabaran, Edisi 2, Pustaka Pelajar, Jakarta
2. Fukuyama, F. 1996. *Trust The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. London: Penguin Books.
3. Hasibuan, Malayu, S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
4. Sikula, Andrew, F. 1981. *Personnel Administration and Human Resources Management*. New York: A. Wiley Trans Ed. By John Wiley & Sons Inc.
5. Sedarmayanti, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi*, PT. Rafika Aditama, Bandung
6. Tilaar, H.A.R. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia.
7. UURI No. 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Fokusmedia.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS. Lahir di Labuhan Batu pada tanggal 10 Agustus 1958. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana tahun 1985 pada FISIP Universitas Sumatera Utara, mendapatkan gelar Magister pada tahun 1992 dan mendapatkan gelar Doktor tahun 1996 dari Universitas Padjajaran Bandung. Bidang Ilmu yang ditekuni penulis adalah Ilmu Komunikasi. Publikasi / Karya Ilmiah yang dihasilkan penulis diantaranya adalah: Komunikasi Teori dan Praktek, Sistem Komunikasi Indonesia, Teknologi Komunikasi dan Pembangunan, Metode Penelitian Sosial, metode Penelitian Komunikasi, Metode Penelitian Public Relation, Teknik Sampel, Analisis Jalur. Penulis pernah meraih penghargaan Satyalencana 10 Tahun dan 20 Tahun, dan Pembinaan Pemuda Korpri GUBSU. Pidato Pengukuhan Guru Besar Penulis : Integrasi Sosial Dan Komunikasi Antar Budaya.

Peranan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Rakyat Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan di Sumatera Utara

Tan Kamello

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Pemikiran diawali dengan mengingat visi Sumatera Utara berbunyi “Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat” yang akan diwujudkan melalui misinya yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, dalam politik, dalam pendidikan, dalam pergaulan dan bermartabat dalam lingkungan.

Tulisan ini akan menguraikan salah satu unsur dari visi tersebut khususnya kata “bermartabat” kaitannya dengan sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia di Sumatera sudah dapat mencapai pada tataran kualitas bermartabat, maka upaya untuk mematuhi peraturan hukum sangat mudah dicapai karena tingkat kesadaran hukum rakyat Sumatera Utara sudah pada level masyarakat modern.

Masalah yang perlu dicermati dan dipecahkan adalah apakah sumber daya manusia yang dimiliki Sumatera Utara sudah mencapai level bermartabat sesuai dengan visi yang lebih konkritnya tercantum dalam misi gubernur yaitu memiliki manusia (rakyat) bermartabat dalam kehidupan, martabat dalam politik, martabat dalam pendidikan, martabat dalam pergaulan, dan martabat dalam lingkungan.

Tulisan ini menganalisis pengaruh martabat dalam kehidupan, martabat dalam politik, martabat dalam pendidikan, martabat dalam pergaulan, dan martabat dalam lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum rakyat mematuhi peraturan hukum, sehingga Sumatera Utara dapat bebas dari kejahatan dan pelanggaran yang pada gilirannya tercipta suasana yang tertib, aman dan damai, menuju kesejahteraan yang berkeadilan.

2. Masalah

Untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat sebagaimana misi yang disampaikan Gubernur, banyak variabel yang akan dilihat sesuai dengan perspektif kategori disiplin ilmu yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.¹ Masalah yang akan dibahas adalah aspek bermartabat dalam konteks

¹ Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dikatakan bahwa Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas : a. Rumpun ilmu

bagaimana peranan sumber manusia untuk meningkatkan kesadaran hukum rakyat mematuhi peraturan hukum yang berlaku baik yang dipositifkan dalam peraturan perundangan-undangan maupun hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) ?

Pemikiran Pemecahan Masalah

Sumber daya manusia memiliki arti strategis dan peranan penting dalam manajemen pembangunan hukum.² Salah satu arti itu terletak pada kualitas manusia dengan menempatkannya pada stratifikasi nilai yang tinggi derajatnya. Dengan tempat dan kedudukan yang tinggi tersebut, manusia memiliki harga diri, dan layak disebut dengan gelar manusia bermartabat. Kata “Martabat” dalam bahasa asing dikenal dengan sebutan “Karama” (Arab), “Dignitate” (Latin), “Waardigheid” (Belanda), “Dignity” (Inggris). Secara etimologi martabat dapat diartikan sebagai tingkatan harkat kemanusiaan; martabat juga diartikan sebagai harga diri.³

Secara filosofi, harkat kemanusiaan ini tertulis dalam sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan aspek filsafat kepribadian bangsa tersebut, eksistensi kelangsungan pembangunan hukum dengan meletakkan kesadaran hukum rakyat sebagai pusat atau mesin pengendali maka dapat diperoleh dampak kepatuhan hukum terhadap peraturan yang dibuat pemerintah. Kesadaran hukum (*rechtsbewustijzn, legal consciounes*) merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi jalannya penegakan hukum (*law enforcement*).

Ahli hukum, Belanda Paul Scholten mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan manusia dengan mana manusia dapat membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogianya dilakukan dan tidak dilakukan.⁴ Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kesadaran hukum berarti tentang apa yang seyogianya dilakukan atau perbuat atau yang seyogianya tidak dilakukan atau berbuat terutama terhadap orang lain.⁵ Demikian juga dikatakan Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum

agama; b. Rumpun ilmu humaniora; c. Rumpun ilmu sosial; d. Rumpun ilmu alam; e. Rumpun ilmu formal, dan f. Rumpun ilmu terapan. Hukum termasuk ke dalam ilmu terapan.

²Pembangunan hukum merupakan sub sistem manajemen nasional yang membutuhkan penempatan sumber daya manusia (*staffing*) dalam kegiatan manajemen selain planning, organizing, directing dan controlling. Lihat M.S.L, *Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan*, (Bandung :Mandar Maju, 1996), h.1

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balasi Pustaka, 1990), h.561

⁴Disitir oleh Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1990), h.89

⁵Soedikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), h.2

yang diharapkan ada.⁶ Berbeda halnya dengan pandangan Patricia Ewick dan Susan S. Silbey mengatakan “*The term ‘legal consciousness’ is used by social scientist to refer to the ways in which people make sense of law and legal institution, that is, the understandings which give meaning to people’s experiences and actions*” (Istilah kesadaran hukum digunakan oleh ilmuwan sosial untuk merujuk pada cara orang memahami hukum dan konstitusi hukum yaitu pemahaman yang memberi makna pada pengalaman dan tindakan orang).⁷

Jika dicermati pemaknaan kesadaran hukum, bukan saja ahli hukum yang akan mempersoalkannya, tetapi bagaimana ahli ilmu sosial juga memahami hukum itu dalam kehidupan bermasyarakat. Kajiannya bukan saja berada pada ruang normatif, tetapi juga pada persoalan empiris. Kriteria seseorang, kelompok orang, dan korporasi bisnis yang dikatakan telah memiliki kesadaran hukum, adalah: *pertama*; memiliki pengetahuan tentang substansi hukum, *kedua*; pemahaman kaidah hukum, *ketiga*; struktur hukum, dan *keempat*; perilaku terhadap hukum. Jika seseorang telah memiliki kriteria di atas dapat disebut sebagai orang yang memiliki kesadaran hukum positif, tetapi bila tidak memiliki kriteria di atas, disebutlah ia memiliki kesadaran hukum negatif. Jika manusia melakukan ketidaktaatan/pembangkangan terhadap hukum yang berlaku (peraturan perundang-undangan) maka muncul kesadaran hukum yang bersifat negatif. Manusia merupakan mesin untuk mengarahkan berhasil atau tidaknya norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam mematuhi hukum.

Kesadaran hukum rakyat untuk mematuhi peraturan hukum di Sumatera Utara diharapkan memiliki korelasi yang kuat dengan sumber daya manusia yang berkualitas, akhlak yang mulia dan menjunjung tinggi peradaban. Kesadaran hukum juga memiliki hubungan dengan kultur hukum (*rechtscultuur*), yang disebut ahli hukum Amerika Lawrence M. Friedmann sebagai budaya hukum (*legal cultural*),⁸ yaitu *people’s attitude toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectation, it is that part of the general culture which concern the legal system. In other words, the legal culture is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert-a dead fish lying in a basket, not a living swimming in its sea.*⁹ Kesadaran hukum menjadi pusat penggerak dari kultur hukum atau budaya hukum masyarakat. Sikap masyarakat terhadap hukum yang terjelma dari kepercayaan, nilai-nilai, pikiran, harapan adalah bagian dari kultur hukum yang dapat membantu penegakan hukum.

⁶Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1982), h.152

⁷Lihat Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), h.298

⁸Lawrence M. Friedmann, *American Law*, (New York-London : W.W.Norton & Company, 1984), h.5

⁹*Ibid*, 6-7

Kesadaran hukum menjadi kekuatan sosial yang menentukan bagaimana peraturan perundang-undangan dilaksanakan masyarakat, dihindarkan masyarakat atau disalahgunakan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang terletak dari jiwa manusia dan sikap tindak manusia harus membutuhkan proses pendidikan, agar manusia sebagai subjek hukum mutlak harus dibekali ilmu hukum dan teknologi untuk sampai pada tingkat kesadaran hukum.

Perubahan kuktur lama menjadi kultur baru dalam kaitannya dengan masyarakat bermartabat ditandai dengandua hal, yakni: *pertama*; cara masyarakat Sumatera Utara dalam berpikir; dan *kedua*; cara masyarakat Sumatera Utara dalam mempersepsikan atau memahami diri sendiri dan realitas di luar diri mereka (dunia). Hal ini yang disebut oleh Arief Sidharta dengan "*rational proof*" yang selalu diidentifikasi sebagai : "*creterion of internal acceptability*".¹⁰

Semakin tinggi kesadaran hukum rakyat untuk mematuhi hukum yang berlaku maka akan lahir kultur hukum yang baik. Kultur hukum ditandai dengan adanya pola pikir masyarakat terhadap proses pembentukan hukum sampai dengan pelaksanaan hukum. Keikutsertaaan rakyat membuat hukum dan melaksanakan hukum menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki mulai bekerja. Artinya eksistensi dan peranan sumber daya manusia sangat besar pengaruhnya untuk meningkatkan kesadaran hukum rakyat dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Telah dikemukakan di atas bahwa sumber manusia menjadi faktor determinan yang harus dibenahi secara serius, sistematis dan berkelanjutan untuk mengubah pola pemikiran, tingkah laku yang konsisten, dan ajeg,serta rasional guna mematuhi peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusatdan Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi barometer masyarakat Sumatera Utara untuk menuju dan masuk dalam lingkaran masyarakat modern dengan karakter kehidupan yang tertib, suasana aman dan damai, penuh kepastian dalam menegakkan hak dan kewajiban. Melalui manusia berkualitas akanberdampak pada pergaulan hidup, mampu memelihara adab, akhlak yang terpuji, dan saling menghormati antarsesama manusia dan kepada pemimpinnya, sehingga dapat tercipta manusia yang penuh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam kerangka hukum kepribadian bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila baik secara vertikal maupun horisontal.

Untuk mencapai manusia yang bermartabat dengan tingkat kesadaran hukum yang demikian, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur strategi pemecahan masalah, paling sedikitnya adalah :

¹⁰Lihat Herman Bakir, *Filsafat Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), h.132-133

- a. Mempersiapkan manusia Sumatera Utara untuk memiliki kesadaran hukum sejak dini, dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Universitas dengan kurikulum hukum yang sesuai dengan tingkatan peserta didik yang berbasis pada filsafat kepribadian bangsa sendiri bukan filsafat kepribadian bangsa lain;
- b. Mempersiapkan pemimpin yang taat beribadah, memelihara adab dan etika, berwawasan luas dengan memiliki ilmu dan teknologi serta sosial budaya sesuai dengan perkembangan zaman dengan bijaksana (*wisdom*), sehingga mampu memiliki peran untuk menjadi contoh dan teladan dalam melaksanakan peraturan hukum bagi generasi penerus secara berkelanjutan;
- c. Memberikan sosialisasi produk perundang-undangan kepada seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan agar secara bertahap memiliki kemauan yang kuat untuk mematuhi dan melaksanakan hukum tanpa ada perbedaan strata sosial;
- d. Membentuk kultur hukum masyarakat sesuai dengan tingkat pendidikan dengan melakukan perubahan ke arah yang dikehendaki oleh cita hukum bukan di luar kemauan hukum;
- e. Mempersiapkan anggaran biaya yang cukup memadai untuk mendukung fasilitas hukum guna mempercepat terciptakan kesadaran hukum rakyat;
- f. Mengupayakan setiap anggota masyarakat saling melakukan kontrol hukum jika terdapat penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pembentuk produk peraturan perundang-undangan;
- g. Mempersiapkan penegak hukum dan para eksekutif, legislatif yang berwibawa dan berintegritas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hubungan internal (bersifat pribadi) dan eksternal (bersifat antarpribadi) dalam memelihara suasana masyarakat Sumatera yang modern.
- h. Melakukan kontrol secara konsisten dan sistemik oleh pemerintah dan stakeholder secara bergandengan tangan terhadap semua program kesadaran hukum rakyat sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kelemahannya. Hal inidilakukan agar ke depannya dapat diperbaiki semua kelemahan yang ada.

Salah satu strategi di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut : Produk hukum yang dihasilkan oleh badan legislatif diberitahu dan disampaikan dengan bahasa yang mudah difahami oleh peserta didik dengan membuat contoh-contoh konkrit yang dapat diikuti oleh peserta didik secara dini. Kemudian secara perlahan dan bertahap sesuai dengan jenjang pendidikan diperkenalkan bunyi pasal-pasal yang akan diterapkan di dalam kehidupan. Tujuannya agar peserta didik mengetahui dan memahami arti hukum dalam peraturan perundang-undangan untuk tidak dijalankan, atau untuk tidak dilanggar, atau mana yang boleh dikerjakan sebagai suruhan dari perintah pasal-pasal tersebut. Pada tahap pendidikan di Universitas, seluruh peserta

sudah wajib bukan saja mengetahui juga diharapkan mampu untuk berperilaku seyogianya (*ought to be*) bukan berperilaku apa adanya (*what it is*) di dalam pergaulan bermasyarakat. Apalagi bagi mahasiswa yang memilih pendidikan hukum di Fakultas Hukum, diharapkan menguasai bentuk, sifat dan isi norma hukum serta yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum tersebut untuk melihat cita hukum yang ada dalam undang-undang tertentu. Dengan menempatkan pendidikan hukum secara dini bagi peserta didik sampai mengenal dan memahami cita hukum, diharapkan terjadi perubahan perilaku dari sikap negatif kepada peraturan perundang-undangan menjadi sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan.

Ada contoh sederhana bagaimana manusia dapat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi jika variabel pendidikan yang diuraikan tersebut diikuti. Dalam bidang lingkungan hidup, manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (*Man als drager van recht en plicht*) secara normatif disebutkan dalam undang-undang antara lain berupa hak-hak bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Di samping manusia mempunyai hak atas hukum juga dibebani kewajiban hukum, antara lain bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup". Demikian juga undang-undang melarang manusia antara lain "Setiap orang dilarang melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar, membuang limbah ke media lingkungan hidup".¹¹

Contoh lain di bidang Perlindungan Konsumen, undang-undang telah menetapkan kepada manusia sebagai subjek hukum memiliki hak-hak, antara lain "Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Selain hak, konsumen dibebani kewajiban hukum, antara lain "Konsumen berkewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa". Sebaliknya bagi pelaku usaha undang-undang juga memberikan hak-hak, antara lain "hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, bahkan pelaku usaha berhak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian

¹¹Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 mengatur Hak dan Kewajiban serta Larangan bagi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi. Khusus Pasal 69 telah diubah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan". Pelaku usaha juga dibebani kewajiban hukum, antara lain "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan, perlakuan atau pelayanan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku". Pelaku usaha dalam membuat kontrak dengan konsumen dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila antara lain "menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran."¹²

Contoh-contoh di atas harus dilaksanakan oleh masyarakat, atau harus dihindari atau disalahgunakan, sangat bergantung kepada kultur hukum atau budaya hukum masyarakat Sumatera Utara. Harapan terciptanya kesadaran hukum yang bersifat positif terhadap hukum tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat dapat terwujud jika masyarakat tersebut memiliki harga diri atau harkat kemanusiaan yang disebut masyarakat bermartabat. Dengan tingkat capaian tersebut, baru dapat dikatakan visi dan misi Sumatera bermartabat berhasil diwujudkan. Jika tidak demikian, maka Sumatera Utara bermartabat hanya sebatas slogan saja tanpa makna hukum yang memiliki esensi sesungguhnya.

4. Rencana Tindak Lanjut

Mengacu kepada permasalahan yang dikemukakan pada tulisan ini bukanlah suatu yang mudah mencapai visi dan misi Gubernur Sumatera Utara. Kesadaran hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan baik oleh rakyat secara individu maupun rakyat secara kelompok yang terorganisir dalam bentuk kelompok sosial budaya, kelompok relegius, dan kelompok bisnis harus dilaksanakan secara berencana dan strategis dalam kurun waktu tertentu melalui proses sistem pendidikan yang terstruktur atau non terstruktur agar mendapatkan hasil yang optimal dari sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk dapat memperoleh hasil tersebut, diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Pada tataran level eksekutif, pemerintah daerah dan jajarannya berkomitmen untuk menciptakan manusia berkualitas dengan

¹²Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 18 mengatur Hak dan Kewajiban Konsumen, Pelaku Usaha serta larangannya.

- memberikan pendidikan hukum yang tepat sasaran guna meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan internal;
- b. Pemerintah daerah mengadakan program pelatihan hukum yang menyentuh keluarga sadar hukum dengan menggunakan sistem pengawasan yang konsisten dan dapat mempertanggungjawabkannya;
 - c. Menumbuhkembangkan perilaku masyarakat dengan fokus mengubah perilaku masyarakat Sumatera Utara untuk mematuhi hukum melalui model kesadaran hati nurani sebagai pusat penggerak pada sentra-sentra hukum pada masing-masing lingkungan di kelurahan/pedesaan.
 - d. Peran serta dari tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh karismatik, tokoh sosial budaya, alim ulama, tokoh pemuda, yang secara simultan merupakan suatu sistem untuk menguatkan kesadaran hukum dalam mewujudkan Sumatera bermartabat;
 - e. Menyusun kurikulum lokal yang memuat mata pelajaran karakter bermartabat, kesadaran hukum rakyat, atau ekstrakurikuler bagi peserta didik sejak dini sampai sekolah menengah atas;
 - f. Pemerintah daerah mempersiapkan anggaran pendapatan belanja daerah, melakukan kerjasama dengan perseroan untuk memanfaatkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *corporate social responsibility* untuk mempercepat terwujudnya kesadaran hukum masyarakat.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan atas masalah peranan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesadaran hukum rakyat dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku baik yang dipositifkan dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*; pemerintah daerah Sumatera Utara masih belum mempersiapkan secara terencana sumber daya manusia yang berkualitas melalui jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas dalam kurikulum lokal mengenai materi kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, *kedua*; masyarakat bermartabat yang didambakan dalam visi dan misi Gubernur Sumatera masih berada pada tataran slogan dan tidak membumi dalam masyarakat, *ketiga*; tingkat kesadaran hukum rakyat yang bersifat positif terhadap peraturan perundang-undangan masih sangat rendah, *keempat*; peran sumber daya manusia di Sumatera Utara pada tataran eksekutif dan legislatif belum sepenuhnya mendukung gerakan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara untuk mencapai masyarakat bermartabat dalam bidang kesadaran hukum, *kelima*; masih belum terlihat adanya kultur hukum atau budaya hukum yang tumbuh sebagai harkat kemanusiaan atau harga diri baik individu perorangan maupun kelompok sosial budaya, kelompok relegius atau kelompok bisnis.

Saran yang dapat diajukan adalah : *pertama*, pemerintah daerah harus melakukan perubahan kurikulum pendidikan yang didasarkan pada sistem pendidikan nasional dan Peraturan Daerah tentang Pendidikan (jika sudah ada) dan jika belum ada Peraturan Daerah tentang Pendidikan dengan segera dibuat rancangan peraturan daerah tersebut, *kedua*; diperlukan kebijakan Gubernur untuk memformulasikan kesadaran hukum masyarakat agar terjadi perubahan secepatnya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan guna menuju masyarakat bermartabat; *ketiga*; Gubernur melakukan koordinasi dengan kepala daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan masyarakat bermartabat menuju era modern agar tercipta suasana ketertiban, kedamaian, keadilan dan kepastian hak dan kewajiban setiap warga Sumatera Utara.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta : Kencana.
- Bakir, Herman. 2007. *Filsafat Hukum*, Bandung : Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- M.S.L. 1996. *Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan*, Bandung : Mandar Maju.
- Friedmann, Lawrence M. 1984 *American Law*, New York-London: W.W.Norton & Company.
- Mertokusumo Soedikno. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo. 1990. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S., lahir di Medan, 21 April 1962. Penulis menyelesaikan S-1 Jurusan Hukum Perdata di FH USU, S-2 bidang Hukum Perdata di Pascasarjana UGM Yogyakarta, dan S-3 tahun 2002 di USU bidang Ilmu Hukum/Keperdataan. Jabatan yang pernah disandang: Ketua Program Kekhususan Perdata BW, Ketua Departemen Hukum Keperdataan, Sekretaris Dewan Guru Besar USU, Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana USU, Anggota Senat USU, Sekretaris Komisi Etik Dewan Guru Besar, Ketua Komisi 3 Dewan Guru Besar tentang Pengangkatan Guru Besar, Doktor Kehormatan, dan Penghargaan Akademik tahun 2019, Anggota Tim penyusunan Anggaran Dasar (statuta) USU, Anggota Tim Hukum dan Ketua Tim Hukum USU, sekarang Tahun 2021 sebagai Ketua Kantor Urusan Hukum USU. Pernah sebagai Staf Ahli Badan Legislasi Nasional DPR RI Tahun 2003, Staf Ahli DPRD Kota Medan tahun 2010, Staf Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara, Anggota Dewan Riset Provinsi Sumatera Utara, Assesor BAN PT Dikti, Anggota Tim Akreditasi Balai Diklat Propinsi Sumatera Utara, Staf Ahli Dewan Komisaris PTPN II tahun 2007, Penasehat Hukum Korporasi Swasta, Memberikan keterangan ahli sejak tahun 2002--sekarang di Pengadilan Negeri, di Kepolisian dan di Kejaksaan, di Kementerian Lingkungan Hidup serta Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Wakil Ketua Badan Arbiter Nasional perwakilan Medan tahun 2005 -- sekarang, Arbiter untuk masalah perdagangan/bisnis di Indonesia.